

Chumidatus Sa'dyah • Dadang Argo P.



EKONOMI 2

Kelas XI SMA dan MA



Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional

Chumidatus Sa'dyah dan Dadang Argo P.

EKONOMI 2

Kelas XI SMA dan MA



Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional



KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2009, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*download*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juni 2009
Kepala Pusat Perbukuan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga buku pelajaran Ekonomi ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya.

Buku pelajaran Ekonomi ini disusun berdasarkan kurikulum, yang dalam mata pelajaran Ekonomi memiliki tujuan memberikan beberapa kemampuan kepada peserta didik, yaitu kemampuan-kemampuan untuk:

1. memahami sejumlah konsep ekonomi untuk mengaitkan peristiwa dan masalah ekonomi dengan kehidupan sehari-hari, terutama yang terjadi di lingkungan individu, rumah tangga, masyarakat, dan negara;
2. menampilkan sikap ingin tahu terhadap sejumlah konsep ekonomi yang diperlukan untuk mendalami ilmu ekonomi;
3. membentuk sikap bijak, rasional, dan bertanggung jawab dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi yang bermanfaat bagi diri sendiri, rumah tangga, masyarakat, dan negara;
4. membuat keputusan yang bertanggung jawab mengenai nilai-nilai sosial ekonomi dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Sejalan dengan tujuan tersebut, buku ini disusun dengan memiliki beberapa karakteristik, sebagai berikut:

1. **Bahasa mudah dipahami**

Buku pelajaran ekonomi ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga memudahkan siswa mendalami materi yang dibahas.

2. **Merangsang berpikir kritis**

Untuk merangsang siswa berpikir kritis, buku ini disusun dengan cara menyajikan kasus-kasus menarik untuk dibahas dan diperdebatkan siswa.

3. **Merangsang berpikir terbuka**

Hampir segala hal di dunia ini berubah. Buku ini merangsang siswa untuk selalu berpikir terbuka, tidak kaku dan bisa menerima perubahan. Caranya, melalui rubrik aktivitas siswa, siswa didorong mengemukakan ide dan gagasan baru.

4. **Contoh dan peristiwa up to date**

Setiap pembahasan materi buku ini berupaya menggunakan contoh-contoh dan peristiwa yang up to date, yang sesuai dengan perkembangan zaman.

5. **Penjelasan utuh dan lengkap**

Adakalanya siswa sulit memahami suatu rumus karena tidak mendapatkan penjelasan yang utuh dan lengkap. Buku ini berusaha memberikan penjelasan secara utuh dan lengkap tentang suatu konsep atau rumus.

6. **Analisis matematik**

Untuk mempermudah siswa memahami konsep-konsep tertentu yang terkadang membingungkan, buku ini memberikan jalan keluar dengan cara menyajikan analisis matematik yang jelas. Sebagai contoh: pada pembahasan mengenai PDB dan PNB siswa memperoleh keterangan jelas tentang keduanya berkat adanya analisis matematik.

7. **Materi akuntansi terstruktur**

Materi akuntansi disajikan secara terstruktur agar mudah dipahami siswa. Bahasa yang sederhana, tingkat kesukaran materi, dan soal yang telah diukur, ikut membantu siswa memahami materi akuntansi dengan baik.

Akhir kata, kritik dan saran sangat dinantikan demi perbaikan buku ini.

Bandung, Juni 2007

Penulis

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
<hr/>	
Bab I Ketenagakerjaan dan Pengangguran	1
<hr/>	
A. Arti Kesempatan Kerja	3
B. Hubungan Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja, Angkatan Kerja, dan Pengangguran	4
C. Macam Pengangguran	5
D. Dampak Pengangguran	7
E. Cara Mengatasi Pengangguran	8
F. Upaya Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	11
G. Sistem Upah	12
<hr/>	
Bab II Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi serta Pembangunan Nasional	23
<hr/>	
A. Pengertian Pembangunan Ekonomi dan Perbedaannya dengan Pertumbuhan Ekonomi	25
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi	29
C. Pertumbuhan Ekonomi di Negara Maju dan Negara Berkembang	31
D. Teori Pertumbuhan Ekonomi	35
E. Pembangunan Nasional	42
<hr/>	
Bab III APBN, APBD, dan Kebijakan Fiskal	57
<hr/>	
A. Keuangan Negara	59
B. APBN	59
C. APBD	75
D. Kebijakan Fiskal	84
E. Pajak	87
<hr/>	
Bab IV Pasar Uang dan Pasar Modal	119
<hr/>	
A. Pasar Uang	121
B. Pasar Modal	125

Bab V Perdagangan Internasional dan Perekonomian Terbuka	153
A. Arti dan Manfaat Perdagangan Internasional	155
B. Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Perdagangan Internasional	157
C. Teori Keunggulan Mutlak (Absolut) dan Teori Keunggulan Komparatif	158
D. Kebijakan Perdagangan Internasional	161
E. Devisa	168
F. Kurs (Rate Of Exchange)	170
G. Cara Pembayaran Internasional	183
H. Alat Pembayaran Internasional	186
Bab VI Akuntansi sebagai Sistem Informasi	203
A. Sejarah Perkembangan Akuntansi	205
B. Definisi Akuntansi	206
C. Kualitas Informasi Akuntansi	206
D. Proses Akuntansi	207
E. Beberapa Pemakai Informasi Akuntansi dan Kegunaan Informasi Akuntansi	208
F. Bidang-Bidang Akuntansi	210
G. Profesi Akuntansi	212
H. Etika Profesi Akuntan	213
Bab VII Dasar Hukum dan Pelaksanaan Akuntansi	223
A. Dasar Hukum Pelaksanaan Akuntansi di Indonesia	225
B. Asumsi dan Konsep Dasar Penyusunan Laporan Keuangan	227
C. Laporan Keuangan	229
D. Penggolongan Akun	232
Bab VIII Struktur Dasar Akuntansi	245
A. Penggolongan Perusahaan	247
B. Transaksi Keuangan	248
C. Persamaan Akuntansi	248
D. Laporan Keuangan Berdasarkan Persamaan Akuntansi	253
Bab IX Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa	269
A. Tahap Pencatatan	271
B. Tahap Pengikhtisaran	281
C. Tahap Pelaporan Keuangan	312

Bab I

Ketenagakerjaan dan Pengangguran



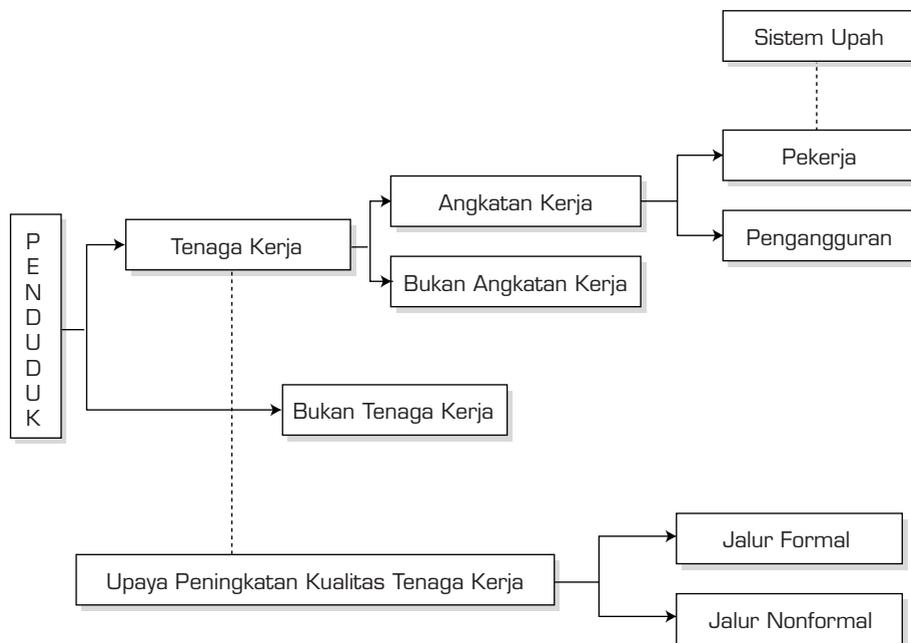
Sumber: www.elsam.or.id/asasi_more.php?id=194_0_3_0

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat:

1. mendeskripsikan angkatan kerja, tenaga kerja, dan kesempatan kerja;
2. membedakan angkatan kerja, tenaga kerja, dan kesempatan kerja;
3. mendeskripsikan pengangguran;
4. mengidentifikasi jenis-jenis pengangguran dan sebab-sebabnya;
5. mendeskripsikan cara-cara mengatasi masalah pengangguran.

PETA KONSEP



Negara manapun pasti menghadapi masalah ketenagakerjaan. Apalagi negara seperti Indonesia yang hampir hancur diterjang badai krisis ekonomi pada tahun 1997. Krisis ekonomi menyisakan banyak kepedihan bagi masyarakat, di antaranya membludaknya jumlah pengangguran akibat banyaknya perusahaan yang memberhentikan (PHK) karyawannya. Masalah ketenagakerjaan semakin menarik karena berkaitan dengan banyak aspek. Salah satunya berkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi, serta tingkat kriminalitas. Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap, berikut ini kita akan membahas tentang ketenagakerjaan dan pengangguran.

A. Arti Kesempatan Kerja

Masalah ketenagakerjaan sangat berkaitan dengan kesempatan kerja. Jumlah tenaga kerja yang tinggi harus diimbangi dengan luasnya kesempatan kerja. Jumlah tenaga kerja yang banyak tetapi tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang luas, akan mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran.



Sumber: CD Photo Image

Gambar 1.1: Perusahaan membutuhkan tenaga kerja

Kesempatan kerja bisa diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh pencari kerja. Dari pengertian ini bisa disimpulkan bahwa kesempatan kerja sesungguhnya merupakan permintaan akan tenaga kerja (*demand for labour*) yang datang dari pihak-pihak yang membutuhkan tenaga kerja, seperti perusahaan dan kantor-kantor pemerintah.

Pihak pencari kerja disebut juga pihak penawar kerja, yakni pihak yang mencari pekerjaan. Pihak pencari kerja dengan pihak yang membutuhkan tenaga kerja akan

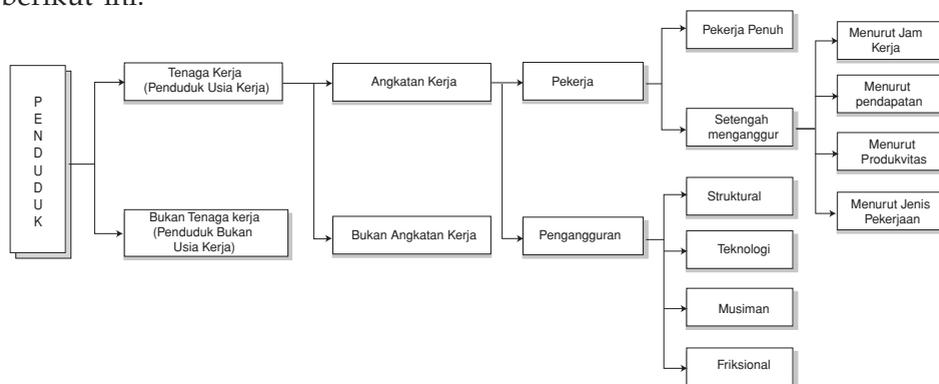
bertemu di pasar tenaga kerja. Mengenai pasar tenaga kerja bisa kalian baca secara lengkap pada bab lain.

Di Indonesia, kesempatan kerja mengalami penurunan drastis akibat krisis ekonomi tahun 1997. Banyaknya karyawan yang di-PHK merupakan bukti menciutnya lapangan kerja pada saat krisis ekonomi. Pada saat itu, pengangguran telah meningkat kurang lebih 21 %. Dengan demikian,

pemerintah harus berusaha keras memperluas kesempatan kerja untuk mengurangi angka pengangguran. Salah satu ukuran keberhasilan pemerintah bisa dilihat dari sukses tidaknya pemerintah menangani masalah ini.

B. Hubungan Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja, Angkatan Kerja, dan Pengangguran

Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, yakni jumlah penduduk, tenaga kerja dan pengangguran. Istilah-istilah tersebut memiliki hubungan satu sama lain dan dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:



Gambar 1.2. Bagan hubungan jumlah penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, dan pengangguran.

Bagan tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penduduk suatu negara dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:
 - a. Tenaga kerja, yakni penduduk yang dianggap sanggup bekerja bila ada permintaan kerja. Mereka adalah penduduk yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun (UU No. 20 Tahun 1999).
 - b. Bukan tenaga kerja, yakni penduduk yang dianggap tidak mampu bekerja. Mereka adalah penduduk yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun, anak-anak dan lansia (lanjut usia) termasuk dalam kelompok ini.
2. Tenaga kerja dibagi lagi menjadi dua kelompok (usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun)
 - a. Angkatan kerja yakni kelompok tenaga kerja (usia 15 sampai dengan 64 tahun) yang ingin bekerja. Mereka selalu berusaha mencari pekerjaan.

- b. Bukan angkatan kerja, yakni kelompok tenaga kerja yang tidak bersedia bekerja walaupun ada kesempatan kerja. Contohnya: pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga.
- 3. Angkatan kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:
 - a. Pekerja (*employment*), yakni kelompok angkatan kerja yang sudah mendapat pekerjaan.
 - b. Pengangguran (*unemployment*), yakni kelompok angkatan kerja yang belum mendapat pekerjaan.
- 4. Pekerja (*employment*) dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:
 - a. Pekerja penuh (*full employment*), yakni pekerja yang bekerja dengan memenuhi kriteria berikut:
 - 1) Lama kerja minimal 40 jam per minggu.
 - 2) Besar pendapatan minimal sama dengan UMR (Upah Minimum Regional).
 - 3) Jenis pekerjaan sesuai dengan pendidikan atau keahliannya.
 - b. Setengah menganggur, yakni pekerja yang bekerja tapi tidak memenuhi kriteria pekerja penuh, kelompok setengah menganggur dibagi menjadi tiga kelompok, yakni:
 - 1) Setengah menganggur menurut jam kerja, yaitu pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam per minggu.
 - 2) Setengah menganggur berdasar pendapatan, yaitu pekerja yang menerima pendapatan lebih kecil dari UMR tempat dia bekerja.
 - 3) Setengah menganggur menurut produktivitas, yaitu pekerja yang produktivitasnya di bawah standar perusahaan. Pada umumnya, pekerja yang baru masuk dan pekerja dengan cacat tertentu termasuk kelompok ini.

C. Macam Pengangguran

Ada beberapa macam pengangguran yang digolongkan berdasarkan lama waktu kerja dan penyebab terjadinya.

1. Macam Pengangguran Berdasarkan Lama Waktu Kerja

Pengangguran berdasarkan lama waktu kerja, terdiri atas:

- a. *Pengangguran terbuka* (*open unemployment*), yakni tenaga kerja yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan (sama sekali tidak bekerja).

Pengangguran ini terjadi karena tidak adanya lapangan kerja atau karena ketidaksesuaian lapangan kerja dengan latar belakang pendidikan dan keahlian tenaga kerja.

- b. *Setengah menganggur (under unemployment)*, yakni tenaga kerja yang bekerja, tetapi bila diukur dari sudut jam kerja, pendapatan, produktivitas dan jenis pekerjaan tidak optimal.
- c. *Pengangguran terselubung (disguised unemployment)*, yakni tenaga kerja yang bekerja tapi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau keahliannya. Misalnya, seorang lulusan S1 pertanian bekerja sebagai tenaga pembukuan, atau seorang insinyur teknik bekerja sebagai pelayan restoran.

2. Macam Pengangguran Berdasarkan Penyebab Terjadinya

Pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya, terdiri atas:

- a. *Pengangguran struktural*, yakni pengangguran yang disebabkan oleh terjadinya perubahan struktur perekonomian. Misalnya, perubahan struktur dari agraris ke industri, perubahan ini menuntut tenaga kerja memiliki keterampilan tertentu (misal keterampilan mengoperasikan mesin teknologi modern) untuk bisa bekerja di sektor industri. Tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan tersebut akan ditolak oleh sektor industri sehingga terjadilah pengangguran.
- b. *Pengangguran konjungtural (siklikal)*, yakni pengangguran yang disebabkan oleh pergerakan naik turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Ada masa pertumbuhan (naik), masa resesi (turun) dan masa depresi (turun). Pada masa resesi dan depresi, masyarakat mengalami penurunan daya beli sehingga permintaan terhadap barang dan jasa juga menurun. Penurunan ini mengharuskan produsen mengurangi produksi barang dan jasa, di antaranya dengan cara mengurangi jumlah pekerja sehingga terjadilah pengangguran. PHK yang terjadi karena krisis ekonomi tahun 1997 di Indonesia adalah contoh pengangguran siklikal.
- c. *Pengangguran friksional*, yakni pengangguran yang disebabkan oleh pergeseran (friksi) pekerja yang ingin bergeser (berpindah) dari satu perusahaan ke perusahaan lain dalam rangka mencari pekerjaan yang lebih bagus dan cocok. Sementara mencari pekerjaan baru, pekerja menganggur untuk sementara waktu sambil mencari pekerjaan yang diinginkan. Oleh karena itu, pengangguran friksional disebut juga pengangguran sukarela (*voluntary unemployment*), karena terjadi karena keinginan pekerja sendiri.

- d. *Pengangguran musiman*, yakni pengangguran yang disebabkan oleh perubahan musim atau perubahan permintaan tenaga kerja secara berkala. Pada umumnya, setelah panen, petani akan menganggur sambil menunggu masa tanam. Contoh lain misalnya pada masa pembangunan gedung, tukang bangunan bisa bekerja. Tetapi bila gedung telah selesai dibangun, tukang bangunan menjadi pengangguran musiman sambil menunggu pembangunan berikutnya. Kebutuhan manusia sangat bermacam-macam. Kebutuhan tersebut dapat digolongkan, sebagai berikut.

Usia	15-24 Th	25-34 Th	35-44 Th	45-54Th	55 Th ke atas	Total
Jumlah pengangguran terbuka	6.597.133	2.320.573	614.471	429.607	492.470	10.854.254

Diolah dari statistik Indonesia 2005/2006

D. Dampak Pengangguran

Pengangguran sangat berdampak pada kehidupan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang menurun, dan bahkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun adalah salah satu dampak pengangguran. Berikut ini beberapa dampak pengangguran terhadap perekonomian dan kehidupan sosial:

1. Menurunkan Aktivitas Perekonomian

Pengangguran menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang menurun menyebabkan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa. Hal ini mengakibatkan para pengusaha dan investor tidak bergairah melakukan perluasan dan pendirian industri baru sehingga aktivitas perekonomian menjadi turun.

2. Menurunkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita

Orang yang tidak bekerja (menganggur) tidak akan menghasilkan barang dan jasa. Itu berarti semakin banyak orang yang menganggur maka PDB (Produk Domestik Bruto) yang dihasilkan akan menurun. PDB yang menurun akan menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi sekaligus turunnya pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita juga turun karena pendapatan per kapita diperoleh dengan rumus:

$$\frac{\text{PDB tahun } x}{\text{Jumlah penduduk tahun } x}$$

Jika pendapatan per kapita turun maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga ikut menurun.

3. Meningkatkan Biaya Sosial

Pengangguran ternyata mengakibatkan meningkatnya biaya sosial. Karena, pengangguran mengharuskan masyarakat memikul biaya-biaya seperti biaya perawatan pasien yang stres (depresi) karena menganggur, biaya keamanan dan biaya pengobatan akibat meningkatnya tidak kriminalitas yang dilakukan oleh penganggur, serta biaya pemulihan dan renovasi beberapa tempat akibat demonstrasi dan kerusuhan yang dipicu oleh ketidakpuasan dan kecemburuan sosial para penganggur.

4. Menurunkan Tingkat Keterampilan

Dengan menganggur, tingkat keterampilan seseorang akan menurun. Semakin lama menganggur, semakin menurun pula tingkat keterampilan seseorang.

5. Menurunkan Penerimaan Negara

Orang yang menganggur tidak memiliki penghasilan (pendapatan). Itu berarti semakin banyak orang yang menganggur, akan semakin turun pula penerimaan negara yang diperoleh dari pajak penghasilan.

KEGIATAN 1.1

Carilah dampak-dampak pengangguran selain yang telah disebutkan di atas. Gunakan berbagai sumber tertulis maupun tidak tertulis (wawancara).

E. Cara Mengatasi Pengangguran

Pengangguran ada beberapa macam, yaitu pengangguran struktural, pengangguran konjungtural (siklikal), pengangguran friksional, dan pengangguran musiman.

Berikut ini akan diuraikan cara-cara mengatasi berbagai macam pengangguran.

1. Cara Mengatasi Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural terjadi karena perubahan struktur ekonomi, misalnya dari agraris ke industri. Untuk mengatasi pengangguran struktural bisa dilakukan cara-cara berikut:

- a. Memindahkan para pengangguran ke tempat yang lebih membutuhkan.
- b. Membuka pendidikan dan pelatihan bagi para pengangguran agar dapat mengisi lowongan pekerjaan yang sedang membutuhkan.
- c. Mendirikan industri dan proyek-proyek padat karya untuk menampung para penganggur.
- d. Meningkatkan mobilitas (perputaran) modal dan tenaga kerja agar mampu menyerap para penganggur.
- e. Menyadarkan masyarakat akan pentingnya menguasai teknologi modern dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan struktur perekonomian.

2. Cara Mengatasi Pengangguran Konjungtural (Siklikal)

Pengangguran konjungtural terjadi karena naik turunnya kegiatan perekonomian yang suatu saat mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat yang diikuti oleh turunnya permintaan terhadap barang dan jasa. Untuk mengatasi pengangguran konjungtural, bisa dilakukan cara-cara berikut:

- a. Meningkatkan daya beli masyarakat dengan membuka berbagai proyek-proyek pemerintah.
- b. Mengarahkan masyarakat agar menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa sehingga permintaan terhadap barang dan jasa meningkat.
- c. Menciptakan teknik-teknik pemasaran dan promosi yang menarik agar masyarakat tertarik membeli barang dan jasa.

3. Cara Mengatasi Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional terjadi karena adanya pekerja yang ingin pindah mencari pekerjaan yang lebih baik dan cocok di perusahaan lain. Untuk mengatasi pengangguran ini bisa dilakukan dengan cara

menyediakan sarana informasi lowongan kerja yang cepat, mudah dan murah kepada pencari kerja. Misalnya, dengan menempelkan iklan-iklan lowongan kerja di tempat-tempat umum secara rutin.

4. Cara Mengatasi Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman terjadi karena perubahan musim atau karena perubahan permintaan tenaga kerja secara berkala. Cara yang dilakukan, untuk mengatasi pengangguran musiman, antara lain:

- a. Memberikan latihan keterampilan yang lain seperti menjahit, mengelas, menyablon dan membordir. Dengan demikian, mereka dapat bekerja sambil menunggu datangnya musim tertentu.
- b. Segera memberikan informasi bila ada lowongan kerja di sektor lain.

I N F O

“PHK dan Jumlah Pengangguran”

Seiring dengan kontraksi perekonomian yang sangat dalam pada tahun 1997-1998 jumlah pengangguran meningkat sebagai akibat terus berlangsungnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor. Tekanan yang berasal dari kenaikan biaya produksi di satu sisi, dan melemahnya daya serap pasar domestik di sisi lain, telah memaksa berbagai sektor mengurangi skala usaha. Dalam pada itu, secara riil, upah minimum regional (UMR) mengalami penurunan sebagai akibat tingginya inflasi.

Jumlah pengangguran terbuka (open unemployment) yang pada tahun 1997 tercatat sebesar 4,3 juta orang pada tahun 1998 meningkat menjadi 5,1 juta orang, atau 5,5 % dari jumlah angkatan kerja. Apabila jumlah pengangguran terselubung (underemployment) sebesar 8,6 juta orang diperhitungkan, jumlah pengangguran meningkat menjadi 13,7 juta orang. Walaupun kontraksi perekonomian cukup dalam, tingkat pengangguran relatif rendah karena pekerja yang terkena PHK di sektor formal pada umumnya segera beralih pekerjaan ke sektor informal demi mempertahankan kelangsungan hidup. Dengan asumsi bahwa setiap pekerja menanggung beban dua orang –seorang istri dan seorang anak– meningkatnya pengangguran tersebut berdampak pada hilangnya daya beli sebanyak 41,1 juta orang.

Dalam tahun 1998, sebanyak 831 perusahaan secara resmi melakukan PHK terhadap 108.363 orang, sementara 91 perusahaan

masih dalam proses PHK dengan jumlah pekerja sebesar 13.323 orang. Pada kenyataannya, angka tersebut dapat jauh lebih tinggi karena banyak perusahaan yang tidak melaporkan proses PHK ke Departemen Tenaga Kerja.

F. Upaya Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

Fakta di lapangan sering menunjukkan kepada kita bahwa kualitas tenaga kerja Indonesia harus ditingkatkan. Apalagi dalam menghadapi era globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas yang memungkinkan masuknya tenaga-tenaga kerja asing ke tanah air, maka pemerintah dan masyarakat Indonesia mutlak harus meningkatkan kualitas tenaga kerjanya agar mampu bersaing dengan tenaga kerja luar negeri. Sebagai gambaran, saat ini kualitas tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri masih dianggap lebih rendah dibanding kualitas tenaga kerja dari negara tetangga seperti Filipina. Dengan bukti bahwa tenaga kerja Filipina dihargai (dibayar) beberapa kali lipat lebih mahal dibanding tenaga kerja Indonesia. Oleh karena itu, sudah selayaknya bila pemerintah dan masyarakat berupaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Peningkatan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan melalui:

1. Jalur formal, seperti sekolah umum, sekolah kejuruan dan kursus-kursus.
2. Jalur nonformal, yang terdiri atas:
 - a. Latihan kerja, yaitu kegiatan untuk melatih tenaga kerja agar memiliki keahlian dan keterampilan di bidang tertentu sesuai tuntutan pekerjaan. Dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja sudah mendirikan BLK (Balai Latihan Kerja) di setiap Daerah Tingkat II.
 - b. Magang, yaitu latihan kerja yang dilakukan langsung di tempat kerja. Magang umumnya diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang dianggap tepat sebagai tempat latihan kerja. Tujuannya, setelah magang siswa menjadi tenaga kerja yang siap pakai. Kegiatan magang merupakan bagian dari proses *Link and Match* (Keterkaitan dan Kecocokan).
 - c. Meningkatkan kualitas mental dan spiritual tenaga kerja.
Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, tidak hanya mengutamakan segi pengetahuan, keahlian dan keterampilan. Akan tetapi, kualitas mental dan spiritual seperti: keimanan, kejujuran, semangat kerja, kedisiplinan, terampil, inovatif, cerdas, bisa saling

menghargai dan bertanggung jawab juga perlu ditingkatkan juga perlu ditingkatkan.

- d. Meningkatkan pemberian gizi dan kualitas kesehatan
Tenaga kerja tidak mampu bekerja dengan baik bila kurang gizi dan kurang sehat. Kurang gizi bahkan bisa menurunkan kualitas otak (kecerdasan) yang justru sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dengan demikian, peningkatan pemberian gizi dan kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.
- e. Meningkatkan pengadaan seminar, *workshop* yang berkaitan dengan pekerjaan tertentu.
Pada umumnya tenaga kerja pada level menengah ke atas seperti kepala seksi, kepala bagian dan sejenisnya dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan mengikuti berbagai seminar workshop dan sejenisnya. Peningkatan wawasan sangat berguna bagi tenaga kerja pada level menengah ke atas, karena bisa digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan atau dalam pembuatan rencana dan strategi.

KEGIATAN 1.2

Diskusikan hal berikut!

Sebagian ahli berpendapat bahwa untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, pemerintah harus dapat merombak dan memperbaiki kurikulum pendidikan sekolah agar sesuai dengan tuntutan dunia kerja, atau sesuai dengan konsep *link and match* (keterkaitan dan kecocokan) dengan kebutuhan dunia kerja. Setujukah kalian dengan pendapat tersebut?

G. Sistem Upah

Upah merupakan kompensasi (balas jasa) yang diberikan kepada pekerja karena telah memberikan tenaganya kepada perusahaan. Pembayaran upah bisa dilakukan harian, mingguan atau bulanan.

Ada beberapa sistem upah yang bisa digunakan untuk menghitung upah pekerja yaitu:

1. Sistem upah menurut waktu, yakni pemberian upah berdasarkan waktu (lama) bekerja dari pekerja. Misalnya tukang bangunan dibayar per hari Rp15.000,- bila dia bekerja 10 hari maka akan dibayar Rp150.000,-.
2. Sistem upah menurut prestasi, yakni pemberian upah berdasarkan prestasi (jumlah barang yang dihasilkan) pekerja. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, semakin besar upah yang diterima pekerja.
3. Sistem upah borongan, yakni pemberian upah berdasarkan kesepakatan pemberian kerja dan pekerja. Misalnya, untuk membuat rumah ukuran 30 m x 10 m disepakati diborongkan dengan upah Rp30.000.000,- sampai rumah tersebut selesai. Pembuatan rumah selain diborongkan bisa juga dibayar dengan sistem upah menurut waktu, misalnya harian, dengan tujuan agar pekerja bekerja lebih bagus dan hati-hati dalam membuat rumah. Dengan demikian, umumnya jumlah upah harian yang dibayarkan lebih mahal dibanding upah borongan.
4. Sistem upah premi, yakni pemberian upah dengan mengombinasikan sistem upah prestasi yang ditambah dengan premi tertentu. Misalnya bila pekerja mampu menyelesaikan 50 boneka dalam 1 jam akan dibayar Rp25.000,- dan kelebihan dari 50 boneka akan diberi premi misal Rp300,- per boneka. Apabila seorang pekerja mampu membuat 70 boneka dia akan menerima $Rp25.000,- + (Rp300,- \times 20) = Rp31.000,-$.
5. Sistem upah partisipasi, yakni pemberian upah khusus berupa sebagian keuntungan perusahaan pada akhir tahun buku. Upah ini merupakan bonus/(hadiah). Jadi, selain menerima upah seperti biasa, pada sistem upah ini, pekerja akan menerima sejumlah upah lagi setiap akhir tahun buku. Sistem upah partisipasi disebut juga sistem upah bonus.
6. Sistem upah mitra usaha (*co Partnership*), yakni pemberian upah seperti sistem upah bonus, bedanya upah tidak diberikan dalam bentuk uang tunai tapi dalam bentuk saham atau obligasi. Dengan memberikan, saham diharapkan pekerja lebih giat dan hati-hati dalam bekerja, karena mereka juga merupakan pemilik perusahaan.
7. Sistem upah indeks biaya hidup, yakni pemberian upah yang didasarkan pada besarnya biaya hidup. Semakin naik biaya hidup, semakin naik pula besarnya upah yang diberikan.
8. Sistem upah skala berubah (*sliding scale*), yakni pemberian upah berdasarkan skala hasil penjualan yang berubah-ubah. Apabila hasil penjualan bertambah, jumlah upah yang diberikan juga bertambah, demikian pula sebaliknya.
9. Sistem upah produksi (*production sharing*), yakni pemberian upah berdasarkan naik turunnya jumlah produksi secara keseluruhan. Bila jumlah produksi naik 5%, upah juga naik 5%, demikian pula sebaliknya.

10. Sistem upah bagi hasil, yakni pemberian upah dengan memberikan bagian tertentu kepada pekerja dari hasil (keuntungan) yang diperoleh. Sistem ini biasa dipakai di sektor pertanian. Misalnya petani penggarap mengerjakan sawah milik orang lain dengan bagi hasil separohan. Artinya, bila sawah menghasilkan 2 ton beras, petani penggarap mendapat 1 ton dan pemilik sawah juga mendapat 1 ton.



Sumber: www.kompas.com/.../0106/24/nasional/kond29.htm

Gambar 1.3. Pemberlakuan UMR merupakan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom

Di Indonesia pengusaha bisa memilih sistem upah yang sesuai untuk jenis perusahaannya. Akan tetapi, pemerintah memiliki kewajiban menetapkan berapa besarnya upah minimum yang harus diterima pekerja agar bisa hidup layak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 mengenai kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom maka pemberlakuan UMR (Upah Minimum Regional) diubah menjadi UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten). Dalam

hal ini, pemerintah kota/kabupaten tidak boleh menetapkan UMK di daerahnya yang jumlahnya di bawah UMP yang sudah ditetapkan oleh provinsi. Dalam peraturan pemerintah tersebut dinyatakan pula antara lain:

- a. UMP atau UMK hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun. Itu berarti bagi pekerja yang masa kerjanya lebih dari 1 tahun berhak memperoleh upah di atas UMP atau UMK.
- b. Bagi pengusaha yang telah memberikan upah di atas UMP atau UMK dilarang menurunkan upahnya.

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2003 yang mengatur pajak penghasilan bagi pekerja. Menurut peraturan ini, bagi para pekerja yang menerima upah yang jumlahnya kurang atau sama dengan UMP atau UMK, maka pemerintah wajib menanggung atau membayar pajak penghasilan para pekerja tersebut. Peraturan ini dikeluarkan dengan maksud mengurangi beban pajak para pekerja yang upahnya kurang atau sama dengan UMP atau UMK.

Perhatikan tabel berikut.

Tabel 1.1 Rata-rata Upah Maksimum dan Minimum Pekerja di Berbagai Sektor per bulan (ribuan rupiah)

Sektor	Rata-rata upah minimum			Rata-rata upah maksimum		
	1993	1994	1995*	1993	1994	1995*
Perkebunan	170	240	272	1.835	1.835	1.927
Pertambangan dan penggalian	414	487	506	3.998	4.669	4.906
Industri	196	207	238	2.920	3.112	3.453
Bangunan	290	296	327	2.656	2.777	3.047
Listrik, gas dan air bersih	155	173	267	2.644	2.744	3.552
Perdagangan/bank dan asuransi	305	326	368	3.733	4.506	4.904
Perhubungan	223	467	494	2.805	4.311	4.399
Jasa-jasa	235	235	281	2.271	2.509	2.780

Sumber : Departemen Tenaga Kerja

I N F O

“Protes Pekerja atas Draf Revisi UU Ketenagakerjaan”

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie mengemukakan, rencana revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan akan dimulai lagi dari awal. Jadi tidaknya revisi tersebut masih akan diputuskan dalam forum tripartit nasional.

Hal itu diutarakan menanggapi maraknya protes pekerja terhadap draf revisi No. 13 tahun 2003. Paling tidak ada satu pasal yang diprotes keras pekerja yakni mengenai pasangan.

Dalam UU No. 13/2003 disebutkan: “dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”

Akan tetapi, dalam draf revisi UU, ketentuan pasal itu ditambah ketentuan tambahan, yaitu “pekerja/buruh yang berhak mendapat pesangon adalah pekerja/buruh yang mendapat upah lebih rendah atau sama dengan satu kali penghasilan tidak kena pajak (PTKP)”.

Berdasarkan Peraturan Menkeu No 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, besaran PTKP

sebesar Rp13,2 juta per tahun atau Rp 1,1 juta per bulan. Ketentuan itu mulai diberlakukan 1 Januari 2006.

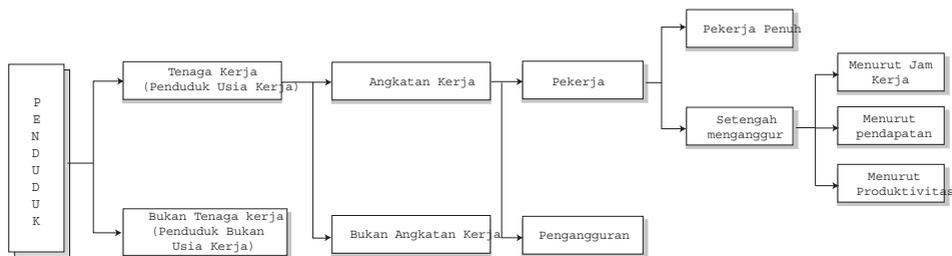
Dengan ketentuan itu, pekerja yang mendapat upah di atas Rp1,1 juta tidak berhak mendapatkan pesangon jika terjadi pemutusan hubungan kerja.

Rata-rata Upah Maksimum dan Minimum Pekerja di Berbagai Sektor per bulan (ribuan rupiah).

Sumber: *Harian Kompas*

RANGKUMAN

1. **Arti kesempatan kerja:** suatu yang menunjukkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh pencari kerja.
2. **Hubungan jumlah penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja dan pengangguran**
Hubungan tersebut tampak dalam skema berikut:



3. **Macam pengangguran**
Berdasarkan lama waktu kerja:
 - a. Pengangguran terbuka
 - b. Setengah Menganggur
 - c. Pengangguran terselubung

Berdasarkan penyebab:

- a. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh terjadinya perubahan struktur perekonomian.
 - b. Pengangguran konjungtural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh pergerakan naik turunnya kegiatan perekonomian.
 - c. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh pergeseran (friksi) pekerja yang ingin berpindah kerja
 - d. Pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh perubahan musim atau perubahan permintaan tenaga kerja secara berkala.
4. **Dampak pengangguran:**
 - a. Menurunkan aktivitas perkenomian
 - b. Menurunkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.
 - c. Meningkatkan biaya sosial
 - d. Menurunkan tingkat keterampilan kerja
 - e. Menurunkan penerimaan negara

5. Cara mengatasi pengangguran

STRUKTUR

- a. Memindahkan tenaga kerja ke tempat yang lebih membutuhkan
- b. Membuka pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
- c. Mendirikan industri dan proyek padat karya
- d. Meningkatkan perputaran modal dan tenaga kerja
- e. Menyadarkan masyarakat pentingnya menguasai teknologi modern

KONJUNGTURAL

- a. Meningkatkan daya beli masyarakat
- b. Mengarahkan masyarakat menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa
- c. Menciptakan teknik-teknik pemasaran dan promosi yang menarik

Friksional

Menyediakan sarana informasi lowongan kerja yang cepat, mudah dan murah

MUSIMAN

- a. Memberikan latihan keterampilan kerja lain
- b. Segera memberikan informasi bila ada lowongan kerja di sektor lain

6. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja

- a. Jalur formal, seperti sekolah umum, sekolah kejuruan dan kursus-kursus.
- b. Jalur non-Formal
 - latihan kerja
 - magang
 - meningkatkan kualitas mental dan spiritual
 - meningkatkan pemberian gizi dan kualitas kesehatan
 - meningkatkan pengadaan seminar dan *workshop* yang berkaitan dengan pekerjaan tertentu.

7. Sistem upah: ada 10 macam sistem upah yaitu

- a. sistem upah menurut waktu
- b. sistem upah menurut prestasi
- c. sistem upah borongan
- d. sistem upah premi
- e. sistem upah partisipasi
- f. sistem upah mitra usaha
- g. sistem upah indeks biaya hidup
- h. sistem upah skala berubah
- i. sistem upah produksi
- j. sistem upah bagi hasil

Di Indonesia pengusaha bisa memilih sistem upah yang sesuai dengan jenis perusahaannya. Akan tetapi, pemerintah wajib menetapkan besarnya upah minimum agar pekerja bisa hidup layak. Berdasar PP No. 25 tahun 2000 UMR (Upah Minimum Regional) diubah menjadi UMP (Upah Minimum Propinsi) dan UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten). Selain itu pemerintah mengeluarkan PP No 5 th. 2003 yang mengatur pajak penghasilan bagi pekerja yakni menyatakan: bagi para pekerja yang menerima upah yang jumlahnya kurang atau sama dengan UMP atau UMK maka pemerintah wajib menanggung atau membayar pajak penghasilan para pekerja tersebut.

Kata Kunci

<i>angkatan kerja</i>	<i>sistem upah</i>
<i>biaya sosial</i>	<i>sistem upah bagi hasil</i>
<i>co partnership</i>	<i>sistem upah borongan</i>
<i>demand of labour</i>	<i>sistem upah indeks biaya hidup</i>
<i>kesempatan kerja</i>	<i>sistem upah menurut prestasi</i>
<i>latihan kerja</i>	<i>sistem upah menurut waktu</i>
<i>magang</i>	<i>sistem upah mitrausaha</i>
<i>pekerja</i>	<i>sistem upah partisipasi</i>
<i>pekerja penuh</i>	<i>sistem upah premi</i>
<i>penduduk</i>	<i>sistem upah produksi</i>
<i>pengangguran</i>	<i>sistem upah skala berubah</i>
<i>pengangguran friksional</i>	<i>sliding scale</i>
<i>pengangguran konjungtural</i>	<i>tenaga kerja</i>
<i>pengangguran musiman</i>	<i>UMK</i>
<i>pengangguran struktural</i>	<i>UMP</i>
<i>PHI</i>	<i>UMR</i>
<i>setengah pengangguran</i>	

Evaluasi Akhir Bab

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Suatu keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh pencari kerja disebut
A. keadaan kerja
B. lapangan kerja
C. kesempatan kerja
D. angkatan kerja
E. tenaga kerja
2. Penduduk usia 15 sampai dengan 64 tahun yang sanggup bekerja bila ada permintaan kerja disebut
A. angkatan kerja
B. tenaga kerja
C. pekerja
D. karyawan
E. pencari kerja
3. Kelompok tenaga kerja yang ingin bekerja dan selalu berusaha mencari pekerjaan disebut

- A. angkatan kerja
B. tenaga kerja
C. pekerja
- D. karyawan
E. pencari kerja
4. Kelompok angkatan kerja yang telah mendapat pekerjaan disebut
- A. tenaga kerja
B. pengangguran
C. pekerja
D. wirausaha
E. wirausaha
5. Apabila seorang bekerja 15 jam seminggu ia tergolong
- A. pekerja penuh
B. pengangguran
C. pengangguran terbuka
D. setengah menganggur
E. pekerja sampingan
6. Yopi bekerja sebagai pelayan restoran meskipun ijazah terakhirnya S-1 pertanian. Yopi tergolong
- A. pekerja penuh
B. pengangguran
C. Pengangguran terselubung
D. pengangguran struktural
E. pengangguran siklikal
7. Dani terpaksa menganggur karena tidak memiliki keterampilan bekerja di pabrik. Dani hanya bisa bertani, Dani tergolong
- A. pengangguran terselubung
B. pengangguran struktural
C. pengangguran musiman
D. pengangguran konjungtural
E. pengangguran friksional
8. Fatma menganggur sambil menunggu panggilan kerja dari perusahaan yang diincarnya, sebelumnya ia bekerja di perusahaan minuman. Dalam hal ini Fatma tergolong
- A. pengangguran terselubung
B. pengangguran struktural
C. pengangguran musiman
D. pengangguran konjungtural
E. pengangguran friksional

9. Krisis ekonomi tahun 1997 telah menyebabkan terjadinya
- A. pengangguran terselubung
 - B. pengangguran struktural
 - C. pengangguran musiman
 - D. pengangguran konjungtural
 - E. pengangguran friksional
10. Yang bukan merupakan dampak pengangguran adalah
- A. meningkatkan biaya sosial
 - B. menurunkan penerimaan negara
 - C. menurunkan tingkat keterampilan kerja
 - D. menurunkan kejahatan
 - E. menurunkan aktivitas perekonomian
11. Meningkatkan daya beli masyarakat dan mengarahkan masyarakat untuk membeli barang dan jasa merupakan cara mengatasi pengangguran
- A. terselubung
 - B. struktural
 - C. konjungtural
 - D. musiman
 - E. friksional
12. Memindahkan tenaga kerja ke tempat yang lebih membutuhkan dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya menguasai teknologi modern merupakan cara mengatasi pengangguran
- A. terselubung
 - B. struktural
 - C. konjungtural
 - D. musiman
 - E. friksional
13. Cara mengatasi pengangguran musiman adalah
- A. memberi latihan keterampilan lain seperti mengelas dan menjahit
 - B. menempelkan iklan-iklan lowongan kerja di tempat-tempat umum
 - C. menciptakan teknik pemasaran untuk menarik pembeli
 - D. memindahkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan
 - E. meningkatkan daya beli masyarakat
14. Menyelenggarakan sekolah umum dan sekolah kejuruan termasuk dalam upaya peningkatan kualitas tenaga kerja melalui jalur
- A. non-formal
 - B. formal
 - C. pendidikan khusus
 - D. latihan kerja
 - E. magang

15. Yang bukan merupakan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja melalui jalur non-formal adalah
- magang
 - latihan kerja
 - menyelenggarakan sekolah-sekolah
 - meningkatkan pemberian gizi
 - meningkatkan penyelenggaraan seminar dan workshop

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

- Jelaskan kaitan penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, pekerja dan pekerja penuh!
- Jelaskan perbedaan tenaga kerja dan bukan tenaga kerja!
- Sebutkan 3 kelompok setengah menganggur!
- Jelaskan pengertian pengangguran terbuka dan pengangguran terselubung!
- Jelaskan pengertian pengangguran:
 - struktural
 - konjungtural
 - friksional
 - musiman
- Jelaskan dampak pengangguran terhadap kehidupan ekonomi dan sosial!
- Jelaskan cara mengatasi pengangguran struktural!
- Jelaskan cara mengatasi pengangguran musiman!
- Jelaskan pengertian sistem upah prestasi, borongan, partisipasi dan indeks biaya hidup!
- Apa saja yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000?

C. UKA (Usut Kasus)

“Kenaikan BBM dan Nasib Pekerja”

Tak jarang modal kerja pun mulai ikut tergerus untuk menutupi meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan BBM. Di sisi lain, tidak ada keseimbangan atas peningkatan itu semua karena daya beli masyarakat tidak tumbuh.

“Jangankan menaikkan harga untuk mengimbangi kenaikan biaya produksi, membeli dengan harga yang lama pun masyarakat sudah tidak mampu,” kata panelis tersebut.

Akibatnya, stok produksi melimpah. Stok itu tak hanya menumpuk di tangan produsen, tetapi juga di tangan distributor dan agen. Bukti paling nyata adalah data perdagangan otomotif, elektronik, tekstil dan produk

tekstil, serta berbagai produk makanan yang begitu rendah diserap pasar. Akibatnya, beberapa pabrik otomotif di Indonesia merumahkan karyawannya.

Kisah sedih itu bukan sekadar isapan jempol sang panelis. Raksasa industri makanan yang ada di Indonesia pun pada awal Januari 2006 sudah mengibarkan bendera kuning bahwa mereka akan memberhentikan sekitar 4.500 pekerjanya.

Itu baru dari satu pabrik. Belum lagi kita bicara di industri tekstil dan produk tekstil, industri sepatu, kayu olahan, dan kayu lapis. Dari berbagai sektor industri manufaktur tersebut paling tidak ribuan orang setiap minggu masuk menjadi anggota pengangguran baru.

Mau bukti, datang saja ke kantong-kantong industri yang terdekat, seperti di Bekasi, Tangerang, Banten, dan Bogor. Lihat apakah masih ada lampu yang menyala penuh di berbagai pabrik tersebut pada malam hari. Jawabannya pasti tidak. Sinar lampu yang ada pun terlihat redup karena menurunnya aktivitas produksi.

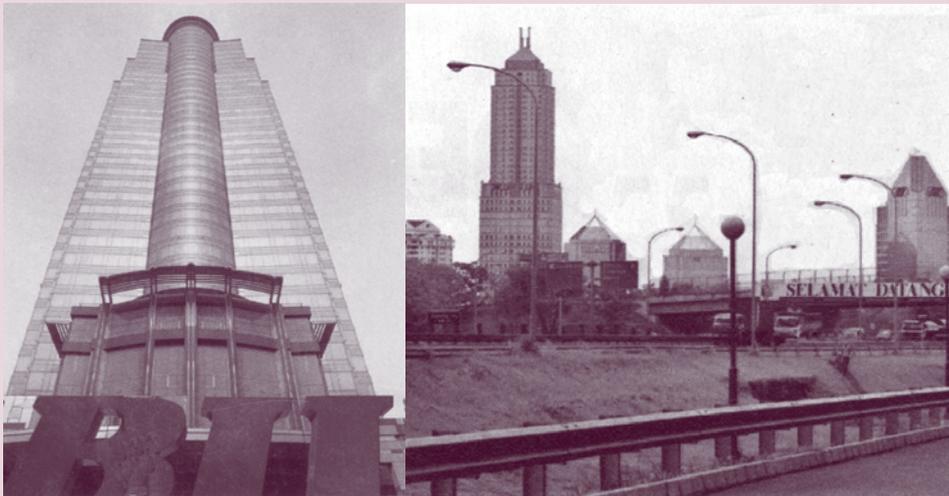
Sumber: *Harian Kompas*

Setelah membaca informasi di atas, jawablah pertanyaan berikut:

1. Coba jelaskan hubungan kenaikan BBM dengan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)! Betulkah kenaikan BBM menyebabkan maraknya PHK?
2. Menurut pendapatmu, apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk mengatasi pengangguran yang akan terus bertambah?

Bab II

Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi serta Pembangunan Nasional



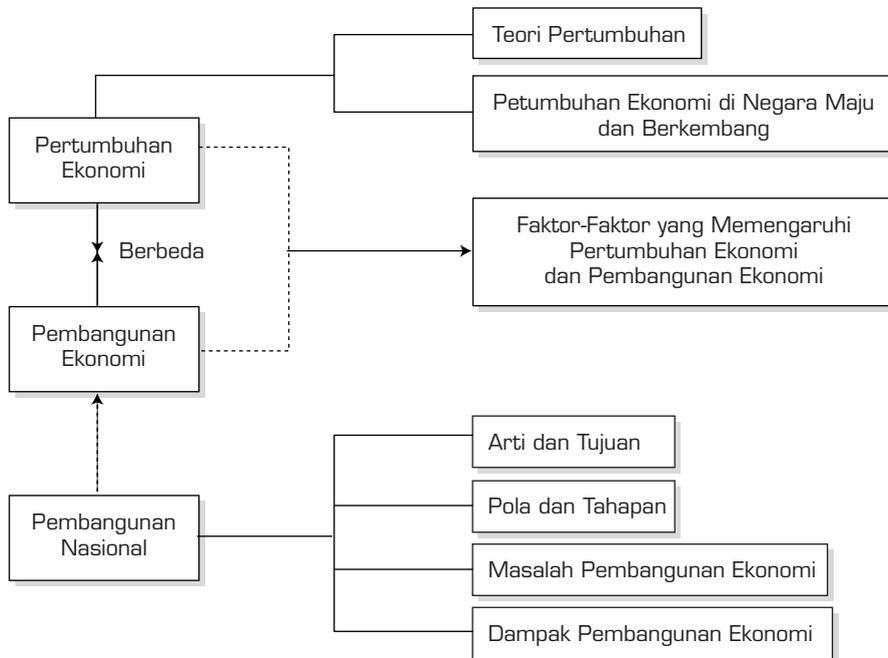
Sumber: *Tempo*, 6 Maret 2005 - 13 Juli 2005

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat:

1. mendeskripsikan pengertian dan tujuan pembangunan ekonomi;
2. mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan ekonomi;
3. mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan pembangunan ekonomi.

PETA KONSEP



Hampir setiap hari media massa seperti televisi dan koran memberitakan hal-hal yang berhubungan dengan perekonomian. Kadang-kadang masalah ekonomi juga dibahas dan didiskusikan lebih mendalam pada acara *talk show* di televisi. Kenaikan harga BBM dan TDL (Tarif Dasar Listrik), tingkat pengangguran yang meningkat, kesejahteraan ekonomi dan sosial, protes mengenai undang-undang ketenagakerjaan, bertambahnya angka kemiskinan, utang Indonesia yang bertumpuk adalah contoh-contoh masalah perekonomian yang sering diberitakan, dibahas dan diskusikan.

Dari pemberitaan dan perbincangan mengenai masalah-masalah ekonomi di atas, sering disebut istilah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Samakah pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dengan pembangunan ekonomi (*economic development*)? Jika berbeda, di mana letak perbedaannya? Berikut ini kita akan membahas hal-hal seputar pembangunan ekonomi dan perbedaannya dengan pertumbuhan ekonomi.

A. Pengertian Pembangunan Ekonomi dan Perbedaannya dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi memiliki arti yang berbeda dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mencakup hal-hal yang lebih luas dibanding pertumbuhan ekonomi. *Pertumbuhan ekonomi* bisa diartikan sebagai suatu keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kenaikan PDB (Produk Domestik Bruto) tanpa memandang apakah persentase kenaikan PDB tersebut lebih besar atau lebih kecil dibanding persentase kenaikan jumlah penduduk. Pengertian PDB sendiri adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan seluruh masyarakat di suatu negara selama satu tahun. Jadi, pertumbuhan ekonomi lebih difokuskan pada kenaikan jumlah PDB. Secara sederhana, suatu negara dikatakan telah mengalami pertumbuhan ekonomi bila jumlah PDB tahun sekarang lebih besar dibanding PDB tahun sebelumnya.

Walaupun suatu negara telah mengalami pertumbuhan ekonomi, belum tentu negara tersebut telah mengalami pembangunan ekonomi. Karena, pembangunan ekonomi mencakup hal yang lebih luas dibanding pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi bisa diartikan sebagai proses yang bertujuan menaikkan pendapatan per kapita untuk jangka waktu yang panjang dan disertai adanya perubahan struktur ekonomi dan perkembangan IPTEK. Pendapatan per kapita diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan per kapita} = \frac{\text{PDB tahun } x}{\text{Jumlah penduduk tahun } x}$$

Karena pembangunan ekonomi bertujuan menaikkan pendapat per kapita, itu berarti pembangunan ekonomi tidak hanya menekankan pentingnya kenaikan PDB, tetapi juga memerhatikan apakah persentase kenaikan PDB lebih besar atau lebih kecil dibanding persentase kenaikan jumlah penduduk. Apabila persentase kenaikan PDB lebih kecil dibanding persentase kenaikan jumlah penduduk maka pendapatan per kapita akan turun. Dan, itu berarti pembangunan ekonomi yang dilaksanakan belum berhasil. Untuk mempermudah pemahaman, perhatikan tabel berikut yang menunjukkan ilustrasi kenaikan PDB dengan angka-angka yang disederhanakan.

PDB tahun 1990	PDB tahun 1991	Persentase kenaikan PDB tahun 1991
Rp1.000,-	Rp1.200,-	$\frac{1.200 - 1.000}{1000} \times 100\% = 20\%$

Dari tabel tersebut persentase kenaikan PDB tahun 1991 adalah 20%.

Jumlah Penduduk tahun 1990	Jumlah Penduduk tahun 1991	Persentase kenaikan Jumlah Penduduk tahun 1991
100 orang	130 orang	$\frac{130 - 1000}{100} \times 100\% = 30\%$

Dari tabel tersebut tampak persentase kenaikan jumlah penduduk tahun 1991 adalah 30%.

Pendapatan per kapita tahun 1990	Pendapatan per kapita tahun 1991
$\frac{\text{PDB tahun 1990}}{\text{Jumlah penduduk tahun 1990}} = \frac{\text{Rp1.000,-}}{100} = \text{Rp10,-}$	$\frac{\text{PDB tahun 1991}}{\text{Jumlah penduduk tahun 1991}} = \frac{\text{Rp1.200,-}}{130} = \text{Rp9,23}$

Dari tabel di atas tampak bahwa pendapatan per kapita tahun 1990 sebesar Rp10,- dan pendapatan per kapita tahun 1991 sebesar Rp9,23. Ini berarti telah terjadi penurunan pendapatan per kapita. Hal itu terjadi karena persentase kenaikan PDB lebih kecil dibanding persentase kenaikan jumlah penduduk yakni 20% berbanding 30%.

Dari tabel-tabel di atas, kita juga dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya pada tahun 1991 telah terjadi pertumbuhan ekonomi, karena PDB tahun 1991 telah mengalami kenaikan dibanding PDB tahun 1990. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi sebesar itu ternyata tidak cukup untuk meningkatkan pendapatan per kapita yang terjadi justru pada tahun 1991 pendapatan per kapita mengalami penurunan seperti yang telah diuraikan di atas. Apabila ingin meningkatkan pendapatan per kapita, maka persentase kenaikan PDB harus lebih besar dibanding persentase kenaikan jumlah penduduk.

Untuk memperjelas perbedaan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi, perhatikan tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Perbedaan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi

Perbedaan	
Pertumbuhan ekonomi	Pembangunan Ekonomi
1. Hanya menekankan pada kenaikan PDB	1. Tidak hanya menekankan pada kenaikan PDB
2. Tidak memerhatikan apakah persentase kenaikan PDB lebih besar atau lebih kecil dibanding persentase kenaikan jumlah penduduk	2. Memerhatikan apakah persentase kenaikan PDB lebih besar atau lebih kecil dibanding persentase kenaikan jumlah penduduk.
3. Tidak memerhatikan apakah kenaikan PDB diikuti atau tidak oleh perubahan ekonomi dan kemajuan IPTEK.	3. Memerhatikan apakah kenaikan PDB diikuti atau tidak oleh perubahan struktur ekonomi dan kemajuan IPTEK. Struktur ekonomi berubah dari tradisional ke modern, dari modern menjadi lebih modern, atau dari agraris ke industri dan perdagangan.
4. Tidak memerhatikan apakah kenaikan PDB diikuti atau tidak oleh peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.	4. Memerhatikan apakah kenaikan PDB diikuti atau tidak oleh peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat

Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi di suatu negara, dapat digunakan rumus berikut:

$$\text{Pertumbuhan ekonomi tahun } t = \frac{\Delta \text{PDB}_t}{\text{PDB}_{t_0}} \times 100\%$$

Di mana: $\Delta \text{PDB}_t = \text{PDB}_t - \text{PDB}_{t_0}$

$\text{PDB}_t =$ Nilai PDB tahun t

$\text{PDB}_{t_0} =$ Nilai PDB tahun dasar yang umumnya adalah nilai PDB tahun sebelumnya.

Atau bisa juga rumus di atas ditulis sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan ekonomi tahun } t = \frac{\text{PDB}_t - \text{PDB}_{t-1}}{\text{PDB}_{t-1}} \times 100\%$$

Di mana $\text{PDB}_t =$ nilai PDB tahun t

$\text{PDB}_{t-1} =$ nilai PDB tahun sebelumnya.

CONTOH SOAL ▼

Diketahui PDB tahun 2002 senilai Rp45.000 miliar dan PDB tahun 2003 senilai Rp50.000 miliar. Berapa pertumbuhan ekonomi tahun 2003?

Jawab:

Pertumbuhan ekonomi tahun 2003

$$= \frac{\text{Rp}50.000 \text{ m miliar} - \text{Rp}45.000 \text{ m miliar}}{\text{Rp}45.000 \text{ m miliar}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp}5.000 \text{ m miliar}}{\text{Rp}45.000 \text{ m miliar}} \times 100\%$$

$$= \frac{5.000 \text{ m miliar}}{45.000 \text{ m miliar}} \times 100\%$$

$$= \frac{500}{45} \% = 11,2\%$$

Adapun untuk mengukur berhasil tidaknya pembangunan ekonomi di suatu negara, dapat dilihat dari naiknya pendapatan per kapita secara terus-menerus dalam jangka panjang yang disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan kemajuan IPTEK. Dan, diikuti pula dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan kesejahteraan. Untuk mengukur tingkat pemerataan kesejahteraan di masyarakat, bisa digunakan Koefisien Gini dan Kriteria dari Bank Dunia.

B. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di suatu negara tidak tetap, bisa naik dan bisa turun. Demikian juga pembangunan ekonomi di suatu negara tidaklah tetap, karena pendapatan per kapita suatu saat bisa naik, tapi di saat lain justru turun. Mengapa demikian? Karena banyak faktor yang bisa memengaruhi naik turunnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Faktor-faktor tersebut di antaranya sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan teknologi.

1. SDA (Sumber Daya Alam)

Sumber daya alam atau faktor produksi alam merupakan faktor yang dapat memengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Jika suatu negara memiliki sumber daya alam yang memadai dan kemudian dikelola dengan baik, tentu akan menghasilkan PDB yang tinggi, yang diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi.

2. SDM (Sumber Daya Manusia)

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dan mampu memengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Sebagai bukti, bila dibandingkan dengan Jepang, Indonesia memiliki SDA yang lebih kaya. Akan tetapi, Jepang lebih makmur dibanding Indonesia karena kualitas SDM Jepang lebih tinggi. SDM merupakan faktor yang sangat penting, karena dalam proses produksi manusia mempunyai peran sebagai tenaga kerja sekaligus sebagai pengusaha yang bertugas mengombinasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, manusia pula yang berperan menciptakan teknologi baru yang lebih modern untuk mempermudah pekerjaan dan meningkatkan hasil produksi. Oleh karena itu, bila suatu negara ingin meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ini berarti negara tersebut harus lebih dulu meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi maka negara tersebut harus lebih dulu meningkatkan kualitas SDM-nya dengan cara memperbaiki kualitas ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan, sikap dan pola pikir.

3. Modal

Apabila suatu negara ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi tentu memerlukan modal, baik modal barang maupun modal uang. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, jumlah modal yang terbatas menjadi masalah. Di negara berkembang, tingkat pembentukan modal yang rendah disebabkan karena kemampuan menabung yang rendah. Kemampuan menabung yang rendah disebabkan karena rendahnya tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan rendah disebabkan karena tingkat produktivitas yang rendah. Tingkat produktivitas yang rendah disebabkan karena tingkat pembentukan modal yang rendah, sehingga kegiatan investasi tidak bisa berkembang. Demikian seterusnya sehingga membentuk suatu lingkaran setan (*vicious circle*) yang tidak ada putusnya dan saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Lingkaran setan itu disebut juga dengan istilah lingkaran setan kemiskinan.



Gambar 2.1. Skema lingkaran setan kemiskinan.

Jika suatu negara ingin memutus tali lingkaran setan tersebut, negara itu harus melakukan suatu hentakan besar agar lingkaran setan dapat putus dan lepas dari ikatannya. Caranya antara lain dengan melakukan investasi yang lebih besar, meningkatkan keahlian penduduk dan mengurangi pertumbuhan penduduk melalui program KB (Keluarga Berencana). Agar bisa melakukan investasi yang lebih besar, umumnya negara-negara berkembang melakukan pinjaman ke luar negeri. Pinjaman luar negeri akan sangat membantu negara-negara berkembang keluar dari kemiskinan, dengan catatan pinjaman tersebut dikelola dengan baik. Sebaliknya, pinjaman luar negeri justru akan mendatangkan keterpurukan bila dikelola dengan buruk dan dikorupsi terus-menerus. Pokok pinjaman yang besar dan bunga utang yang menumpuk pada akhirnya dapat memperparah kemiskinan yang ada.

4. Teknologi

Semakin tinggi tingkat teknologi yang dikuasai suatu negara akan mempermudah negara yang bersangkutan dalam mengolah SDA yang dimiliki dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dengan menggunakan teknologi tinggi, proses produksi bisa berjalan lebih cepat, mampu memproduksi lebih banyak, lebih baik dan dengan harga lebih murah. Mengapa demikian? Karena dengan menggunakan teknologi tinggi, efisiensi dan efektivitas, proses produksi dapat tercapai.

C. Pertumbuhan Ekonomi di Negara Maju dan Negara Berkembang

Kita mengira bahwa pertumbuhan ekonomi di negara maju pasti lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Lalu, bagaimana sesungguhnya pertumbuhan ekonomi di negara maju dibanding negara berkembang? Untuk menjawabnya, perhatikan tabel pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia berikut ini.

I N F O			
Pertumbuhan Ekonomi Dunia			
Negara	1994r	1995r	1996r
Negara Industri/Maju	3,2 %	2,6 %	3,2 %
7 Negara Industri Utama	2,9 %	2,1 %	3,0 %
Amerika Serikat	3,5 %	2,3 %	3,4 %
Jepang	0,6 %	1,5 %	5,0 %
Jerman	2,7 %	1,2 %	1,3 %
Prancis	2,8 %	2,1 %	1,6 %
Italia	2,2 %	2,9 %	0,7 %
Inggris	4,4 %	2,8 %	2,6 %
Kanada	4,7 %	2,6 %	1,2 %
Lainnya	4,6 %	4,4 %	3,8 %

Negara Berkembang	6,8 %	6,0 %	6,5 %
Afrika	2,1 %	3,0 %	5,8 %
Timur Tengah dan Eropa	0,7 %	3,8 %	4,7 %
Amerika latin	5,2 %	1,2 %	3,5 %
Asia	9,6 %	9,0 %	8,2 %
NIEs Asia	7,6 %	7,3 %	6,3 %
RRC	12,6 %	10,5 %	9,7 %
ASEAN 4	8,1 %	8,2 %	7,1 %
Indonesia	7,5 %	8,2 %	7,8 %
Singapura	10,1 %	8,8 %	6,9 %
Malaysia	9,2 %	9,5 %	8,6 %
Thailand	8,8 %	8,7 %	5,5 %
Filipina	4,4 %	4,8 %	5,7 %
Vietnam	8,8 %	9,5 %	9,3 %
Negara-Negara Transisi	-7,1 %	-1,5 %	-1,0 %
Eropa Tengah dan Timur	-2,8 %	1,6 %	1,6 %
Rusia	-11,6 %	-4,8 %	-5,0 %
Transcaucasus dan Asia Tengah	-11,4 %	-4,7 %	-3,7 %

Keterangan: *r* = Revised Figures = angka yang telah diperbaiki

Sumber: IMF, World Economic Outlook, April 1999 – Bank Indonesia

Dari tabel di atas, tampak bahwa pertumbuhan ekonomi di negara maju ternyata lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Mengapa bisa demikian?

Karena, di negara maju perekonomian sudah stabil dan hampir semua sumber daya sudah digunakan secara optimal. Berbeda dengan negara berkembang, sesuai dengan namanya (berkembang), negara-negara ini masih mungkin untuk terus berkembang, karena masih banyak sumber daya yang belum dikelola secara optimal. Jika sumber-sumber daya yang masih potensial tersebut dikelola dengan baik maka bisa menambah peningkatan PDB dengan mencolok. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di negara berkembang menjadi lebih tinggi dibanding negara-negara maju.

Alasan lain mengapa pertumbuhan ekonomi di negara berkembang lebih tinggi dibanding negara maju yaitu karena pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\Delta \text{PDB}}{\text{PDB}_{t_0}} \times 100\%$$

Sehingga, pertumbuhan ekonomi hanya melihat berapa besar tambahan PDB suatu tahun dibanding PDB tahun sebelumnya. Rumus pertumbuhan ekonomi tidak mempersoalkan berapa besar nilai PDB suatu negara yang akan dihitung pertumbuhannya. Akibatnya, walaupun nilai PDB di negara maju tinggi sedangkan nilai PDB di negara berkembang rendah, tetapi bila dihitung tingkat pertumbuhannya, sering kali pertumbuhan ekonomi di negara maju lebih rendah dibanding negara berkembang. Agar lebih jelas, perhatikan ilustrasi nilai PDB dan pertumbuhan ekonomi negara maju dan negara berkembang berikut.

Tabel 2.2 Nilai PDB dan pertumbuhan ekonomi negara maju dan negara berkembang

Negara	PDB tahun 2004 (dalam miliar Rp)	PDB tahun 2005 (dalam miliar Rp)	Pertumbuhan Ekonomi
Maju	930.000.000	955.000.000	3%

Negara	PDB tahun 2004 (dalam miliar Rp)	PDB tahun 2005 (dalam miliar Rp)	Pertumbuhan Ekonomi
Berkembang	420.000	495.000	18%

Dari tabel tampak walaupun nilai PDB negara maju jauh lebih tinggi dibanding negara berkembang, tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi negara maju lebih rendah dibanding negara berkembang. Ada satu pertanyaan yang menarik, pertumbuhan ekonomi di negara berkembang umumnya lebih tinggi dibanding negara maju, tetapi mengapa tingkat kesejahteraan di negara berkembang lebih rendah dibanding negara berkembang?

Jawabannya sederhana, karena tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara tidak bisa digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara lebih tepat jika menggunakan tingkat pendapatan per kapita, yang salah satunya menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan per kapita} = \frac{\text{PDB tahun } x}{\text{Jumlah penduduk tahun } x}$$

Pada umumnya, di negara maju pendapatan per kapita jauh lebih tinggi dibanding di negara berkembang. Karena, PDB yang dicapai juga jauh lebih tinggi, sementara jumlah penduduk di negara-negara maju umumnya tidak terlalu besar. Akibatnya, pendapatan per kapita mereka menjadi tinggi. Perhatikan tabel pendapatan per kapita berikut!

Pendapatan per kapita negara berkembang dan negara maju tahun 1999 (dalam US\$).

<p>a. Negara berkembang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indonesia = 2.830 2. Malaysia = 9.000 	<p>b. Negara maju</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jepang = 31.500 2. Inggris = 22.200 3. Amerika = 26.400
---	--

I N F O

“Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Asia”

Pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia masih tercatat paling tinggi, yaitu mencapai 8,4 % pada tahun 1995. Kinerja ekonomi di RRC, kelompok NIEs dan ASEAN memberikan sumbangan terbesar bagi pertumbuhan yang tinggi tersebut. Pertumbuhan tinggi yang terus-menerus telah meningkatkan risiko pemanasan suhu perekonomian yang gejalanya mulai dirasakan oleh beberapa negara sejak 1994. Untuk mencegah terjadinya pemanasan suhu perekonomian, beberapa negara menerapkan kebijakan makro-ekonomi yang berhati-hati dan melaksanakan reformasi struktural. Upaya tersebut berdampak, antara lain pada penurunan laju inflasi pada tahun 1995 menjadi 10,9% dibandingkan dengan 13,5% dalam tahun sebelumnya.

RRC sebagai negara berkembang yang penting dalam perekonomian Asia mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 10,2% pada tahun 1995.

Sumber : Laporan Bank Indonesia

KEGIATAN 2.1

Sebuah negara pada tahun 1990 memiliki PDB 40 miliar dolar. Kemudian, pada tahun 1991 PDB yang dicapai 34 miliar dolar. Hitunglah pertumbuhan ekonomi tahun 1991. Jika hasil yang dicapai bertanda (-) berarti telah terjadi penurunan PDB.

D. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi adalah teori yang membahas pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh negara ditinjau dari dua sudut. Pertama, membahas pertumbuhan ekonomi berdasarkan tahap-tahap tertentu (secara historis). Kedua, membahas pertumbuhan ekonomi berdasarkan penyebab-penyebabnya (secara analitis). Kita akan membahas pertumbuhan ekonomi dengan struktur sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------|---|-------------------------------------|
| 1. Secara historis | → | Teori Pertumbuhan Ekonomi Historis |
| 2. Secara analitis | → | Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik |
| | → | Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik |

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Historis

Tokoh dari teori pertumbuhan ekonomi historis adalah Frederich List, Karl Bucher, Werner Sombart dan WW. Rostow.

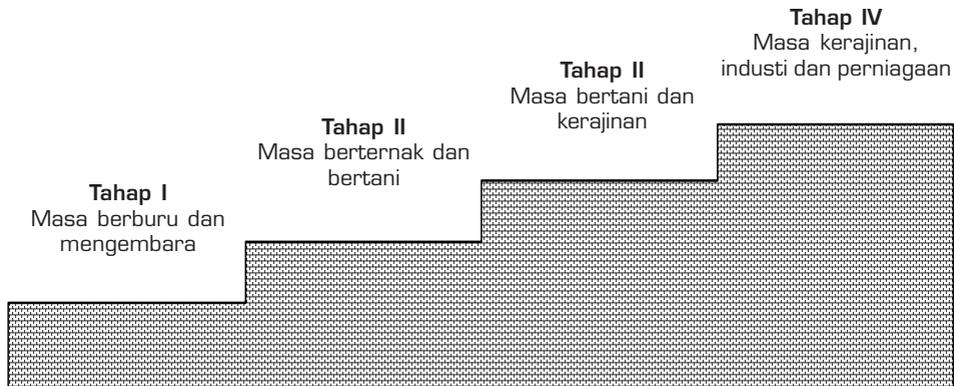
a. Frederich List (1789 - 1846)

Frederich List menguraikan pertumbuhan ekonomi yang dialami suatu negara berdasarkan cara produksi (teknik produksi) dan mata pencaharian masyarakat. Frederich List membagi pertumbuhan ekonomi ke dalam tahapan yang bertingkat-tingkat seperti sebuah tangga sehingga disebut "*Stufen Theorien*" (teori tangga).

1) Masa berburu dan mengembara

Pada masa ini manusia memenuhi kebutuhannya dengan berburu dan mengembara. Berburu dilakukan oleh laki-laki, sedang perempuan

bertugas mencari umbi-umbian, buah dan sayuran. Jika hewan dan tumbuhan sebagai makanan telah habis di suatu tempat, mereka akan berpindah (mengembara) ke tempat lain, demikian seterusnya. Pada masa ini belum ada pertukaran, karena manusia hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri.



Gambar 2.2. Skema Stufen Theorien (Teori Tangga)

- 2) Masa beternak dan bertani
 Pada masa ini manusia sudah mulai menetap di suatu tempat, mereka memenuhi kebutuhan hidup dengan cara beternak dan bertani. Binatang buruan yang diperoleh sebagian dipelihara untuk diambil daging atau telurnya. Umbi-umbian, buah, sayuran dan tanaman lain yang disukai ditanam agar suatu saat bisa dipanen dan dijadikan bahan makanan. Karena tinggal menetap maka pada masa ini mulai timbul perkampungan atau desa-desa.
- 3) Masa bertani dan kerajinan
 Pada masa ini, selain bertani manusia sudah mulai mengembangkan kerajinan yang ada hubungannya dengan pertanian, seperti pandai besi dan pertukangan. Kerajinan dikerjakan untuk memanfaatkan waktu luang setelah mengerjakan pekerjaan bertani.
- 4) Masa kerajinan, industri dan perniagaan
 Pada masa ini, selain kerajinan manusia juga telah melakukan kegiatan industri (mendirikan pabrik-pabrik) dan perniagaan (perdagangan). Sehingga muncul kota-kota sebagai pusat industri dan perdagangan. Pada masa ini ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan yang cepat dan perdagangan tidak hanya bersifat nasional tetapi sudah bersifat internasional, karena didukung oleh alat-alat transportasi.

b. Karl Bucher (1847-1930)

Karl Bucher menguraikan pertumbuhan ekonomi suatu negara berdasarkan hubungan produsen dengan konsumen. Menurut Karl Bucher, pertumbuhan ekonomi dibagi menurut tahap-tahap berikut:

- 1) Masa rumah tangga tertutup
Masyarakat memproduksi hanya untuk memenuhi kebutuhan kelompok sendiri. Pada masa ini keluarga mereka masih sangat sederhana. Oleh karena itu, kehidupan masih bersifat tertutup dan belum ada pertukaran antar desa atau antar kelompok.
- 2) Masa rumah tangga kota
Pertumbuhan jumlah penduduk mengakibatkan kelompok atau desa tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya sendiri. Sehingga, timbul pertukaran antar desa yang disebut dengan perdagangan. Pada masa ini, sebagian kelompok masyarakat membangun tempat khusus sebagai pusat perdagangan dan industri yang disebut kota. Selanjutnya, timbul hubungan dagang antara desa dengan kota.
- 3) Masa rumah tangga bangsa (kemasyarakatan)
Sesuai perkembangan zaman, pertukaran yang terjadi di satu kota sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduknya. Kadang-kadang suatu kota tidak dapat menghasilkan satu jenis barang dan barang tersebut harus didatangkan dari kota lain, sehingga terjadilah kegiatan perdagangan antar kota. Perdagangan ini meluas ke seluruh kota sehingga terbentuk satu kesatuan masyarakat yang melakukan pertukaran perdagangan antar kota dalam satu negara atau dalam satu bangsa.
- 4) Masa rumah tangga dunia
Pada masa ini, pertukaran atau perdagangan sudah melewati batas-batas negara karena antar negara ternyata saling membutuhkan. Perdagangan antar negara juga didukung dengan kemajuan IPTEK yang memudahkan manusia berhubungan dengan negara lain.

c. Werner Sombart (1863 - 1947)

Sombart menguraikan pertumbuhan ekonomi menjadi empat tahap. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Prapitalisme (*Vorkapitalismus*)
Pada masa ini belum dikenal adanya kaum kapitalis atau paham kapitalis. Masyarakat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri dalam suasana

kekeluargaan. Di masa ini umumnya masyarakat hidup dari sektor pertanian dan kehidupan masih bersifat statis.

- 2) Kapitalis Madya (*Fruh Kapitalismus*)
Pada masa ini kehidupan sudah mulai dinamis. Manusia sudah mengenal uang dan mulai menumpuk keuntungan dan kekayaan. Suasana kekeluargaan mulai memudar, gaya hidup individualis perlahan-lahan merasuki masyarakat.
- 3) Kapitalis Raya (*Hoch Kapitalismus*)
Pada masa ini kehidupan hanya diarahkan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Maka, muncul para kaum kapitalis (kaum yang bermodal besar). Kaum ini menguasai alat-alat produksi untuk melakukan produksi secara besar-besaran. Sebagai akibat munculnya kaum kapitalis, muncul pula kaum buruh (pekerja).
- 4) Kapitalis Akhir (*Spot Kapitalismus*)
Akibat adanya kesenjangan kesejahteraan antara kaum kapitalis dan kaum buruh, pada masa ini muncul kaum sosialis yang ingin mewujudkan kesejahteraan bersama. Untuk itu, campur tangan pemerintah mutlak diperlukan untuk mengendalikan perekonomian. Akibatnya, peran kaum kapitalis terdesak oleh kaum sosialis.

d. Walt Whitman Rostow (1916 - 1979)

Dalam bukunya yang berjudul "The Stages of Economic Growth", WW Rostow menguraikan pertumbuhan ekonomi ke dalam beberapa tahap (masa), yaitu:

- 1) Masyarakat tradisional (*The traditional society*)
Pada masa ini kehidupan masih sangat tradisional, adat istiadat masih berperan kuat. Produksi masih menggunakan alat yang sederhana dan hanya mampu memproduksi dengan hasil yang terbatas.
- 2) Prasyarat untuk lepas landas (*Precondition for take off*)
Pada masa ini masyarakat mulai menyadari pentingnya dilakukan pembaharuan atau perubahan hidup. Mereka sudah tidak terpaku pada adat dan mulai menerima pemikiran-pemikiran baru, menerima inovasi-inovasi baru dan menerima perubahan cara-cara berproduksi. Akibat selanjutnya terjadilah perubahan struktur sosial, sistem politik dan struktur kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi mengalami perubahan dari agraris menjadi industri dan perdagangan. Sehingga, proses pertumbuhan ekonomi sudah mulai berlangsung dengan mantap dan negara dikatakan sudah siap menuju tahap lepas landas.

- 3) Lepas landas (*Take off*)
Pada masa ini pertumbuhan ekonomi terus berlangsung. Pada permulaan masa lepas landas, bisa terjadi revolusi politik, timbulnya pasar baru yang sangat luas dan muncul penemuan baru yang sangat banyak. Selanjutnya, terjadi kegiatan penanaman modal yang pesat dan mencapai 10% dari Produk Nasional Neto, terjadi kemajuan yang tinggi dalam sektor industri serta terwujudnya suatu kerangka dasar yang kuat untuk melanjutkan pertumbuhan ekonomi ke tahap berikutnya.
- 4) Perekonomian yang matang (*Maturity of Economic*)
Pada masa ini masyarakat sudah mampu menggunakan teknologi modern secara selektif sehingga faktor-faktor produksi dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Sektor dan industri pada masa ini merupakan sektor yang semakin penting, sedangkan sektor pertanian semakin menurun perannya. Kemudian, muncul tenaga-tenaga profesional di bidang industri. Perekonomian yang matang (dewasa) ditandai juga dengan kemampuan negara dalam menyelesaikan sendiri kesulitan ekonomi tanpa meminta bantuan dari negara lain.
- 5) Konsumsi tinggi (*High mass consumption*)
Masa konsumsi tinggi merupakan tahap pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi. Pada masa ini masyarakat telah mencapai kemakmuran. Masyarakat lebih memikirkan cara berkonsumsi untuk mengalokasikan penghasilannya yang melimpah, pendapatan per kapita riil yang sangat tinggi digunakan untuk konsumsi semua barang termasuk barang-barang mewah. Pada masa ini negara dan masyarakat tinggal berusaha untuk mempertahankan kemakmuran.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith, David Ricardo dan TR. Malthus. Berikut ini akan diuraikan satu per satu.

a. Adam Smith

Adam Smith adalah ahli ekonomi yang menulis buku "*The Wealth of Nation*" (kemakmuran suatu negara) yang sangat terkenal. Ia merupakan tokoh yang mengemukakan pentingnya sistem ekonomi liberal (bebas), yakni sistem ekonomi yang bebas dari campur tangan pemerintah yang diperkuat dengan semboyan "*Laissez Faire, Laissez Passer*". Adam Smith percaya bahwa dengan menggunakan sistem ekonomi liberal (bebas), pertumbuhan ekonomi dapat dicapai secara maksimum. Pertumbuhan ekonomi bisa dicapai dengan melibatkan dua unsur, yaitu:

- 1) Pertumbuhan penduduk.
- 2) Pertumbuhan output total.

Selanjutnya, pertumbuhan output yang berupa barang dan jasa dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu sumber-sumber alam, tenaga kerja, jumlah persediaan barang.

Agar terjadi pertumbuhan output, sumber-sumber alam harus dikelola oleh tenaga kerja dengan menggunakan barang modal. Sumber-sumber alam sangat penting untuk menentukan pertumbuhan ekonomi, karena sumber-sumber alam merupakan batas maksimum output jika sudah dimanfaatkan secara maksimum. Sumber-sumber alam mencapai batas maksimum apabila telah dikerjakan oleh tenaga kerja yang handal dengan menggunakan barang modal yang cukup.

b. David Ricardo dan TR Malthus

Pemikiran David Ricardo dan TR Malthus tidak sama dengan Adam Smith. Mereka mengkritik Adam Smith, bila Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar (hingga 2 kali lipat) bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang melimpah menyebabkan upah yang diterima menurun, di mana upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum (*subsistence level*). Pada taraf ini, perekonomian mengalami stagnasi (kemandegan) yang disebut *Stationary State*.

TR Malthus sependapat dengan David Ricardo dan mengemukakan bahwa bahan makanan bertambah menurut deret hitung (1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya), sedangkan penduduk bertambah menurut deret ukur (1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya). Akibatnya, bahan makanan tidak cukup untuk menghidupi penduduk, sehingga masyarakat hidup pada tingkat subsistence dan perekonomian mengalami kemandegan.

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik

Ada tiga tokoh Neoklasik yang akan dibahas, yakni Robert Solow, Harrod Domar serta Joseph Schumpeter.

a. Robert Solow

Robert Solow adalah ahli ekonomi yang memenangkan hadiah nobel pada tahun 1987. Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai jika ada pertumbuhan output. Pertumbuhan output terjadi jika dua

faktor input, yakni modal dan tenaga kerja dikombinasikan, sedangkan faktor teknologi dianggap konstan (tidak berubah). Adapun yang tergolong sebagai modal adalah bahan baku, mesin, peralatan, komputer, bangunan dan uang. Dalam memproduksi output, faktor modal dan tenaga kerja bisa dikombinasikan dalam berbagai model kombinasi. Sehingga, bisa dituliskan dalam rumus sebagai berikut:

$$Q = f(C, L)$$

Keterangan:

Q = Jumlah output yang dihasilkan

f = Fungsi

C = Capital (modal sebagai input)

L = Labour (tenaga kerja, sebagai input)

Rumus di atas menyatakan bahwa output (Q) merupakan fungsi dari modal (C) dan tenaga kerja (L). Ini berarti tinggi rendahnya output tergantung pada cara mengombinasikan modal dan tenaga kerja.

b. Harrod dan Domar

Harrod dan Domar mengemukakan perlunya pembentukan modal sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap (*steady growth*). Menurut mereka, bila pembentukan modal telah dilakukan pada suatu masa, maka pada masa berikutnya perekonomian akan sanggup memproduksi barang-barang dalam jumlah lebih besar. Keinginan masyarakat dalam pembentukan modal (berinvestasi) ditentukan oleh permintaan *agregat* (keseluruhan) dari masyarakat dan oleh MEC (*Marginal Efficiency of Capital*), yakni perbandingan antara pertambahan modal terhadap pertambahan output.

c. Joseph Schumpeter

Menurut Joseph Schumpeter pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada inovasi dari para pengusaha (wiraswasta). Dalam hal ini, inovasi merupakan penerapan pengetahuan dan teknologi yang baru di dunia usaha. Inovasi memiliki pengaruh sebagai berikut:

- 1) Diperkenalkannya teknologi baru.
- 2) Menimbulkan keuntungan yang lebih tinggi.
- 3) Menimbulkan imitasi inovasi, yaitu peniruan teknologi baru oleh pengusaha-pengusaha lain yang dapat meningkatkan hasil produksi.

E. Pembangunan Nasional

Sebagai negara berkembang, Indonesia sedang giat melakukan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang sudah kita bahas di depan adalah bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional mencakup semua aspek kehidupan yang meliputi pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan. Berikut ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan nasional.

1. Pengertian dan Tujuan Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan, yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara pembangunan nasional dan mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan.

Pembangunan nasional dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Untuk memberikan arah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut, MPR telah menetapkan GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara). Dengan demikian, GBHN merupakan pola umum Pembangunan nasional.

2. Pola dan Tahapan Pembangunan Nasional pada Masa Orde Baru

Sebagai pola umum pembangunan nasional, GBHN memuat:

- a. Pola dasar pembangunan nasional, seperti tujuan, landasan dan asas-asas pembangunan nasional.
- b. Pola umum pembangunan jangka panjang, yang berisi arah dan kebijakan pembangunan untuk 25 sampai dengan 30 tahun mendatang.
- c. Pola umum pembangunan 5 tahun, yang berisi arah dan kebijakan pembangunan untuk 5 tahun.

Selanjutnya, pola umum pembangunan lima tahun dituangkan dalam rencana operasional tahunan dalam bentuk pembuatan dan pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Agar jelas, berikut ini adalah skema pola-pola tahapan pembangunan Nasional.

Tabel 2.3 Pola dan Tahapan Pembangunan Nasional Orde Baru

Pola	Tahapan
1. Pola Dasar Pembangunan Nasional diubah)	Selamanya (Selama tidak
2. Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang	25 sampai dengan 30 tahun
3. Pola Umum Pembangunan Jangka Menengah	5 tahun
4. Pola Umum Pembangunan Jangka Pendek (Berupa APBN)	1 tahun

Indonesia melakukan pembangunan jangka panjang yang ke-1 selama 25 tahun, dimulai pada tahun 1969 sampai dengan tahun 1994 yang dijabarkan dalam 5 pelita, yakni pelita I, II, III, IV dan V. Sebagai gambaran, perhatikan prioritas pembangunan yang dilaksanakan selama pelita I sampai dengan V.

Tabel 2.4 Prioritas Pembangunan Pelita I sampai V

No.	PELITA	Jangka waktu	Prioritas
1.	PELITA I	1 April 1969 – 31 Maret 1974	Sektor pertanian dan Industri yang mendukung sektor pertanian
2.	PELITA II	1 April 1974 – 31 Maret 1979	Sektor pertanian dan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku
3.	PELITA III	1 April 1979 – 31 Maret 1984	Sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan usaha swasembada pangan.
4.	PELITA IV	1 April 1984 – 31 Maret 1989	Sektor pertanian dengan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri dan melanjutkan usaha swasembada pangan

5.	PELITA V	1 April 1989 – 31 Maret 1994	Sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya, dan sektor industri, khususnya industri yang menghasilkan barang untuk ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri.
----	----------	------------------------------	---

Dari tabel tampak bahwa selama pelita I sampai dengan V, sektor pertanian selalu menjadi prioritas pembangunan.

Hasil pembangunan jangka panjang yang ke-1 cukup memuaskan, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata di atas 6% per tahun. Akan tetapi, memasuki pembangunan jangka panjang ke-2, yakni pada pelita VI tepatnya pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang menyadarkan bangsa Indonesia tentang betapa rapuhnya fondasi ekonomi yang telah dibangun selama ini.

3. Pola dan Tahapan Pembangunan Nasional menurut GBHN Tahun 1999 (Masa Reformasi)

Pada pelita VI, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang memicu terjadinya reformasi dan pergantian pemerintah. Reformasi tersebut berpengaruh juga terhadap perubahan pola pembangunan nasional seperti yang terlihat pada GBHN tahun 1999.

GBHN 1999 - 2004 mengemukakan 5 masalah utama yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan di masa orde baru, yakni munculnya gejala disintegrasi bangsa dan merebaknya konflik sosial, lemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia, lambatnya pemulihan ekonomi, rendahnya kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya nasional, serta kurang berkembangnya kapasitas pembangunan daerah yang masyarakat.

Berdasarkan kelima masalah tersebut, GBHN tahun 1999 - 2004 berusaha melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pengembangan pembangunan untuk 5 tahun ke depan agar terwujud kemajuan di segala bidang. Oleh karena itu, penyelenggaraan negara dituangkan dalam PROPENAS (Program Pembangunan Nasional) yang ditetapkan presiden bersama DPR. Kemudian, PROPENAS yang berlaku selama 5 tahun dijabarkan dalam REPETA (Rencana Pembangunan Tahunan)

yang memuat APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) APBN ditetapkan oleh presiden bersama DPR.

PROPENAS berbeda dengan REPELITA yang disusun di masa orde baru. Jika REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) disusun sangat terinci dan menguraikan rencana seluruh sektor dan daerah selama 5 tahun, maka PROPENAS hanya memuat program-program pembangunan yang pokok, penting, mendasar dan mendesak untuk 5 tahun.

Seiring dengan penyusunan PROPENAS, tiap departemen dan pemerintah daerah juga menyusun RENSTRA (Rencana Strategis) dan PROPEDA (Program Pembangunan Daerah). Penyusunan RENSTRA tetap mengacu kepada PROPENAS. Adapun penyusunan PROPERDA, sejauh menyangkut komitmen nasional tetap mengacu kepada PROPENAS meskipun dimungkinkan adanya penekanan prioritas sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

Sebagai rencana pembangunan yang berskala nasional, PROPENAS memiliki 5 prioritas pembangunan nasional, yaitu:

- a. Membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan.
- b. Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih.
- c. Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.
- d. Membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya.
- e. Meningkatkan pembangunan daerah.

4. Masalah Pembangunan Ekonomi Indonesia

Secara umum, ada empat masalah yang harus dihadapi dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Keempat masalah tersebut dari tahun ke tahun selalu mendapat perhatian serius. Masalah yang paling serius diperhatikan pemerintah adalah masalah kemiskinan, apalagi menurut data PROPENAS terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dari 22,5 juta pada tahun 1996 menjadi 37,5 juta pada pertengahan tahun 1999. Keempat masalah tersebut adalah:

a. Kemiskinan

Program pengentasan kemiskinan sudah dilaksanakan sejak masa orde baru melalui berbagai bentuk program seperti INSUS (Intensifikasi Khusus), INMUM (Intensifikasi Umum), BIMAS (Bimbingan Massal), INMAS (Intensifikasi Massal), KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen), KUK (Kredit Usaha Kecil), Wajib Belajar, INPRES Desa yang dilanjutkan dengan INPRES Desa Tertinggal (IDT).

Selanjutnya, ada tiga program yang dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan, program-program ini langsung ditujukan kepada penduduk miskin, yakni:

- 1) Menyediakan kebutuhan pokok untuk keluarga miskin.
- 2) Mengembangkan sistem jaminan sosial.
- 3) Mengembangkan budaya masyarakat miskin.

b. Keterbelakangan

Secara umum, keterbelakangan yang diderita Indonesia meliputi rendahnya tingkat pendidikan, tingkat keterampilan, pemilikan modal, efisiensi dan efektivitas kerja, tingkat manajemen, dan kurang tersedianya infrastruktur. Semua faktor tersebut memiliki hubungan sebab akibat satu sama lain yang membentuk lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle*)

Adapun keterbelakangan di bidang ekonomi tampak dari rendahnya pendapatan per kapita, tingkat spesialisasi (pembagian kerja), penggunaan uang giral per kapita serta masih sempitnya pasar.

c. Lapangan Kerja

Jumlah pengangguran di Indonesia diupayakan terus berkurang dengan memperluas lapangan kerja. Akan tetapi, krisis ekonomi tahun 1997 semakin menambah jumlah pengangguran di Indonesia hingga mencapai 37,5 juta jiwa. Ditambah lagi dengan masih rendahnya kualitas angkatan kerja Indonesia; kurang lebih 64% dari angkatan kerja Indonesia memiliki pendidikan SD ke bawah.

Untuk mengatasi masalah di atas, pemerintah melakukan strategi kebijakan ketenagakerjaan yang meliputi:

- 1) Menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kebijakan ekonomi makro.
- 2) Meningkatkan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dengan menetapkan sistem pengupahan dan penjaminan kesejahteraan.
- 4) Meningkatkan perlindungan bagi pekerja.
- 5) Menata kembali sistem pelatihan, penempatan, pemantauan dan perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri.

d. Pemerataan Pembangunan

Untuk pemerataan pembangunan, harus dilihat komposisi penduduk dan wilayah Indonesia. Karena, sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan daerah (bukan di ibukota) maka pembangunan harus lebih

banyak diarahkan ke pedesaan dan daerah. Selain itu, dalam melakukan pembangunan pemerintah juga berpedoman pada “delapan jalur pemerataan”, yakni:

- 1) Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok terutama sandang, pangan dan papan.
- 2) Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
- 3) Pemerataan pembagian pendapatan.
- 4) Pemerataan kesempatan kerja.
- 5) Pemerataan kesempatan berusaha.
- 6) Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan wanita.
- 7) Pemerataan penyebaran pembangunan ke seluruh wilayah tanah air.
- 8) Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

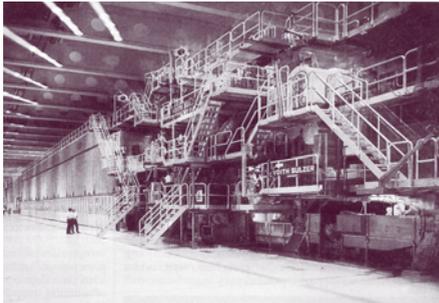
Dengan melihat delapan jalur pemerataan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia tidak hanya ditujukan pada pencapaian pendapatan per kapita yang tinggi dalam jangka panjang. Akan tetapi, pemerintah juga mengusahakan pemerataan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan seperti yang tampak pada delapan jalur pemerataan di atas. Karena, pencapaian pendapatan per kapita yang tinggi belum menjamin telah tercapainya pemerataan kesejahteraan, sebab pendapatan per kapita hanya merupakan angka rata-rata.

5. Dampak Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi yang dilakukan suatu negara memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf hidup
Dengan adanya pembangunan ekonomi, pendapatan per kapita meningkat sehingga daya beli masyarakat ikut meningkat. Meningkatnya daya beli dapat meningkatkan taraf hidup mereka.
2. Mempermudah hidup manusia
Adanya pembangunan ekonomi telah mendatangkan berbagai peralatan teknologi modern seperti komputer, handphone, satelit, mesin-mesin modern, kulkas, mesin cuci, AC dan peralatan elektronika lainnya. Semua peralatan tersebut sangat mempermudah hidup manusia.
3. Meningkatkan persediaan barang kebutuhan masyarakat
Dengan pembangunan ekonomi, PDB (Produk Domestik Bruto) meningkat. PDB yang meningkat berarti meningkat pula persediaan barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Meningkatkan sikap kesetiakawanan sosial
Dengan pembangunan ekonomi, kebutuhan hidup terutama yang primer dan sekunder bisa dipenuhi. Terpenuhinya kebutuhan hidup memberi kesempatan pada masyarakat untuk memikirkan nasib saudaranya yang tidak beruntung sehingga muncul usaha-usaha untuk mendirikan panti asuhan, rumah jompo dan lain-lain.
5. Meningkatkan jumlah kesempatan kerja



Sumber: *Tempo*, 23-29 Sep. 2002

Dengan pembangunan ekonomi berbagai unit produksi dibangun dan berbagai lembaga didirikan. Semua itu membutuhkan tenaga kerja baru yang lebih banyak, yang berarti menyerap tenaga kerja.

Gambar 2.3. Pembangunan ekonomi mampu meningkatkan jumlah kesempatan kerja.

Adapun dampak negatif dari pembangunan ekonomi adalah:

1. Sumber daya alam (SDA) yang tidak dapat diperbaharui suatu saat bisa habis atau musnah. Minyak bumi, emas, batubara dan sejenisnya suatu saat akan habis dieksploitasi manusia.
2. Lingkungan mengalami kerusakan fisik.
Eksplorasi yang tidak terkendali untuk memproduksi barang dan jasa bisa merusak lingkungan, seperti hutan jadi gundul dan ekosistem menjadi rusak.
3. Terjadi pencemaran air, udara, tanah dan suara.
Berbagai limbah dan efek samping seperti bisingnya suara pabrik dari pembangunan ekonomi bisa mencemari air, udara, tanah dan suara.
4. Kesehatan dan keselamatan manusia terancam.
Akibat pencemaran dan bencana alam yang disebabkan oleh kelalaian manusia dapat mengancam kesehatan dan keselamatan manusia. Air tercemar, udara kotor, kekeringan, banjir dan tanah longsor adalah contoh pencemaran dan bencana alam yang mengancam manusia akibat pembangunan ekonomi yang tidak sadar lingkungan.
5. Berubahnya gaya hidup
Pembangunan ekonomi yang tidak disertai dengan pemantapan keimanan dan jati diri, bisa mengubah gaya hidup masyarakat menjadi konsumtif, individualis, materialistis dan hedonistis.

I N F O

“Konsep Pembangunan Berkesinambungan Atasi Dampak Negatif Pembangunan Ekonomi”

Konsep pembangunan berkesinambungan telah lama menjadi sumber pemikiran dan ditekankan dalam *Bruntland Commission Report* (Laporan Komisi Bruntland) kepada PBB, yang mengimbau cara baru yang lebih radikal dalam mendorong pembangunan ekonomi untuk melestarikan lingkungan. Cara itu disebut pembangunan yang “memenuhi kebutuhan masa kini tanpa merugikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.” Pada tahun 1990, Maurice Strong, Sekretaris Jenderal *United Nations Conference on Environment and Development*, menjadi sponsor pembentukan *Business Council for Sustainable Development* (BCSD) untuk memikirkan bagaimana bisnis dapat mengadopsi pembangunan berkesinambungan sebagai produser operasional standar.

Sekali lagi, marilah kita melihat contoh CFC (*Chlorofluorocarbons*) dan kerusakan lapisan ozon. Pemikiran pembangunan berkesinambungan akan memberi tahu kita bahwa kalau kita terus memproduksi gas CFC, maka kita akan “merugikan kemampuan generasi masa depan”, karena perusakan ozon akan, paling sedikit, menyebabkan semakin banyak penderita kanker kulit, dan mungkin pengaruh yang lebih buruk. Pembangunan berkesinambungan memberi tahu kita untuk mengoordinasikan tindakan kita melewati batas perusahaan, geografi, dan politik misalnya pemerintah nasional mengadopsi perjanjian seperti Protokol Montreal, yang melarang produksi CFC setelah tanggal tertentu.

KEGIATAN 2.2

Coba kalian cari dan temukan dampak positif dan negatif lain yang diakibatkan oleh pembangunan ekonomi selain yang telah disebutkan di atas!

RANGKUMAN

Pembangunan Ekonomi

1. **Arti**
Proses yang bertujuan menaikkan pendapatan per kapita untuk jangka waktu yang panjang yang disertai dengan adanya perubahan struktur ekonomi dan perkembangan IPTEK. Pendapatan per kapita bisa naik bila persentase kenaikan PDB lebih besar dibanding persentase kenaikan jumlah penduduk.
2. **Bedanya dengan pertumbuhan ekonomi**
Pembangunan ekonomi jelas lebih luas dibanding pertumbuhan ekonomi, suatu negara yang telah mengalami pertumbuhan ekonomi belum tentu telah mencapai pembangunan ekonomi. Perbedaan secara terinci antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi bisa dilihat pada tabel halaman sebelumnya.
3. **Faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi**
 - a. SDA (Sumber Daya Alam)
 - b. SDM (Sumber Daya Manusia)
 - c. Model
 - d. Teknologi
4. **Pertumbuhan ekonomi di negara maju dan negara berkembang**
Secara umum pertumbuhan ekonomi di negara maju lebih rendah dibanding di negara berkembang.
Alasannya:
 - a. Perekonomian di negara maju sudah stabil dan hampir semua sumber daya sudah digunakan secara optimal sehingga tidak ada peningkatan PDB secara mencolok. Hal ini berkebalikan dengan negara berkembang. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi negara maju lebih rendah dibanding negara berkembang.
 - b. Karena rumus pertumbuhan ekonomi hanya melihat seberapa besar tambahan PDB satu tahun dibanding PDB tahun sebelumnya. Rumus pertumbuhan ekonomi tidak mempersoalkan seberapa besar nilai PDB suatu negara, akibatnya walau nilai PDB negara maju jauh lebih tinggi dibanding negara berkembang tetap saja pertumbuhan ekonomi negara maju lebih rendah dibanding negara berkembang.
5. **Teori Pertumbuhan Ekonomi**
 - a. Teori Pertumbuhan ekonomi historis

Frederich List	Werner Sombart
1) Masa berburu dan mengembara	1) Prakapitalisme
2) Masa beternak dan bertani	2) Kapitalis Madya
3) Masa bertani dan kerajinan	3) Kapitalis Raya
4) Masa kerajinan, industri dan perdagangan	4) Kapitalis Akhir

Karl Bucher	W.W. Rustow
1) Masa RT tertutup	1) Masyarakat tradisional
2) Masa RT kota	2) Prasyarat lepas landas
3) Masa RT bangsa	3) Lepas landas
4) Masa RT dunia	4) Perekonomian matang
	5) Konsumsi tinggi
 - b. Teori pertumbuhan ekonomi klasik oleh Adam Smith; David Ricardo dan TR Malthus
 - c. Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik oleh Robert Solow; Harrod dan Domar; Joseph Schumpeter

Pembangunan Nasional

1. **Arti**
Rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yakni mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
2. **Tujuan**
Untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.
3. **Pola dan Tahapan Pembangunan Nasional pada masa ORBA**
GBHN
Pola umum Pembangunan Nasional, memuat:

Pola	Tahapan
1. Pola Dasar Pembangunan Nasional	Selamanya (asal tak di rubah)
2. Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang	25 sampai dengan 30 tahun
3. Pola Umum Pembangunan Menengah	5 tahun
4. Pola Umum Pembangunan Jangka Pendek (Berupa APBN)	1 tahun
4. **Pola dan Tahapan Pembangunan Nasional Menurut GBHN 1999**
Ada beberapa perubahan = REPELITA diganti PROPENAS (Program Pembangunan Nasional). PROPENAS dijabarkan dalam REPETA (Rencana Pembangunan Tahunan) yang memuat APBN
5. **Masalah Pembangunan Ekonomi Indonesia**
Kemiskinan, Keterbelakangan, Lapangan Kerja dan Pemerataan Pembangunan
6. **Dampak Pembangunan Ekonomi**
 - a. Positif
Meningkatkan taraf hidup, meningkatkan jumlah kesempatan kerja, meningkatkan persediaan barang, meningkatkan kesetiakawanan sosial, dan mempermudah hidup manusia.
 - b. Negatif
SDA yang tidak dapat diperbaharui bisa habis, kerusakan fisik lingkungan, pencemaran air, udara, tanah dan suara, kesehatan dan keselamatan manusia terancam dan berubahnya gaya hidup.

Kata Kunci

<i>Adam Smith</i>	<i>pembangunan nasional</i>
<i>David Ricardo</i>	<i>pemerataan bangunan</i>
<i>economic growth</i>	<i>pertumbuhan ekonomi</i>
<i>Harrold Domar</i>	<i>PROPEDA</i>
<i>Joseph Schumpeter</i>	<i>PROPENAS</i>
<i>Karl Bucher</i>	<i>RENSTRA</i>
<i>kemiskinan</i>	<i>REPELITA</i>
<i>keterbelakangan</i>	<i>Robert Solow</i>
<i>lapangan kerja</i>	<i>T. R. Maltuhs</i>
<i>pembangunan ekonomi</i>	<i>Werner Sombart</i>

Evaluasi Akhir Bab

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Suatu keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kenaikan PDB (Produk Domestik Bruto) tanpa memandang apakah persentase kenaikan PDB lebih besar atau lebih kecil dibanding persentase kenaikan jumlah penduduk disebut
 - A. pembangunan ekonomi
 - B. penambahan ekonomi
 - C. pertumbuhan ekonomi
 - D. peningkatan ekonomi
 - E. pelonjakan ekonomi
2. Pembangunan ekonomi lebih luas dari pertumbuhan ekonomi karena pembangunan ekonomi
 - A. hanya menekankan pada kenaikan PDB
 - B. tidak memerhatikan persentase kenaikan jumlah penduduk
 - C. tidak memerhatikan pemerataan kesejahteraan penduduk
 - D. tidak memerhatikan perubahan struktur ekonomi
 - E. tidak hanya menekankan pada kenaikan PDB
3. Pertumbuhan ekonomi bisa dihitung dengan rumus:
 - A. $\frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$
 - B. $\frac{PDB_t}{PDB_{t-1}} \times 100\%$
 - C. $\frac{PDB_t}{PDB_t} \times 100\%$
 - D. $\frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_t} \times 100\%$
 - E. $\frac{PDB_t}{PDB_t} \times 100\%$
4. Yang bukan faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi adalah
 - A. SDM (Sumber Daya Manusia)
 - B. SDA (Sumber Daya Alam)
 - C. jumlah PDB
 - D. modal
 - E. teknologi
5. Pada umumnya pertumbuhan ekonomi negara maju jika dibandingkan dengan negara berkembang.
 - A. lebih rendah
 - B. lebih tinggi
 - C. sama tinggi
 - D. sama rendah
 - E. sama besar

6. Rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, rumah tangga dunia adalah tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menurut
 - A. Frederich List
 - B. Karl Bucher
 - C. Werner Sombart
 - D. WW. Rostow
 - E. Adam Smith

7. Masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas, lepas landas, perekonomian yang matang, konsumsi tinggi adalah tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menurut
 - A. Adam Smith
 - B. Robert Solow
 - C. Fredich list
 - D. Karl Busher
 - E. WW. Rostow

8. Menurut Joseph Schumpeter, pertumbuhan ekonomi terjadi bila
 - A. ada kemajuan ilmu pengetahuan
 - B. terjadi pertumbuhan tenaga kerja
 - C. ada inovasi dari para pengusaha
 - D. terjadi penambahan modal
 - E. terjadi penambahan mesin

9. Rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara disebut
 - A. perkembangan nasional
 - B. pembangunan nasional
 - C. pertumbuhan nasional
 - D. perbaikan nasional
 - E. penertiban nasional

10. Berkaitan dengan penyusunan PROPENAS, setiap departemen dan pemerintah daerah juga perlu membuat
 - A. RENSTRA dan PROPENAS
 - B. RENSDA dan PROPENAS
 - C. REPELITA dan RENSTRA
 - D. RENSTRA dan PROPERDA
 - E. RENSTRA dan PRODA

11. GBHN merupakan
 - A. pola umum pembangunan nasional
 - B. pola khusus pembangunan nasional
 - C. Pola dasar pembangunan nasional
 - D. pola umum pembangunan daerah
 - E. pola umum pembangunan semesta

12. Sejak masa reformasi REPELITA diganti dengan PROPENAS. REPELITA berbeda dengan PROPENAS karena
- A. PROPENAS memuat rencana seluruh sektor dan daerah selama 5 tahun
 - B. PROPENAS memuat rencana sektor dan daerah tertentu selama 5 tahun
 - C. PROPENAS hanya memuat program-program pembangunan yang pokok dan penting selama 5 tahun
 - D. REPELITA hanya memuat program-program pembangunan yang pokok dan penting selama 5 tahun
 - E. REPELITA hanya memuat rencana sektor dan daerah tertentu selama 5 tahun
13. Dalam rangka memberikan arah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, MPR menetapkan
- A. RAPBN
 - B. PELITA
 - C. GBHN
 - D. Propenas
 - E. APBD
14. Yang bukan merupakan agenda kebijakan PROPENAS adalah
- A. meningkatkan pembangunan daerah
 - B. membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan
 - C. membangun kesejahteraan rakyat dan kesatuan budaya
 - D. mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih
 - E. membangun citra sebagai bangsa yang berkeadilan sosial
15. Masalah utama yang harus dihadapi dalam pembangunan ekonomi di Indonesia adalah
- A. kemiskinan, keterbelakangan, penyakit dan pengangguran
 - B. lapangan kerja, keterbelakangan, kemiskinan dan pemerataan pembangunan
 - C. lapangan kerja, kejahatan, keamanan dan kemiskinan
 - D. lapangan kerja, kemiskinan, keamanan dan pendidikan
 - E. pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan pengangguran

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

1. Jelaskan perbedaan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi!

2. Negara A pada tahun 2000 memiliki PDB senilai US\$ 60.000 miliar dan pada tahun 2001 PDB mengalami kenaikan menjadi US\$ 75.000 miliar. Hitunglah pertumbuhan ekonomi negara A pada tahun 2001!
3. Jelaskan bagaimana SDM (Sumber Daya Manusia) mampu memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi!
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Lingkaran Setan Kemiskinan!
5. Mengapa pada umumnya pertumbuhan ekonomi di negara maju lebih rendah dibanding negara berkembang?
6. Sebutkan tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menurut:
 - a. Frederich List!
 - b. Werner Sombart!
 - c. WW Rostow
 - d. Karl Bucher
7. Jelaskan teori pertumbuhan ekonomi menurut:
 - a. Robert Solow
 - b. David Ricardo
 - c. TR Malthus
 - d. Adam Smith
 - e. Harrod dan Domar
 - f. Joseph Schumpeter
8. Uraikan tujuan pembangunan nasional!
9. Sebutkan 5 masalah utama yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan di masa Orde Baru menurut GBHN 1999-2004!
10. Sebutkan 5 macam program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan sejak masa Orde Baru!
11. Sebutkan berbagai strategi kebijakan ketenagakerjaan untuk mengatasi masalah pengangguran!
12. Dalam usaha pemeratakan pembangunan, pemerintah juga berpedoman pada delapan jalur pemerataan. Sebutkan delapan jalur pemerataan!
13. Jelaskan dampak-dampak positif pembangunan ekonomi!
14. Jelaskan dampak-dampak negatif pembangunan ekonomi!
15. Uraikan pendapatmu, bagaimana cara-cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi pencemaran air, udara, tanah dan suara.

C. UKA (Usut Kasus)

“Pencemaran Kulit Kerang oleh Mc Donalds”

Pada tahun 1990, McDonald’s menyadari posisinya berada di tengah-tengah perdebatan yang sengit sekitar kemasan makanan yang dipergunakannya. Inti dari perdebatan ini adalah kemasan model “kulit kerang” dari *polystyrene (styrofoam)* yang terkenal untuk membungkus hamburger dan produk makanan yang lain. Penentang kemasan model kerang mengatakan bahwa ini bukan metode kemasan yang bertanggung jawab pada lingkungan, dan bahwa metode yang “lebih hijau” tersedia dan bisa digunakan. *Citizens Clearinghouse for Hazardous Waste* bahkan

mengorganisasikan boikot terhadap McDonald's, dengan orang yang piket mengenakan pakaian badut "*Ronald Mc Toxic*".

Ini bukan kritikan pertama yang diangkat terhadap kemasan model kerang. Sebelumnya McDonalds pernah melawan tuntutan masyarakat pada akhir tahun 1980-an ketika suara menentang kemasan model kerang karena penggunaan *chlorofluorocarbon* (CFC)–senyawa kimia yang dianggap merusak lapisan ozon di stratosfer. Nasib dari kemasan model kerang pada mulanya diragukan, tetapi, pada tanggal 5 Agustus 1987, McDonald's mengumumkan bahwa mereka tetap dapat menggunakan kemasan model kerang, karena pemasoknya telah beralih ke proses produksi tanpa memakai CFC.

Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh perancang kemasan Gerstman & Meyers, 60 persen responden percaya bahwa kemasan plastik merupakan sumber yang menyebabkan masalah paling sulit dalam pembuangan sampah padat. Memikirkan jumlah *polystyrene* (plastik) yang digunakan oleh perusahaan– kira-kira 40 juta kilogram setiap tahun untuk membungkus Big Mac, Quarter Pounder, Egg McMuffin, pancake untuk sarapan, sandwich McChicken, dan Chicken McNugget–McDonald's dengan penjualan tahun 1990 lebih dari \$ 18 miliar, tentu menjadi target kemarahan kaum pencinta lingkungan.

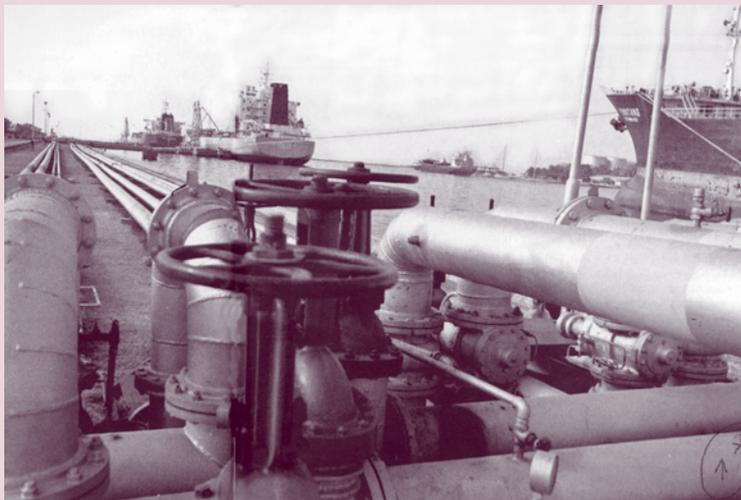
Ironinya adalah persepsi pelanggan bertentangan dengan kenyataan. Sebenarnya, plastik hanya bertanggung jawab sebanyak 8 persen dari berat total sampah padat kota, sedangkan kertas sebanyak 40 persen sedang 52% merupakan sampah jenis lain.

Setelah membaca informasi di atas, jawablah pertanyaan berikut:

1. Pembangunan ekonomi di manapun memiliki dampak. Di Amerika, kemasan kulit kerang McDonald's dipermasalahkan karena berdampak negatif terhadap lingkungan! Coba uraikan dampak negatif kemasan kulit kerang!
2. Mana sebenarnya yang lebih banyak, sampah plastik atau sampah kertas?
3. Menurut pendapatmu, cara apa saja yang bisa digunakan untuk menanggulangi sampah?

Bab III

APBN, APBD, dan Kebijakan Fiskal



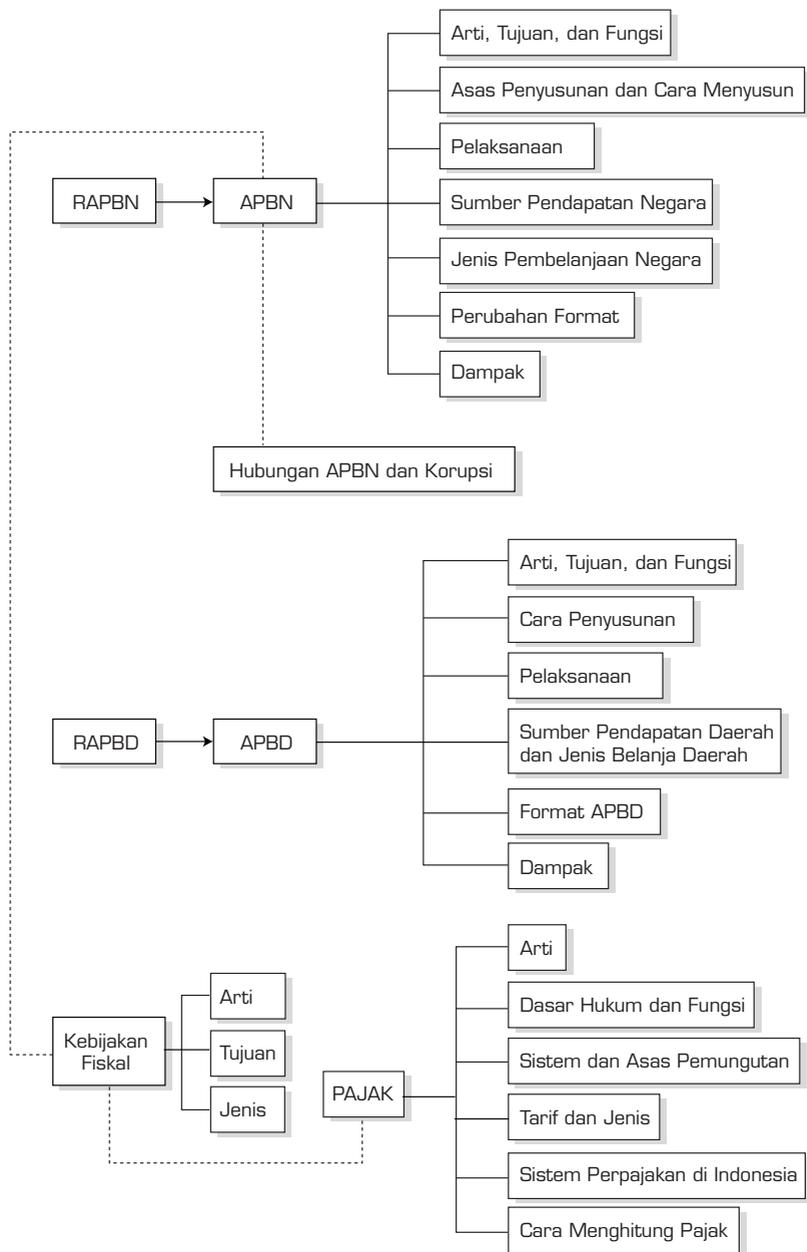
Sumber: *Tempa*, 13 Mei 2001

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat:

1. menguraikan arti, fungsi dan tujuan APBN dan APBD;
2. mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan negara dan daerah;
3. menguraikan pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian;
4. mendeskripsikan pengertian pajak dan fungsinya;
5. mengidentifikasi pajak dan pungutan resmi lainnya sebagai sumber pendapatan negara dan daerah;
6. menghitung pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan.

PETA KONSEP



Kita sering mendengar bahwa anggaran Indonesia selalu mengalami defisit (kekurangan). Defisit terjadi karena pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Defisit tersebut ditanggulangi pemerintah di antaranya dengan cara berutang ke luar negeri.

Secara teoretis, anggaran negara atau APBN yang defisit bukan merupakan hal jelek, dengan syarat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran (APBN) tidak berbau KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Namun yang menyedihkan, ternyata Indonesia adalah negara terkorup urutan pertama di kawasan ASEAN, dan negara terkorup urutan ke-6 dari 133 negara di dunia menurut penilaian lembaga TI (*Transparency International*). Bahkan menurut berita terakhir, saat ini Indonesia sudah berada di urutan ke-5 sebagai negara terkorup dari 146 negara di dunia.

Pertanyaan selanjutnya, mengapa APBN yang defisit bukan merupakan hal yang jelek? Dan, apa sebenarnya APBN itu? Apa hubungannya APBN dengan keuangan negara? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang harus dijawab.

A. Keuangan Negara

Seperti sebuah rumah tangga, negara perlu mengatur dan mengelola keuangannya dengan baik. Agar bisa memenuhi semua pengeluarannya, negara harus memiliki pendapatan atau penerimaan. Dari mana saja pendapatan atau penerimaan negara bisa diperoleh? Untuk apa saja pengeluaran yang dilakukan oleh negara? Bagaimana mengatasi pendapatan yang lebih kecil dibandingkan pengeluaran, perlukah negara berutang ke luar negeri? Itulah yang akan kita pelajari sekarang.

Mempelajari cara-cara negara memperoleh pendapatan dan cara-cara negara membelanjakannya berarti mempelajari keuangan negara. Jadi, keuangan negara adalah ilmu yang mempelajari cara-cara negara atau pemerintah memperoleh pendapatan serta cara-cara negara atau pemerintah melakukan pengeluaran serta pengaruh-pengaruhnya terhadap perekonomian.

B. APBN

Sumber-sumber pendapatan negara dan berbagai jenis pengeluaran negara dapat kita lihat pada APBN. APBN adalah Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara yang dibuat oleh pemerintah setiap tahun. Seperti apa APBN itu? Berikut ini kita akan mempelajarinya.

1. Arti dan Landasan Hukum APBN

APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sesuai dengan kepanjangannya, APBN dapat diartikan sebagai suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam waktu satu tahun.

Pada zaman Orde Baru (Orba), APBN dirancang dan dilaksanakan untuk satu tahun mulai 1 April - 31 Maret tahun berikutnya, misalnya mulai 1 April 1995 - 31 Maret 1996. Akan tetapi, sejak tahun 2000 (Era Reformasi), APBN dirancang dan dilaksanakan untuk satu tahun mulai 1 Januari - 31 Desember tahun yang sama.

APBN dirancang berdasarkan landasan hukum tertentu. Landasan hukum tersebut adalah sebagai berikut.

- a. UUD 1945 Pasal 23 (sesudah diamandemen) yang pada intinya berisi:
 - 1) APBN ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang.
 - 2) Rancangan APBN dibahas di DPR dengan memerhatikan pendapat Dewan Perwakilan Daerah.
 - 3) Apabila DPR tidak menyetujui rancangan anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah memakai APBN tahun lalu.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.

I N F O

Samakah Pendapatan Nasional dengan Pendapatan Negara?

Apabila salah seorang dari kalian tiba-tiba bertanya: “Apakah pendapatan Nasional yang kita pelajari di kelas X itu sama dengan Pendapatan Negara yang tercantum dalam APBN? Kalau tidak sama, lalu apa perbedaan Pendapatan Nasional dengan Pendapatan Negara?

Bagaimana? Mampukah kalian menjawab pertanyaan itu? Belum mampu? Kalau begitu, simaklah uraian berikut:

Berdasarkan pendekatan pendapatan, Pendapatan Nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima semua pemilik faktor produksi di suatu negara sebagai balas jasa penggunaan faktor-faktor produksi, selama satu tahun. Pemilik faktor-faktor produksi tersebut

terdiri dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan masyarakat luar negeri. Adapun yang dimaksud Pendapatan Negara, seperti yang tercantum dalam APBN adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima negara yang berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak yang akan digunakan negara untuk membiayai semua kebutuhannya.

Dari dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Nasional berbeda dengan Pendapatan Negara. Pendapatan Nasional lebih luas cakupannya dibandingkan pendapatan Negara. Dalam Pendapatan Nasional, pendapatan yang dihitung mencakup pendapatan yang diterima oleh semua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah (negara) dan masyarakat luar negeri, sedangkan Pendapatan Negara hanya merupakan penerimaan yang diperoleh suatu negara selama 1 tahun untuk membiayai kebutuhannya. Dan, sering kali dalam APBN diperlihatkan berapa persen jumlah Pendapatan Negara jika dibandingkan dengan pendapatan Nasional (dalam hal ini PDB/Produk Domestik Druto).

2. Tujuan dan Fungsi APBN

Berikut ini adalah penjelasan mengenai tujuan dan fungsi APBN.

a. Tujuan APBN

APBN disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan negara. Dengan adanya APBN, pemerintah sudah mempunyai gambaran yang jelas mengenai apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran apa saja yang harus dilakukan selama satu tahun. Dengan adanya APBN sebagai pedoman tersebut, diharapkan kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari. Dan, apabila APBN disusun dengan baik dan tepat, serta dilaksanakan sesuai aturan, maka akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan kemakmuran bangsa.

b. Fungsi APBN

Fungsi APBN meliputi:

1) Fungsi Alokasi

Dengan adanya APBN, pemerintah dapat mengalokasikan (membagikan) pendapatan yang diterima sesuai dengan sasaran yang

dituju. Misalnya, berapa besar untuk belanja (gaji) pegawai, untuk belanja barang, dan berapa besar untuk proyek.

2) Fungsi Distribusi

Dengan adanya APBN, pemerintah dapat mendistribusikan pendapatan yang diterima secara adil dan merata. Fungsi distribusi dilakukan untuk memperbaiki distribusi pendapatan di masyarakat sehingga masyarakat miskin dapat dibantu. Caranya, antara lain dengan melakukan kebijakan subsidi seperti subsidi BBM.

3) Fungsi Stabilisasi

Dengan adanya APBN, pemerintah dapat menstabilkan keadaan perekonomian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, dalam keadaan inflasi (harga barang dan jasa naik), pemerintah dapat menstabilkan perekonomian dengan cara menaikkan pajak. Dengan menaikkan pajak, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi sehingga harga-harga dapat kembali turun.

3. Cara Penyusunan serta Pelaksanaan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban APBN

Uraian berikut ini akan menjelaskan tentang cara-cara penyusunan APBN serta pelaksanaan dan pengawasannya.

a. Asas Penyusunan APBN

Asas penyusunan APBN adalah sebagai berikut:

- 1) Kemandirian, yang berarti pembiayaan negara didasarkan atas kemampuan negara, sedangkan pinjaman luar negeri hanya sebagai pelengkap.
- 2) Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas.
- 3) Penajaman prioritas pembangunan, yang berarti mengutamakan pembiayaan yang lebih bermanfaat.

b. Cara Penyusunan APBN

APBN disusun melalui cara-cara berikut ini.

- 1) Pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). RAPBN disusun pemerintah atas dasar usulan anggaran yang dibuat oleh setiap departemen atau lembaga negara yang diusulkan kepada pemerintah dalam bentuk DUK (Daftar Usulan Kegiatan) dan DUP (Daftar Usulan Proyek). DUK diusulkan untuk membiayai kegiatan rutin dan DUP diusulkan untuk membiayai pembangunan.

- 2) Pemerintah mengajukan RAPBN kepada DPR untuk dibahas.
- 3) DPR membahas RAPBN dengan dua tujuan: diterima atau ditolak.
- 4) Jika diterima, RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Namun, jika ditolak, pemerintah harus menggunakan APBN sebelumnya.

c. Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban APBN

Penjelasan tentang pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban APBN adalah sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan APBN
APBN yang sudah disahkan digunakan pemerintah sebagai pedoman pendapatan dan pengeluaran, sekaligus sebagai program kerja pemerintah selama satu tahun. Setiap pengeluaran harus berdasarkan DIK (Daftar Isian Kegiatan) dan DIP (Daftar Isian Proyek). Pembayaran DIK dan DIP dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) dalam bentuk SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) yang dapat ditukarkan dengan uang tunai.
- 2) Pengawasan APBN
Agar tidak terjadi penyimpangan, pelaksanaan APBN harus diawasi. Lembaga yang bertugas mengawasi APBN, di antaranya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai instansi pengawas tertinggi. Selain itu, masyarakat juga bisa turut serta mengawasi pelaksanaan APBN.
- 3) Pertanggungjawaban APBN
Pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN dalam bentuk PAN (Perhitungan Anggaran Negara) yang disampaikan kepada DPR untuk diteliti.

4. Sumber-Sumber Pendapatan Negara dan Jenis-Jenis Pembelanjaan Negara

Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pembelanjaan negara.

a. Sumber-Sumber Pendapatan Negara

Setiap negara pasti ingin memperoleh pendapatan yang sebanyak-banyaknya. Caranya, yaitu dengan menggali semua sumber pendapatan yang ada di negara tersebut. Sumber-sumber pendapatan tiap negara berbeda. Begitu juga Indonesia sebagai negara sektor migas (minyak dan gas). Namun, sejak harga BBM di dunia merosot pada tahun 1982,

pemerintah mulai mendorong sektor nonmigas agar mampu meningkatkan pendapatan negara. Mulai tahun 1984 penerimaan dari nonmigas terus meningkat dan pada tahun 1987 jumlahnya sudah seimbang dengan jumlah sektor migas. Selanjutnya, sumber-sumber pendapatan Indonesia berdasarkan APBN tahun 2001 adalah sebagai berikut.

- 1) Pendapatan Negara terdiri atas: penerimaan dalam negeri dan hibah.
- 2) Penerimaan dalam negeri berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak.

Tabel 3.1. Sumber-sumber pendapatan negara

Sumber-Sumber Pendapatan Negara	
I. Penerimaan Dalam Negeri	
A. Penerimaan Perpajakan	
1.	Pajak Dalam Negeri, terdiri dari:
a.	Pajak Penghasilan migas dan nonmigas
b.	Pajak Pertambahan Nilai
c.	Pajak Bumi dan Bangunan
d.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
e.	Cukai
f.	Pajak lainnya.
2.	Pajak Perdagangan Internasional, terdiri dari:
a.	Bea masuk
b.	Pajak/Pungutan ekspor
B. Penerimaan Bukan Pajak	
1.	Penerimaan SDA (Sumber Daya Alam), terdiri dari:
a.	Minyak bumi
b.	Gas alam
c.	Pertambangan umum
d.	Kehutanan
e.	Perikanan
2.	Bagian laba BUMN
3.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya.
II. Hibah	

Berdasarkan tabel 3.1 tampak bahwa pendapatan negara kita terdiri atas penerimaan dalam negeri dan hibah. Adapun penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak, di antaranya berupa penerimaan dari minyak bumi. Salah satu masalah yang dihadapi Indonesia pada tahun 2004 adalah meningkatnya harga minyak bumi di dunia. Secara kasar, harusnya peningkatan harga tersebut disambut

gembira oleh Indonesia sebagai negara pengeksport minyak bumi. Akan tetapi, kemampuan produksi minyak ekspor Indonesia ternyata lebih kecil dibandingkan jumlah konsumsi minyak dalam negeri. Sementara itu, naiknya harga minyak dunia justru akan merugikan Indonesia. Mengapa demikian? Karena kenaikan harga minyak dunia menyebabkan subsidi BBM yang harus dikeluarkan pemerintah semakin membengkak.

Agar lebih jelas seperti apa kerugian Indonesia, simaklah sekilas info berikut!

I N F O

Kenaikan Harga Minyak Bukan lagi Surga bagi Indonesia

Bagi negara produsen minyak, anggota OPEC seperti Indonesia sekalipun, drama kenaikan harga minyak tidak lagi disambut dengan rasa syukur. Dongeng tentang rezeki minyak, istilah yang selalu kita baca dalam setiap halaman surat kabar antara 1970-an dan 1980-an sudah jarang kita temukan lagi. Soalnya, produksi minyak terus menurun sebaliknya konsumsinya terus menanjak. Satu dari tiga liter BBM yang hari ini dibakar rakyat Indonesia harus didatangkan dari pasar minyak Asia di Singapura, Cina, sampai Nigeria.

Akibatnya, kenaikan harga di pasar internasional tak bisa lagi kita nikmati sebagai rezeki bonanza minyak seperti di masa lalu. Lonjakan harga justru menjadi tular yang menggerogoti simpanan cadangan devisa. Minyak yang selama ini menjadi sumber kekayaan devisa, kini berbalik menjadi ancaman terhadap kesehatan neraca pembayaran.

Lebih celaka lagi, harga minyak di dalam negeri belum sepenuhnya disetarakan dengan harga di pasar internasional. Melalui instrumen yang disebut subsidi energi, pemerintah terus menjadi bumper yang harus siap menomboki selisih harga minyak internasional dengan harga minyak domestik. Makin tinggi harga minyak di pasar dunia makin sempit ruang gerak pemerintah untuk melakukan manuver terhadap anggaran negara.

Tahun ini, dengan patokan harga minyak US\$ 35 per barel saja, dana subsidi yang harus disediakan melambung hingga mencapai Rp 63 triliun, melonjak hampir lima kali lipat dari jumlah yang sebelumnya dianggarkan. Jumlah yang kolosal itu setara dengan tiga kali lipat anggaran yang disediakan untuk subsidi pendidikan nasional. Semakin sering harga minyak bergejolak, semakin kerap kita harus menyesuaikan pos-pos dalam APBN.

Di atas semua itu, subsidi minyak mematikan upaya pencarian sumber energi alternatif. Harga minyak di pasar lokal yang terus menerus dibuat murah, membuat kita tak punya gairah untuk mengeksplorasi sumber energi yang lebih masuk akal.

Tak ada cara lain, subsidi bahan bakar harus dihentikan agar dasar-dasar perekonomian menjadi lebih sehat. Namun, penghapusan yang tiba-tiba bukan hanya meledakkan keguncangan politik, tapi juga melahirkan gempa ekonomi.

b. Jenis-Jenis Pembelanjaan Negara

Pembelanjaan atau pengeluaran negara sebaiknya diupayakan sama dengan pendapatan negara. Namun, pada kenyataannya sering kali pengeluaran negara lebih besar daripada pendapatan negara sehingga negara mengalami defisit (kekurangan). Untuk menutupi kekurangan tersebut, negara bisa melakukan privatisasi (menjual saham perusahaan negara kepada masyarakat), menjual aset negara, menerbitkan obligasi (surat pengakuan utang), serta berutang ke luar negeri.

Tabel 3.2. Jenis-jenis belanja negara

Jenis-Jenis Belanja Negara	
I.	Belanja Pemerintah Pusat
A.	Pengeluaran Rutin
1.	Belanja Pegawai
2.	Belanja Barang
3.	Pembayaran Bunga Utang
a.	Utang Dalam Negeri
b.	Utang Luar Negeri
4.	Subsidi
a.	Subsidi BBM
b.	Subsidi Non-BBM
5.	Pengeluaran rutin lainnya
B.	Pengeluaran Pembangunan
1.	Pembiayaan pembangunan rupiah
2.	Pembiayaan proyek
II.	Belanja Daerah (Dana Perimbangan)
A.	Dana Bagi Hasil
B.	Dana Alokasi Umum
C.	Dana Alokasi Khusus

Jika dilihat dari sifatnya, belanja atau pengeluaran negara dapat dibedakan menjadi dua macam:

- 1) Pengeluaran yang bersifat *eksklusatif*, yaitu pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang dapat langsung dikonsumsi atau dapat menghasilkan barang lain.
- 2) Pengeluaran yang bersifat transfer, yaitu pengeluaran yang berbentuk dana bantuan sosial, seperti subsidi atau sumbangan kepada korban bencana alam dan hadiah-hadiah kepada negara lain.

5. Perubahan Format APBN

Sejak Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, format APBN mulai April tahun 2000 mengalami perubahan-perubahan sebagai berikut.

a. Perubahan Periode Anggaran

Pada masa pemerintahan Orba, periode anggaran dimulai 1 April - 31 Maret tahun berikutnya. Sejak pemerintahan Abdurrahman Wahid, periode tersebut diubah menjadi 1 Januari - 31 Desember tahun yang sama. Akibat perubahan ini, khusus tahun 2000 APBN berlaku hanya sembilan bulan, yaitu 1 April - 31 Desember tahun 2000. Perubahan ini memudahkan siapa pun untuk menganalisis kinerja perekonomian Indonesia, baik dalam skala nasional maupun internasional.

b. Perubahan Struktur Penyajian

Perubahan struktur penyajian APBN Indonesia disesuaikan dengan standar yang berlaku dalam *Government Finance Statistics* (GFS) atau Statistik Keuangan Pemerintah. Perubahan struktur penyajian tersebut meliputi:

- 1) Struktur APBN dengan tegas memisahkan unsur-unsur sebagai berikut:
 - a) pendapatan negara dan hibah,
 - b) belanja negara,
 - c) defisit/surplus, dan
 - d) pembiayaan.

Pada APBN sebelum tahun 2000 unsur defisit surplus dan unsur pembiayaan tidak tercantum secara jelas dalam APBN. Di samping itu, pada APBN sebelum tahun 2000 walaupun negara mengalami defisit, defisit tersebut tidak tercantum dengan jelas, karena pada saat itu utang kepada luar negeri masih dianggap sebagai penerimaan negara. Dengan struktur APBN yang baru, defisit tersebut akan tampak dengan jelas.

- 2) Pinjaman Luar Negeri tidak lagi dianggap sebagai komponen Penerimaan Negara (seperti yang terjadi pada APBN sebelum tahun 2000). Pinjaman Luar Negeri sekarang dianggap sebagai komponen Pembiayaan. Ini terjadi karena mulai APBN tahun 2000, yang dimaksud dengan Penerimaan Negara adalah semua penerimaan yang tidak wajib dibayar kembali oleh pemerintah. Karena pinjaman luar negeri wajib dibayar kembali, maka hal itu tidak digolongkan sebagai penerimaan negara.

Adapun unsur pembiayaan muncul dengan tujuan:

- 1) Apabila APBN mengalami defisit, unsur Pembiayaan akan menjelaskan bagaimana cara menutup defisit, misalnya dengan cara berutang ke luar negeri.
- 2) Apabila APBN mengalami surplus, unsur pembiayaan akan menjelaskan bagaimana surplus (kelebihan) itu akan digunakan (dibelanjakan). Agar lebih jelas, perhatikan contoh-contoh APBN berikut ini yang menggambarkan APBN sebelum dan sesudah tahun 2000!

Tabel 3.3. APBN 1998/1999

Penerimaan		Pengeluaran	
A. Pen. Dalam Negeri	149.302.500	A. Pengeluaran Rutin	171.205.100
I. Penerimaan Migas	49.711.400	I. Belanja Pegawai	24.781.400
1. Minyak bumi	32.908.600	1. Gaji/Pensiun	19.120.000
2. Gas alam	16.802.800	2. Tunjangan Beras	1.872.400
II. Pen. Bukan Migas	99.591.100	3. Uang makan/Lauk Pauk	1.484.400
1. PPh	25.846.200	4. Lain-lain Belanja Pegawai	1.154.600
2. PPN	28.940.000	Dalam Negeri	1.150.000
3. Bea masuk	5.494.900	5. Belanja Pegawai	11.425.100
4. Cukai	7.775.900	Luar Negeri	10.059.700
5. Pajak ekspor	942.800	II. Belanja Barang	13.289.700
6. PBB dan BPHTB	3.411.000	1. Belanja Barang	10.059.700
7. Pajak lainnya	540.000	Dalam Negeri	1.365.400
8. PNBPN	26.660.300	2. Belanja Barang luar Negeri	1.365.400
a. PNBPN murni	-	III. Belanja Rutin Daerah	13.289.700
b. Privatisasi	-	1. Belanja Pegawai	12.606.500
c. Asset Recovery	-	2. Belanja Nonpegawai	683.200
9. LBM	-	IV. Bunga dan Cicilan Hutang	66.236.400
		1. Dalam Negeri	1.940.100
		2. Luar Negeri	64.296.300
		a. Pokok	33.261.500
		b. Bunga	31.034.800
		V. Subsidi	55.472.500
		1. BBM	27.534.000
		a. Murni	-
		b. Tunggakan	-

		2. Non-BBM	27.938.500
		a. Murni	-
		b. Tunggakan	-
		IV. Lain-lain	-
B. Pen. Luar Negeri	114.585.600	B. Pengel. Pembangunan	92.683.000
I. Pinjaman Program	74.044.700	I. Pembiayaan rupiah	52.142.100
		1. Angg. yang didaerahkan	
		2. Angg. yang dikelola oleh pusat	
		3. Restrukturisasi perbankan	
II. Pinjam Proyek	40.540.900	II. Pembiayaan proyek	40.540.900
Jumlah	263.888.00	Jumlah	263.888.100

Sumber: diolah dari BPS

Cat.:

Beda pinjaman program dengan pinjaman proyek

- a. Pinjaman program = pinjaman yang digunakan untuk membiayai program-program yang ditentukan bebas oleh pemerintah.
- b. Pinjaman proyek = pinjaman yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang sudah disepakati antara pemerintah dengan pemberi pinjaman.

Tabel 3.4 APBN 2001

	APBN Penyesuaian	Persen terhadap PDB
A. Pendapatan Negara dan Hibah	286.006,1	19,5
I. Penerimaan dalam Negeri	286.000,1	19,5
1. Penerimaan Perpajakan	185.260,2	12,6
a. Pajak dalam Negeri	174.254,8	11,9
i. Pajak Penghasilan	94.970,5	6,5
- Migas	25.725,0	1,7
- nonmigas	69.245,5	4,7
ii. Pajak pertambahan nilai	53.456,5	3,6
iii. Pajak bumi dan bangunan	5.094,4	0,3
iv. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	1.195,0	0,1
v. Cukai	17.600,6	1,2
vi. Pajak lainnya	1.937,8	0,1
b. Pajak perdagangan internasional	11.005,4	0,7
i. Bea masuk	10.398,1	0,7
ii. Pajak/pungutan ekspor	607,3	0,0
2. Penerimaan Bukan Pajak (SDA migas)	100.745,0	6,9
a. Penerimaan SDA	79.446,2	5,4
i. Minyak bumi	57.857,1	3,9
ii. Gas alam	17.368,7	1,2
iii. Pertambangan umum	928,1	0,1
iv. Kehutanan	3.000,6	0,2
v. Perikanan	291,1	0,0
b. Bagian laba BUMN	9.000,0	0,6
c. PNPB lainnya	121,7	0,8

II. Hibah	0,0	0,0
B. Belanja Negara	340.325,8	23,2
I. Belanja Pemerintah pusat	258.849,2	17,7
1. Pengeluaran rutin	213.387,8	14,6
a. Belanja pegawai	38.206,4	2,6
b. Belanja barang	9.909,1	0,7
c. Pembayaran bunga utang	89.569,7	6,1
i. Utang dalam negeri	61.174,3	4,2
ii. Utang luar negeri	28.395,4	1,9
d. Subsidi	66.269,3	4,6
i. Subsidi BBM	53.774,0	3,7
ii. Subsidi non-BBM	12.495,3	0,9
e. Pengeluaran rutin lainnya	9.433,2	0,6
2. Pengeluaran Pembangunan	45.461,4	3,1
a. Pembiayaan pembangunan rupiah	21.712,1	1,5
b. Pembiayaan proyek	23.749,3	1,6
II. Dana perimbangan	81.476,6	5,5
1. Dana bagi hasil	20.259,3	1,4
2. Dana alokasi umum	60.516,7	4,1
3. Dana alokasi khusus	700,6	0,0
C. Keseimbangan Primer (A-(b-BI.1c))	35.250,0	2,4
D. Surplus/Defisit Anggaran (A-B)	-54.319,7	-3,7
E. Pembiayaan (E.L + W.II)	54.319,7	3,6
I. Dalam Negeri	34.386,7	2,3
1. Perbankan dalam negeri	0,0	0,0
2. Non-Perbankan dalam negeri	34.386,7	2,3
a. Privatisasi	6.500,0	0,4
b. Penjualan aset program Restrukturisasi perbankan	27.000,0	1,8
c. Obligasi negara (neto)	886,7	0,1
i. Penerbitan obligasi	886,7	0,1
ii. Pembayaran cicilan pokok	0,0	0,0
II. Luar Negeri	19.933,0	1,3
1. Pinjaman	23.749,3	1,6
2. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri	-20.157,7	-1,4
3. Pinjaman program dan penundaan cicilan uang	16.341,4	1,1

Sumber : BPS

6. Dampak APBN terhadap Perekonomian

Keberadaan APBN mempunyai dampak (pengaruh) besar terhadap perekonomian. Tanpa adanya APBN, negara tidak memiliki pedoman dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, termasuk dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, serta tidak memiliki alat (sarana) yang tepat untuk memperbaiki perekonomian. Secara rinci, dampak atau pengaruh APBN terhadap perekonomian adalah sebagai berikut:

- a. APBN memberi pedoman bagi kegiatan pembangunan ekonomi. Misalnya, jika dalam APBN prioritas pembangunan ditujukan pada bidang industri maka pemerintah tentu akan lebih banyak melakukan pembangunan di bidang industri.
- b. APBN dapat digunakan sebagai alat perbaikan perekonomian. Apabila negara mengalami gejala ekonomi yang buruk, APBN dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian. Contohnya, pada tahun 1982, Indonesia melihat harga BBM dunia terus menurun. Menurunnya harga BBM adalah pertanda buruk bagi Indonesia, karena Indonesia sangat menggantungkan penerimaan pada sektor migas. Untuk memperbaiki keadaan tersebut, pada penyusunan APBN selanjutnya, pemerintah berusaha keras meningkatkan penerimaan dari sektor nonmigas, misalnya meningkatkan penerimaan sektor pajak. Penerimaan sektor pajak dapat ditingkatkan di antaranya dengan cara memperbaiki sistem pemungutan pajak di Indonesia. Kini terbukti, pajak menjadi sektor andalan bagi penerimaan negara (70% lebih penerimaan Indonesia diperoleh dari sektor pajak). Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa APBN dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian.
- c. APBN dapat memengaruhi perubahan harga secara keseluruhan. Jika dalam penyusunan APBN pemerintah menurunkan atau menghilangkan subsidi BBM, berarti harga BBM akan naik. Kenaikan harga BBM akan diikuti dengan kenaikan harga barang dan jasa lain yang banyak dibutuhkan masyarakat. Itu berarti, APBN dapat memengaruhi perubahan harga secara keseluruhan.
- d. APBN dapat memengaruhi tingkat produktivitas perusahaan. Misalnya, untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah menaikkan tarif pajak ekspor. Kenaikan tersebut akan memengaruhi sikap para eksportir. Jika tarif pajak ekspor dianggap terlalu tinggi maka bisa menurunkan produktivitas para eksportir. Akibatnya, jumlah ekspor menjadi menurun. Sebaliknya, jika pemerintah menurunkan tarif pajak ekspor, para eksportir justru akan lebih meningkatkan ekspornya.
- e. APBN dapat memengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang tidak merata dan tidak adil bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial yang tinggi suatu saat bisa meledak dan menimbulkan kerusuhan seperti perusakan dan pembakaran. Perusakan dan pembakaran akan memengaruhi kinerja perekonomian nasional. Dalam hal ini, APBN bisa digunakan sebagai alat untuk memengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan, misalnya dengan melakukan kebijakan subsidi, baik subsidi BBM atau subsidi non-BBM. Subsidi tersebut diberikan bagi pihak yang membutuhkan. Saat ini, subsidi BBM diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk pemberian Raskin

(beras untuk rakyat miskin), penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Selain subsidi, pemerintah juga bisa menggunakan pajak untuk memengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan.

I N F O

Penghentian Pembayaran Utang dan Penerimaan Hibah

Pemerintah telah menghentikan pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo antara Januari-Maret 2005 senilai 350 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp3,238 triliun. Pemerintah menyurati 19 negara anggota *Paris Club* untuk meminta agar pinjaman yang ditunda pembayarannya itu tidak dikenakan beban bunga berlipat yang sangat memberatkan.

Demikian diungkapkan Menteri Keuangan Jusuf Anwar Jusuf mengatakan, sejak Januari 2005 hingga Februari 2005, pemerintah sudah menghentikan pembayaran bunga serta pokok pinjaman pada negara-negara anggota *Paris Club*. Pembayaran itu akan dilakukan nanti. Tergantung pada *maturity*-nya (jangka waktu), termasuk untuk bulan Maret. "Permohonan saya itu akan mereka bahas, mereka akan sepakat dan jawabannya akan seragam. Itu merupakan jawaban mereka atas permintaan itu," kata Jusuf.

Sementara terkait dengan komitmen hibah Pemerintah Australia dan Jepang, Jusuf menegaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti komitmen hibah itu hingga dapat dicairkan. Tindak lanjut atas hibah dari kedua negara itu akan dilakukan oleh pemerintah pada bulan Maret 2005, Australia memberikan 500 juta dolar Australia dalam bentuk hibah dan 500 juta dolar Australia lainnya berbentuk pinjaman lunak. Saya akan ke Sydney untuk memastikan bentuk-bentuk teknis pencairannya, termasuk tingkat bunga pinjamannya, dan memastikan ada persyaratan atau tidak, kata Jusuf.

Sementara untuk hibah dari Pemerintah Jepang senilai 146 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp1,35 triliun, Jusuf mengatakan, bantuan itu sudah tersedia untuk Indonesia sejak bulan Januari 2005. Bantuan tersebut disimpan dalam rekening Pemerintah Indonesia di Bank of Tokyo Mitsubishi dan hanya dapat dicairkan setelah desain lengkap tentang pembangunan kembali Aceh dan Sumatera Utara selesai disusun oleh pemerintah.

Sumber Kompas

KEGIATAN 3.1

Coba diskusikan dengan kelompokmu, apa lagi dampak APBN terhadap perekonomian selain yang sudah disebutkan di atas?

Jika ada, tulis dan uraikan dalam buku tulis untuk dipresentasikan di depan kelas dan didiskusikan bersama guru dan seluruh siswa.

7. Hubungan Korupsi dengan APBN

Seperti sudah dijelaskan dalam pengantar bab ini, Indonesia ternyata adalah negara terkorup urutan pertama di kawasan ASEAN, sekaligus negara terkorup urutan keenam dari 133 negara di dunia. Berarti, korupsi telah membudaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya, kita tidak ingin sebutan seperti itu melekat selamanya pada bangsa ini. Tidak ada kata terlambat untuk berubah.

Korupsi berasal dari kata *corrupt* (bahasa Inggris) yang berarti jahat, rusak, mengubah, menyuap, atau menyalahgunakan. Kata korupsi sering disandingkan dengan kata kolusi dan nepotisme. Kolusi adalah kerja sama antar penyelenggara negara atau kerja sama antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang bisa merugikan negara, masyarakat, atau orang lain. Nepotisme adalah perbuatan penyelenggara negara yang menguntungkan dengan mengutamakan kepentingan keluarga atau kroninya sehingga merugikan negara, masyarakat, atau orang lain. KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) bagaimanapun bentuknya sangat merugikan dan perlu diberantas. Dalam pembahasan selanjutnya, akan kita batasi hanya pada masalah korupsi.

Berikut ini akan diuraikan bagaimana APBN bisa dikorupsi. Sudah banyak kasus yang diangkat di media massa. Jika dikelompokkan, ada dua macam tindakan korupsi dalam APBN.

- a. Korupsi dari sisi pendapatan negara dilakukan dengan cara:
 - 1) Ada sebagian pendapatan negara yang tidak dilaporkan (digelapkan) untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Misalnya: kasus penggelapan pajak.
 - 2) Menghindari pembayaran pajak, termasuk bea, atau cukai. Hal ini bisa dilakukan dengan cara penyelundupan. Barang yang diselundupkan ke luar negeri, tentu terbebas dari tarif pajak ekspor. Begitu juga, barang yang diselundupkan ke dalam negeri tentu terbebas dari tarif pajak impor. Dengan demikian, kegiatan penyelundupan merugikan negara dari sisi pendapatan.

- b. Korupsi dari sisi Pembelanjaan Negara dilakukan dengan cara:
- 1) Melaporkan pembelanjaan lebih besar daripada nilai sebenarnya yang disebut dengan istilah *mark up*.
 - 2) Melaporkan pembelanjaan fiktif (pembelanjaan yang sebenarnya tidak pernah terjadi). Hal ini dilakukan dengan cara memalsukan dokumen-dokumen.
 - 3) Mengurangi jatah pembelanjaan, misalnya yang seharusnya senilai Rp x, tetapi dikurangi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini bisa juga disebut dengan istilah pungli (pungutan liar). Coba kalian baca contohnya di sekilas info.
 - 4) Mengalihkan suatu pembelanjaan ke bentuk lain yang tidak sesuai aturan. Misalnya, mengalihkan pembelanjaan bencana alam menjadi pembelanjaan pembangunan rumah dinas pegawai.

I N F O

Contoh tentang betapa Jahatnya Korupsi

Mengapa korupsi bisa menghambat kemajuan? Mengapa korupsi bisa menggerogoti bangsa? Dua pertanyaan tersebut barangkali muncul di benak kalian. Sejahat apa korupsi itu sehingga PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pun merasa perlu mencanangkan hari Anti Korupsi Sedunia?

Berikut ini akan diberikan dua contoh tentang betapa jahatnya korupsi.

Contoh pertama

Kita sering mendengar isu penerimaan CPNS yang diwarnai KKN. Salah satu penerimaan CPNS tersebut adalah untuk profesi guru. Kita tahu bahwa masa depan suatu bangsa tergantung kualitas generasi mudanya, dan guru merupakan salah satu profesi strategis yang berperan besar dalam membentuk kualitas generasi muda. Ada kejadian beberapa waktu lalu di mana seorang guru yang telah diterima tes CPNS (diduga secara KKN), bahkan tidak mampu mengisi formulir pendaftaran. Nah, akan jadi apa bangsa ini jika gurunya seperti itu?

Contoh ke dua

Misalnya ada rumah tangga A, meminjam uang 100 juta ke bank untuk membuka *home industry*. A mengangkat 10 pegawai dengan B sebagai pemimpinnya. Setelah 6 bulan perusahaan A semakin mundur

dan tidak mampu membayar utang. Mengapa ini terjadi? Karena di perusahaan A banyak terjadi korupsi. Agar perusahaan tidak ditutup, A meminjam uang lagi 70 juta, dan mengganti B dengan C sebagai pemimpin karyawan. Ternyata, C tidak lebih baik, korupsi tetap merajalela. Jadilah A “tutup lubang gali lubang” untuk membayar utang-utangnya. Mungkin seperti inilah gambaran Indonesia. Sering kali para pemimpin hanya memikirkan dirinya dan kelompoknya saja tanpa memikirkan nasib bangsa ini untuk jangka panjang.

C. APBD

Setiap daerah, baik Tingkat I (Propinsi) ataupun Tingkat II (Kota dan Kabupaten) harus menyusun APBD. Berikut ini akan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan APBD.

1. Arti dan Landasan Hukum APBD

APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD dapat diartikan sebagai suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan daerah dan macam-macam pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 mengartikan APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Adapun landasan hukum penyusunan APBD adalah:

- a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah pasal 25 yang berbunyi: Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang ..., menyusun dan mengajukan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
- b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 4 yang berbunyi: Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai APBD. APBD harus disusun Pemerintah Daerah setiap tahun, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah:
 - 1) Gubernur dan perangkatnya yang memerintah daerah propinsi.
 - 2) Walikota dan perangkatnya yang memerintah daerah kota (dulu disebut Kotamadya).
 - 3) Bupati dan perangkatnya yang memerintah daerah kabupaten.

- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan, dan Penghitungan APBD.

2. Tujuan dan Fungsi APBD

Seperti halnya dalam APBN, APBD pun memiliki tujuan dan fungsi-fungsi. Berikut ini adalah penjelasan tentang tujuan dan fungsi-fungsi APBD.

a. Tujuan APBD

APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya APBD, pemerintah daerah sudah memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran apa saja yang harus dikeluarkan, selama satu tahun. Dengan adanya APBD sebagai pedoman, kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari.

b. Fungsi APBD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003, pasal 66, APBD memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi Otorisasi
Fungsi otorisasi berarti APBD menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- 2) Fungsi Perencanaan
Fungsi perencanaan berarti APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- 3) Fungsi Pengawasan
Fungsi pengawasan berarti APBD menjadi pedoman untuk menilai (mengawasi) apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 4) Fungsi Alokasi
Fungsi alokasi berarti APBD dalam pembagiannya harus diarahkan dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- 5) Fungsi Distribusi
Fungsi distribusi berarti APBD dalam pendistribusiannya harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3. Cara Penyusunan APBD serta Pelaksanaan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban APBD

Selanjutnya akan dijelaskan cara-cara atau tahap-tahap penyusunan APBD serta pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban APBD.

a. Cara Penyusunan APBD

APBD disusun melalui cara-cara atau tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Pertama, pemerintah daerah menyusun RAPBD (Rancangan APBD). RAPBD disusun pemerintah daerah atas dasar usulan dari setiap perangkat belanja administrasi dan umum 326.928.112 daerah yang diusulkan dalam bentuk RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja).
- 2) Pemerintah daerah mengajukan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas. Sebelum membahas RAPBD, DPRD menyosialisasikan RAPBD kepada masyarakat untuk mendapat masukan. Masukan tersebut dicatat dan akan dibukukan sebagai lampiran.
- 3) DPRD membahas RAPBD bersama dengan Tim Anggaran Eksekutif.
- 4) RAPBD yang telah disetujui DPRD disahkan menjadi APBD untuk dilaksanakan.

b. Pelaksanaan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban APBD

Berikut ini adalah penjelasan tentang pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban APBD.

- 1) Pelaksanaan APBD
Berdasarkan APBD yang sudah disahkan, Kepala Daerah menetapkan RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) menjadi DASK (Daftar Anggaran Satuan Kerja). DASK yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah inilah yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan semua pengguna anggaran.
- 2) Pengawasan APBD
Agar tidak terjadi penyimpangan, pelaksanaan APBD harus diawasi. Lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan APBD adalah DPRD dan pejabat internal yang diangkat oleh kepala daerah.
- 3) Pertanggungjawaban APBD
Ada dua macam laporan pertanggungjawaban APBD yang dilakukan Kepala Daerah. Yaitu laporan pelaksanaan APBD Triwulanan yang disampaikan setiap tiga bulan sekali, dan laporan pelaksanaan APBD Tahunan, yang disampaikan setiap akhir tahun.

4. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dan Jenis-Jenis Pembelanjaan Daerah

Dalam bagian ini, akan dijelaskan tentang sumber-sumber pendapatan daerah dan jenis-jenis pembelanjaan daerah.

a. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan asli yang diperoleh dari daerah tersebut, meliputi:
 - a) pajak daerah;
 - b) retribusi daerah;
 - c) hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d) lain-lain PAD yang sah seperti: pendapatan bunga, jasa giro, komisi dan potongan.
- 2) Dana Perimbangan
Dana perimbangan adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari APBN, meliputi:
 - a) Dana Bagi Hasil, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pajak dan SDA (Sumber Daya Alam) untuk mendanai kebutuhan daerah.
 - b) Dana Alokasi Umum, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.
 - c) Dana Alokasi Khusus, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus daerah yang sesuai dengan prioritas nasional.
- 3) Lain-Lain Pendapatan
Lain-lain pendapatan terdiri dari:
 - a) Hibah, yaitu bantuan yang tidak mengikat dari pihak lain.
 - b) Dana darurat, yakni dana dari APBN yang diberikan kepada daerah untuk keperluan mendesak, seperti bencana alam atau peristiwa luar biasa lainnya.

b. Jenis-Jenis Pembelanjaan Daerah

Pembelanjaan Daerah terdiri atas:

- 1) Belanja Aparatur Daerah, yang meliputi:

- a) Belanja Administrasi Umum
- b) Belanja Operasi dan Pemeliharaan
- c) Belanja Modal
- 2) Belanja Pelayanan Publik, yang meliputi:
 - a) Belanja Administrasi Umum
 - b) Belanja Operasi dan Pemeliharaan
 - c) Belanja Modal
- 3) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
- 4) Belanja Tidak Tersangka

5. Format APBD

Penyusunan format APBD sama dengan penyusunan format APBN yang baru (tahun 2000 - sekarang) yang memisahkan dengan tegas unsur-unsur:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah;
- c. Surplus/Defisit; dan
- d. Pembiayaan.

Berikut ini akan disajikan satu contoh APBD, yaitu APBD Garut.

Tabel 3.5 Pemerintah Kabupaten Garut Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (dalam Rp)

	Uraian		Jumlah	
I.	Pendapatan			570.787.272.669
1.1	- Pendapatan Asli Daerah		30.311463.062	
1.1.1	- Pajak Daerah	3.392.314.776		
1.1.2	- Retribusi Daerah	23.219.847.020		
1.1.3	- Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan	655.025.000		
1.1.4	- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.044.266		
1.2	Dana Perimbangan		499.161.799.607	
1.2.1	- Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	21.167.164.607		

1.2.2	- Dana Alokasi Umum	468.170.000.000		
1.2.3	- Dana Alokasi Khusus	1.000.000.000		
1.2.4	- Dana Perimbangan dari Propinsi	8.824.635.000		
1.3	Lain-lain Pendapatan yang sah		41.314.010.000	
1.3.1	- Dana penyeimbang	40.314.010.000		
1.3.2	- Dana Darurat	1000.000.000		
II.	Belanja			573979.735.24
1.	Aparatur Daerah			140.572.459.123
2.1.1	Belanja Administrasi Umum		118.623.448.897	
2.1.1.1	- Belanja Pegawai/ Personalia	87210874.110		
2.1.2.1	- Belanja Barang dan Jasa	14.181.738.907		
2.1.3.1	- Belanja Perjalanan Dinas	10124.038.000.000		
2.1.4.1	- Belanja Pemeliharaan	5.306.797.880		
2.1.5.1	- Belanja Lain-lain	1.800.000.000		
2.2.1	Belanja operasi dan pemeliharaan		12.900.432.726	
2.2.1.1	- Belanja Pegawai/ Personalia	3.834.247.000		
2.2.2.1	- Belanja Barang dan Jasa	6.829.712.726		
2.2.3.1	- Belanja Perjalanan Dinas	1.869.175.000,00		
2.2.4.1	- Belanja Pemeliharaan	367.298.000		
2.3.1	Belanja Modal	9.048.577.500		
2.	Pelayanan Publik			433.407.278.401
2.1.1	Belanja Adm. & Umum	326.219.928.112		
2.1.2	- Belanja Pegawai/ Personalia	301.918.480.529		
2.11.2	- Belanja Barang dan Jasa	20.095.383.333		
2.2.3.2	- Belanja Perjalanan Dinas	1.523.025.000		

2.1.4.2	- Belanja Pemeliharaan	2.683.039.250		
2.2.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan		27.628.706.100	
2.2.1.2	- Belanja Pegawai/Personalia	4.435.596.500		
2.2.2.2	- Belanja Barang dan Jasa	10.564.905.910		
	Belanja Perjalanan Dinas	2.264.920.500		
2.2.4.2	- Belanja Pemeliharaan	10.363.283.190		
2.3.2	Belanja Modal	47.064.368.213	47.064.368.213	
4.	Belanja Bagi hasil dan Bantuan keuangan	28.885.176.850	28.885.176.850	
5.	Belanja Tidak Terkira Surplus (Defisit)	3.609.099.126	3.609.099.126	(3.192.464.855)
III.	Pembiayaan			3.192.464.855
3.1	Penerimaan		5.064.800.000	
3.1.1	- Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun lalu	5.064.800.000		
3.1.2	- Transfer dari Dana Cadangan			
3.1.3	- Penerimaan Pinjaman dan Obligasi			
3.1.4	- Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan			
	Jumlah Penerimaan Daerah			
3.1	Pengeluaran		1872.335.145	
3.2.1	- Transfer ke Dana Cadangan			
3.2.2	- Penyertaan modal	1.566.068.000		
3.2.3	- Pembayaran Utang Pokok yang jatuh Tempo	306.267.145		
3.2.4	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan			
	Jumlah Pengeluaran			

KEGIATAN 3.2

Kunjungilah Kantor Pemda (Pemerintah Daerah) Tingkat II (Kabupaten) di wilayah tempat tinggalmu. Kemudian, mintalah contoh APBD selama 3 tahun berturut-turut. Setelah itu, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Dari mana saja sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) diperoleh?
2. Apakah PAD semakin tahun semakin besar?
3. Apakah Dana perimbangan semakin lama semakin besar?
4. Dari 4 jenis belanja daerah, jenis belanja apa yang paling besar jumlahnya? Mengapa demikian?

Kerjakan tugas ini secara berkelompok.

6. Dampak APBD terhadap Perekonomian

Seperti APBN, keberadaan APBD juga berpengaruh besar terhadap perekonomian. Misalnya, di era otonomi daerah, setiap pemerintah daerah di Indonesia pernah berlomba meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan menciptakan atau menaikkan berbagai pungutan (pajak, retribusi, dan lain-lain) yang berakibat terjadi high cost economy (ekonomi biaya tinggi). Ekonomi biaya tinggi sangat merugikan sektor perekonomian karena bisa menaikkan harga barang dan jasa. Kenaikan harga, menjadikan barang dan jasa Indonesia tidak bisa bersaing dengan barang dan jasa dari luar negeri.

Untuk mengantisipasi kenaikan harga barang, akhirnya pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang pada pasal 7 melarang pemerintah daerah untuk: menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, serta kegiatan ekspor dan impor.

Uraian di atas hanyalah satu contoh bahwa APBD memiliki dampak terhadap perekonomian. Selengkapnya, dampak (pengaruh) APBD terhadap perekonomian adalah sebagai berikut:

- a. APBD mampu memberikan pedoman bagi kegiatan pembangunan ekonomi di daerah. Dengan adanya APBD, pemerintah daerah memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan pembangunan ekonomi

sehingga semua kegiatan dapat terarah dan perekonomian daerah diharapkan bisa meningkat.

- b. APBD dapat digunakan sebagai alat perbaikan perekonomian. Jika daerah mengalami gejala ekonomi yang buruk, misalnya mengalami ekonomi biaya tinggi, APBD dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian. Caranya, pada penyusunan APBD tahun berikutnya, pemerintah daerah harus mengurangi atau bahkan menghapuskan beberapa pungutan yang memberatkan.
- c. APBD dapat memengaruhi perubahan harga di daerah, misalnya: dalam rangka meningkatkan PAD, pemerintah daerah menaikkan tarif beberapa pungutan, seperti tarif pendaftaran rumah sakit, tarif pengujian kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak sarang burung walet. Semua kenaikan tarif tersebut tentu akan berpengaruh terhadap harga barang dan jasa. Satu hal yang perlu diingat oleh pemerintah daerah, jangan sampai kenaikan-kenaikan tersebut menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- d. APBD mampu memengaruhi tingkat produktivitas perusahaan. Apabila pemerintah daerah menetapkan peraturan yang menghambat lalu lintas barang dan jasa antar daerah, hal itu akan memengaruhi produktivitas perusahaan-perusahaan tertentu, seperti perusahaan yang menjual produknya ke daerah lain atau perusahaan yang mendatangkan bahan bakunya dari daerah lain.
- e. APBD dapat memengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Misalnya, di Garut kita mengenal adanya sarang burung walet yang tentunya membuat kaya para pemiliknya. Agar kekayaan mereka tidak bertumpuk dan menimbulkan kecemburuan sosial serta menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan maka pada APBD dianggarkan pajak sarang burung walet. Pajak yang dikenakan pada pemilik sarang burung walet akan digunakan pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat banyak. Dengan demikian, distribusi pendapatan di masyarakat diharapkan lebih merata.

I N F O

Korupsi! Benarkah Diri Kita Bersih dari Korupsi?

Menurut survei TII (*Transparency International Indonesia*), Lembaga Bea dan Cukai dinyatakan sebagai lembaga yang memperoleh suap atau sogokan tertinggi, yaitu mencapai 23 miliar rupiah selama 1 tahun yang didapat dari 140 penyuap. Urutan kedua ditempati oleh kantor pajak yang memperoleh 12,7 miliar rupiah selama 1 tahun yang didapat dari 328 penyuap.

Korupsi di Indonesia sudah berurat akar dalam setiap segi kehidupan. Bisa dikatakan sudah membudaya di Indonesia. Seandainya diperbolehkan, mungkin akan ada penulis yang membuat buku “Seni Korupsi” atau “Cara Aman Mengelola Hasil Korupsi.” Sudah menjadi rahasia umum, untuk membuat surat izin tertentu, orang biasa memberikan amplop (berisi uang) agar izinnya dipermudah dan dipercepat. Dalam hal ini, pemberi dan penerima amplop telah melakukan korupsi, karena ada aturan yang dilanggar dan ada pihak lain yang dirugikan. Mau contoh yang lain? Menyupai saat memasukkan anak ke suatu sekolah, memotong gaji guru, memalsukan surat-surat untuk memperoleh keuntungan tertentu, dan lain-lain. Korupsi tidak hanya terjadi dalam APBN dan APBD, korupsi ada di mana-mana. Oleh karena itu, memusnahkan korupsi sangat sulit, bahkan tindakan korupsi mungkin juga ada di dalam diri kita sendiri. Yakinkah kita, bahwa sampai dengan hari ini kita dan keluarga kita tidak pernah melakukan korupsi? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Mulailah dari diri kita sendiri, lalu terapkan pada pendidikan (mulai SD sampai Perguruan Tinggi). Jika ini telah diterapkan, mungkin korupsi di negeri kita akan berkurang atau bahkan hilang.

Dari berbagai sumber

D. Kebijakan Fiskal

Untuk memperoleh wawasan yang baik mengenai kebijakan fiskal, berikut kita akan mempelajari arti kebijakan fiskal, tujuan kebijakan fiskal, dan jenis-jenis kebijakan fiskal.

1. Arti Kebijakan Fiskal/Anggaran

Dua contoh di atas adalah sedikit dari kebijakan pemerintah dalam mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Mengapa pemerintah harus mengubah penerimaan dan pengeluaran negara? Alasannya, pemerintah ingin mengatur perekonomian menjadi lebih baik. Semua kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara disebut dengan istilah Kebijakan Fiskal. Kebijakan Fiskal disebut juga Kebijakan Anggaran. Kebijakan Anggaran, mengakibatkan perubahan angka-angka yang terdapat dalam APBN.

2. Tujuan Kebijakan Fiskal/Anggaran

Secara rinci, kebijakan anggaran dilakukan pemerintah dengan tujuan sebagai berikut:

- a. untuk menciptakan stabilitas ekonomi;
- b. untuk menciptakan lapangan kerja;
- c. untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi;
- d. untuk menciptakan keadilan dalam mendistribusikan pendapatan.

3. Jenis-Jenis Kebijakan Fiskal/Anggaran

Jika ditinjau dari sisi teori, ada tiga macam kebijakan anggaran yaitu:

- a. Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional (*functional finance*), adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja.
- b. Kebijakan pengelolaan anggaran (*the finance budget approach*), adalah kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mantap.
- c. Kebijakan stabilisasi anggaran otomatis (*the stabilizing budget*), adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program. Tujuan kebijakan ini adalah agar terjadi penghematan dalam pengeluaran pemerintah.

Selanjutnya, jika dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran, kebijakan fiskal/anggaran dapat dibedakan menjadi empat jenis.

a. Kebijakan Anggaran Seimbang

Kebijakan anggaran seimbang, adalah kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Ini berarti jumlah pengeluaran yang disusun pemerintah tidak boleh melebihi jumlah penerimaan yang didapat. Sehingga negara tidak perlu berhutang, baik berhutang dari dalam negeri maupun ke luar negeri. Dalam masa depresi (kelesuan ekonomi), sebaiknya negara tidak menggunakan kebijakan anggaran seimbang karena bisa memperburuk keadaan ekonomi. Pada masa depresi penerimaan negara sangat rendah sehingga negara perlu mendapat pinjaman untuk memperbaiki perekonomian. Dengan demikian, negara tidak bisa melakukan kebijakan anggaran seimbang. Adapun kebijakan anggaran yang tepat digunakan pada masa depresi adalah kebijakan anggaran defisit.

b. Kebijakan Anggaran Defisit

Kebijakan anggaran defisit yaitu kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Karena pengeluaran lebih besar daripada penerimaan maka negara mengalami defisit (kekurangan) anggaran. Pada umumnya, kebijakan anggaran defisit ditempuh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ibaratnya, seorang pengusaha yang kekurangan modal untuk memajukan usaha dan ekonominya, berutang pada pihak lain untuk memperoleh tambahan modal sehingga dapat memajukan usaha dan ekonominya. Asalkan bekerja dan berusaha dengan jujur, tidak boros, tidak dikorupsi oleh para pegawai, tentu usahanya itu bisa maju. Demikian halnya dengan Indonesia, walaupun negara melakukan kebijakan anggaran defisit, asalkan tidak dikorupsi, Indonesia pasti mampu memajukan perekonomiannya.

c. Kebijakan Anggaran Surplus

Kebijakan anggaran surplus, yaitu kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih kecil dari penerimaan. Kebijakan ini umumnya dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi (kenaikan harga akibat terlalu banyak jumlah uang yang beredar). Dengan memperkecil jumlah pengeluaran (belanja), diharapkan jumlah permintaan terhadap barang dan jasa tidak meningkat. Jika permintaan terhadap barang dan jasa tidak meningkat, maka harga barang dan jasa juga tidak akan naik, ini berarti inflasi bisa dicegah.

d. Kebijakan Anggaran Dinamis

Kebijakan anggaran dinamis, yaitu kebijakan anggaran dengan cara terus menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran sehingga semakin lama semakin besar (tidak statis). Anggaran yang dinamis diperlukan karena semakin hari semakin banyak kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan yang harus dibiayai negara, yang membutuhkan dana lebih besar.

I N F O

Benarkah Kebijakan Pemerintah Mengurangi atau Menghapus Subsidi BBM Tergolong sebagai Kebijakan Fiskal?

Jawabannya benar sekali. Kebijakan pemerintah mengurangi atau menghapus subsidi BBM adalah tergolong kebijakan fiskal. Karena, dengan mengurangi atau menghapus subsidi BBM berarti pemerintah telah melakukan tindakan mengubah pengeluaran Negara. Adapun

tindakan atau kebijakan mengubah pengeluaran negara, merupakan bagian dari kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran.

Berikut ini kalian akan menyimak berita yang menjelaskan tentang kebocoran subsidi BBM yang mendorong pemerintah untuk mengurangi dan menghapus subsidi BBM serta mengalihkannya ke dalam bentuk pengeluaran lain.

Subsidi Minyak Tanah Tahun 2003 Mengalami Kebocoran Rp5,6 Triliun.

Angka efisiensi distribusi minyak tanah bersubsidi sesuai hasil survei kebutuhan minyak tanah tahun 2003 yang dilakukan Sucofindo dan Surveyor Indonesia menunjukkan kebocoran Rp5,6 triliun. Subsidi yang sampai kepada kelompok yang berhak hanya sebesar 62,8 persen dari nilai subsidi sebesar Rp15,2 triliun yang dikeluarkan pemerintah pada waktu itu.

Demikian kesimpulan Survei yang diperoleh pada Minggu (27/2) yang sebenarnya tidak pernah diungkapkan kepada publik meskipun hasil survei sangat penting digunakan untuk membuat keputusan sejak survei diselesaikan pada tahun 2004.

Sesuai perhitungan Kompas, jika angka efisiensi pada tahun 2003 tidak mengalami perubahan seperti hasil survei Sucofindo, maka jumlah kebocoran dana subsidi akan semakin tinggi. Mengingat angka subsidi untuk tahun 2005 lebih besar karena harga minyak mentah yang jauh lebih tinggi daripada tahun 2003.

Angka kebocoran relatif besar dibandingkan dengan penghematan subsidi dari rencana kenaikan harga BBM per 1 Maret 2005 yang hanya sebesar Rp20,3 triliun. Itu pun yang direlokasikan untuk program kompensasi kenaikan harga BBM hanya Rp10,78 triliun. Sebenarnya, pemerintah bisa mendapat dana untuk mengurangi orang miskin lebih banyak jika bisa mengurangi kebocoran BBM .

Sumber Kompas

E. Pajak

Pajak merupakan bagian dari kebijakan fiskal (kebijakan anggaran), karena tindakan menaikkan atau menurunkan pajak dilakukan dalam rangka mengelola anggaran negara. Misalnya, jika pemerintah ingin menaikkan pendapatan negara maka cara yang ditempuh di antaranya menaikkan tarif

pajak, menambah jenis pajak baru, mengoptimalkan cara pemungutan pajak, dan membasmi korupsi dalam perpajakan.

Pajak sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Pada zaman dulu kerajaan-kerajaan besar akan mewajibkan kerajaan-kerajaan yang dikuasainya agar menyerahkan upeti atau persembahan berupa emas, batu berharga, uang atau benda-benda berharga lain sebagai bukti kesetiaan. Kadangkala upeti juga bisa berwujud manusia seperti para budak, perempuan atau seseorang yang diinginkan oleh kerajaan penguasa. Pada zaman sekarang, upeti sudah tidak berlaku lagi dan kedudukannya digantikan oleh pajak sebagai salah satu kewajiban masyarakat terhadap negara.

1. Arti Pajak

Pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat balas jasa (kontraprestasi) secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif negara. Contoh pajak yang wajib dibayar rakyat adalah pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, serta bea meterai.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif, guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung. Yang dimaksud pengeluaran kolektif adalah pengeluaran untuk kepentingan bersama.

Dari pengertian pajak di atas, pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. merupakan iuran wajib (dapat dipaksakan oleh pemerintah);
- b. dipungut berdasarkan norma-norma hukum (undang-undang);
- c. tidak mendapat balas jasa secara langsung; dan
- d. digunakan untuk membiayai pengeluaran kolektif pemerintah.

2. Arti Pungutan Resmi Lain

Untuk meningkatkan pendapatan negara, selain mewajibkan masyarakat membayar pajak, pemerintah juga melakukan pungutan resmi lainnya. Bentuk pungutan resmi lain tersebut adalah:

- a. Retribusi, yaitu pungutan yang dilakukan dengan pemberian jasa atau fasilitas langsung dari negara kepada pihak yang dipungut. Contoh retribusi adalah karcis masuk terminal, karcis masuk tempat wisata, iuran sampah, iuran parkir dan iuran keamanan.
- b. Sumbangan, yaitu sejumlah dana yang disumbangkan masyarakat kepada pemerintah. Contoh: SWPJ (Sumbangan Wajib Perbaikan Jalan) dan SWDKLLJR (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan Raya).

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat perbedaan antara pajak dengan pungutan resmi lainnya yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.6 Perbedaan Pajak dengan Pungutan Resmi Lainnya

Ditinjau dari	Pajak	Pungutan resmi lain
1. Balas jasa	Tidak diterima secara langsung	Diterima secara langsung
2. Objek pemungutan	Semua orang yang memenuhi syarat tertentu	Khusus orang yang menggunakan jasa atau fasilitas tertentu
3. Instansi pemungut	Dipungut oleh Pemerintah Pusat dan Daerah	Hanya dipungut oleh Pemerintah Daerah
4. Sifat pemungutan	Bersifat memaksa	Sesuai kebijakan pemerintah
5. Sanksi (hukum)	Tertulis jelas dalam undang-undang (sanksi berupa surat teguran, denda maksimal Rp 10.000.000 dan hukuman penjara maksimal 6 tahun)	Sesuai kebijakan pemerintah

3. Dasar Hukum dan Fungsi Pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat, pemerintah memiliki dasar hukum yaitu:

- a. UUD 1945 pasal 23 A (sesudah diamandemen) yang berbunyi: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
- b. Undang-Undang Perpajakan yang sudah disempurnakan (terbaru) terdiri atas:
 - 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 - 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
 - 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 - 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan.

- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
- 7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini mengatur berbagai ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak memiliki beberapa fungsi, sebagai berikut.

a. Pendapatan Negara (Fungsi *Budgeter*)

Pada saat sekarang, pajak merupakan sumber terbesar pendapatan negara. Coba kalian amati kembali APBN tahun 2001 pada Bab 2. Sebelumnya, Indonesia pernah menggantungkan pendapatan pada sektor migas. Karena harga migas menurun dan produksinya juga sudah tidak seimbang dengan jumlah konsumsi di dalam negeri, pemerintah kemudian mengalihkan perhatian pada sektor pajak. Dengan memperbaiki tata cara perpajakan, sekarang pajak merupakan sumber utama pendapatan negara.

b. Alat Pengatur Kegiatan Ekonomi (Fungsi *Regulasi*)

Pajak dapat digunakan pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi, misalnya, jika pemerintah ingin meningkatkan daya saing barang dalam negeri, pemerintah bisa menurunkan tarif pajak ekspor sehingga barang dalam negeri bisa dijual dengan harga yang lebih murah. Jika harga lebih murah, negara lain lebih tertarik untuk membeli barang Indonesia. Dan, jika pemerintah ingin melindungi industri dalam negeri, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak impor bagi barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri. Sedangkan untuk bahan baku industri yang masih diimpor, pemerintah harus menetapkan tarif pajak impor yang rendah atau kalau perlu tarif pajak impornya = 0 (tidak ada pajaknya sama sekali).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur perekonomian.

c. Alat Pemerataan Pendapatan (Fungsi *Distribusi*)

Pajak yang sudah menjadi pendapatan utama negara digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Penggunaan pajak untuk pembangunan harus dilakukan secara merata ke seluruh wilayah tanah air. Tidak terpusat di satu wilayah saja. Selain itu, dengan pajak tersebut, pemerintah dapat mensubsidi masyarakat miskin, seperti subsidi pupuk bagi petani atau subsidi dalam bentuk RASKIN (beras untuk rakyat miskin) agar tidak terjadi ketimpangan pendapatan di masyarakat.

Kemudian, untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara si kaya dan si miskin, pemerintah bisa menaikkan tarif pajak atas penjualan barang-barang mewah yang umumnya hanya dibeli oleh orang-orang kaya. Dengan semua cara di atas, diharapkan dapat tercipta pemerataan pendapatan di masyarakat.

d. Alat untuk Menstabilkan Ekonomi (Fungsi Stabilisasi)

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan keadaan ekonomi, misalnya dengan menetapkan pajak yang tinggi, pemerintah dapat mengatasi inflasi, karena jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Dan, untuk mengatasi deflasi atau kelesuan ekonomi, pemerintah dapat menurunkan pajak. Dengan menurunkan pajak, jumlah uang yang beredar dapat ditambah sehingga kelesuan ekonomi yang di antaranya ditandai dengan sulitnya pengusaha memperoleh modal dapat diatasi. Dengan demikian, perekonomian diharapkan senantiasa dalam keadaan stabil.

4. Sistem Pemungutan Pajak dan Asas Pemungutan Pajak

Agar berjalan lancar, pelaksanaan pemungutan pajak kepada masyarakat harus menggunakan sistem tertentu.

a. Sistem Pemungutan Pajak

Ada empat macam sistem pemungutan pajak yang bisa digunakan, yaitu sebagai berikut.

- 1) *Official Assesment System*
Dalam sistem ini, penghitungan pajak dilakukan oleh aparatur pajak atau kantor pajak. Si wajib pajak tinggal membayar hasil perhitungan pajak yang sudah dihitung oleh aparatur pajak atau kantor pajak.
- 2) *Self Assesment System*
Dalam sistem ini penghitungan pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak dan kemudian membayar pajak yang sudah dihitungnya.
- 3) *Semi-Self Assesment System*
Dalam sistem ini penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak bersama dengan aparatur pajak. Kemudian wajib pajak membayar pajak yang sudah dihitung bersama tersebut.
- 4) *With Holding System*
Dalam sistem ini penghitungan pajak tidak dilakukan oleh wajib pajak dan aparatur pajak, tetapi dilakukan oleh pihak ke tiga yang ditunjuk. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata

cara Perpajakan, pemungutan pajak penghasilan menggunakan *Self Assesment System* dan pemungutan pajak penjualan atas barang mewah menggunakan *With Holding System*.

b. Asas Pemungutan Pajak

Agar tercipta keadilan dan tidak memberatkan masyarakat, dalam pemungutan pajak perlu diperhatikan asas-asas atau prinsip-prinsip pemungutan pajak seperti yang sudah dikemukakan oleh Adam Smith yang lebih dikenal dengan istilah *Smith's Canon*, yang meliputi:

- 1) Prinsip Keadilan/Kesamaan (*Equity*)
Pemungutan pajak harus adil dan sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak.
- 2) Prinsip Kepastian (*Certainly*)
Pemungutan pajak harus jelas dan pasti sehingga bisa dimengerti oleh wajib pajak serta memudahkan perhitungan dan administrasi.
- 3) Prinsip Kelayakan (*Convenience*)
Pemungutan pajak jangan sampai memberatkan wajib pajak sehingga wajib pajak bisa merasa senang dalam membayar pajak. Bahkan, jika ada kelebihan dalam pembayaran pajak, pemerintah wajib mengembalikannya pada wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan.
- 4) Prinsip Ekonomi (*Economy*)
Pemungutan pajak harus memenuhi syarat ekonomi, yaitu hasil pajak mampu memenuhi kebutuhan negara dan pemungutan pajak tidak menghambat kemajuan ekonomi.

5. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah dasar pembebanan besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak, yang umumnya dinyatakan dalam bentuk persentase (%). Berikut ini adalah macam-macam tarif pajak:

- a. Tarif Tetap, yaitu tarif pajak yang ditetapkan dalam nilai rupiah tertentu yang jumlahnya tetap (tidak berubah). Contoh: pajak meterai atau bea meterai yang tarifnya tetap, yaitu sebesar Rp3.000,- dan Rp6.000,-.
- b. Tarif Proporsional, yaitu tarif pajak yang menggunakan persentase tetap terhadap berapa pun jumlah objek pajak sehingga jika dihitung, besarnya pajak akan proporsional (sebanding) dengan besarnya jumlah objek pajak. Contoh: tarif PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) adalah sebesar 0,5% dari berapa pun jumlah objek pajak.
- c. Tarif Progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin meningkat jika jumlah objek pajak semakin bertambah. Contoh: Tarif pajak penghasilan yang ditentukan sebagai berikut:

- 1) Penghasilan 0 - Rp25.000.000,- tarifnya 5%.
 - 2) Penghasilan di atas Rp25.000.000,- - Rp50.000.000,- tarifnya 10%.
 - 3) Penghasilan di atas Rp50.000.000,- - Rp100.000.000,- tarifnya 15%, dan seterusnya.
- d. Tarif Regresif/Degresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya justru semakin menurun jika jumlah objek pajak semakin bertambah. Contoh:
- 1) Jumlah objek pajak 0 - Rp25.000.000,- tarifnya 15%.
 - 2) Jumlah objek pajak di atas Rp25.000.000,- - Rp50.000.000,- tarifnya 12,5%.
 - 3) Jumlah objek pajak di atas Rp50.000.000,- - Rp100.000.000,- tarifnya 10%, dan seterusnya.

Di Indonesia, penentuan besar kecilnya tarif pajak ditetapkan dalam undang-undang. Karena berbentuk undang-undang, maka dalam menentukan besar kecilnya tarif pajak dan segala hal tentang perpajakan pemerintah harus memahaminya dengan DPR untuk mendapat persetujuan bersama. Dengan adanya DPR sebagai wakil rakyat, diharapkan tarif pajak yang ditetapkan tidak memberatkan rakyat dan sekaligus dapat ikut menunjang pendapatan negara.

6. Jenis Pajak

Berbagai macam pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan sifat, subjek pajak, objek pajak dan instansi pemungut.

a. Jenis Pajak Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Langsung (*Direct Tax*)
Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala pada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak (kohir) yang dibuat oleh kantor pajak. Pada intinya, surat ketetapan pajak (kohir) memuat berapa besar pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus dipikul sendiri oleh si wajib pajak, sebab pajak ini tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, berbeda dengan pajak tidak langsung yang bebannya bisa dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak langsung yaitu pajak penghasilan dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
- 2) Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)
Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak hanya jika wajib pajak melakukan perbuatan atau peristiwa tertentu. Oleh karena itu, pajak tidak langsung tidak bisa dipungut secara berkala, pajak hanya bisa dipungut jika terjadi perbuatan atau peristiwa tertentu

yang menimbulkan kewajiban membayar pajak. Contoh pajak tidak langsung yaitu, pajak penjualan atas barang mewah. Pajak ini hanya bisa dikenakan, jika ada wajib pajak yang melakukan penjualan barang mewah. Jika wajib pajak sering melakukan penjualan barang mewah maka dia akan sering pula dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Umumnya demi perhitungan bisnis, para wajib pajak penjualan atas barang mewah (biasanya para pengusaha) akan mengalihkan beban pajak yang ditanggungnya kepada konsumen yang membeli barang mewah. Caranya? Gampang sekali, yaitu dengan menaikkan harga jual barang mewah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pajak tidak langsung merupakan pajak yang tidak harus dipikul sendiri oleh wajib pajak, tetapi bisa dialihkan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung lainnya adalah pajak pertambahan nilai, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai dan pajak ekspor.

Agar bisa membedakan dengan jelas antara pajak langsung dengan pajak tidak langsung, perhatikan tabel berikut.

Tabel 3.7 Perbedaan Pajak Langsung dengan Pajak Tidak Langsung

Ciri-Ciri Pajak Langsung	Ciri-Ciri Pajak Tidak Langsung
1. Dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak (kohir)	1. Dipungut tanpa menggunakan Surat Ketetapan Pajak (kohir)
2. Tidak bisa dialihkan (dilimpahkan) kepada pihak lain.	2. Bisa dialihkan (dilimpahkan) kepada pihak lain.
3. Dipungut setahun sekali.	3. Dipungut jika ada perbuatan atau peristiwa tertentu.
4. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan.	4. Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Cukai dan Pajak Ekspor.

b. Jenis Pajak Menurut Subjek Pajak

Berdasarkan subjek pajak (siapa yang harus membayar pajak), pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Pajak Perorangan dan Pajak Badan.

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan seperti PT, CV, Firma, Koperasi, Yayasan, Organisasi Sosial dan Politik.

c. Jenis Pajak Menurut Objek Pajak

Berdasarkan objek pajak (sesuatu hal yang dikenakan pajak), pajak dapat dibedakan menjadi:

- 1) Objek pajak perbuatan, seperti PPn (Pajak Pertambahan Nilai).
- 2) Objek pajak kejadian, seperti Bea Masuk dan Bea Keluar.
- 3) Objek pajak keadaan, seperti Pajak Penghasilan, dan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 4) Objek pajak pemakaian seperti Bea Meterai dan Cukai.

d. Jenis Pajak Menurut Instansi Pemungut

Berdasarkan instansi pemungut, pajak dapat dibedakan menjadi:

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Bea Meterai.
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik pemerintah daerah tingkat I (Propinsi) maupun pemerintah daerah tingkat II (kabupaten atau kota).
Contoh: Pajak Radio, Pajak Televisi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Sarang Burung Walet.

7. Sistem Perpajakan di Indonesia dan Cara Menghitung Pajak

Dalam rangka menempatkan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara, pemerintah senantiasa melakukan langkah-langkah pembaruan dalam sistem perpajakan, dengan tujuan memperbaiki kinerja sistem perpajakan dan sekaligus untuk meningkatkan pendapatan negara dari pemungutan pajak.

Dengan melakukan pembaruan tersebut, diharapkan sistem perpajakan yang baru akan memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

- a. praktis dan mudah;
- b. adil dan merata dalam penerapan dan pembebanannya;
- c. adanya kepastian hukum bagi wajib pajak dan petugas pajak;
- d. menutup peluang terjadinya perbuatan penggelapan pajak, kecurangan petugas pajak dan sejenisnya;
- e. mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Contoh pembaruan sistem perpajakan yang sudah dilakukan pemerintah di antaranya dengan mengubah undang-undang perpajakan yang sudah tidak sesuai seperti:

- a. Mengubah UU No. 9 Tahun 1999 dengan UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Mengubah UU No. 10 Tahun 1994 dengan UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
- c. Mengubah UU No. 11 Tahun 1994 dengan UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Selain itu, pemerintah juga membuat undang-undang baru yaitu:

- a. UU No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- b. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk menghindari perbedaan penafsiran tentang semua undang-undang perpajakan maka pemerintah menjabarkan semua undang-undang tersebut dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Dirjen Pajak.

Berikut ini kita akan membahas satu per satu undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, yang semuanya merupakan pajak pusat (pajak yang dipungut pemerintah pusat), yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang ini memuat ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang di antaranya berisi:

- 1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Dirjen Pajak untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
- 2) Yang dimaksud Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut undang-undang perpajakan diharuskan melakukan kewajiban pajak.
- 3) Yang dimaksud NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan.
- 4) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan. Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak.
- 5) Jika dalam jangka waktu tertentu Wajib Pajak tidak mengisi dan menyerahkan Surat Pemberitahuan, maka akan dikenakan denda.
- 6) Tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak serta cara mengangsur dan menunda pajak, diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- 7) Memuat penjelasan berbagai sanksi (hukuman) jika terjadi kelalaian dalam perpajakan, baik bagi wajib pajak maupun bagi aparat pajak.

I N F O

Ditangkap, Pemalsu Faktur Pajak

Aparat Ditjen Pajak dan Polri membongkar satu jaringan pembuat faktur pajak tidak sah (fiktif), yang menyebabkan kerugian negara sedikitnya Rp55 miliar.

Penyidik memperoleh petunjuk dan barang bukti berupa nama-nama perusahaan yang diduga fiktif dan dapat menimbulkan kerugian negara pada pendapatan negara khususnya pada pajak pertambahan nilai (PPn).

Modus operandi yang dilakukan antara lain membuat banyak KTP, membuat faktur pajak tidak sah (palsu), juga ditemukan adanya specimen (contoh) tanda tangan kepala kantor pajak.

Ancaman pidana untuk pelaku berdasarkan KUHP yaitu tindak pemalsuan adalah maksimum enam tahun penjara. Sementara berdasarkan UU tentang Perpajakan ancaman hukumannya adalah enam tahun ditambah denda empat kali jumlah pajak terutang.

Sumber: Pikiran Rakyat

- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan
Undang-undang ini mengatur tentang Pajak Penghasilan yang di antaranya meliputi:
- 1) Subjek Pajak Penghasilan
Pihak-pihak yang merupakan subjek pajak penghasilan yang berkewajiban membayar pajak penghasilan adalah:
 - a) Orang pribadi atau warisan yang belum terbagi.
 - b) Badan seperti PT, CV, BUMN, BUMD, Firma, Koperasi, Organisasi Dana Pensiun, dan Organisasi Sosial Politik.
 - c) Bentuk usaha tetap yang lain.
 - 2) Objek Pajak Penghasilan
Berbagai macam penghasilan dapat dijadikan objek pajak penghasilan.
Adapun yang dimaksud dengan penghasilan sebenarnya adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Berikut ini

adalah berbagai penghasilan yang bisa dijadikan objek pajak penghasilan:

- a) Imbalan dari pekerjaan atau jasa yang diterima, seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi dan uang pensiun.
 - b) Hadiah.
 - c) Laba Usaha.
 - d) Keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta.
 - e) Penerimaan kembali pajak.
 - f) Bunga, termasuk diskonto, premium dan sejenisnya.
 - g) Dividen, termasuk dividen perusahaan asuransi dan SHU koperasi.
 - h) Royalti.
 - i) Sewa dan penghasilan lain yang sejenis.
 - j) Penerimaan dan perolehan dari pembayaran berkala.
 - k) Keuntungan dari selisih kurs mata uang asing.
 - l) Selisih lebih dari penilaian kembali aktiva.
 - m) Premi Asuransi.
 - n) Iuran yang diperoleh berdasarkan volume usaha.
 - o) Tambahan kekayaan neto, yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
 - p) Keuntungan dari pembebasan utang.
- 3) Penghasilan Tidak Kena Pajak

Siapa pun subjek pajak yang memiliki objek pajak penghasilan maka dia akan dikenai pajak penghasilan. Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan, penghasilan yang dimiliki subjek pajak harus dikurangi dulu dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Penghasilan yang harus dikurangi PTKP hanyalah penghasilan yang berasal dari gaji, upah, dan pensiun. Selain itu, tidak perlu dikurangi PTKP, misalnya, Reza yang belum menikah bekerja di perusahaan dan memiliki penghasilan setahun Rp5.000.000,-. Ini berarti, besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar Reza dihitung sebagai berikut:

Penghasilan Neto setahun Rp5.000.000,-

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp2.880.000,- (besarnya ditentukan undang-undang).

Penghasilan Kena Pajak Rp2.120.000,-

Pajak Penghasilan yang harus dibayar Reza:

$5\% \times \text{Rp}2.120.000,- = \text{Rp}106.000,-$ setahun.

Dengan demikian, besar pajak penghasilan yang harus dibayar Reza

tiap bulan adalah $= \frac{\text{Rp}160.000,-}{12} = \text{Rp}8.833,-$

Dalam dunia perpajakan, Pajak Penghasilan yang harus dibayar biasa disebut dengan istilah: Pajak Penghasilan Terutang. Selanjutnya, berikut ini akan diuraikan besarnya PTKP untuk berbagai keadaan:

Tabel 3.8 Besarnya PTKP

Besarnya PTKP	Keadaan
Rp2.880.000,- Rp1.440.000,- Rp2.880.000,-	Untuk wajib pajak diri pribadi Tambahkan untuk wajib pajak menikah Tambahkan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
Rp1.440.000,-	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Dengan adanya ketentuan mengenai PTKP di atas maka orang yang memiliki gaji atau penghasilan neto setahun sebesar Rp2.880.000,- atau kurang dari itu, tidak perlu membayar pajak penghasilan kepada negara. Itu berarti, pajak penghasilan bersifat adil karena tidak dikenakan pada mereka yang berpenghasilan kurang. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, penghasilan yang harus dikurangi PTKP hanyalah penghasilan yang berasal dari gaji, upah atau pensiun. Selain itu, seperti penghasilan dari hadiah, royalti, honorarium, komisi, bea siswa dan sejenisnya tidak perlu dikurangi PTKP.

4) Tarif Pajak Penghasilan

Seperti contoh di atas (Pajak Penghasilan Reza) maka pajak penghasilan dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak (yang berbentuk persentase) dengan jumlah penghasilan kena pajak. Besarnya tarif pajak penghasilan ditentukan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Tarif Pajak Penghasilan

No.	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1.	Sampai dengan Rp25.000.000,-	5%
2.	Rp25.000.000,00 - Rp50.000.000,-	10%

3.	Di atas Rp50.000.000,- – Rp100.000.000,-	15%
4.	Di atas Rp100.000.000,- – Rp200.000.000,-	25%
5.	Di atas Rp200.000.000,-	35%

5) Contoh Cara Menghitung Pajak Penghasilan

Contoh 1:

Idwan memiliki penghasilan netto sebulan Rp400.000,-. Maka besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar Idwan adalah:

$$\begin{aligned} \text{Penghasilan setahun} &= 12 \times \text{Rp}400.000,- = \text{Rp}4.800.000,- \\ \text{PTKP (diri pribadi)} &= \text{Rp}2.880.000,- - \\ \text{PKP (Penghasilan Kena Pajak)} &= \text{Rp}1.920.000,- \end{aligned}$$

Pajak penghasilan terutang = 5% x Rp1.920.000,- = Rp96.000,- (setahun).

Jadi, pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Idwan per bulan

$$\text{adalah } \frac{\text{Rp}96.000,-}{12} = \text{Rp}8.000,- .$$

Contoh 2:

Gunawan yang sudah menikah dan memiliki 4 orang anak, bekerja dengan gaji per bulan Rp1.000.000, pada PT Sentosa. PT ini mengikuti program Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) sehingga perusahaan membayar untuk Gunawan premi asuransi kecelakaan kerja Rp5.000, per bulan dan premi asuransi kematian Rp3.000,-per bulan.

PT Sentosa juga mengikuti program jaminan hari tua dan pensiun, oleh karena itu Gunawan harus membayar iuran jaminan hari tua Rp20.000,- per bulan dan iuran pensiun Rp25.000,- per bulan. Pada Gunawan juga dikenakan biaya jabatan 5% dari gaji.

Berdasarkan data di atas maka besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar Gunawan dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Gaji sebulan} &= \text{Rp}1.000.000,- \\ \text{Premi asuransi kecelakaan kerja} &= \text{Rp}5.000,- \\ \text{Premi asuransi kematian} &= \text{Rp} 3.000,- \\ \text{Penghasilan bruto} &= \text{Rp}1.008.000,- \end{aligned}$$

Dikurangi

$$\text{Biaya jabatan } 5\% \times \text{Rp}1.008.000,- = \text{Rp}50.400,-$$

(semua pegawai tetap dan penerima pensiun akan dikurangi biaya jabatan sebesar 5%).

$$\text{Iuran pensiun} = \text{Rp}25.000,-$$

$$\text{Iuran jaminan hari tua} = \text{Rp}20.000,-$$

Total pengurangan	=	Rp95.400,-
Penghasilan neto sebulan (Rp1.008.000,- – Rp 95.400,-)	=	Rp912.600,-
Penghasilan neto setahun 12 x Rp912.600,-	=	Rp10.951.200,-
PTKP setahun:		
– Wajib pajak diri pribadi		Rp2.880.000,-
– Tambahan wajib pajak kawin		Rp1.440.000,-
– Tambahan 3 orang anak @ Rp1.440.000,- (yang 1 anak tidak dihitung)		<u>Rp4.320.000,-</u> +
Total PTKP	=	Rp8.640.000,-
PKP (Penghasilan Kena Pajak) setahun (Rp10.951.200,- – Rp8.640.000,-)	=	Rp2.311.000,-
Besar pajak penghasilan = 5% x Rp2.311.000,-	=	Rp115.560,-
Dengan demikian, besar pajak penghasilan tiap bulan adalah		
	=	Rp9.630,-

Contoh 3:

Jika dua contoh di atas menggambarkan cara perhitungan pajak penghasilan yang berasal dari gaji, berikut ini diberikan contoh cara menghitung pajak penghasilan yang berasal dari hadiah. Pajak penghasilan dari hadiah tidak perlu dikurangi PTKP.

Ali pemain tenis yang tinggal di Jakarta menjadi juara dalam suatu turnamen dan mendapat hadiah Rp30.000.000,-.

Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar Ali adalah:

5% x Rp25.000.000,-	=	Rp1.250.000,-
10% x Rp5.000.000,-	=	<u>Rp500.000,-</u> +
		Rp1.750.000,-

Keterangan:

Dari hadiah Rp30.000.000,-, yang Rp25.000.000,- dikenai tarif pajak 5%, dan sisanya Rp5.000.000,- dikenai tarif pajak 10%. Lihat lagi aturan tentang tarif pajak pada uraian sebelumnya.

- c. Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Isi dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 meliputi hal-hal berikut.
 - 1) Objek PPn dan PPnBM
Yang menjadi objek pajak ini adalah penyerahan barang dan jasa dari produsen ke produsen lain, dari produsen ke perantara perdagangan, atau dari produsen langsung ke konsumen.

Tidak semua penyerahan barang dan jasa akan terkena PPn dan PPnBM. Yang dikenai PPn dan PPnBM hanyalah penyerahan barang dan jasa tertentu yang dikenai pajak menurut undang-undang yang disebut dengan istilah BKP (Barang Kena Pajak) dan JKP (Jasa Kena Pajak). Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan BKP (Barang Kena Pajak) dan JKP (Jasa Kena Pajak) sehingga harus dikenakan PPn, kecuali barang dan jasa berikut:

- a) Barang yang tidak dikenai PPn
 - (1) Barang hasil tambang atau hasil pengeboran seperti minyak mentah, gas bumi dan lain-lain.
 - (2) Barang kebutuhan pokok seperti gabah, jagung, sagu, kedelai dan garam.
 - (3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran dan yang sejenis.
 - (4) Uang, emas batangan dan surat-surat berharga.
- b) Jasa yang tidak dikenai PPn
 - (1) Jasa pelayanan kesehatan seperti jasa dokter, jasa bidan dan jasa laboratorium.
 - (2) Jasa pelayanan sosial seperti jasa panti asuhan dan jasa pemakaman.
 - (3) Jasa pengiriman surat dengan prangko oleh PT Pos Indonesia.
 - (4) Jasa perbankan, asuransi dan swaguna usaha (*leasing*).
 - (5) Jasa keagamaan seperti jasa rumah ibadah dan jasa dakwah.
 - (6) Jasa pendidikan seperti jasa sekolah dan jasa kursus.
 - (7) Jasa kesenian dan hiburan yang sudah terkena pajak tontonan.
 - (8) Jasa penyiaran yang bukan bersifat iklan.
 - (9) Jasa angkutan umum baik darat maupun laut.
 - (10) Jasa tenaga kerja termasuk penyediaan dan penyelenggaraan latihan tenaga kerja.
 - (11) Jasa perhotelan meliputi jasa sewa kamar dan ruangan tertentu.
 - (12) Jasa pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, seperti jasa pemberian IMB (izin mendirikan bangunan) dan pembuatan KTP.

Jika PPn bisa dikenakan pada barang dan jasa, maka PPnBM hanya dikenakan pada barang. Oleh karena itu, namanya PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) tidak ada PPnJM (Pajak Penjualan atas Jasa Mewah).

Semua barang mewah akan dikenakan dua pajak, yaitu PPn dan PPnBM, maksud penggunaan PPnBM adalah menciptakan keadilan dalam pembebanan pajak sekaligus mengurangi pola hidup mewah yang tidak produktif. Adapun contoh barang mewah menurut SK Menkeu dan Pemberdayaan BUMN nomor 570/KMK.04/2000 adalah sebagai berikut:

- (1) Barang mewah yang dikenakan tarif pajak 10%. Contoh: susu ragi, yoghurt, keju.
 - (2) Barang mewah yang dikenakan tarif pajak 20%. Contoh: film foto, lensa objektif, teropong ganda dan kamera.
 - (3) Barang mewah yang dikenakan tarif pajak 30%. Contoh: kapal, bola golf, dan peralatan ski air.
 - (4) Barang mewah yang dikenakan tarif pajak 40%. Contoh: Bir, minuman alkohol, permadani sutra, pelana, koper kulit dan pakaian yang berharga Rp300.000,- ke atas.
 - (5) Barang mewah yang dikenakan tarif pajak 70%. Contoh: jam tangan, barang yang terbuat dari batu mulia dan vodka.
- c) Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
- Ada 5 macam DPP yang bisa digunakan untuk menghitung besarnya pajak yaitu:
- (1) Harga jual;
 - (2) Penggantian, yaitu uang yang diterima pemberi jasa (penghasil jasa) karena telah menyerahkan jasa kena pajak (JKP);
 - (3) Nilai impor;
 - (4) Nilai ekspor;
 - (5) Nilai lain yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan.
- Contoh:
- Dalam kegiatan impor, yang menjadi DPP adalah nilai impor, dalam penjualan barang kena pajak yang menjadi DPP adalah harga jual dan dalam penyerahan Jasa Kena Pajak yang menjadi DPP adalah penggantian.
- d) Tarif Pajak
- Tarif pajak PPn dan PPnBM ditentukan sebagai berikut:

Tabel 3.10 Tarif PPn dan PPnBM

No	Jenis Pajak	Sifat Pajak	Tarif Pajak
1	Pertambahan Nilai	Umum	10%
2	Pertambahan Nilai	Khusus (jika ada pertimbangan tertentu)	5% - 15%
3	Pertambahan Nilai untuk ekspor	-	0%
4	Penjualan atas Barang Mewah	Umum	10% - 75%
5.	Penjualan atas Barang Mewah untuk ekspor	-	0%

e) Contoh Menghitung PPn dan PPnBM

Contoh 1:

Pengusaha M pada bulan Januari 2004 menjual tunai BKP (Barang Kena Pajak) dengan harga jual Rp25.000.000,-.

Karena BKP yang dijual pengusaha M bukan merupakan barang mewah maka atas barang tersebut hanya dikenakan PPn (Pajak Pertambahan Nilai).

Besarnya PPn yang dipungut dari pengusaha M adalah:

$$10\% \times \text{Rp}25.000.000,- = \text{Rp}2.500.000,-.$$

Contoh 2:

Pengusaha N mengimpor BKP (Barang Kena Pajak) yang tergolong mewah dengan nilai impor Rp50.000.000,-. Karena tergolong BKP mewah maka pada barang tersebut dikenai dua macam pajak, yaitu PPn dan sekaligus PPnBM. Pada BKP yang diimpor pengusaha N ini dikenakan tarif PPn 10% dan tarif PPnBM 20%. Maka, besarnya PPn dan PPnBM adalah:

$$\text{PPn} = 10\% \times \text{Rp}50.000.000,- = \text{Rp}5.000.000,-$$

$$\text{PPnBM} = 20\% \times \text{Rp}50.000.000,- = \text{Rp}10.000.000,-$$

d. Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Isi dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 meliputi:

1) Objek Pajak

Yang menjadi objek PBB adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam dan diletakkan secara tetap di dalam tanah atau perairan. Contoh bangunan antara lain gedung, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, taman mewah, kilang minyak dan tempat olahraga.

Tidak semua bumi dan bangunan akan dikenakan PBB. Bumi dan bangunan yang tidak dikenakan PBB adalah bumi dan bangunan yang sebagai berikut:

- (1) Digunakan semata-mata melayani kepentingan umum.
- (2) Digunakan untuk kuburan dan sejenis.
- (3) Digunakan untuk hutan lindung, taman nasional dan yang sejenis.
- (4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat.
- (5) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional.

2) Subjek Pajak

Yang menjadi subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atau memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.

3) Dasar Pengenaan PBB

Yang menjadi dasar pengenaan PBB adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang merupakan harga rata-rata dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

4) Tarif PBB

Tarif PBB adalah sebesar 0,5%.

5) NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak)

Demi keadilan dan untuk membantu orang miskin maka dalam menghitung PBB, besarnya NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) harus dikurangi dulu dengan NJOPTKP sebesar Rp8.000.000,-. Itu berarti, orang yang memiliki bumi atau bangunan yang nilai jualnya hanya Rp8.000.000,- atau kurang dari itu maka dia tidak wajib membayar PBB.

Contoh:

Pak Toha memiliki bangunan dengan NJOP =Rp8.000.000,-
dikurangi NJOPTKP =Rp8.000.000,-
0

Karena setelah dikurangi hasilnya 0, berarti PBB-nya juga 0.

6) Rumus PBB

Besarnya PBB diperoleh dengan rumus $PBB = \text{Tarif} \times \text{NJKP}$

atau $PBB = 0,5\% \times \text{NJKP}$

Besarnya NJKP atau Nilai Jual Kena Pajak diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) $40\% \times \text{NJOP}$ Jika objek pajak berbentuk perumahan yang nilai jualnya 1 miliar rupiah ke atas.
- (2) $20\% \times \text{NJOP}$ untuk objek pajak yang lain (atau jika tidak memenuhi ketentuan no. 1 di atas).

7) Contoh Menghitung PBB

Agar jelas, berikut ini akan diberikan contoh menghitung PBB.

Pak Rahmad memiliki tanah seluas 162,5 m² dengan harga jual Rp400.000,- per m² dan memiliki bangunan seluas 50 m² dengan harga jual Rp600.000,- per m².

Hitunglah PBB yang harus dibayar Pak Rahmad!

Jawab:

NJOP tanah = 162,5 m² × Rp400.000,- = Rp65.000.000,-

NJOP bangunan = 50 m² × Rp600.000,- = Rp30.000.000,-

NJOP keseluruhan sebagai dasar pengenaan pajak = Rp95.000.000,-
 NJOPTKP = Rp8.000.000,-
 NJOP untuk perhitungan pajak Rp87.000.000,-
 NJKP = 20% x Rp87.000.000,- = Rp17.400.000,-
 (dikenakan 20% karena NJOP tidak mencapai 1 miliar rupiah dan bukan perumahan).
 PBB yang harus dibayar Pak Rahmad = 0,5% x Rp17.400.000,- = Rp87.000,-.
 PBB sebesar Rp87.000, hanya dibayar 1 x setahun.

KEGIATAN 3.3

Coba kalian minta tanda bukti pembayaran PBB yang dimiliki oleh orangtua kalian. Atau kalian bisa meminta contohnya pada Kantor Pajak yang terdekat. Kemudian, kalian amati bagaimana cara penghitungan pajak yang ada dalam tanda bukti tersebut! Adakah hal yang ingin kalian tanyakan?

- e. Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
 Undang-undang ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2000 yang mengatur tentang penetapan besarnya bea meterai. Selengkapnya UU No. 13 Tahun 1985 dan PP No. 24 Tahun 2000 memuat tentang:
- 1) Objek Bea Meterai
 Yang merupakan objek bea meterai adalah dokumen-dokumen yang berbentuk sebagai berikut:
 - a) Surat perjanjian dan surat lain yang digunakan sebagai alat pembuktian.
 - b) Akta-akta Notaris dan salinannya.
 - c) Akta-akta yang dibuat PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan rangkap-rangkapnya.
 - d) Surat-surat yang menyebutkan penerimaan uang, yang menyatakan pembukuan atau penyimpanan uang dalam rekening bank, yang memberitahukan saldo rekening di bank dan surat-surat yang berisi pengakuan bahwa sebagian atau seluruh utang telah dilunasi.
 - e) Surat-surat berharga seperti wesel, promes, aksep dan cek.
 - f) Efek seperti saham dan obligasi.

Adapun dokumen-dokumen yang berbentuk: surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti pengiriman dan penerimaan barang, segala bentuk ijazah, akta kelahiran, surat nikah, tanda terima gaji dan yang sejenisnya, tanda penerimaan uang negara, tanda penerimaan uang intern organisasi, semua jenis kuitansi, surat gadai, dan kupon pembagian keuntungan tidak dikenakan bea meterai.

2) Tarif Bea Meterai

Tarif Bea Meterai ada dua macam yaitu Rp3.000,- dan Rp6.000,- dengan ketentuan sebagai berikut.

a) Bea Meterai Rp3.000,- dikenakan pada dokumen berikut:

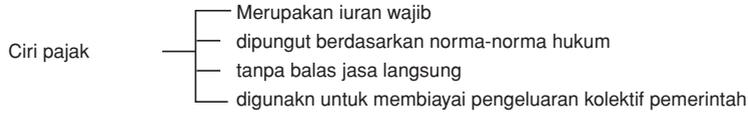
- (1) Surat yang memiliki harga nominal lebih dari Rp250.000,- tetapi tidak lebih dari Rp1.000.000,- yang menyebut penerimaan uang, yang menyatakan pembukuan atau penyimpanan uang dalam rekening bank, yang memberitahukan saldo rekening di bank dan surat pengakuan bahwa sebagian atau seluruh utang telah dilunasi.
- (2) Surat berharga seperti wesel, promes dan aksep yang memiliki harga nominal lebih dari Rp250.000,- tetapi tidak lebih dari Rp1.000.000,-.
- (3) Efek seperti saham dan obligasi yang berharga nominal lebih dari Rp250.000,- tetapi tidak lebih dari Rp1.000.000,-.
- (4) Cek dan bilyet giro yang berharga nominal lebih dari Rp250.000,-.

b) Bea Meterai Rp6.000,- dikenakan pada dokumen berikut:

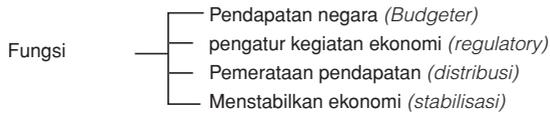
- (1) Surat yang memiliki harga nominal lebih dari Rp1.000.000,- yang menyebut penerimaan uang, yang menyatakan pembukuan atau penyimpanan uang dalam rekening bank, yang memberitahukan saldo rekening di bank dan surat pengakuan bahwa sebagian atau seluruh utang telah dilunasi.
- (2) Surat berharga seperti wesel, promes dan aksep yang berharga nominal lebih dari Rp1.000.000,-.
- (3) Efek seperti saham dan obligasi yang berharga nominal lebih dari Rp1.000.000,-.
- (4) Surat perjanjian dan surat lain seperti surat kuasa, surat hibah dan surat pernyataan yang dibuat dengan tujuan sebagai alat pembuktian.
- (5) Akta-akta Notaris dan salinan-salinannya.
- (6) Akta-akta PPAT dan rangkap-rangkapnya.

Pajak

1. **Arti** : iuran yang wajib dibayar oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat, balas jasa (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.



2. **Dasar Hukum pajak** : Undang-undang 1945 pasal 23 dan berbagai Undang-undang perpajakan yang sudah disempurnakan (terbaru)



3. **Sistem pemugutan pajak**

- *Official asesment system.*
- *Self asesment system.*
- *Semi self asesment system.*
- *With Holding system*

Asas pemugutan pajak



4. **Tarif Pajak Menurut**

- Tarif Tetap
- Tarif Proporsional
- Tarif Progresif
- Degresif



6. Sistem Perpajakan di Indonesia → Pembaruan berupa:
Merubah berbagai Undang-undang perpajakan yang sudah tidak sesuai
Membuat Undang-undang Perpajakan baru yang diperlukan.

Kata Kunci

APBD
APBN
bea materai
Belanja Aparatur Daerah
Belanja Pelayanan Publik
belanja pemerintah pusat
Daftar Anggaran Satuan Kerja
Daftar Isian Kegiatan
Daftar Isian Proyek
Daftar Usulan Kegiatan
Daftar Usulan Proyek
dana alokasi khusus
dana alokasi umum
dana bagi hasil
dana perimbangan
ekonomi biaya tinggi
ekskausatif
format APBD
format APBN
fungsi alokasi
fungsi alokasi
fungsi distribusi
fungsi distribusi
fungsi otorisasi
fungsi pengawasan
fungsi perencanaan
fungsi stabilitasasi
hibah
hit cost economy
kebijakan anggaran
kebijakan fiskal
keuangan negara
mark up
PAD (pendapatan asli daerah)
pajak
pajak bumi dan bangunan
pajak langsung
pajak penghasilan
pajak penjualan
pajak penjualan barang mewah
pajak tak langsung
pembiayaan
penerimaan bukan pajak
penerimaan dalam negeri
penerimaan perpajakan
pengeluaran daerah
pengeluaran rutin
penyelundupan
perhitungan anggaran negara
pungli
Rencana Anggaran Satuan Kerja
RAPBD
RAPBN
retribusi
sumbangan
Tim Anggaran Eksekutif
transfer

Evaluasi Akhir Bab

A. Pilih jawaban yang paling tepat!

1. APBN diartikan sebagai suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber
 - A. Pendapatan dan investasi negara selama 1 tahun
 - B. Pendapatan dan pengeluaran menteri selama 2 tahun
 - C. Pendapatan negara dan pengeluaran negara selama 1 tahun
 - D. Pendapatan dan pengeluaran negara selama 5 tahun
 - E. Penghasilan, investasi dan tabungan negara selama 1 tahun
2. Dengan adanya APBN, pemerintah dapat membagikan pendapatan yang diterima sesuai dengan sasaran yang dituju. ini adalah fungsi
 - A. Distribusi
 - B. Alokasi
 - C. Efisiensi
 - D. Disposibility
 - E. Stabilisasi
3. Jika RAPBN ditolak maka pemerintah
 - A. Membuat RAPBN yang baru
 - B. Membujuk DPR agar diterima
 - C. Mengadakan demonstrasi
 - D. Mengundurkan diri
 - E. Menggunakan APBN tahun lalu
4. Pertanggungjawaban APBN dibuat pemerintah dalam bentuk
 - A. PAN (Pertanggungjawaban Anggaran Negara)
 - B. PAN (Perhitungan Anggaran Negara)
 - C. PAP (Perhitungan Anggaran Pemerintah)
 - D. DAP (Daftar Anggaran Pemerintah)
 - E. DAN (Daftar Anggaran Negara)
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan termasuk
 - A. Penerimaan bukan pajak
 - B. Bagian laba BUMN
 - C. Penerimaan pajak perdagangan internasional
 - D. Penerimaan pajak dalam negeri
 - E. Penerimaan negara bukan pajak

- C. Pengelolaan Anggaran (*The Finance Budget Approach*)
 D. Pembiayaan Fungsional (*Functional Finance*)
 E. Anggaran Dinamis
16. Apabila suatu negara kekurangan modal untuk membiayai semua pengeluarannya (baik pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan maupun belanja daerah), sebaiknya negara tersebut melakukan kebijakan anggaran
- A. Defisit
 B. Seimbang
 C. Surplus
 D. Ekonomis
 E. Dinamis
17. Dari pernyataan berikut ini, yang bukan merupakan fungsi APBN adalah
- A. Untuk mengalokasikan pendapatan yang diterima sesuai sasaran yang dituju.
 B. Untuk menentukan alokasi besarnya belanja pegawai, belanja barang dan lain-lain.
 C. Untuk mendistribusikan pendapatan secara adil dan merata.
 D. Untuk membuat kebijakan harga minimum bagi petani.
 E. Untuk menstabilkan keadaan perekonomian.
18. APBN dapat digunakan untuk menstabilkan perekonomian. Misalnya dalam keadaan inflasi, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar pemerintah sebaiknya ...
- A. Menurunkan pajak
 B. Menaikkan pajak
 C. Tidak mengubah pajak
 D. Meningkatkan pengeluaran
 E. Mengubah manajemen pajak
19. Perhatikan pernyataan berikut
- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Pemerataan | 4. Efisiensi |
| 2. Kemandirian | 5. Penajaman prioritas |
| 3. Keadilan | 6. Pengoptimalan |
- yang merupakan asas penyusunan APBN adalah
- A. 1, 2, 3
 B. 2, 3, 4
 C. 2, 4, 6
 D. 2, 4, 5
 E. 1, 2, 6
20. APBN di tetapkan setiap satu tahun sekali. Hal itu sesuai dengan bunyi ...
- A. UU No. 1 tahun 1994 pasal 23
 B. UU No. 25 tahun 1994 pasal 26

- C. Keppres No. 42 tahun 2002
 - D. UUD 1945 Pasal 23
 - E. UUD 1945 pasal 32
21. Yang bukan ciri-ciri pajak adalah
- A. dipungut berdasarkan norma-norma hukum
 - B. merupakan iuran wajib
 - C. mendapat imbalan secara langsung
 - D. digunakan untuk membiayai pengeluaran kolektif pemerintah
 - E. tidak mendapat balas jasa secara langsung
22. Karcis masuk tempat wisata, iuran parkir, iuran sampah adalah contoh dari
- A. pajak
 - B. sumbangan
 - C. iuran
 - D. PPn
 - E. retribusi
23. Dengan menyempurnakan tata cara perpajakan, pemerintah dapat menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Pernyataan tersebut merupakan gambaran fungsi pajak sebagai. . . .
- A. alat pengatur kegiatan ekonomi
 - B. sumber pendapatan negara
 - C. alat pemerataan pendapatan
 - D. alat untuk menstabilkan ekonomi
 - E. alat penyempurnaan hukum
24. Apabila wajib pajak menghitung sendiri pajak yang harus dibayarnya maka sistem pemungutan pajak yang dipakai adalah
- A. *Self Assesment System*
 - B. *Official Assesment System*
 - C. *Semi Self Assesment System*
 - D. *With Holding System*
 - E. *Semi Holding System*
25. Sebaiknya pemungutan pajak tidak memberatkan wajib pajak sehingga wajib pajak merasa senang dalam membayar pajak. Hal ini merupakan asas atau prinsip
- A. keadilan
 - B. ekonomi
 - C. kesenangan
 - D. kelayakan
 - E. kepastian

26. Pajak yang tidak dipungut secara berkala, tetap hanya dipungut jika terjadi perbuatan atau peristiwa tertentu, serta dapat dialihkan kepada pihak lain disebut pajak
- A. langsung
B. pengalihan
C. tidak langsung
D. Progresif
E. pusat

27.

Penghasilan	Tarif
Rp 0 - Rp50.000.000,-	8 %
Rp50.000.001 - Rp100.000.000,-	10 %
di atas Rp100.000.000,-	12 %

Tabel di atas menggambarkan tarif pajak secara

- A. agresif
B. degresif
C. progresif
D. proporsional
E. tetap
28. Bapak Harun memiliki penghasilan kena pajak sebesar Rp200.000.000,- satu tahun maka berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar adalah
- A. Rp25.000.000,-
B. Rp50.000.000,-
C. Rp10.000.000,-
D. Rp20.000.000,-
E. Rp75.000.000,-
29. Pajak penghasilan individu, yang merupakan Pajak Langsung berpengaruh terhadap besarnya
- A. Pendapatan Nasional Neto
B. Produk Nasional Neto
C. Pendapatan Perseorangan
D. Pendapatan Bebas
E. Produk Nasional Bruto
30. Berikut ini yang merupakan objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah
- A. tempat pemakaman
B. hutan lindung
C. kantor diplomat
D. perusahaan jaket
E. taman nasional

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut!

1. Apa pengertian keuangan negara?
2. Jelaskan cara-cara penyusunan APBN!
3. Sebutkan macam-macam penerimaan dalam negeri yang tercantum dalam APBN tahun 2000!

4. Sebutkan dampak-dampak APBN terhadap perekonomian!
5. Jelaskan perubahan struktur penyajian APBN yang dimulai sejak April 2000!
6. Sebutkan jenis-jenis pembelanjaan daerah yang tercantum dalam APBD!
7. Jelaskan pengertian kebijakan anggaran!
8. Sebut dan Jelaskan jenis-jenis kebijakan anggaran jika dilihat dari perbandingan antara jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran!
9. Bagaimana menurut kalian cara-cara untuk memberantas Korupsi?
10. Jelaskan perbedaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus!
11. Jelaskan pengertian kebijakan fiskal!
12. Jelaskan perbedaan antara pajak dengan pungutan resmi lain ditinjau dari sisi balas jasa, objek pemungutan dan instansi pemungut
13. Jelaskan perbedaan antara *Self Assessment System* dengan *Semi Self Assessment System*!
14. Benarkah pajak penghasilan di Indonesia menganut tarif Progresif? Jelaskan pendapatmu!
15. Apa tujuan pemerintah mengenakan NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) dalam menghitung PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)?
16. Ardi sudah menikah, tetapi belum mempunyai anak. Ardi Memiliki penghasilan Neto Rp1.000.000,- per bulan. Hitung Pajak penghasilan yang harus dibayar Ardi!
17. Pak Rusli memiliki objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai berikut:
 - a. Tanah seluas 3.000 m² dengan harga jual Rp500.000,- per m²
 - b. Bangunan seluas 1000 m² dengan harga jual Rp1000.000,- per m²
 - c. Taman mewah seluas 500 m² dengan harga jual Rp1.500.000,- per m²
 Hitung PBB terutang yang harus dibayar oleh Pak Rusli!
18. Jelaskan perbedaan antara pajak langsung dengan pajak tidak langsung!
19. Sebutkan 5 contoh bidang jasa yang tidak dikenai PPN!
20. Jelaskan pengertian bumi dan bangunan dalam PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)!

C. Uka (Usut Kasus)!

Proses Penyusunan APBD Memakai Paradigma Lama Menekankan pada Belanja Aparatur yang Tidak Proporsional

Proses penyusunan anggaran daerah yang dilakukan Pemerintah Propinsi Jawa Barat masih belum beranjak dari paradigma lama. Penganggaran yang dilakukan eksekutif dipandang masih tetap memberi

prioritas besar pada belanja aparatur sehingga menafikan anggaran bagi publik yang langsung terkait dengan kesejahteraan rakyat.

Hal itu ditemukan pada pos anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes). Dilihat dari komposisi anggaran belanja aparatur yang relatif kecil yakni 18,4% dibandingkan belanja publik 81,6%. Namun, jika diperhatikan lebih saksama, belanja aparatur hampir tersebar dan dominan pada semua program kegiatan, sehingga terdapat pembengkakan terhadap biaya aparatur.

Sumber: Pikiran Rakyat

Setelah membaca berita di atas, jawablah pertanyaan berikut!

1. Mengapa proses penyusunan APBD masih memakai paradigma lama? Apakah karena aturan penyusunan yang tidak jelas, atau karena para penyusunnya yang kurang bertanggung jawab?
2. Menurut kalian, bagaimana caranya agar penyusunan APBD lebih memerhatikan kesejahteraan rakyat banyak?

Bab IV

Pasar Uang dan Pasar Modal



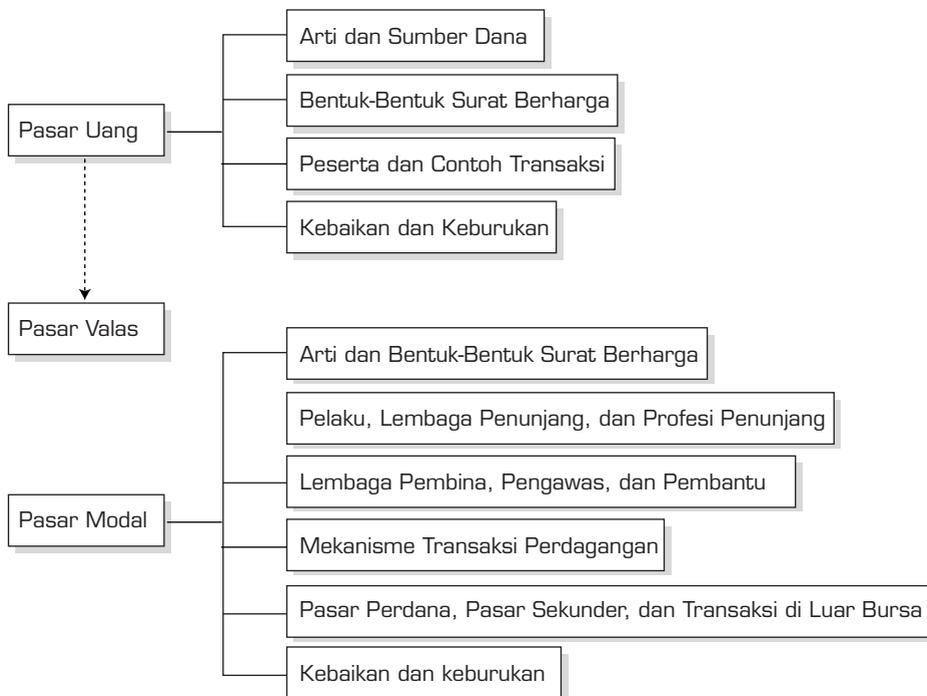
Sumber: www.ksei.co.id/Fokuss/Edisi%2016/hal1.htm

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat:

1. mendeskripsikan konsep pasar modal;
2. mendeskripsikan jenis produk dalam pasar modal;
3. mendeskripsikan mekanisme kerja bursa efek;
4. membedakan pasar modal dengan pasar uang;
5. mendeskripsikan konsep pasar uang;
6. menjelaskan sumber dana dan pelaku pasar uang;
7. menyebutkan bentuk-bentuk pasar uang serta kebaikan dan keburukan pasar uang.

PETA KONSEP



Dalam kehidupan sehari-hari, bila kita belanja ke pasar tradisional kita harus membawa uang sebagai alat pembayaran. Membeli roti, es krim, kue, sayur, terigu dan sebagainya semua harus dibayar menggunakan uang.

Demikian juga bila kita pergi ke pasar bunga, *mall*, toserba swalayan, dan lain-lain, umumnya kita akan membayar dengan menggunakan uang. Tetapi bagaimana jadinya bila seorang pengusaha ingin berbelanja di pasar uang? Apakah dia juga harus membawa uang yang diinginkannya? Apakah sebenarnya pasar uang itu? Berikut ini kita akan membahasnya satu persatu. Dan supaya lengkap kita juga akan mempelajari apa itu pasar modal, dan pasar valuta. Setelah membacanya, dijamin wawasan kalian akan bertambah luas.

A. Pasar Uang

Untuk memahami pasar uang, berikut ini kita akan membahas pengertian pasar uang, sumber dana pasar uang, bentuk-bentuk surat berharga pasar uang, peserta pasar uang, contoh transaksi pasar uang, serta kebaikan dan keburukan pasar uang.

1. Pengertian Pasar Uang

Apa yang harus dilakukan pengusaha bila suatu saat tidak memiliki dana untuk membayar pegawai? Bagaimana cara memenuhi kebutuhan uang yang mendadak, sedangkan perusahaan hanya memiliki uang sedikit? Bagaimana cara yang cepat untuk memperoleh pinjaman uang?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut ternyata bisa dijawab dengan mudah, karena di dunia usaha sudah dikenal adanya pasar uang. Pasar uang adalah pasar yang memperjualbelikan uang dalam bentuk surat-surat berharga yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun. Atau bisa juga diartikan sebagai pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran uang dalam bentuk surat-surat berharga yang berjangka waktu kurang dari satu tahun (jangka pendek).

Permintaan akan uang berasal dari pihak yang ingin meminjam atau pihak yang membutuhkan kredit, sedangkan penawaran uang berasal dari pihak yang memiliki kelebihan uang. Daripada uang tersebut mengganggu (*idle money*) maka uang tersebut dipinjamkan agar dapat diperoleh keuntungan berupa bunga atau diskonto.

Pasar uang bisa digolongkan sebagai pasar abstrak. Pasar abstrak adalah pasar yang memperjualbelikan barang tetapi barangnya tidak tersedia di

pasar tersebut, yang ada hanyalah barang sebagai contoh yang bentuknya bisa berupa: barang itu sendiri (dalam jumlah sedikit), brosur atau surat berharga. Dengan demikian, dalam pasar uang tidak akan ditemui beberapa penjual yang sedang menjajakan uang (seperti para pedagang buah sedang menjajakan buah), tapi dalam pasar uang, posisi uang diwakili oleh surat-surat berharga jangka pendek. Oleh karena itu, pasar uang digolongkan sebagai pasar abstrak.

Selain pasar uang yang tergolong pasar abstrak adalah pasar modal, pasar tenaga kerja, dan pasar komoditas. Di pasar komoditas yang diperjualbelikan adalah contoh barang dalam jumlah sedikit, baru bila terjadi transaksi maka penjual akan mengirimkan/memberikan kepada pembeli sejumlah besar barang sesuai contoh barang yang dipilihnya.

Belakangan ini pengertian pasar uang sudah berkembang lebih luas. Pasar uang tidak hanya diartikan sebagai pasar yang memperjualbelikan surat-surat berharga jangka pendek tapi termasuk pasar yang memperjualbelikan valuta asing (mata uang asing). Jadi, dalam hal ini pasar valuta asing dianggap sebagai salah satu bentuk dari pasar uang.

Dengan demikian, secara luas pasar uang diartikan sebagai pasar yang memperjualbelikan surat-surat berharga jangka pendek dan juga memperjualbelikan valuta-valuta asing (Adapun pembahasan lengkap tentang pasar valuta asing bisa dilihat di halaman-halaman selanjutnya pada bab ini).

2. Sumber Dana Pasar Uang

Uang atau dana yang diperjualbelikan dalam pasar uang dapat berasal dari berbagai sumber, sebagai berikut:

- a. Dana masyarakat umum.
- b. Dana dari perusahaan-perusahaan (seperti perusahaan dagang, industri, atau jasa).
- c. Dana dari bank (baik bank pemerintah atau swasta).
- d. Dana dari lembaga keuangan bukan bank (seperti Yayasan Dana Pensiun).
- e. Dana dari kelebihan kas BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

3. Bentuk Surat-Surat Berharga Pasar Uang

Adapun bentuk-bentuk surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar uang meliputi:

- a. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- b. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).

- c. Pinjaman sewaktu-waktu (*Call Money*).
- d. Surat Utang Negara (SUN).
- e. Promes (*Promissory Notes*).
- f. Aksep (*Banker's Acceptent*).
- g. Wesel dagang (*Treasurry Bill*).
- h. *Reporchase Agreement*.
- i. Sertifikat deposito jangka pendek.
- j. Kertas perbendaharaan negara (*Commercial Paper*).

4. Peserta Pasar Uang dan Contoh Transaksi Pasar Uang

Peserta atau pelaku dalam jual beli di pasar uang ternyata dilakukan oleh banyak pihak, yaitu bank-bank, yayasan dana pensiun, perusahaan asuransi, koperasi, perusahaan dagang, perusahaan industri, perusahaan jasa, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Berikut ini akan diuraikan contoh-contoh transaksi yang terjadi di pasar uang.

Contoh 1

Bila suatu bank memerlukan uang tunai segera yang akan digunakan untuk membayar karyawan atau untuk keperluan lain maka bank tersebut dapat meminjamnya dari bank lain dengan cara mengeluarkan promes atau aksep yang telah disahkan oleh bank yang bersangkutan. Selanjutnya promes atau aksep ini dapat dijual kepada Ficorinvest, kemudian Ficorinvest akan menukarnya dengan SBPU. Ini berarti dengan menjual promes atau aksep kepada Ficorinvest, bank tersebut akan memperoleh sejumlah uang yang dibutuhkannya. Selanjutnya SBPU ini dapat diperjualbelikan dengan mendapat keuntungan berupa bunga atau diskonto.

Ficorinvest seperti yang disebut di atas adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang sedang membutuhkan dana. Tugas Ficorinvest adalah menyimpan surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar uang. Lewat Ficorinvest, pihak yang memiliki kelebihan dana akan membeli surat-surat berharga, sedang pihak yang membutuhkan dana akan menjual surat-surat berharga.

Hal yang perlu diingat, tidak semua surat berharga harus dijual/dibeli lewat Ficorinvest, contohnya *call money* (pinjaman sewaktu-waktu). *Call money* dapat diperjualbelikan langsung melalui telepon tanpa menggunakan jasa Ficorinvest.

Contoh 2

Bila suatu lembaga keuangan atau perusahaan memiliki kelebihan uang tunai maka daripada menganggur uang tersebut dapat dibelikan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang memiliki jangka waktu pelunasan tiga puluh hari, enam puluh hari, atau sembilan puluh hari. Ketika pembeli menyertakan uang pembelian SBI, saat itu juga pembeli memperoleh potongan di awal, yang disebut diskonto. Jadi, dalam pembelian tersebut pembeli hanya membayar di bawah nilai nominal (nilai nominal = nilai yang tercantum dalam surat berharga). Kemudian, pada saat jatuh tempo (pelunasan) pembeli akan dibayar oleh Bank Indonesia sebesar nilai nominal. Dengan demikian, keuntungan yang didapat pembeli adalah selisih antara pembayaran oleh pembeli dengan nilai nominal. Adakalanya pembeli memerlukan uang sebelum waktu jatuh tempo. Oleh karena itu, dia bisa menjual SBI tersebut kepada pihak lain.

5. Kebaikan (Manfaat) dan Keburukan (Risiko) Pasar Uang

Kebajikan pasar uang berkaitan erat dengan manfaat yang diperoleh dengan adanya pasar uang. Kebajikan atau manfaat pasar uang adalah, sebagai berikut.

- a. Memberi wahana untuk memberi pinjaman jangka pendek.
- b. Mencegah terjadinya uang menganggur (*idle money*); yaitu uang yang disimpan dan tidak digunakan untuk kegiatan produktif, misal disimpan di brankas (lemari penyimpanan uang).
- c. Ikut membantu pengusaha memajukan usahanya. Ini juga berarti ikut mendorong kemajuan ekonomi nasional.
- d. Dengan adanya pasar uang, Bank Indonesia sebagai bank sentral bisa ikut mengendalikan jumlah uang yang beredar.

Adapun keburukan pasar uang berkaitan erat dengan risiko yang dialami pelaku pasar uang. Keburukan atau risiko tersebut adalah, sebagai berikut.

- a. Bila peminjam (debitur) tidak bisa mengembalikan pinjamannya saat pelunasan (jatuh tempo) tiba. Ini disebut risiko gagal bayar.
- b. Bila terjadi inflasi yang mengakibatkan turunnya nilai uang. Ini berarti akan menurunkan daya beli dari keuntungan yang diterima dari jual beli di pasar uang. Ini disebut risiko inflasi.
- c. Bila surat-surat berharga yang ingin dijual tidak cepat laku, padahal perusahaan/ lembaga membutuhkan uang tunai secepatnya. Ini disebut risiko likuiditas.

- d. Bila surat-surat berharga terpaksa dijual dengan harga lebih rendah daripada saat membeli. Ini disebut risiko *capital loss*.

KEGIATAN 4.1

Mengupas George Soros

Tahukah kalian bahwa krisis moneter yang dialami Indonesia mulai tahun 1997 yang dampaknya masih dirasakan sampai sekarang, berkaitan dengan orang yang bernama George Soros. George Soros dituduh telah menjatuhkan nilai tukar rupiah sehingga Indonesia mengalami Krisis Moneter.

Siapa George Soros?

Secara singkat Soros adalah seorang pelaku pasar yang memiliki lembaga bernama Quantum Fund dengan kekayaan senilai \$ 12 miliar. Surat kabar The New York Times menjulukinya “Maha Bintang di antara Manajer Dunia”.

Menurut Soros sendiri, dia adalah orang yang memanfaatkan pasar uang sebagai laboratorium untuk menguji teori-teorinya. Dan berhasil!

Tugas kalian adalah:

1. Carilah informasi dari buku, majalah atau koran yang memberitakan sepak terjang Soros sehingga menyebabkan krisis moneter di Indonesia.
Supaya cepat, gunakan buku, majalah atau koran yang diterbitkan tahun 1997. Agar mudah kunjungilah perpustakaan di kotamu.
 2. Setelah semua informasi terkumpul susunlah menjadi sebuah karangan/esai yang berjudul “Peran George Soros dalam Krisis Moneter di Indonesia tahun 1997”.
- Jangan lupa. Lakukan tugas ini secara berkelompok!

B. Pasar Modal

Apa sebenarnya pasar modal tersebut? Untuk mengetahui tentang pasar modal, berikut ini kita akan membahasnya lebih lanjut.

1. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal hampir sama dengan pasar uang. Bedanya, pasar uang memperjualbelikan uang dalam bentuk surat-surat berharga yang berjangka waktu kurang dari satu tahun (jangka pendek), sedangkan pasar modal adalah pasar yang memperjualbelikan uang dalam bentuk surat-surat berharga yang berjangka waktu lebih dari satu tahun (jangka panjang). Atau: pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran uang dalam bentuk surat-surat berharga yang berjangka waktu lebih dari satu tahun. Dalam pasar modal, surat berharga disebut juga dengan istilah “efek”.

Lebih rinci, Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal, telah mengartikan pasar modal sebagai, kegiatan yang bersangkutan dengan:

- a. Penawaran umum dan penawaran efek (surat berharga);
- b. Perusahaan publik (umum) yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya;
- c. Lembaga atau profesi yang berkaitan dengan efek.

Pasar modal disebut juga bursa efek. Ada tiga macam bursa efek di Indonesia, yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES), dan Bursa Paralel Indonesia. Berbeda dengan BEJ dan BES, Bursa Paralel Indonesia merupakan bursa yang didirikan sebagai pilihan alternatif bagi pemodal yang memiliki dana terbatas.

Dalam pasar modal kita akan mengenal istilah berikut:

- a. Pemodal/Investor, yaitu pihak yang memiliki modal atau dana untuk dipinjamkan; dan
- b. Emiten, yaitu pihak yang ingin meminjamkan modal atau dana.

Kedua pihak tersebut akan saling bertemu membentuk kesepakatan melalui mekanisme tertentu yang melibatkan beberapa pihak lain seperti yang sudah diatur oleh peraturan pasar modal.

Karena kemajuan zaman, pasar modal terus mengalami perubahan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai seluk beluk pasar modal berikut ini akan mengambil perkembangan pasar modal terbaru yang sebagian besar diakses langsung dari internet.

2. Bentuk-Bentuk Surat Berharga yang Diperjualbelikan dalam Pasar Modal

Surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar modal berbeda dengan surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar uang.

Adapun surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar modal meliputi saham biasa (*common stock*), saham preferen (*preferred stock*), obligasi (*bond*), obligasi konversi (*convertible bond*), *right*, waran, dan reksadana.

a. Saham Biasa (*Common Stock*)

Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan dari seseorang/badan usaha terhadap suatu perusahaan. Jadi, bila seseorang membeli sebagian saham perusahaan N berarti orang tersebut telah memiliki sebagian dari perusahaan N. Dalam pasar modal, saham atau saham biasa (*Common Stock*) merupakan saham yang paling dikenal masyarakat dan yang paling banyak digunakan untuk menarik dana dari masyarakat. Dengan membeli saham, masyarakat akan memperoleh dividen (pembagian keuntungan). Dividen akan dibagikan kepada pembeli saham bila perusahaan mendapat keuntungan; bila tidak mendapat keuntungan maka pembeli saham tidak memperoleh dividen.

b. Saham Preferen (*Preferred Stock*)

Saham preferen disebut juga saham istimewa, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Memiliki hak paling dulu mendapat pembagian dividen.
2. Memperoleh dividen dalam jumlah yang tetap atau dalam persentase yang tetap.
3. Memiliki hak tambahan tertentu, seperti: memperoleh tambahan laba selain yang sudah dibagikan secara tetap.

I N F O

Achmad Bakrie: "Tidak Keberatan Saham Milik Keluarganya Berkurang Menjadi 40%"

Achmad Bakrie (1916-1988), yang lahir di Lampung ini adalah salah seorang dari wirausahawan pribumi yang berhasil mempertahankan usahanya sampai dua generasi, bahkan mampu mengembangkannya menjadi salah satu konglomerat terkemuka di Indonesia.

Keinginan menjadi wirausahawan yang telah dipegangnya sejak kecil mendorongnya membuka usaha sendiri. Pada tahun 1942 ia mendirikan CV Bakrie di Teluk Betung, sebuah usaha perdagangan

hasil bumi kecil-kecilan, karena pada masa itu Belanda memang membatasi usaha pribumi.

Meskipun usaha dagang tidak sepenuhnya ditinggalkannya, Bakrie kemudian meningkat menjadi industriawan ketika pada tahun 1957 ia membeli NV Kawat, pabrik milik Belanda yang memproduksi berbagai produk jenis kawat. Dua tahun kemudian ia mendirikan sebuah pabrik pipa baja ukuran kecil. Dalam beberapa tahun setelah itu Bakrie melanjutkan diversifikasinya dengan mendirikan pabrik pengecoran logam dan pabrik pengolahan karet mentah (*crumbrubber*). Mulailah Bakrie merintis perwujudan cita-citanya memiliki perusahaan besar yang mampu bertahan sampai beberapa keturunan. "Angan-angan saya adalah janganlah perusahaan ini sampai seumur saya atau sampai kepada anak-anak saya saja. Tidak, saya ingin perusahaan ini hidup terus beratus-ratus tahun seperti perusahaan orang di Eropa dan Amerika."

Pandangan dan angan-angan Achmad Bakrie ternyata tidak terhenti sampai di situ. Ia ingin Bakrie menjadi sebuah *public company* yang mampu mempekerjakan paling sedikit 40.000 orang. Ia tidak keberatan saham milik keluarganya berkurang menjadi 40% atau bahkan 20%, selama namanya tetap dipertahankan. Untuk itu, Bakrie tua bersedia mundur (1980) dan memberikan kesempatan kepada keempat orang anaknya yang telah dipersiapkan dengan disiplin ketat sejak kecil di antaranya adalah Aburizal Bakrie (Ical).

Selain sibuk berbisnis, Achmad Bakrie tidak lupa beramal. Ia mendirikan Yayasan Bakrie pada tahun 1980. Yayasan ini memberikan bantuan bea siswa dan tunjangan buat siswa SD sampai dengan perguruan tinggi.

Sumber: *Ensiklopedi Ekonomi Bisnis dan Manajemen*

c. Obligasi (*Bond*)

Obligasi adalah tanda bukti peminjaman sejumlah uang dengan tingkat bunga tertentu yang akan dilunasi pada waktu tertentu. Oleh karena itu, pembeli obligasi akan memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima setiap periode tertentu, misal setiap tiga bulan, enam bulan, atau satu tahun sekali. Dan pada saat jatuh tempo (pelunasan) pembeli obligasi akan menerima kembali uang yang telah dipinjamkannya.

Berbeda dengan dividen saham, bunga obligasi tetap wajib dibayarkan walau perusahaan tidak mendapat keuntungan.

d. Obligasi Konversi (*Convertible Bond*)

Obligasi konversi hampir sama dengan obligasi biasa. Bedanya obligasi konversi bisa ditukar dengan sejumlah saham biasa setelah memenuhi syarat tertentu. Salah satu contoh syarat tersebut adalah suatu obligasi konversi baru dapat ditukar menjadi tiga lembar saham biasa setelah 1 Januari pada tahun tertentu.

e. *Right*

Right adalah surat berharga yang memberikan hak bagi pemodal untuk membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. *Right* merupakan produk turunan dari saham. *Right issue* (penerbitan *right*) dilakukan emiten untuk menambah jumlah saham yang beredar. Ini berarti penerbitan *right* juga akan menambah jumlah modal/dana yang dimiliki emiten.

f. Waran

Seperti *right*, waran juga merupakan surat berharga yang memberikan hak untuk membeli saham biasa pada waktu tertentu dan harga tertentu. Bedanya, waran umumnya dijual bersamaan dengan surat berharga lain, seperti saham dan obligasi. Dalam hal ini, waran bisa dipandang sebagai bonus dalam penjualan surat berharga untuk menarik minat pemodal. Contoh: PT "B" menerbitkan obligasi dengan jatuh tempo (pelunasan) setelah lima tahun. Bila kita membeli obligasi PT "B" maka kita akan mendapat bonus dua waran. Selanjutnya, dari setiap waran kita berhak membeli satu lembar saham lagi mulai akhir tahun ketiga. Dengan iming-iming seperti ini diharapkan pemodal akan tertarik membeli obligasi PT "B".

g. Reksadana

Reksadana merupakan sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, memiliki keinginan berinvestasi, tetapi hanya memiliki waktu dan pengetahuan terbatas tentang pasar modal. Selain itu, dengan adanya reksadana diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Ada dua bentuk reksadana, yaitu bentuk perseroan dan bentuk kontrak.

3. Pelaku Pasar Modal

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, di pasar modal akan bertemu dua pihak, yaitu pihak yang memiliki modal untuk dipinjamkan atau diinvestasikan (disebut pemodal/investor) dan pihak yang ingin meminjam

modal (disebut emiten). Sesuai ketentuan pasar modal, dua pihak tersebut tidak bisa bertemu secara langsung untuk membuat transaksi, tetapi harus melibatkan beberapa pihak lain sesuai peraturan pasar modal. Dengan demikian, pelaku dalam pasar modal meliputi pemodal/investor, emiten, perusahaan efek, dan danareksa (*investment fund*).

a. Pemodal/Investor

Pemodal adalah pihak yang memiliki modal untuk dipinjamkan atau diinvestasikan. Modal dipinjamkan oleh pemodal dengan cara membeli surat-surat berharga yang ditawarkan oleh emiten. Dengan demikian berarti pemodal telah meminjamkan uangnya kepada emiten. Dan dari pembeli tersebut pemodal bisa memperoleh keuntungan berupa dividen atau bunga.

Kemudian, untuk memperoleh keuntungan lebih, pemodal bisa menjual kembali surat berharga yang telah dibelinya dengan tujuan mendapat *capital gain*, yaitu keuntungan berupa selisih dari harga jual dikurangi harga beli. Misal: ketika membeli saham harga per lembar hanya Rp300,-, ketika dijual harga per lembar Rp350,-. Berarti *capital gain*-nya sebesar Rp50,- per lembar. Bayangkan berapa keuntungannya bila yang dijual adalah 30.000 lembar.

Hal yang perlu diingat, dalam mekanisme pasar modal, pemodal tidak bisa bertransaksi langsung dengan emiten; tetapi untuk bisa bertransaksi pemodal harus terlebih dulu menjadi nasabah dari suatu perusahaan efek. Sehingga semua transaksi akan dilakukan melalui perusahaan efek tersebut.

b. Emiten

Emiten adalah pihak yang ingin meminjamkan modal. Modal dipinjamkan emiten dengan cara melakukan emisi, yaitu menawarkan efek (surat berharga) untuk dijual atau diperdagangkan. Bila efek yang dijualnya ada yang membeli maka emiten akan memperoleh uang yang diperlukan. Emiten umumnya adalah perusahaan atau lembaga yang membutuhkan modal untuk membiayai atau memperluas usahanya.

c. Perusahaan Efek

Perusahaan efek adalah perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) untuk menjalankan satu atau beberapa kegiatan berikut:

- 1) perantara perdagangan efek;
- 2) penjamin emisi efek;
- 3) manajer investasi; dan
- 4) penasihat investasi.

d. Danareksa (*Investment Fund*)

Danareksa adalah pihak yang kegiatannya melakukan investasi, investasi kembali atau perdagangan efek.

4. Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan lembaga yang menunjang semua kegiatan di pasar modal, meliputi bank kustodian, biro administrasi efek, wali amanat, penasihat investasi, pemeringkat efek, dan penjamin emisi.

a. Bank Kustodian

Bank kustodian adalah bank yang berfungsi melakukan penyimpanan dan pengamanan fisik dokumen-dokumen efek.

b. Biro Administrasi Efek (BAE)

Biro administrasi adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan administrasi efek bagi emiten, seperti pembukuan, transfer, registrasi, pemecahan surat kolektif saham, pembayaran dividen, dan lain-lain.

c. Wali Amanat

Wali amanat adalah pihak yang dipercaya mewakili kepentingan pedagang obligasi.

d. Penasihat Investasi

Penasihat investasi adalah pihak yang bertugas memberikan nasihat investasi. Penasihat investasi hampir sama dengan manajer investasi. Bedanya, penasihat investasi hanya memberikan nasihat, tapi tidak mengelola dana seperti yang dilakukan manajer investasi.

e. Pemeringkat Efek

Pemeringkat efek adalah pihak yang bertugas memberikan pendapat secara objektif, jujur, dan tidak memihak mengenai risiko suatu efek.

f. Penjamin Emisi

Penjamin emisi adalah pihak yang bertugas memberi jaminan untuk membeli saham yang tidak habis terjual supaya modal atau dana yang dibutuhkan emiten dapat terpenuhi.

5. Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi penunjang pasar modal merupakan profesi atau pekerjaan yang ikut menunjang kelancaran pasar modal. Profesi penunjang pasar modal meliputi akuntan, konsultan hukum, penilai (*appraiser*), dan notaris.

a. Akuntan

Akuntan adalah profesi yang bertugas melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan suatu perusahaan, apakah sudah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia dan ketentuan Bapepam. Untuk melakukan tugasnya di pasar modal, akuntan yang bersangkutan harus terdaftar di Bapepam dan juga harus selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai akuntansi, pengendalian interen, dan pemeriksaan perusahaan efek.

b. Konsultan Hukum

Konsultan hukum adalah profesi yang bertugas memeriksa aspek-aspek hukum emiten dan memberikan legal opinion (pendapat hukum) mengenai keadaan dan keabsahan usaha emiten, seperti anggaran dasar, izin usaha, bukti pemilikan harta kekayaan, perjanjian/perikatan dengan pihak ketiga, dan lain-lain. Oleh karena itu, konsultan hukum yang terdaftar di Bapepam harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang tinggi mengenai dunia pasar modal, baik teori maupun praktik.

c. Penilai (*Appraiser*)

Penilai adalah profesi yang bertugas melakukan penilaian terhadap aktiva (harta) menurut nilai yang wajar kepada emiten yang akan *go public* (menjual sahamnya) dan kepada emiten yang melakukan proses akuisisi.

d. Notaris

Notaris adalah profesi yang bertugas membantu para pelaku pasar modal dalam menyusun anggaran dasar dan kontrak-kontrak penting.

6. Badan Pembina, Pengawas dan Pembantu Pasar Modal

Dalam pasar modal terdapat badan pembina pasar modal, badan pengawas dan pembantu pasar modal. Untuk lebih memahami badan-badan tersebut, berikut ini kita akan membahas mengenai badan pembina pasar modal, badan pengawas dan pembantu pasar modal.

a. Badan Pembina Pasar Modal

Badan Pembina Pasar Modal terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan Sekretaris dengan susunan sebagai berikut.

- Ketua : Menteri Keuangan
- Wakil Ketua : Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Ketua BAPPENAS
- Anggota : Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri
Muda Sekretaris Negara, Menteri Muda Keuangan,
Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM).
- Sekretaris : Ketua BAPEPAM

Adapun tugas Pembina Pasar Modal adalah:

1. Memberikan pertimbangan kebijakan kepada Menteri Keuangan dalam melaksanakan wewenangnya di bidang pasar modal berdasarkan UU No. 15 tahun 1952 tentang Bursa dan Peraturan Perundangan Lainnya;
2. Memberikan pertimbangan kebijakan kepada Menteri Keuangan dalam melaksanakan wewenang terhadap BUMN.

b. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)

Bapepam memiliki tugas-tugas, sebagai berikut:

1. Melaksanakan penilaian terhadap perusahaan yang akan menjual efeknya melalui pasar modal, apakah telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.
2. Mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual efek di pasar modal secara terus-menerus.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pasar modal yang diselenggarakan pasar modal nasional.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bapepam memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Memberikan izin, persetujuan, dan pendaftaran kepada para pelaku pasar modal.
2. Memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum.
3. Menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Sebelum menjadi Badan Pengawas Pasar Modal, Bapepam dulunya bernama Badan Pelaksana Pasar Modal. Tetapi sejak pasar modal

diswastanisasi menjadi PT Bursa Efek Jakarta pada tahun 1991 maka fungsi Bapepam sebagai pelaksana berubah menjadi pengawas saja.

c. PT Danareksa

PT Danareksa didirikan pemerintah untuk menjaga kelangsungan hidup pasar modal dan mewakili masyarakat terutama yang berkemampuan terbatas dalam membeli saham.

PT Danareksa memiliki tugas-tugas, sebagai berikut:

1. Membantu mempercepat masyarakat yang berkemampuan terbatas untuk membeli saham sehingga mereka dapat menikmati dividen (pembagian keuntungan perusahaan). Caranya: PT Danareksa akan membeli saham sebesar 50% dari yang ditawarkan. Saham tersebut lalu dipecah-pecah dalam bentuk sertifikat saham dengan nilai nominal Rp10.000,-, dan masyarakat boleh membelinya paling banyak 100 lembar.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membeli efek dalam rangka pengerahan dan dana dari masyarakat. Selain masyarakat dapat menikmati dividen, dana yang terkumpul bisa disalurkan ke emiten untuk pengembangan usahanya.

I N F O

Apa Itu Wall Street? Apa Hubungan Wall Street dengan Bursa Saham New York? Apa Peranan Bursa Saham New York di Pasar Modal Dunia?

Wall Street adalah nama populer untuk pusat pasar uang, pasar modal, dan lembaga keuangan di Amerika Serikat. Wall Street mencakup Bursa Saham New York (*New York Stock Exchange/NYSE*), Bursa Saham Amerika (*American Stock Exchange/ASE*), Bank Sentral (*Federal Reserve Bank*), dan bank-bank komersial lain. Akan tetapi, nama Wall Street lebih sering dikaitkan dengan Bursa Saham New York saja.

Menurut sejarah, nama Wall Street diambil dari nama sebuah jalan kecil di kota New York. Pada tahun 1792, tujuh perusahaan pialang saham dan tiga belas pedagang saham telah berunding untuk membuat tempat perdagangan saham yang sah. Karena mereka berunding di bawah sebuah pohon di jalan Wall Street No.68, maka tempat perdagangan saham itu disebut dengan Wall Street. Sejak tahun 1863 nama pasar saham ini diresmikan menjadi *New York Stock Exchange*,

sering disingkat NYSE, dan lokasinya pun dipindahkan ke Broad Street No. 20. Meskipun demikian, nama Wall Street tetap populer dan bahkan sering digunakan untuk mewakili pasar uang yang lebih luas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Bursa Saham New York (*The New York Stock Exchange/NYSE*).

Bursa Saham New York adalah bursa saham terbesar dan paling berpengaruh di dunia, meskipun bukan merupakan bursa saham yang pertama berdiri. Persyaratan untuk menjadi anggota dan terdaftar pada Bursa Saham New York sangat berat, sehingga hanya beberapa ribu perusahaan di Amerika Serikat yang sahamnya terdaftar di Bursa Saham New York. Syarat-syarat tersebut meliputi:

- a. kemampuan menghasilkan di atas 1.000.000 dolar AS (Satu juta dolar AS) setahun, setelah dipotong pajak dan biaya-biaya lain;
- b. memiliki harta terwujud neto (*net tangible assets*) di atas 8.000.000 dolar AS (delapan juta dolar AS);
- c. menawarkan paling sedikit 400.000 saham biasa (*common stock*), tidak termasuk saham milik keluarga, untuk dijual kepada paling sedikit 1.500 pemegang saham.

Karena ketatnya persyaratan tersebut, dewasa ini hanya sekitar 1.100 perusahaan yang sahamnya terdaftar di Bursa Saham New York, dibandingkan dengan puluhan ribu perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di pasar-pasar saham lainnya di seluruh dunia.

Harga saham-saham di Bursa Saham New York terus-menerus dipantau dan dihitung dalam bentuk indeks oleh Dow Jones & Co., sebuah perusahaan penerbitan yang menerbitkan harian *The Wall Street Journal*. Indeks-indeks Dow Jones disiarkan secara lengkap pada setiap edisi harian tersebut ke seluruh dunia. Indeks Dow Jones merupakan kumpulan harga saham rata-rata dari beberapa perusahaan yang dianggap mewakili.

Ada empat jenis indeks, yakni:

- a. *Dow Jones Industrial Average Index (DJIA)*: harga rata-rata saham 30 perusahaan industri terkemuka di Amerika.
- b. *Dow Jones Transportation Average Index*: harga rata-rata saham 20 perusahaan angkutan terkemuka.
- c. *Dow Jones Utility Average Index*: harga rata-rata 15 perusahaan jasa pelayanan umum (air, listrik, dan gas).
- d. *Dow Jones Closing Average Index*: harga rata-rata saham 65 perusahaan.

Di samping keempat indeks tersebut, Dow Jones juga menyiarkan beberapa indeks lain untuk kepentingan penjualan obligasi (*Dow Jones Bond Average Index*), dan untuk perdagangan komoditi (*Dow Jones Futures Index* dan *Dow Jones Spot Index*).

Dari keempat indeks saham di atas dapat diketahui naik turunnya harga saham setiap hari. Naik turunnya harga saham di Bursa Saham New York dipengaruhi banyak faktor, bukan sekedar jumlah dividen yang diharapkan. Faktor-faktor politik, kemajuan perusahaan, fluktuasi berbagai nilai mata uang, dan perkembangan suku bunga di pasar uang internasional ikut dipertimbangkan para investor dan pialangnya, sehingga tidak heran bila sering terjadi gejolak dalam perdagangan saham. Demikian besar pengaruh Bursa Saham New York terhadap perdagangan saham di bursa-bursa saham di seluruh dunia, sehingga perhatian seluruh dunia selalu tertuju padanya. Setiap gejolak yang terjadi di Bursa Saham New York, betapapun kecilnya, akan langsung berpengaruh pada perdagangan bursa saham di negara-negara lain.

Pengaruh yang dimiliki Bursa Saham New York terutama disebabkan beberapa hal berikut:

1. Hampir semua perusahaan yang sahamnya terdaftar dalam Bursa Saham New York adalah perusahaan-perusahaan multinasional raksasa (seperti *IBM*, *Eastman Kodak*, dan *Procter and Gamble*), yang sahamnya diminati dan dibeli para investor dari seluruh penjuru dunia.
2. Besarnya pengaruh bisnis Amerika kepada bisnis internasional serta perekonomian dunia.
3. Kecenderungan terjadinya “globalisasi” pasar saham melalui penjualan saham dan obligasi secara internasional.
4. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang makin mendekatkan jarak dan waktu antara pasar modal di suatu negara dengan pembeli di negara lain.

Sumber: Dikutip dengan perubahan dari *Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen*.

7. Mekanisme Transaksi Perdagangan di Pasar Modal

Transaksi perdagangan di pasar modal pada hakikatnya akan mempertemukan pemodal (pemilik modal) dengan emiten (peminjam

modal). Untuk mempertemukan keduanya banyak pihak lain yang harus terlibat. Dan masing-masing pihak, baik pemodal maupun emiten terlebih dulu harus melakukan langkah-langkah persiapan. Langkah-langkah persiapan tersebut adalah, sebagai berikut.

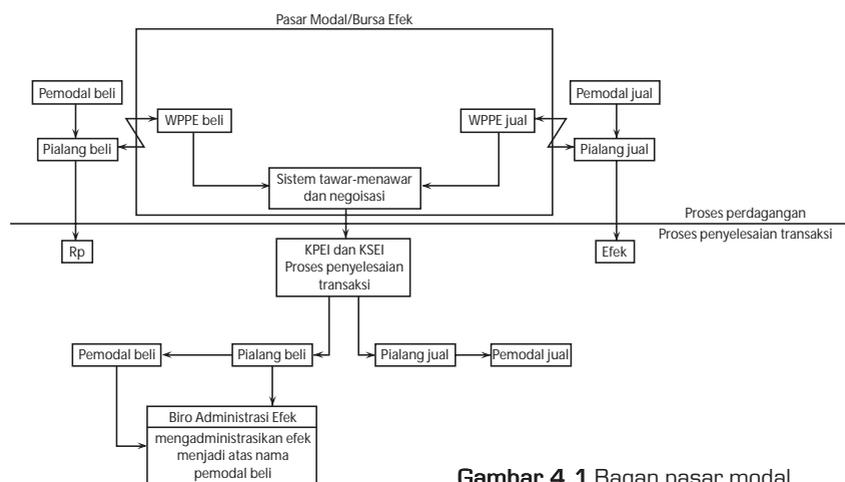
a. Langkah Persiapan bagi Pemodal

Agar dapat melakukan transaksi, pemodal harus lebih dulu menjadi nasabah dari perusahaan efek. Di Bursa Efek Jakarta terdapat lebih kurang 186 perusahaan efek yang menjadi anggota BEJ. Pemodal boleh menjadi nasabah di salah satu atau beberapa perusahaan efek. Agar bisa menjadi nasabah, pemodal harus melakukan pembukaan rekening dengan mengisi dokumen pembukaan rekening yang memuat identitas nasabah secara lengkap, seperti keadaan keuangan dan tujuan investasi serta keterangan tentang investasi yang akan dilakukan.

Pemodal dapat melakukan transaksi setelah disetujui menjadi nasabah di perusahaan efek yang bersangkutan. Umumnya setiap perusahaan efek mewajibkan nasabahnya untuk mendepositokan sejumlah uang tertentu, misalnya 15 juta atau 25 juta atau 50% dari nilai transaksi sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut layak melakukan transaksi. Jadi intinya, setelah disetujui menjadi nasabah di suatu perusahaan efek, pemodal telah siap melakukan transaksi di pasar modal (bursa efek).

b. Langkah Persiapan bagi Emiten

Agar dapat melakukan transaksi di pasar modal, emiten harus melakukan proses pencatatan di pasar modal. Sejak Juli tahun 2000, dunia pasar modal khususnya Bursa Efek Jakarta telah mengeluarkan peraturan pencatatan terbaru yang bertujuan memulihkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan daya saing Bursa Efek di pasar regional.



Gambar 4.1 Bagan pasar modal

Bagan pasar modal pada Gambar 4.1 menunjukkan mekanisme transaksi setelah pemodal dan emiten siap.

Selengkapnya, proses pencatatan yang harus dilakukan emiten adalah sebagai berikut:

1. Emiten mengajukan permohonan pencatatan ke bursa dan bursa akan menilai permohonan tersebut apakah sesuai dengan ketentuan pencatatan. Setelah itu emiten diminta mempresentasikan kinerja perusahaannya.
2. Jika memenuhi syarat, bursa akan memberikan surat persetujuan prinsip pencatatan yang dikenal dengan istilah "Perjanjian Pendahuluan".
3. Selanjutnya emiten mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke Bapepam. Dalam mengajukan pernyataan pendaftaran, emiten harus menghubungi perantara emisi yang terdiri atas: Penjamin Emisi, Akuntan, dan Perusahaan Penilai yang akan memberikan layanan sesuai dengan tugasnya masing-masing.
4. Bila telah mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam, emiten bisa melakukan proses penawaran umum IPO (Initial Public Offering) agar nanti efeknya bisa dijual.
5. Emiten membayar biaya pencatatan.
6. Bursa efek mengumumkan pencatatan efek tersebut di bursa. Dengan adanya pengumuman ini berarti emiten bisa langsung memulai penjualan efek.

Transaksi perdagangan efek dimulai dengan pesanan (order) oleh pemodal yang disampaikan kepada perusahaan efek. Pesanan tersebut dapat disampaikan secara tertulis atau lewat telepon kepada sales/dealer yang berada di perusahaan efek. Pesanan harus jelas menyebutkan; efek apa yang dibeli, berapa jumlahnya, dan berapa harga yang diinginkan. Sebagai contoh, seorang pemodal menelepon ke dealer yang menyampaikan keinginan untuk membeli saham ABC sebanyak 3 lot = 1500 saham (1 lot = 500 saham, pembelian saham minimal 1 lot), dengan harga Rp3.000,- per saham. Pemodal yang ingin membeli ini disebut pemodal beli. Kemudian, pesanan tersebut akan diteliti oleh perusahaan efek, apakah saham yang dibeli ada, bagaimana dengan batas limit perdagangan, dan lain-lain. Setelah selesai, barulah pesanan tersebut disampaikan kepada pialang beli di lantai bursa (floor trader) untuk dilaksanakan.

Di lantai bursa ada orang-orang khusus yang bertugas memasukkan semua pesanan ke terminal (sambungan) yang sesuai. Orang-orang khusus itu disebut Wakil Perantara Perdagangan Efek (WPPE). Dengan menggunakan sistem komputerisasi perdagangan yang disebut JATS, semua

pesanan diolah oleh komputer yang akan melakukan matching (pencocokan) dengan mempertimbangkan prioritas harga atau waktu. Ini berarti sistem perdagangan di bursa adalah sistem lelang secara terbuka yang berlangsung terus-menerus selama jam bursa. Dan dalam kegiatan lelang ini terjadilah tawar-menawar.

Setelah kegiatan tawar-menawar dan negosiasi tuntas, selanjutnya penyelesaian transaksi dilakukan oleh dua lembaga lain selain bursa; yaitu Lembaga Kliring dan Penjamin (LKP) serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP). Di Indonesia, peran dua lembaga tersebut dijalankan oleh PT KPEI (Kliring Pinjaman Efek Indonesia) dan PT KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia). Di pasar modal Indonesia, penyelesaian transaksi menggunakan skema T + 3 yang berarti penyerahan efek dan pembayarannya dilakukan tiga hari setelah terjadinya transaksi. Transaksi di Bursa Efek dilakukan pada hari Senin sampai dengan Jumat yang disebut dengan hari bursa.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, seorang pemodal selain berperan sebagai pembeli efek, dia juga bisa menjual kembali efek yang sudah dibelinya. Umumnya seorang pemodal membeli efek dengan tujuan memperoleh dividen atau bunga yang akan diterimanya secara periodik. Dan umumnya seorang pemodal akan menjual kembali efek yang sudah dibelinya dengan tujuan memperoleh *capital gain* (*capital gain* = harga jual – harga beli).

Sering kali terjadi pemodal membeli efek pada pagi hari, kemudian pada siang hari sudah menjualnya kembali. Kenapa demikian? Karena pada siang hari harga efek tersebut sudah naik, sehingga dengan menjualnya pemodal akan memperoleh *capital gain*. Karena hal seperti ini dilakukan oleh banyak pemodal, maka tidak mengherankan bila kalian melihat kesibukan yang tinggi di lantai Bursa seperti yang disaksikan di televisi.

Karena pada pasar modal ada transaksi beli dan jual, maka pada bagan di atas bisa kalian lihat dua macam alur. Alur beli di sebelah kiri dan alur jual ada di sebelah kanan.

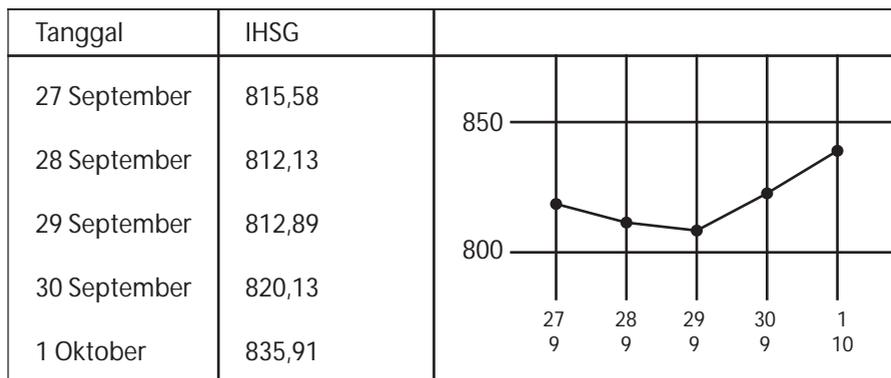
I N F O

I H S G

- Bagi kalian yang sering melihat acara *Market Review* di Metro TV pasti akrab dengan istilah ini. IHSG ini diumumkan setiap hari di TV dan di koran. Apa sih IHSG itu dan apa pentingnya IHSG hingga harus diumumkan setiap hari?

- IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan merupakan angka yang menunjukkan seberapa besar kenaikan harga saham secara keseluruhan/gabungan yang terjadi di Bursa Efek Jakarta sejak tahun 1988, yaitu sejak dimulainya kembali kegiatan pasar modal di Indonesia. Angka tersebut merupakan angka rata-rata dari gabungan harga-harga saham yang dihitung. Misal, hari ini IHSG sebesar 750,40 berarti sejak 1988 sampai hari ini telah terjadi kenaikan harga saham sebanyak 7,5 kali lipat (+ 750%). Karena IHSG merupakan angka rata-rata, maka tidak semua saham telah naik 7,5 kali lipat; ada yang di atasnya dan ada yang di bawahnya.
- IHSG bisa naik bisa turun karena banyak faktor yang memengaruhi, seperti faktor kemampuan perusahaan menghasilkan laba, faktor kebijakan ekonomi pemerintah, faktor politik dan keamanan, faktor fluktuasi nilai mata uang (kurs), dan lain-lain. Perhatikan contoh pergerakan naik turun IHSG berikut.

Indonesia IHSG (Tahun 2005)



Selain IHSG yang dikeluarkan oleh BEJ, kalian sudah mengetahui adanya indeks lain, yakni Indeks Dow Jones yang sangat terkenal, Indeks Hangseng dari Hongkong, Indeks Nikkei dari Tokyo, dan lain-lain. IHSG dan indeks-indeks lainnya umumnya diumumkan setiap hari dengan tujuan agar para pemodal, emiten, calon pemodal, calon emiten, dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat memantau perkembangan pasar modal setiap saat.

8. Mengenal Istilah Pasar Perdana, Pasar Sekunder, dan Transaksi di Luar Bursa

Di dunia pasar modal, kita akan mengenal istilah-istilah pasar perdana, pasar sekunder, dan transaksi di luar bursa. Berikut ini adalah pengertian dari istilah-istilah tersebut.

a. Pasar Perdana

Pasar perdana adalah pasar untuk pertama kalinya efek dijual, yang dilakukan sesaat sebelum perdagangan di bursa efek.

b. Pasar Sekunder

Pasar sekunder adalah pasar penjualan efek yang dilakukan di bursa efek yang terjadi setelah pasar perdana berakhir. Pasar sekunder disebut juga pasar reguler.

c. Transaksi di Luar Bursa

Transaksi di luar bursa adalah transaksi perdagangan efek, yang terjadi antarperusahaan efek atau transaksi yang terjadi antara perusahaan efek dengan pihak lain, atau transaksi yang terjadi antarpihak yang bukan perusahaan efek, yang kesemuanya terjadi di luar bursa dan tidak diatur oleh bursa efek.

9. Perkembangan Terakhir Pasar Modal/Bursa Efek

Berikut ini adalah perkembangan terakhir pasar modal atau bursa efek.

- a. Pada 22 Mei 1995 bursa efek khususnya Bursa Efek Jakarta meluncurkan JATS (*Jakarta Automated Trading System*). JATS merupakan sebuah sistem otomatis perdagangan dengan menggunakan komputerisasi untuk menggantikan perdagangan manual. Kelebihan JATS adalah dapat memfasilitasi transaksi lebih banyak dan mampu menjamin kegiatan pasar lebih adil dan transparan (jelas).
- b. Pada Juli 2000, Bursa Efek Jakarta menerapkan Perdagangan Tanpa Warkat (*Scriptless Trading*) dengan tujuan meningkatkan likuiditas pasar, mencegah saham hilang dan pemalsuan saham, serta mempercepat proses penyelesaian transaksi.
- c. Pada tahun 2002 Bursa Efek Jakarta mulai menerapkan Perdagangan Jarak Jauh (*Remote Trading*). Dengan adanya *remote trading*

perdagangan efek bisa dilakukan dari luar lantai bursa, bahkan dari luar Jakarta melalui kantor-kantor cabang yang sudah ada.

I N F O

Saham Telkom Dinilai Lebih Baik Tetap Tercatat Di Bursa New York

Manajemen PT Telkom akan meminta kepada para pedagang saham agar perusahaan telekomunikasi tersebut tetap tercatat di bursa efek di dalam negeri. Usulan tersebut akan diajukan dalam rapat umum pemegang saham yang dijadwalkan pada tanggal 30 Juli 2004.

“Tidak akan ada *delisting* (penghapusan perdagangan saham dari lantai bursa). Kami tetap meminta listing di *New York Stock Exchange*. Hal ini demi reputasi dan keuntungan yang didapatkan,” ujar Direktur Utama Telkom Kristiono di Jakarta.

Sebelumnya, melalui Menteri BUMN Laksamana Sukardi, pemerintah selaku pemegang saham mayoritas Telkom pernah mengusulkan agar Telkom keluar dari pencatatan (*delisting* bursa New York dan cukup tercatat di BEJ saja. Hal itu mengemuka ketika tahun lalu Telkom tersandung masalah laporan keuangan yang ditolak oleh otoritas bursa AS (US SEC) karena menggunakan akuntan publik yang tidak terdaftar pada SEC.

Dalam rapat mendatang, manajemen Telkom akan membeberkan hasil kajian internal mengenai untung rugi pencatatan saham di lebih dari satu bursa efek (*multi listing*). Walaupun menurut Kristiono, dalam rapat umum pemegang saham tahunan mendatang tidak ada agenda yang khusus untuk membahas masalah tersebut. Secara garis besar, hasil kajian internal tersebut menunjukkan bahwa Telkom akan lebih baik jika tetap tercatat di Bursa Efek New York.

Kristiono menjelaskan, hasil kajian tersebut menjelaskan bahwa Telkom akan mendapatkan keuntungan jika tetap menjadi perusahaan yang terdaftar di BEJ dan Bursa New York. “Pertama masalah reputasi, kedua soal pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang semakin bagus,” ujar Kristiono

Analisis dari Mega Akses Sekuritas, Hendra Bujang, mengatakan hal senada. Menurut dia, dengan multi listing akan lebih banyak pihak yang mengawasi manajemen. Penyebaran informasi juga dapat lebih mudah.

Sumber: Kompas 13 Juli 2004

KEGIATAN 4.2

Cobalah kalian cari data dari koran atau majalah mengenai:

- a. Kegiatan pasar uang dan pasar modal yang terjadi di Indonesia atau di luar negeri.
- b. Keburukan dan kebaikan dari kegiatan pasar uang dan pasar modal.

Kumpulkanlah data-data tersebut dalam bentuk kliping menurut kelompok yang sudah kalian bentuk.

10. Kebaikan dan Keburukan Pasar Modal

Kebaikan pasar modal berkaitan erat dengan manfaat yang bisa didapat dari adanya pasar modal.

a. Kebaikan bagi Pemodal/Investor

Pasar modal memiliki kebaikan bagi pemodal/investor, sebagai berikut.

- 1) Memberikan wahana berinvestasi.
- 2) Bisa memperoleh dividen atau bunga.
- 3) Bisa dengan mudah beralih alat investasi. Misalnya dari saham A ke saham B dengan cara jual beli. Dari jual beli ini pemodal bisa memperoleh capital gain atau bisa mengurangi risiko kerugian karena anjloknya harga saham.

b. Kebaikan bagi Emiten

Pasar modal memiliki kebaikan bagi emiten, sebagai berikut.

- 1) Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang. Misalnya, untuk membangun jalan tol yang membutuhkan modal besar dengan pengembalian pinjaman yang cukup lama (lebih dari 1 tahun).
- 2) Bisa lebih bebas dan fleksibel dalam mengelola dana.
- 3) Tidak membebani perusahaan, karena emiten hanya memberikan dividen yang besarnya tergantung besar kecilnya laba perusahaan. Hal ini berlaku bagi emiten yang menjual efek berbentuk saham.

c. Kebaikan bagi Pemerintah

Pasar modal memiliki kebaikan bagi pemerintah, sebagai berikut.

- 1) Pasar modal merupakan *leading indicator* (petunjuk penting) tren ekonomi atau kemajuan ekonomi negara.

- 2) Ikut mendorong laju pertumbuhan ekonomi karena kegiatan ekonomi berjalan dengan lancar (tidak kekurangan modal).
- 3) Ikut memperluas pertumbuhan lapangan kerja seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Keburukan pasar modal berkaitan erat dengan risiko yang dihadapi oleh pelaku pasar modal. Keburukan atau risiko tersebut adalah, sebagai berikut:

- a. Bila surat berharga (efek) yang dibeli pemodal di-*delisting* (dikeluarkan) dari pasar modal karena berbagai sebab, di antaranya karena emiten yang menjual efek tersebut mengalami kerugian atau pailit, yang disebut risiko *delisting*.
- b. Bila terjadi inflasi yang mengakibatkan turunnya nilai mata uang, sehingga akan turut menurunkan daya beli dari dividen dan bunga yang diperoleh pemodal. Ini disebut risiko inflasi.
- c. Bila surat berharga yang ingin dijual tidak cepat laku seperti yang diharapkan. Ini disebut risiko likuiditas.
- d. Bila terjadi kenaikan tingkat bunga bank yang akhirnya dapat menurunkan harga surat-surat berharga. Naiknya tingkat bunga bank membuat para pemodal lebih tertarik berinvestasi di bank. Akibatnya, permintaan akan surat berharga menurun sehingga harga surat berharga pun menjadi turun. Ini disebut risiko tingkat bunga.
- e. Bila surat-surat berharga terpaksa dijual dengan harga lebih rendah dari harga belinya, sehingga pemodal mengalami kerugian. Ini disebut risiko *capital loss*.
- f. Bila kemampuan emiten dalam menghasilkan laba menurun. Akibatnya dividen yang dibayarkan ke pemodal ikut menurun. Ini disebut risiko bisnis.

Dari risiko-risiko tersebut, tampak bahwa sebagian dari risiko pasar modal sama dengan risiko pasar uang.

I N F O

Contoh Keburukan Pasar Modal

Berikut ini bisa kalian simak bagaimana akibat keburukan pasar modal di dunia. (Ada yang sampai bunuh diri) Tidak percaya? Baca saja cuplikannya!

Gejolak terbesar dalam Bursa Saham New York (NYSE) terjadi pada hari Senin 19 Oktober 1987, yang kemudian terkenal dengan

sebutan *The Black Monday*. Pada hari itu *Dow Jones Industrial Average Index* mengumumkan kemerosotan harga saham sebesar 502 point atau 22,6% dari harga semula. Kemerosotan sebesar itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dan angkanya bahkan sampai hampir dua kali lipat dari angka kemerosotan yang pernah terjadi dalam sejarah dunia, yakni 12 % pada tanggal 22 Oktober 1929 dan dikenal dengan *The Great Crash*. Malapetaka pada tahun 1929 itulah yang diduga menjadi penyebab utama krisis perekonomian dunia, yang akhirnya berakibat pada Depresi Besar (*The Great Depression*) pada tahun 1930-an.

Hebatnya kejatuhan pasar saham pada hari “Senin Hitam” itu dapat dilihat dari ilustrasi berikut ini. Beberapa perusahaan perdagangan saham raksasa di Amerika Serikat bangkrut seketika, karena tak sanggup menanggung rugi yang diperkirakan mencapai miliaran dolar AS dalam sehari itu. Banyak investor menjadi putus asa dan bunuh diri.

Dapat dibayangkan betapa hebat kejatuhan itu mengguncang dunia. Kepanikan terjadi di pasar-pasar modal London, Paris, Tokyo, Hongkong, Singapura, Sidney, sampai ke Afrika Selatan. Berbagai analisis dan spekulasi tentang malapetaka ini muncul kemudian. Beberapa di antaranya yang berhasil dikumpulkan majalah Tempo adalah sebagai berikut.

1. Spekulasi yang berlebihan membuat harga saham di pasar tidak realistis lagi (*over-valued*). Sejak lima tahun terakhir sebelum bencana ini, para investor berspekulasi memborong untuk mengejar keuntungan dari kenaikan harga (*capital gain*). Spekulasi ini semakin mendorong kenaikan harga saham secara tidak realistis. Para analisis yakin bahwa kekacauan yang diakibatkan “Senin Hitam” itu mengarah pada normalisasi harga saham.
2. Kenaikan suku bunga Bank Sentral Jerman. Para eksekutif dalam pemerintahan Reagen menuding kenaikan suku bunga bank di Jerman mengakibatkan orang ingin segera mengalihkan investasinya ke sana, dan menjual saham dengan serentak. Penjualan saham secara serentak mengakibatkan merosotnya harga saham.
3. Kebijakan ekonomi Kongres Amerika Serikat cenderung menyetujui undang-undang perdagangan yang proteksionis yang menakut-nakuti para calon investor.

4. Defisit pembelanjaan pemerintahan Reagen mendorong pemerintah mencari lebih banyak uang di pasar bebas. Makin banyak permintaan, nilai uang menjadi semakin tinggi, sehingga nilai saham menjadi kurang menarik.
5. Nasihat dari Robert Prechter, seorang pengamat pasar modal paling terkenal di Amerika Serikat, agar para investor berpaling ke pasar obligasi, komoditi, atau pasar-pasar modal di luar negeri.
6. Kemajuan teknologi, terutama komputer, mengakibatkan orang hanya mengikuti analisis komputer untuk menjual atau membeli saham.

Dampak dari gejolak “Senin Hitam” di Wall Street itu pun terasa di Indonesia, terutama di kalangan pemilik uang, pengusaha, dan beberapa lembaga keuangan yang ikut menanamkan modalnya di pasar-pasar saham internasional itu. Meskipun demikian, pandangan optimis dari beberapa pengamat mengatakan bahwa kekacauan di Wall Street akan membawa dampak positif di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya yang menginginkan peningkatan penanaman modal di negeri masing-masing. Diharapkan pemilik modal akan sadar bahwa investasi yang aman adalah dalam industri dan perdagangan yang nyata, bukan dalam spekulasi yang nonproduktif.

Sumber: Ensiklopedia Ekonomi, Bisnis dan Manajemen

RANGKUMAN

PASAR UANG

1. **Arti:**
pasar yang memperjualbelikan uang dalam bentuk surat-surat berharga jangka pendek (kurang dari satu tahun).
2. **Sumber dana:**
 - a. dana masyarakat
 - b. dana perusahaan
 - c. dana bank
 - d. dana lembaga keuangan bukan bank
 - e. dana kelebihan kas BUMN
3. **Bentuk-bentuk surat berharga:**
 - a. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
 - b. Surat Berharga Pasar Uang (SPBU)
 - c. Pinjaman Sewaktu-waktu (Call Money)

- d Surat Utang Negara (SUN)
- e Promes
- f Aksep
- g Wesel Dagang
- h *Repurchase* jangka pendek
- j Kertas pembendaharaan negara (*Comercial Paper*)

4. Peserta pasar uang:

- a Bank
- b Yayasan Dana Pensiun
- c Perusahaan Asuransi
- d Koperasi
- e Perusahaan dagang
- f lain-lain

5. Kebaikan:

Memberi wahana untuk memperoleh pinjaman jangka pendek, mencegah uang menganggur membantu pengusaha mengembangkan usaha; Bank Indonesia bisa ikut serta mengendalikan jumlah uang yang beredar.

6. Keburukan:

Bila peminjaman tidak bisa mengembalikan pinjaman saat jatuh tempo (risiko gagal bayar); bila terjadi inflasi yang menurunkan daya beli dari keuntungan yang diperoleh dalam jual beli di pasar uang (risiko inflasi); bila surat-surat berharga terpaksa dijual lebih rendah dari harga beli (risiko *capital loss*).

Pasar Modal

1. Arti:

Pasar yang memperjualbelikan uang dalam bentuk surat-surat berharga jangka panjang (lebih dari satu tahun).

2. Bentuk-bentuk surat berharga:

- a Saham biasa (*common stock*)
- b Saham preferen (*preferred stock*)
- c Obligasi (*bond*)
- d Obligasi Konversi (*convertible bond*)
- e Right
- f Waran
- g Reksadana

3. Pelaku Pasar Modal:

- a Pemodal/investor : yakni pihak yang memiliki modal untuk dipinjamkan/ investasikan.
- b Emiten : Pihak yang meminjam modal.
- c Perusahaan efek : pihak yang peran sebagai perantara perdagangan efek penjamin emisi efek; manajer investasi; penasihat investasi.
- d Danareksa : yakni pihak melakukan investasi, investasi kembali, atau perdagangan efek.

4. Lembaga Penunjang Pasar Modal

- a Bank Kustodian
- b Biro Administrasi Efek (BAE)
- c Wali amanat
- d Penasihat investor
- e Pemeringkat efek
- f Penjamin emisi

5. **Profesi Penunjang Pasar Modal**
 - a. Akuntan
 - b. Konsultan hukum
 - c. Penilai (*appraiser*)
 - d. Notaris

6. **Lembaga Pembina, Pengawas dan Pembantu Pasar Modal**
 - a. Badan Pembina Pasar Modal
 - b. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)
 - c. PT Danareksa

7. **Mekanisme transaksi perdagangan di pasar modal**
 - a. Pada hakikatnya akan mempertemukan pemodal (pemilik modal) dengan emiten (peminjam modal). Agar dapat bertemu pemodal dan emiten masing-masing perlu melakukan langkah persiapan. Langkah persiapan yang ditempuh pemodal pada intinya adalah agar pemodal bisa menjadi nasabah dari suatu perusahaan efek dengan syarat tertentu. Sedangkan langkah persiapan yang ditempuh emiten pada intinya adalah agar emiten melakukan proses pencatatan di pasar modal. Setelah siap, keduanya baru bisa melakukan transaksi.
 - b. Dalam transaksi perdagangan di pasar modal, selain bisa berperan sebagai pembeli efek, pemodal juga bisa menjual kembali efek yang sudah dibelinya.
 - c. Umumnya pemodal menjual kembali efek dengan tujuan memperoleh dividen atau bunga. Umumnya pemodal menjual kembali efek yang dibelinya dengan tujuan mendapatkan capital gain ($\text{capital gain} = \text{harga jual} - \text{harga beli}$).

8. **Mengenai Pasar Perdana, Pasar Sekunder, dan Transaksi di Luar Bursa.**
 - a. Pasar Perdana adalah pasar untuk pertama kalinya efek dijual yang dilakukan sesaat sebelum perdagangan di bursa efek.
 - b. Pasar Sekunder adalah pasar penjualan efek di bursa efek setelah pasar perdana berakhir; disebut juga dengan istilah pasar reguler.
 - c. Transaksi di luar bursa adalah transaksi perdagangan efek yang terjadi di luar bursa dan tidak diatur oleh bursa efek.

9. **Perkembangan terakhir pasar modal:**
 - a. Pada 22 Mei 1995 diluncurkan JATS (*Jakarta Automated Trading System*)
 - b. Pada Juli 2000 diterapkan Perdagangan tanpa warkat (*Scriptless Trading*).
 - c. Pada tahun 2002 diterapkan Perdagangan Jarak Jauh (*Remote Trading*)

10. **Kebaikan Pasar Modal:**
 - a. Bagi Investor: Memberi wahana berinvestasi; bisa memperoleh dividen dan bunga; bisa mudah beralih alat investasi; bisa berinvestasi ke dalam beberapa perusahaan sekaligus.
 - b. Bagi Emiten: menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang; lebih bebas dan fleksibel mengelola dana; tidak membebani perusahaan dalam hal pembagian dividen.
 - c. Bagi Pemerintah; merupakan leading indicator (petunjuk penting) bagi kemajuan ekonomi suatu negara; ikut mendorong laju pertumbuhan ekonomi; ikut memperluas lapangan kerja.

11. **Keburukan Pasar Modal:**
 - Bila efek yang dibeli pemodal di-delisting (dikeluarkan) dari pasar modal (risiko *delisting*) bila terjadi inflasi yang menurunkan daya beli dari keuntungan yang diperoleh dari jual beli di pasar modal (risiko inflasi); bila surat berharga tidak cepat laku (risiko likuiditas) bila terjadi kenaikan suku bunga bank yang bisa menurunkan harga-harga surat berharga (risiko tingkat bunga); bila surat berharga dijual lebih rendah dari harga beli (risiko *capital loss*); bila kemampuan emiten dalam menghasilkan laba menurun.

Kata Kunci

Bapepam
capital gain
dana reksa
emiten
ficoinvest
floortrader
George Soros
iddle money
Indeks Dow Jones
Initial Public Offering (IPO)
investor
kurs beli
kurs jual
lot
pasar modal
pasar uang
pasar valuta asing

pedagang valuta asing
pemodal
penawaran valuta asing
permintaan valuta asing
perusahaan efek
PT Danareksa
risiko bisnis
risiko dilisting
risiko gagal bayar
risiko gagal capital loss
risiko gagal inflasi
risiko likuiditas
risiko tingkat bunga
surat berharga pasar modal
surat berharga pasar uang
Wallstreet

Evaluasi Akhir Bab

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!

1. Pasar yang memperjualbelikan surat-surat berharga jangka pendek disebut dengan istilah
 - A. pasar modal
 - B. pasar uang
 - C. pasar komoditas
 - D. pasar valuta asing
 - E. pasar jangka pendek
2. Surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar uang adalah
 - A. saham dan SBI
 - B. obligasi dan saham
 - C. *right* dan promes
 - D. SBI dan SPBU
 - E. Wesel dan waran

3. Yang bukan kebaikan/manfaat pasar uang adalah
 - A. mencegah uang menganggur
 - B. memberikan pinjaman jangka pendek
 - C. memberikan dividen
 - D. membantu kemajuan usaha
 - E. ikut mengendalikan jumlah uang yang beredar

4. Bila surat-surat berharga terpaksa dijual dengan lebih rendah dari harga belinya disebut risiko

A. gagal bayar	D. <i>capital loss</i>
B. inflasi	E. likuiditas
C. <i>capital gain</i>	

5. Dalam pasar modal, pihak yang ingin meminjam modal disebut
 - A. emiten
 - B. pemodal
 - C. perantara perdagangan efek
 - D. pialang
 - E. *dealer*

6. Yang bukan profesi penunjang pasar modal adalah

A. konsultan hukum	D. wali amanat
B. notaris	E. akuntan
C. penilai	

7. Pernyataan yang salah dari perdagangan di pasar modal adalah
 - A. pembeli saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen
 - B. agar dapat melakukan transaksi, emiten harus melakukan proses pencatatan
 - C. atar bisa bertransaksi, pemodal harus menjadi nasabah dari perusahaan efek.
 - D. transaksi perdagangan efek dimulai dengan pesanan oleh pemodal yang disampaikan ke perusahaan efek.
 - E. pemodal tidak dapat menjual kembali efek yang sudah dibelinya.

8. *Capital gain* diperoleh bila
 - A. harga jual = harga beli
 - B. harga beli lebih besar dari harga jual
 - C. harga beli melampaui harga tawar
 - D. harga jual lebih rendah dari harga beli
 - E. harga jual lebih tinggi dari harga beli

9. Lembaga yang bertugas melakukan kegiatan administrasi efek bagi emiten seperti pembukuan, registrasi dan lain-lain adalah
- A. biro efek
 - B. akuntan
 - C. wali amanat
 - D. Biro Administrasi Efek
 - E. notaris
10. Kegiatan penyelesaian transaksi perdagangan efek, salah satunya dilakukan oleh
- A. Biro Konsultan
 - B. Bank Kustodian
 - C. Perusahaan Efek
 - D. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
 - E. PT Danaraksa
11. Orang-orang khusus yang bertugas memasukkan semua pesanan ke terminal yang sesuai di lantai bursa disebut
- A. pialang
 - B. perantara
 - C. Biro Administrasi Efek
 - D. Wakil Perantara Perdagangan Efek
 - E. wali amanat
12. Apabila Hasan ingin membeli dolar Amerika di money changers maka money changers akan mengenakan
- A. Kurs dolar Singapura
 - B. Kurs dolar Amerika
 - C. Kurs beli dolar Amerika
 - D. Kurs jual beli dolar
 - E. Kurs jual beli dolar Amerika
13. Permintaan akan valuta asing bisa berasal dari
- A. eksportir yang dibayar dengan valuta asing
 - B. perusahaan asing yang ingin menukar uang asing ke dalam rupiah.
 - C. wisatawan asing yang ingin menukar uang asing ke dalam rupiah
 - D. orang Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri yang membutuhkan mata uang asing.
 - E. orang Indonesia yang baru datang dari luar negeri yang membawa mata uang asing
14. Pasar penjualan efek di bursa efek yang dilakukan setelah pasar perdana berakhir disebut

- A. pasar primer
- B. pasar reguler
- C. pasar transaksi
- D. pasar valuta
- E. pasar tersier

15. Diketahui tabel kurs berikut:

Nama Valuta Asing	Kurs Beli	Kurs Jual
Dolar Amerika	Rp9.040,-	Rp9.130,-
Dolar Singapura	Rp5.248,49	Rp5.303,82
Yen Jepang	Rp8.323,40	Rp8.316,63

Bila Bintang ingin menjual 20 dolar Amerika dan 10 yen maka Bintang akan memperoleh uang sebanyak

- A. Rp265.766,3
- B. Rp263.124,-
- C. Rp266.766,3
- D. Rp261.324,-
- E. Rp269.764,7

B. Jawablah pertanyaan berikut!

1. Sebutkan surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar uang!
2. Jelaskan perbedaan pasar uang dan pasar modal!
3. Siapa saja yang berperan sebagai pelaku pasar modal?
4. Jelaskan pengertian, saham, obligasi, saham konvertibel
5. Jelaskan apa yang dimaksud pasar valuta asing!
6. Sebutkan manfaat pasar valuta asing!
7. Sebutkan kebaikan dan keburukan pasar uang!
8. Sebutkan kebaikan dan keburukan pasar modal!
9. Sebutkan kebaikan dan keburukan pasar valuta asing!
10. Jelaskan mekanisme transaksi perdagangan di pasar modal!

Bab V

Perdagangan Internasional dan Perekonomian Terbuka



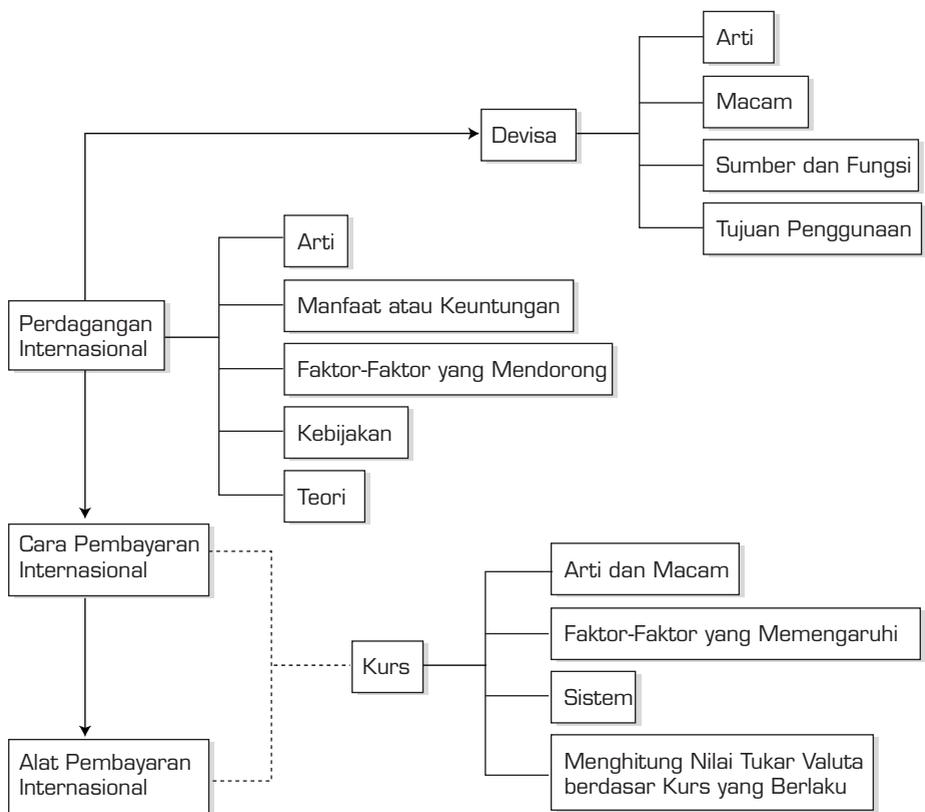
Sumber: Tempo, 9 Juli 2006

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat:

1. mendeskripsikan pengertian perdagangan internasional;
2. menguraikan konsep keunggulan absolut (mutlak) dan keunggulan komparatif;
3. mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional;
4. mendeskripsikan kebijakan pemerintah di bidang perdagangan internasional;
5. mengidentifikasi sumber-sumber devisa dan tujuan penggunaannya;
6. mengidentifikasi alat-alat pembayaran internasional;
7. menguraikan sebab-sebab terjadinya perubahan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing;
8. menghitung nilai tukar suatu valuta berdasarkan kurs yang berlaku;
9. mendeskripsikan konsep neraca pembayaran;
10. mengelompokkan komponen-komponen neraca pembayaran dan neraca perdagangan;
11. menguraikan kebaikan dan keburukan utang luar negeri bagi Indonesia;
12. mendeskripsikan konsep tarif, kuota, larangan ekspor, larangan impor, subsidi, premi, diskriminasi harga dan dumping;
13. mendeskripsikan pengertian dan fungsi devisa;
14. mengidentifikasi alat-alat pembayaran internasional.

PETA KONSEP



Toyota, Audi, BMW, Chevrolet, Ford, Peugeot, Mitsubishi, Isuzu, Daihatsu, Honda, Hyundai, Mercedes, Volvo dan Opel adalah deretan beberapa merk mobil yang dijual di pasaran Indonesia. Kita juga mengenal berbagai merk handphone seperti Nokia, Samsung, Siemens dan Motorola yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Semua barang di atas tidak dibuat sendiri oleh Indonesia. Barang-barang tersebut umumnya masuk ke Indonesia melalui kegiatan perdagangan internasional. Selain mobil dan *handphone*, masih banyak barang lain yang diperoleh Indonesia dari perdagangan Internasional, seperti satelit, alat perang, komputer dan pesawat terbang.

Perdagangan internasional sangat penting bagi negara berkembang maupun negara maju. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, selain untuk mendapatkan barang-barang yang tidak bisa diproduksi sendiri, adanya perdagangan internasional membantu Indonesia agar dapat menjual sumber daya alam yang dimiliki, seperti timah, karet dan minyak bumi serta menjual berbagai produk, seperti kerajinan rotan, kertas, pakaian dan lain-lain. Di lain pihak, negara maju pada umumnya akan menjual berbagai hasil industri seperti mobil, *handphone*, TV dan satelit ke negara-negara berkembang. Agar lebih jelas, berikut ini akan dibahas berbagai hal seputar perdagangan internasional.

A. Arti dan Manfaat Perdagangan Internasional

Perdagangan berasal dari kata dagang yang menurut kamus lengkap bahasa Indonesia berarti kegiatan menjual dan membeli. Sehingga, perdagangan internasional bisa diartikan sebagai kegiatan menjual dan membeli produk yang terjadi antar negara yang dilakukan individu dengan individu, individu dengan pemerintah, atau pemerintah dengan pemerintah. Pada umumnya, negara-negara di dunia melakukan perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, ekspor dan impor merupakan bentuk kegiatan perdagangan internasional.

Kegiatan perdagangan internasional memberi banyak manfaat atau keuntungan bagi negara yang melakukannya, termasuk bagi Indonesia. Manfaat-manfaat atau keuntungan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Sumber Devisa

Dengan mengeksport (menjual) bermacam barang dan jasa, negara kita akan memperoleh devisa. Devisa adalah semua benda yang dapat digunakan

sebagai alat pembayaran internasional. Devisa bisa berbentuk mata uang asing, emas, wesel, cek, dan surat-surat berharga lainnya. Devisa yang diperoleh suatu negara dapat digunakan untuk membayar impor dan lain-lain.

2. Menjaga Stabilitas Harga

Harga suatu barang cenderung meningkat bila jumlah barang yang dimaksud tidak bisa memenuhi permintaan pasar, dengan kata lain jumlah barang lebih sedikit dibanding permintaan. Agar harga tidak terus naik, pemerintah dapat mengimpor barang yang sama sehingga harga dapat stabil kembali.

3. Memperluas Lapangan Kerja

Perdagangan internasional dapat memperluas lapangan kerja. Peningkatan permintaan luar negeri terhadap hasil produksi Indonesia, akan mendorong pengusaha membangun pabrik baru yang membutuhkan tambahan tenaga kerja.

4. Mendorong Alih Teknologi

Barang-barang impor yang berteknologi tinggi seperti komputer, handphone, kapal selam dan pesawat tempur, mengharuskan masyarakat memahami dan mampu mengoperasikan barang-barang tersebut. Hal ini mendorong terjadinya alih teknologi dari negara pengekspor (negara maju) ke negara pengimpor (negara berkembang).

5. Memperluas Konsumsi

Dengan perdagangan internasional, hasil produksi suatu negara dapat dikonsumsi secara lebih luas ke negara lain. Misalnya, buah kiwi dari Selandia Baru dan kurma dari Arab bisa dinikmati di banyak negara. Demikian juga berbagai hasil produksi pabrik, seperti TV, kulkas, *handphone* dan komputer bisa dikonsumsi oleh banyak negara.

6. Memperoleh Barang dan Jasa yang Tidak Bisa Diproduksi Sendiri

Satelit adalah salah satu contoh barang yang tidak bisa diproduksi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Indonesia memperoleh

satelit dengan cara membeli dari Amerika. Selain satelit, masih banyak barang lain yang tidak dapat diproduksi Indonesia dan harus diperoleh melalui perdagangan internasional.

B. Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Perdagangan Internasional

Mengapa bisa terjadi perdagangan internasional? Mengapa suatu negara berdagang dengan negara lain? Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Perbedaan Sumber Daya Alam

Setiap negara tidak memiliki sumber daya alam yang sama. Indonesia terkenal kaya akan sumber daya alam, tetapi belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengolahnya. Hal ini mendorong Indonesia untuk menjual bahan baku atau bahan mentah seperti kayu, minyak bumi, batu bara, timah dan karet ke negara lain untuk diolah. Contoh lain, Saudi Arabia memiliki ladang minyak bumi yang besar, tetapi memiliki sedikit lahan subur. Hal ini mendorong Saudi Arabia untuk mengekspor minyak bumi dan mengimpor berbagai hasil pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, terjadilah perdagangan internasional.

2. Selera (Kesukaan)

Selera bisa mendorong terjadinya perdagangan internasional. Selera atau minat masyarakat Indonesia yang tinggi terhadap apel Amerika dan pear Shandong dari Cina, mendorong Indonesia untuk mengimpor buah-buahan tersebut. Artinya, Indonesia telah melakukan perdagangan internasional dengan Amerika dan Cina.

3. Penghematan Biaya Produksi

Bagi negara berkembang yang belum memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju, merancang dan membuat sendiri sebuah handphone, akan menghabiskan biaya produksi yang jauh lebih mahal dibanding bila negara tersebut membelinya dari negara lain. Dengan alasan ini, Indonesia lebih suka mengimpor handphone daripada memproduksi sendiri. Selain itu, bagi negara produsen *handphone*, perdagangan internasional

memungkinkan mereka dapat menghemat biaya produksi, karena memproduksi dalam jumlah besar biaya produksi rata-ratanya (*average cost*) lebih murah.

4. Perbedaan Teknologi

Perbedaan teknologi mendorong terjadinya perdagangan internasional. Negara maju berteknologi tinggi yang mampu menghasilkan berbagai produk modern, sangat ingin menjual produknya ke negara lain dengan tujuan memperluas pasar dan memperoleh keuntungan. Adapun negara-negara berkembang yang berteknologi sedang atau rendah, menghendaki perdagangan dengan negara maju agar dapat menggunakan produk mereka dan sebagai sarana alih teknologi.

5. Ingin Meningkatkan Keuntungan

Produsen memproduksi dan menjual produk dengan tujuan memperoleh keuntungan. Apabila produsen tersebut menjual produknya sampai ke luar negeri maka keuntungan yang diperoleh akan meningkat.

KEGIATAN 5.1

Coba kalian pikirkan, faktor-faktor apalagi yang dapat mendorong terjadinya perdagangan internasional (selain yang sudah disebutkan di atas)!

C. Teori Keunggulan Mutlak (*Absolut*) dan Teori Keunggulan Komparatif

Dalam perdagangan internasional, ada dua teori yang perlu kita pahami, yakni teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif.

1. Teori Keunggulan Mutlak

Teori keunggulan mutlak dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul "*Wealth of Nations*" yang terbit tahun 1776. Pada intinya, teori ini mengemukakan bahwa suatu negara dikatakan memiliki

keunggulan mutlak dalam memproduksi suatu barang, jika negara itu mampu memproduksi barang tersebut dengan biaya lebih rendah dibanding negara lain. Jika negara tersebut sepakat melakukan perdagangan internasional dengan negara lain, maka sebaiknya negara tersebut hanya memproduksi dan mengekspor barang-barang yang memiliki keunggulan mutlak (*absolute advantage*) dan mengimpor barang-barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak (*absolute disadvantage*).

Keunggulan mutlak bisa diartikan sebagai keunggulan yang dimiliki suatu negara karena memiliki keistimewaan. Contohnya suatu negara memiliki kekayaan alam dan keahlian penduduk sehingga dapat memproduksi barang tertentu dengan biaya lebih murah dibanding negara lain terhadap produk yang sama. Agar dapat memahami teori keunggulan mutlak dengan baik, perhatikan tabel yang menunjukkan tingkat produktivitas dari tiap satu unit produksi di Cina dan Indonesia.

Tabel 5.1 Tingkat produktivitas tiap satu unit produksi

Negara	Jenis produk	
	Kain	Beras
Cina	900 meter/jam	1700 kg/jam
Indonesia	500 meter/jam	2500 kg/jam

Dari tabel di atas tampak bahwa Cina mampu menghasilkan kain lebih banyak dibanding Indonesia. Ini berarti, Cina lebih efisien (lebih hemat, lebih murah) dalam memproduksi kain. Sebaliknya, Indonesia mampu menghasilkan beras lebih banyak dibanding Cina, yang berarti Indonesia lebih efisien dalam memproduksi beras. Dengan kata lain, Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi beras, sedang Cina memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi kain. Oleh karena itu, sebaiknya Indonesia menjual beras ke Cina dan sebaliknya, Cina menjual kain ke Indonesia.

2. Teori Keunggulan Komparatif

Teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh David Ricardo. Teori ini merupakan pelengkap dari teori keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak memiliki kelemahan, karena tidak dapat menjelaskan mengapa suatu negara yang sama sekali tidak memiliki keunggulan mutlak atas suatu produk, tetap bisa menjual (mengeksport) produknya ke negara lain. Teori keunggulan komparatif bisa menjawab pertanyaan tersebut.

Tabel berikut ini menunjukkan tingkat produktivitas tiap satu unit produksi di Indonesia dan Jepang. Perhatikan dengan baik.

Tabel 5.2 Tingkat produktivitas tiap satu unit produksi

Negara	Jenis produk		Dasar Tukar Dalam Negeri
	TV	Tas	
Indonesia	5/hari	20/hari	1 TV = 4 tas (di Indonesia)
Jepang	12/hari	24/hari	1 TV = 2 tas (di Jepang)

Jika menggunakan dasar teori keunggulan mutlak yang dikemukakan Adam Smith, Indonesia tidak dapat menjual (mengeksport) TV ataupun tas ke Jepang, karena Indonesia tidak memiliki keunggulan mutlak atas keduanya. Padahal, pada kenyataannya banyak negara di dunia yang tidak memiliki keunggulan mutlak tapi tetap bisa menjual produknya ke negara lain dan kedua negara tetap memperoleh keuntungan. Lalu, teori apa yang bisa menjelaskan fenomena tersebut?

Teori keunggulan komparatif bisa menjawab (menjelaskan) fenomena tersebut. Teori keunggulan komparatif menyatakan bahwa perdagangan masih bisa terjadi dan menguntungkan dua negara meskipun hanya satu negara yang mempunyai keunggulan mutlak pada kedua jenis barang. Pertukaran akan terjadi dan tetap menguntungkan bila masing-masing negara punya keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang dimiliki suatu negara karena memiliki keunggulan lebih besar pada satu barang dibanding barang lain, sedangkan negara lain memiliki kelemahan yang lebih kecil pada barang lainnya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Jepang sebaiknya berspesialisasi dalam produksi TV dan Indonesia berspesialisasi memproduksi tas. Dengan melakukan spesialisasi dan kemudian mengekspornya, Jepang dan Indonesia sama-sama akan memperoleh keuntungan.

Sebelum melakukan perdagangan internasional, Jepang dapat menukarkan sebuah TV dengan 2 buah tas (dasar tukar Jepang). Setelah berspesialisasi memproduksi TV dan melakukan perdagangan internasional dengan Indonesia, Jepang dapat menukarkan sebuah TV dengan 4 tas (dasar tukar Indonesia). Itu berarti, keuntungan Jepang dalam perdagangan ini adalah sebesar 2 tas (4 tas - 2 tas) .

Sebelum melakukan perdagangan internasional, Indonesia dapat menukarkan 4 tas dengan 1 TV (dasar tukar Indonesia). Setelah berspesialisasi memproduksi tas dan melakukan perdagangan internasional dengan Jepang, 4 tas dapat ditukarkan dengan 2 TV (karena di Jepang untuk

memperoleh 1 TV hanya diperlukan 2 tas, artinya bila terdapat 4 tas maka 4 tas tersebut dapat ditukar dengan 2 TV). Ini berarti, keuntungan Indonesia dalam perdagangan internasional dengan Jepang adalah sebesar 1 TV (2 TV - 1 TV).

D. Kebijakan Perdagangan Internasional

Di samping memiliki manfaat perdagangan internasional dapat memajukan industri dalam negeri yang baru tumbuh. Hal ini mendorong munculnya kebijakan perdagangan internasional.

Kebijakan perdagangan internasional yang dianut tiap negara berbeda-beda. Ada negara yang menganut kebijakan perdagangan proteksionis (perlindungan), ada pula yang menganut kebijakan perdagangan bebas (*free trade*).

1. Tujuan Kebijakan Perdagangan Internasional

Baik negara yang menganut kebijakan perdagangan proteksionis maupun yang menganut kebijakan perdagangan bebas, pada umumnya melakukan kebijakan perdagangan internasional dengan tujuan:

a. Mengendalikan Ekspor dan Impor

Setiap negara dapat menggunakan kebijakan perdagangan internasional untuk mengendalikan ekspor dan impor. Kebijakan perdagangan bebas berusaha meningkatkan ekspor dengan cara menghapus hambatan perdagangan. Sedangkan kebijakan perdagangan proteksionis berusaha meningkatkan ekspor antara lain dengan cara menurunkan tarif ekspor.

b. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Bagi negara maju, perekonomian akan tumbuh dengan baik bila hasil produksi yang melimpah dapat diekspor ke berbagai negara. Sebaliknya, bagi negara berkembang, perekonomian akan tumbuh dengan baik bila negara bisa melindungi industri dalam negeri, di antaranya dengan cara memberlakukan kuota impor (batasan impor) atau bahkan larangan untuk mengimpor barang tertentu.

c. Menyehatkan Neraca Pembayaran

Untuk menghindari defisit (kekurangan) dalam neraca pembayaran, negara dapat menggunakan kebijakan perdagangan proteksionis sebagai

salah satu alat. Caranya yaitu dengan berusaha meningkatkan ekspor dan sekaligus menekan impor dengan berbagai cara, seperti pemberlakuan kuota impor, tarif impor dan larangan impor.

2. Macam Kebijakan Perdagangan Internasional

Ada dua macam kebijakan perdagangan internasional, yakni kebijakan perdagangan bebas (*free trade*) dan kebijakan perdagangan proteksionis.

a. Kebijakan Perdagangan Bebas

Kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan perdagangan yang menginginkan kebebasan dalam perdagangan, sehingga tidak ada rintangan yang menghalangi arus produk dari dan ke luar negeri. Kebijakan perdagangan bebas berkembang dengan berpedoman pada ajaran aliran klasik (liberal) yang tidak menghendaki adanya rintangan-rintangan (hambatan-hambatan) dalam arus perdagangan internasional. Menurut aliran klasik, perdagangan bebas layak dipakai sebagai sarana untuk meningkatkan kemakmuran, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Dapat mendorong persaingan antar pengusaha, sehingga tercipta produk yang berkualitas dan berteknologi tinggi.
- 2) Dapat mendorong penghematan biaya, sehingga produksi dapat dijalankan dengan biaya serendah-rendahnya dan dijual dengan harga bersaing (efisiensi).
- 3) Dapat menggerakkan perputaran modal, tenaga ahli dan investasi ke berbagai negara sehingga dapat menumbuhkan perekonomian.
- 4) Dapat meningkatkan perolehan laba sehingga memungkinkan para pengusaha berinvestasi lebih luas.
- 5) Dapat memperluas pilihan dan variasi bagi konsumen, sehingga mereka lebih bebas dalam memilih berbagai produk yang diinginkan.

Karena dalam perdagangan bebas tidak terdapat rintangan-rintangan atau hambatan-hambatan, maka harga produk ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran sesuai hukum ekonomi.

Saat ini, perdagangan bebas belum berlaku secara menyeluruh dan masih terbatas pada kawasan-kawasan tertentu. Ini berarti, perdagangan bebas hanya berlaku bagi negara yang ada di kawasan tersebut. Dan, bagi negara yang bukan anggota kawasan tersebut tidak berlaku ketentuan perdagangan bebas, sehingga di negara tersebut masih terdapat berbagai rintangan seperti tarif, kuota, diskriminasi harga dan lain-lain.

Contoh organisasi perdagangan bebas di antaranya adalah NAFTA (*North America Free Trade Agreement*), yaitu perjanjian perdagangan bebas

kawasan Amerika Utara, AFTA (*Asean Free Trade Agreement*) yaitu perjanjian perdagangan bebas kawasan Asia Tenggara dan EETA (*European Economic Trade Area*) yaitu kawasan perdagangan bebas Eropa.

b. Kebijakan Perdagangan Proteksionis

Kebijakan perdagangan proteksionis adalah kebijakan perdagangan yang melindungi industri dalam negeri dengan cara membuat berbagai rintangan (hambatan) yang menghalangi arus produk dari dan ke luar negeri.

Alasan suatu negara menganut kebijakan perdagangan proteksionis adalah sebagai berikut:

- 1) Perdagangan bebas hanya menguntungkan negara maju, karena mereka memiliki modal yang kuat dan teknologi yang maju. Selain itu, harga produk industri negara maju dinilai terlalu mahal (tinggi) dibanding harga bahan-bahan mentah yang dihasilkan negara berkembang.
- 2) Untuk melindungi industri dalam negeri yang baru tumbuh. Industri seperti ini tidak akan mampu bersaing dengan industri negara lain yang sudah maju dan berpengalaman.
- 3) Untuk membuka lapangan kerja. Dengan melakukan proteksi, industri-industri di dalam negeri dapat tetap hidup dan dengan demikian mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
- 4) Untuk menyehatkan neraca pembayaran. Agar terhindar dari defisit dalam neraca pembayaran, negara dapat menggunakan kebijakan perdagangan proteksionis, caranya dengan meningkatkan ekspor.
- 5) Untuk meningkatkan penerimaan negara. Dengan mengenakan tarif tertentu terhadap produk impor dan ekspor, negara dapat meningkatkan penerimaan.

I N F O

“Keiretsu, Proteksi Gaya Jepang!”

Kelompok Sumitomo mulai sebagai perusahaan penambang tembaga sekitar 300 tahun yang lalu. Sekarang, kelompok ini terdiri dari 20 perusahaan inti dan puluhan bisnis kecil yang berlokasi di berbagai tempat di dunia dalam berbagai industri, termasuk komputer, logam, baja, gelas, batu bara, real estate, bir, barang elektronik, dan asuransi jiwa. Kelompok ini dipersatukan pertama dan paling penting oleh ritual dan tingkah laku. Misalnya, setiap tahun presiden dari kedua puluh perusahaan datang berkumpul dengan keluarga Sumitomo di tempat semacam kuil untuk memperingati pendiri kelompok tersebut.

Sebagai tambahan, presiden bertemu secara terpisah setiap bulan dengan apa yang disebut “*Hakusuikal*” atau “kelompok air putih” untuk mendiskusikan masalah bisnis dari membuat rencana usaha baru sampai memberikan dukungan untuk anggota kelompok yang sedang mengalami kesulitan.

Kelompok Sumitomo adalah salah satu contoh dari suatu keiretsu-konglomerat bisnis raksasa. Sering kali diberi label “perusahaan sama dengan darah persaudaraan”, “*famili bisnis*” ini mendasar banyak pengaturan bisnis Jepang.

Sistem keiretsu telah menempatkan perusahaan asing di posisi yang tidak menguntungkan di Jepang. Kebanyakan konglomerat memfokuskan kegiatannya di sekitar bank yang besar milik kelompok mereka, sesuatu yang dilarang oleh undang-undang di Amerika Serikat.

Hal ini membuat kelompok perusahaan ini bisa menanggung kerugian tanpa khawatir mengenai menurunnya pemberian kredit karena mereka akan selalu meminta kepada bank milik kelompok. Perusahaan elektronik Jepang seperti NEC, Hitachi, dan Fujitsu bersaing lewat harga tanpa harus khawatir mengenai kerugian dalam keuangan. Keadaan ini membuat pesaing asing tidak mampu berhadapan langsung dengan Jepang, bisnis asing dirugikan, demikian pula konsumen global.

Keiretsu Sumitomo membantu anggota pada berbagai kejadian. “Bank Sumitomo amat ahli dalam mengatur kulit kacang untuk menghilangkan masalah,” kata Alicia Ogawa, seorang ahli analisis di S.G Warburg Securities. Salah satu contoh terjadi ketika Bank Sumitomo membantu keuangan Mazda pada awal tahun 1970-an dan berhasil mengembalikan perusahaan dari keadaan yang nyaris bangkrut. Anggota *keiretsu* Sumitomo menolong Mazda dengan menawarkan dukungan keuangan dan menerima karyawan Mazda yang sudah dirumahkan. Semua anggota *keiretsu* Sumitomo hanya membeli mobil Mazda selama periode pemulihan perusahaan tadi.

Kebijakan perdagangan proteksionis dapat dilakukan suatu negara dengan membuat berbagai hambatan atau rintangan. Hambatan-hambatan tersebut di antaranya adalah:

1) Kuota impor

Kuota impor adalah kebijakan yang menetapkan batas jumlah barang yang boleh diimpor, dengan tujuan melindungi produksi dalam negeri.

Dengan demikian, setelah mencapai jumlah tertentu dalam suatu periode, pengimpor dilarang menambah jumlah barang yang diimpor.

- 2) Kuota ekspor
Kuota ekspor adalah kebijakan menetapkan batas jumlah barang yang dapat diekspor dengan tujuan menjamin persediaan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- 3) Subsidi
Subsidi adalah kebijakan dengan cara memberikan subsidi (tunjangan) kepada perusahaan yang memproduksi barang ekspor, sehingga harga barang dari perusahaan tersebut bisa bersaing dengan barang luar negeri. Dengan kata lain, pemberian subsidi akan membuat harga jual barang menjadi lebih murah dan mampu bersaing dengan harga jual barang luar negeri.
- 4) Tarif impor
Tarif impor adalah kebijakan mengenakan tarif atau bea terhadap barang yang diimpor agar harga barang impor menjadi lebih mahal. Dengan demikian, perusahaan dalam negeri yang menghasilkan barang sejenis bisa bersaing dengan barang impor. Pada umumnya, tarif impor dikenakan dalam bentuk persentase dari nilai barang yang diimpor, misalnya 10% atau 20%. Untuk bahan-bahan baku industri, suatu negara biasanya akan mengenakan tarif impor yang rendah atau bahkan 0%. Tarif impor dikenal dengan istilah pajak impor atau bea masuk.
- 5) Tarif ekspor
Tarif ekspor adalah kebijakan mengenakan tarif atau bea terhadap barang yang diekspor dengan tujuan untuk merangsang ekspor. Dengan demikian, umumnya tarif dapat dikenakan sangat rendah atau bahkan 0%. Istilah lain dari tarif ekspor adalah pajak ekspor atau bea keluar. Kebijakan tarif ekspor dan tarif impor, selain digunakan sebagai alat proteksi, juga bermanfaat menambah penerimaan negara, karena dengan adanya tarif, negara akan menerima sejumlah uang. Coba Kalian cari, berapa jumlah tarif ekspor dan impor di APBN tahun 1998 dan APBN tahun 2001 pada buku Ekonomi kelas XI.
- 6) Premi
Premi adalah kebijakan berupa pemberian hadiah atau penghargaan kepada perusahaan yang mampu memproduksi barang dengan kualitas tinggi dan kuantitas (jumlah) tertentu. Pemberian premi diharapkan bisa memacu produsen dalam negeri untuk bersaing dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya.
- 7) Diskriminasi harga
Diskriminasi harga adalah kebijakan melalui penetapan harga produk secara berlainan untuk satu negara dengan negara lainnya. Kebijakan

ini dilakukan salah satunya dalam rangka perang tarif. Sebagai contoh, bila negara X menganggap barang hasil produksinya yang diekspor ke negara Y dikenakan tarif masuk yang tinggi, maka sebagai balasannya bila negara Y mengimpor barang dari negara X, negara X akan memberikan harga jual yang lebih tinggi. Dengan adanya tindakan ini, diharapkan negara Y akan menurunkan tarif masuknya terhadap negara X.

8) Larangan ekspor

Larangan ekspor adalah kebijakan melarang ekspor untuk barang-barang tertentu dengan pertimbangan ekonomi, politik dan sosial budaya. Dengan pertimbangan ekonomi, suatu negara melarang mengekspor bahan-bahan baku industri yang dibutuhkan di dalam negeri. Larangan ekspor dengan pertimbangan politik misalnya adanya embargo ekonomi dari PBB, di mana Irak dilarang mengekspor minyak bumi ke luar negeri. Sedangkan pertimbangan sosial budaya, misalnya suatu negara melarang ekspor benda-benda bersejarah serta flora dan fauna yang sudah langka.

9) Larangan impor

Larangan impor adalah kebijakan melarang impor untuk barang-barang tertentu dengan beberapa alasan. Alasan-alasan tersebut di antaranya adalah untuk melindungi industri dalam negeri, untuk membalas kebijakan perdagangan negara lain dan untuk menghemat devisa.

10) *Dumping*

Dumping adalah kebijakan menjual suatu barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri. Tujuan kebijakan ini adalah memperluas dan menguasai pasar. *Dumping* bisa dilakukan bila terdapat aturan(hambatan) yang jelas dan tegas sehingga konsumen di dalam negeri tidak bisa membeli barang (yang di-*dumping*) dari luar negeri.

I N F O

Sekilas *Dumping*

Dumping adalah praktik penjualan suatu komoditi ke luar negeri dengan harga jauh lebih rendah dari tingkat harganya di pasaran domestik, bahkan mungkin di bawah harga pokoknya. Tujuan *dumping* adalah untuk memperoleh keunggulan bersaing dengan pemasok dari negara lain

Dumping hanya akan berhasil jika pasar luar negeri dan domestik terpisah jauh secara geografis, dan tidak terbuka kesempatan untuk menjual kembali ke negara asal. Dalam perdagangan internasional

dikenal tiga jenis dumping. (1) *persistent dumping* (dumping terus-menerus) merupakan diskriminasi harga yang dilakukan secara kontinu, tanpa mempedulikan protes dari negara lain. Praktik ini pernah dijalankan Jepang sebelum Perang Dunia II untuk menerobos dan memantapkan diri di pasaran luar negeri. (2) *sproradic dumping* dipraktikkan untuk melepas persediaan yang besar ke pasaran luar negeri, dan biasanya didorong oleh kelesuan pasar domestik; (3) *predatory dumping* (*dumping* untuk menghancurkan pesaing) dipraktikkan untuk menghalau pesaing asing dari pasaran luar negeri yang menjadi sasaran. Setelah pesaing mengundurkan diri dari pasaran yang dituju, harga dinaikkan untuk menutup kerugian yang diderita sebelumnya.

Jenis dumping kedua dan ketiga, tidak dianggap membahayakan oleh kebanyakan ahli ekonomi, karena tidak terlalu menggoyahkan sendi-sendi perdagangan internasional. Sedang dumping jenis pertama sangat mencemaskan, apalagi jika kebijakan ini didukung pemerintah negara pengekspor. Dalam praktik, tuduhan adanya *persistent dumping* sulit dibuktikan, karena pemerintah negara bersangkutan hanya secara terselubung memberikan subsidi atau kemudahan ekspor melalui pengaturan valuta asing yang diskriminatoris.

Secara internasional. Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tarifs and Trade - GATT*) melarang praktik dumping dengan mengizinkan bea masuk yang tinggi atas barang dumping.

Sumber: *Ensiklopedia Ekonomi Bisnis dan Manajemen*

Berikut ini contoh data perdagangan internasional yang berupa nilai ekspor Indonesia ke berbagai negara pada tahun 2005 dalam satuan juta dolar. Di antaranya, ke Hongkong 1.492,3; Jepang 18.049,1; negara Asia lainnya 23.396,3; Afrika 1.669; Amerika Serikat 9.868,5; Kanada 464,3; negara Amerika lainnya 1.330,4; Australia 2.227,6; negara Oceania lainnya 360,9; Uni Eropa 10.238,4.

KEGIATAN 5.2

Coba Kalian pikirkan, apa yang terjadi bila barang yang dijual dengan harga lebih murah ke luar negeri, membuat para pengimpor di luar negeri tertarik untuk menjual kembali barang tersebut ke negara asal, dengan alasan di negara asal barang tersebut dijual dengan harga lebih mahal.

E. Devisa

Pada materi pertama di bab ini, telah dijelaskan bahwa salah satu manfaat perdagangan internasional adalah sebagai sumber devisa. Devisa yang diperoleh suatu negara dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Berikut ini kita akan membahas lebih lengkap mengenai devisa.

1. Pengertian Devisa

Devisa adalah semua benda yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional. Devisa bisa berbentuk mata uang asing, emas, wesel, cek dan surat-surat berharga lainnya. Setiap negara pasti ingin memiliki persediaan atau cadangan devisa yang cukup. Karena, dengan adanya devisa negara bisa membeli barang-barang dari negara lain, bisa membiayai perjalanan dinas ke luar negeri, bisa membayar cicilan utang luar negeri dan lain-lain.

2. Macam Devisa

Devisa dapat digolongkan berdasarkan sumber dan wujudnya.

- a. Macam devisa berdasarkan sumbernya
 - 1) Devisa kredit, yaitu devisa yang berasal dari kredit (pinjaman) luar negeri.
 - 2) Devisa umum, yaitu devisa yang berasal dari sumber lain (selain kredit) seperti dari ekspor, penyelenggaraan jasa dan penerimaan bunga modal.
- b. Macam devisa berdasarkan wujudnya
 - 1) Devisa kartal, yaitu devisa yang berwujud uang logam dan uang kertas.
 - 2) Devisa giral, yaitu devisa yang berwujud surat-surat berharga seperti wesel, cek, cek perjalanan (*travellers cheque*), IMO (*International Money Order*) dan lain-lain. Apabila diinginkan, devisa giral bisa diubah(dicairkan) menjadi devisa kartal.

3. Sumber Devisa

Dengan melakukan perdagangan internasional (ekspor), negara akan memperoleh devisa. Akan tetapi, perdagangan internasional (ekspor) bukanlah satu-satunya sumber untuk memperoleh devisa. Masih banyak sumber lain untuk memperoleh devisa.

Secara lengkap, devisa dapat diperoleh melalui sumber-sumber berikut:

- a. Ekspor barang.
- b. Ekspor jasa, termasuk jasa pelayaran, jasa pariwisata.
- c. Penanaman modal asing ke dalam negeri. Penanaman modal asing disebut juga dengan istilah penanaman modal langsung.
- d. Pinjaman (utang) dari luar negeri.
- e. Pendapatan atas modal dan investasi di luar negeri seperti bunga dan dividen.
- f. Hibah dan hadiah dari luar negeri.
- g. Hasil penjualan surat-surat berharga kepada penduduk luar negeri.

4. Fungsi Devisa

Devisa memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a. Sebagai alat pembayaran barang-barang dan jasa impor.
- b. Sebagai alat pembayaran cicilan utang luar negeri termasuk bunganya.
- c. Sebagai alat pembiayaan hubungan luar negeri seperti biaya misi kesenian, biaya perjalanan dinas, biaya korp diplomatik dan pemberian bantuan luar negeri.
- d. Sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan.

5. Tujuan Penggunaan Devisa

Sesuai dengan fungsinya, devisa digunakan dengan tujuan:

- a. Untuk membayar barang-barang konsumsi yang masih diimpor, seperti handphone dan kain.
- b. Untuk membayar barang-barang modal yang masih diimpor, seperti mesin.
- c. Untuk membayar jasa-jasa ke luar negeri seperti jasa pelayaran.
- d. Untuk membiayai pengiriman tim kesenian dan olahraga.
- e. Untuk membiayai perjalanan dinas para pejabat ke luar negeri.
- f. Untuk membiayai korps diplomatik di luar negeri.
- g. Untuk membiayai para pemuda dan mahasiswa yang belajar di luar negeri.
- h. Untuk memberikan sumbangan ke negara-negara lain yang mengalami musibah.
- i. Untuk membangun berbagai fasilitas umum di dalam negeri. Contohnya, sebagian devisa yang diperoleh dari pinjaman luar negeri, selain digunakan untuk mengangsur cicilan utang dan bunga, juga digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan di dalam negeri.

F. Kurs (*Rate of Exchange*)

Setelah mempelajari cara-cara dan alat-alat pembayaran internasional, ada satu hal penting yang perlu kita pelajari yang berkaitan dengan cara dan alat pembayaran internasional. Hal penting itu adalah *kurs*.

Apa itu kurs? Mengapa harus ada kurs? Ada berapa macam kurs?

1. Arti dan Macam Kurs

Setiap negara di dunia memiliki mata uang sendiri-sendiri sehingga kita mengenal rupiah (Indonesia), ringgit (Malaysia), peso (Philiphina), dolar Amerika (Amerika), dolar Singapura (Singapura), dolar Australia (Australia), yuan (China) dan masih banyak lagi. Karena perbedaan pemakaian mata uang di tiap negara maka muncullah kurs. Dengan adanya kurs, kita bisa menghitung berapa nilai (harga) suatu barang bila dinyatakan dalam berbagai mata uang negara lain.

Pada umumnya, kurs selalu menunjukkan perbandingan nilai berbagai mata uang asing terhadap mata uang dalam negeri (rupiah). Dengan demikian, kurs bisa diartikan sebagai nilai tukar mata uang asing yang dinyatakan dalam mata uang negeri sendiri. Di Indonesia, kurs dinyatakan dalam rupiah, misalnya kurs beli US \$ 1 = Rp9.000,-, ini berarti pedagang valuta asing akan membeli 1 dolar Amerika dengan uang Rp9.000,-. Oleh karena itu, bila pedagang valuta asing, membeli 1000 dolar Amerika maka dia harus menyediakan uang rupiah sebanyak Rp9.000.000,- (1.000 x 9.000). Agar memperoleh pemahaman yang lengkap dan sesuai dengan kenyataan di lapangan, perhatikan daftar kurs berikut.

Tabel 5.3 Kurs Uang Kertas Asing

	Beli (Rp)			Jual (Rp)		
	BI	CIC	AYU	BI	CIC	AYU
US\$	9.470,0000	9.975,0000	9.970,0000	10.470,0000	9.995,0000	10.000,0000
Pound	16.985,3900	17.815,0000	17.820,0000	18.784,2300	17.895,0000	17.920,0000
Aust \$	7.131,8600	7.485,0000	7.510,0000	7.890,1900	7.530,0000	7.545,0000
Sin %	5.679,5000	5.965,0000	5.980,0000	6.283,3800	5.995,0000	6.005,0000
MYR	0,0000	2.640,0000	2.610,0000	0,0000	2.650,0000	2.660,0000
HK \$	1.218,7000	1.280,0000	1.280,0000	1.347,4400	1.285,0000	1.290,0000
Yen	85,7634	90,0500	89,5000	94,8627	90,3000	90,5000
Euro	11.532,5700	12.100,0000	12.110,0000	12.755,6000	12.130,0000	12.160,0000
Logam Mulia		139.800			142.100	

Tabel 5.4 Kurs Transaksi Bank Indonesia

Mata Uang	Beli (Rp)	Jual (Rp)
US \$	9.920,0000	10.020,0000
Pound	17.792,5100	17.976,8800
Aus \$	7.470,7500	7.551,0700
Sin \$	5.949,3800	6.013,3200
MYR	2.632,3500	2.659,5900
HK \$	1.276,6100	1.289,5300
Yen	89,8388	90,7855
Euro	12.080,5800	12.207,3700

Sumber Kompas 22 Agustus 2005

Dari daftar kurs yang diambil dari koran Kompas di atas, tampak bahwa ada dua macam kurs, yakni Kurs Uang Kertas Asing dan Kurs Transaksi Bank Indonesia. Mengapa ada dua macam kurs dan apa perbedaannya?

Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tanggung jawab untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Oleh karena itu, Bank Indonesia menetapkan kurs konversi (kurs pertukaran) sebagai patokan dalam kegiatan ekonomi. Kurs konversi yang ditetapkan Bank Indonesia terdiri atas dua macam, yaitu:

a. Kurs Uang Kertas Asing (UKA)

Kurs UKA (Uang Kertas Asing) adalah kurs yang dipakai sebagai patokan dalam jual beli uang kertas asing, seperti uang kertas dolar AS, uang kertas yen dan lain-lain. Pada umumnya, jual beli uang kertas asing terjadi di *money changer* (lembaga pertukaran uang) atau di bank-bank yang melayani jual beli uang kertas asing. Jual beli uang kertas asing bisa juga melibatkan para makelar. Kegiatan jual beli uang kertas asing dilakukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan para turis akan rupiah dan untuk memberi keuntungan dengan memanfaatkan naik turunnya nilai kurs. Dari tabel kurs UKA di atas, tampak ada kurs beli UKA dan kurs jual UKA. Kurs beli UKA adalah kurs yang dipakai bila pedagang valuta asing (mata uang asing) sedang membeli valas. Adapun kurs jual UKA adalah kurs yang dipakai bila pedagang valas sedang menjual valas. Yang dimaksud pedagang valas adalah *money changer* (lembaga pertukaran uang), bank devisa dan makelar valas.

Setiap pedagang valas bisa menentukan kurs jual UKA dan kurs beli UKA yang diinginkannya dalam rangka meraih keuntungan tertentu, asal

tetap berpedoman pada kurs beli dan jual UKA yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan demikian, besarnya kurs beli UKA dan kurs jual UKA yang ditentukan para pedagang menjadi beragam, akan tetapi besarnya tidak akan jauh berbeda dengan nilai kurs beli UKA dan kurs jual UKA yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dari daftar kurs di atas hanya diperlihatkan kurs beli UKA dan kurs jual UKA yang berasal dari 3 lembaga, yang pertama adalah kurs dari BI (Bank Indonesia) yang berlaku sebagai patokan bagi pedagang valas, yang kedua dan ketiga adalah kurs dari dua *money changer* yang terkenal di Jakarta yaitu CIC (*Center Investment Corporation*) dan AYU.

b. Kurs Transaksi

Kurs Transaksi adalah kurs yang dipakai sebagai patokan dalam melakukan transaksi yang melibatkan mata uang asing. Dalam kurs transaksi juga dikenal adanya kurs beli dan kurs jual seperti yang tampak dalam daftar kurs di atas. Meskipun demikian, bukan berarti bank melakukan jual beli uang kertas asing seperti yang terjadi di *money changer*. Adanya kurs beli dan kurs jual di sini hanya untuk memperjelas posisi bank dalam bertransaksi. Misalnya nasabah A membawa uang rupiah dan ingin memindahbentukkan menjadi uang asing (misalnya, mentransfer ke luar negeri) berarti nasabah tersebut sedang membutuhkan uang asing. Oleh karena itu, dia harus membeli uang asing tersebut. Jika nasabah A pembeli, berarti posisi bank sebagai penjual, sehingga bank akan mengenakan kurs jual-transaksi pada nasabah A.

Sebaliknya, bila nasabah B di Jakarta memiliki uang asing serta ingin mengirimkan untuk anaknya di Bandung sebagai biaya kuliah, itu berarti nasabah B ingin menjual uang asing dan memindahbentukkannya menjadi rupiah. Karena nasabah B menjual, berarti posisi bank sebagai pembeli, sehingga bank akan mengenakan kurs beli transaksi kepada nasabah B.

Mengenai pengenalan kurs beli dan kurs jual pada nasabah bisa kalian lihat lagi pada pelajaran di kelas X tentang pasar valuta asing.

Contoh: Ibu Ani ingin mentransfer uang untuk anaknya di Amerika. Karena di Amerika berlaku dolar Amerika maka uang rupiah yang dibawa ibu Ani harus ditransfer dengan dikenakan kurs transaksi. Dalam transaksi ini, ibu Ani akan dikenakan kurs jual karena posisi bank sebagai penjual dolar kepada ibu Ani, uang dolar tersebut kemudian ditransfer ke luar negeri.

Selain untuk patokan transfer, kurs transaksi juga dipakai sebagai patokan dalam pengambilalihan wesel ekspor dan pencairan pinjaman luar negeri. Besarnya nilai kurs transaksi ditentukan oleh Bank Indonesia, contohnya bisa dilihat pada daftar kurs di atas. Bank-bank lain

diperbolehkan menentukan sendiri besarnya kurs transaksi dalam rangka meraih keuntungan tertentu, asalkan tetap berpedoman pada besarnya kurs transaksi yang ditetapkan Bank Indonesia. Dengan demikian, nilai kurs transaksi yang ditetapkan bank-bank lain nilainya tidak akan jauh berbeda dengan kurs transaksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Baik kurs transaksi maupun kurs uang kertas asing ditetapkan setiap hari oleh Bank Indonesia. Ini berarti nilai kurs transaksi berbeda dari hari ke hari. Selain dikenal kurs jual dan kurs beli, dikenal juga istilah kurs tengah (middle rate exchange). Kurs tengah atau kurs rata-rata diperoleh dari $\{(kurs\ jual + kurs\ beli) : 2\}$. Kurs tengah digunakan untuk keperluan transaksi antar bank dan juga untuk keperluan analisis teori-teori perubahan kurs. Pada pembahasan selanjutnya, kurs tengah digunakan sebagai dasar analisis untuk mempermudah pemahaman tentang sistem kurs.

2. Menafsirkan Perubahan Kurs dengan Benar

Di koran atau di televisi sering diumumkan perubahan kurs dari waktu ke waktu. Bagaimana cara menafsirkan perubahan kurs tersebut dengan benar?

Kita harus berhati-hati dalam menafsirkan perubahan kurs. Kita harus bisa menyimpulkan dengan benar, kapan nilai rupiah menguat dan kapan melemah. Agar jelas, perhatikan ilustrasi berikut ini yang menggambarkan perubahan kurs uang kertas asing yang ditetapkan Bank Indonesia.

Senin 1 Oktober 200....	
Kurs beli	Kurs jual
US\$ 1 = Rp9.000,-	US\$ = Rp9.500,-

Selasa, 2 Oktober 200....	
Kurs beli	Kurs jual
US\$ 1 = Rp10.000,-	US\$ 1 = Rp11.000,-

Dari ilustrasi pada tabel di atas tampak bahwa kurs mengalami perubahan. Apabila dibandingkan dengan hari Senin, betulkah kurs (nilai tukar) rupiah terhadap dolar AS pada hari Selasa semakin menguat? Bukankah pada hari Selasa nilai rupiah tampak lebih besar dibanding hari Senin?

Jawabannya, pada hari Selasa nilai tukar rupiah terhadap dolar justru semakin melemah (turun). Mengapa demikian? Misalnya, pada hari Senin pak Toni ingin membeli US \$ 1000. Oleh *money changer* pak Toni dikenakan kurs jual (karena posisi *money changer* sebagai penjual) yakni US \$ 1 = Rp9.500,-. Dengan demikian, untuk membeli US \$ 1000 pak Toni harus membayar dengan uang rupiah sebanyak Rp9.500.000,- ($1000 \times \text{Rp}9.500,-$). Akan tetapi, bila pak Toni membeli US \$ 1000 pada hari Selasa, pak Toni harus membayar dengan uang rupiah sebanyak Rp11.000.000,- ($1000 \times \text{Rp}11.000,-$).

Pada hari Senin, untuk membeli US \$ 1000 cukup disediakan uang Rp9.500.000,-.

Pada hari Selasa, untuk membeli US \$ 1000 harus disediakan uang Rp11.000.000,-

Kesimpulan : Pada hari Selasa nilai tukar rupiah terhadap dolar semakin melemah.

3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perubahan Kurs

Mempelajari perubahan kurs sangat penting. Kalian tentu masih ingat peristiwa krisis moneter yang melanda Indonesia mulai tahun 1997. Kurs rata-rata yang biasanya US \$ 1 = Rp2.600,-, setelah terjadi krisis moneter tiba-tiba mencapai US \$ 1 = Rp9.000,-. Akibatnya, perusahaan-perusahaan yang berbahan baku impor menjadi sangat terpukul, karena harga bahan-bahan baku impor menjadi sangat mahal. Untuk membeli bahan baku impor seharga US \$ 1000, dulu hanya diperlukan uang Rp2.600.000,-. Setelah krisis moneter, untuk bahan baku impor seharga US \$ 1000 harus dikeluarkan uang Rp9.000.000,-s. Akibatnya, banyak perusahaan gulung tikar dan mem-PHK puluhan ribu karyawannya. Inflasi pun menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perekonomian Indonesia. Bahkan, sampai saat ini pun Indonesia masih terus berjuang memperbaiki perekonomiannya.

Kurs (nilai tukar) memang tidak tetap. Kurs selalu berubah, bahkan dalam sehari kurs bisa berubah sampai 9 kali. Mengapa kurs selalu berubah?

Banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan kurs. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah:

a. Sistem Kurs yang Dianut

Ada tiga macam sistem kurs, yaitu sistem kurs bebas, sistem kurs tetap dan sistem kurs mengambang terkendali. Sistem kurs yang dianut suatu negara sangat mempengaruhi cepat lambatnya perubahan kurs. Pada sistem kurs bebas, kurs sangat mudah berubah. Pada sistem kurs tetap, kurs tidak pernah berubah (kecuali diinginkan oleh pemerintah). Pada sistem kurs mengambang terkendali, perubahan kurs bisa dikendalikan pemerintah.

b. Selera (Cita Rasa) Masyarakat

Selera masyarakat yang meningkat pada produk suatu negara, membuat permintaan terhadap produk negara tersebut juga meningkat. Peningkatan permintaan terhadap produk negara tersebut, tentu akan diikuti oleh peningkatan permintaan terhadap mata uang negara tersebut (untuk membayar impor). Sehingga, nilai tukar mata uang negara tersebut juga akan meningkat. Itu berarti, bila masyarakat Indonesia sangat menyukai produk-produk Amerika maka pada akhirnya akan menaikkan nilai tukar dolar Amerika.

c. Keadaan Neraca Pembayaran

Apabila neraca pembayaran Indonesia mengalami surplus (lebih), itu berarti telah terjadi kelebihan permintaan terhadap rupiah. Permintaan yang lebih terhadap rupiah akan menyebabkan nilai tukar rupiah mengalami kenaikan sehingga terjadilah perubahan kurs.

d. Adanya Kebijakan Devaluasi dan Revaluasi

Adanya kebijakan devaluasi dan revaluasi yang dilakukan pemerintah bisa menyebabkan terjadinya perubahan kurs. Karena, yang dimaksud dengan devaluasi adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri (rupiah) terhadap mata uang asing dengan tujuan meningkatkan ekspor. Sedangkan revaluasi adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk menaikkan nilai mata uang dalam negeri (rupiah) terhadap mata uang asing karena keadaan ekonomi sudah memungkinkan. Tentang devaluasi dan revaluasi bisa kalian baca lagi di buku Ekonomi kelas X mengenai Kebijakan Moneter.

e. Keadaan Kurs Antarnegara Maju

Jika kurs di negara-negara maju mengalami perubahan, maka perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap kurs negara-negara berkembang seperti Indonesia. Mengapa demikian? Karena, negara-negara maju memiliki pengaruh kuat terhadap perekonomian negara berkembang. Negara-negara maju umumnya bertindak sebagai pemberi pinjaman kepada negara-negara berkembang, sehingga bila kurs antar negara maju berubah maka perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap kurs negara berkembang sebagai penerima pinjaman. Agar lebih jelas, bacalah sekilas info berikut.

I N F O

“Perubahan Kurs (Nilai Tukar) di Negara-negara Maju bisa Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah

Tahun 1995/1996 tercatat kenaikan nilai tukar dolar Amerika terhadap yen. Kekhawatiran yang berlebihan terhadap tingkat inflasi dan defisit transaksi berjalan Amerika Serikat sempat menekan nilai tukar dolar Amerika terhadap yen menjadi di bawah 80 yen per dolar pada awal periode laporan. Namun, sejalan dengan kesepakatan negara-negara Kelompok G-7 dan membaiknya perekonomian Amerika Serikat, nilai tukar dolar Amerika terhadap yen mulai menguat kembali sejak Juli 1995 dan pada akhir periode laporan mencapai sekitar 107 yen per dolar. Bagi Indonesia, melemahnya yen terhadap dolar Amerika memberikan dampak mengurangi beban pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri Indonesia karena sebagian utang Indonesia terdiri atas valuta asing yang mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika seperti yen Jepang dan mark Jerman.

Akibat dari naiknya nilai tukar dolar Amerika terhadap yen, maka nilai tukar rupiah terhadap yen juga mengalami kenaikan (apresiasi) sebesar 13,27%.

f. Kekuatan Permintaan dan Penawaran

Pada umumnya, perubahan kurs disebabkan oleh perubahan kekuatan permintaan dan penawaran terhadap suatu mata uang. Bila permintaan terhadap suatu mata uang bertambah, sedang penawarannya tetap, maka nilai tukar (kurs) mata uang tersebut akan meningkat. Sebaliknya bila permintaan terhadap suatu mata uang berkurang, sedangkan penawarannya tetap maka nilai tukar (kurs) mata uang tersebut akan menurun.

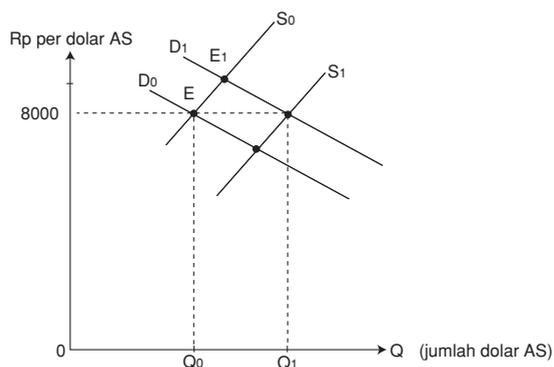
4. Sistem Kurs

Di awal telah dijelaskan bahwa salah satu faktor yang bisa mempengaruhi perubahan kurs adalah sistem kurs yang dianut negara yang bersangkutan. Ada tiga macam sistem kurs yang bisa dipilih untuk dianut suatu negara, yaitu sistem kurs tetap, sistem kurs bebas dan sistem kurs mengambang terkendali. Berikut ini kita akan membahas satu per satu sistem-sistem tersebut. Untuk mempermudah pemahaman maka kurs yang dipakai untuk menjelaskan grafik diasumsikan sebagai kurs tengah, yakni nilai tengah atau rata-rata dari kurs jual dan kurs beli.

a. Sistem Kurs Tetap (*Fixed Exchange Rate System*)

Pada sistem ini, kurs ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya, pemerintah menetapkan bahwa US \$ 1 = Rp8.000,- dan 1 yen = Rp5.000,-. Akan tetapi, pada kenyataannya walaupun kurs sudah ditetapkan pemerintah, kurs masih mengalami perubahan. Perubahan kurs tersebut terjadi karena adanya perubahan kekuatan permintaan dan penawaran. Kadang terjadi kelebihan permintaan dan kadang terjadi kelebihan penawaran. Agar kurs berada di tingkat yang sudah ditetapkan, pemerintah harus meredam efek dari kelebihan permintaan atau penawaran tersebut.

Jika terjadi kelebihan permintaan, pemerintah akan menjual persediaan mata uang untuk memenuhi kelebihan permintaan tersebut. Dan, bila terjadi kelebihan penawaran, pemerintah akan membeli kelebihan penawaran tersebut. Perhatikan grafik berikut:



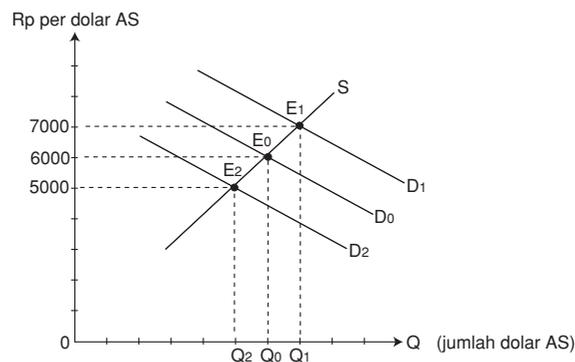
Gambar 5.1 Grafik Sistem Kurs Tetap

Pada awalnya, pemerintah menetapkan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika adalah US \$ 1 = Rp8.000,-. Karena impor barang dari Amerika meningkat maka permintaan terhadap dolar Amerika juga

meningkat, dari Q_0 menjadi Q_1 yang akhirnya membuat kurva permintaan bergeser dari D_0 ke D_1 . Apabila pemerintah tidak campur tangan maka akan terbentuk tingkat kurs yang baru sebesar E_1 . Oleh karena itu, agar tingkat kurs tetap pada $US \$ 1 = Rp8.000,-$ maka pemerintah (melalui Bank Sentral) akan menjual cadangan dolar Amerika sehingga kurva penawaran dolar Amerika akan bergeser ke kanan dari S_0 ke S_1 dan terbentuklah tingkat kurs yang besarnya sama dengan tingkat semula yakni $US \$ 1 = Rp8.000,-$.

b. Sistem Kurs Bebas (*Freely Floating Exchange Rate System*)

Pada sistem ini, kurs bebas bergerak naik turun tanpa adanya campur tangan pemerintah. Kurs bergerak naik turun sesuai dengan kekuatan tarik menarik antara permintaan dan penawaran. Sistem kurs bebas disebut juga dengan istilah "Sistem Kurs Mengambang". Selanjutnya, perhatikan grafik berikut.



Gambar 5.2 Grafik Sistem Kurs Bebas

Pada awalnya, tingkat kurs yang terjadi adalah di titik E_0 sebagai titik keseimbangan. Bila impor terhadap barang-barang Amerika meningkat, maka permintaan terhadap dolar Amerika untuk membayar impor juga meningkat, sehingga kurva permintaan dari D_0 akan bergeser ke D_1 . Hal itu mengakibatkan kurs keseimbangan bergeser ke E_1 . Pada titik E_1 , nilai tukar rupiah adalah $Rp7.000,-$ per dolar AS atau $US \$ 1 = Rp7.000,-$. Maka, dikatakan bahwa nilai dolar Amerika telah mengalami peningkatan (apresiasi) terhadap rupiah, karena sebelumnya 1 dolar Amerika hanya senilai $Rp6.000,-$ (titik E_0).

Sebaliknya, bila impor terhadap barang-barang Amerika menurun maka permintaan terhadap dolar Amerika juga menurun yang pada akhirnya akan menggeser kurva permintaan dari D_0 menjadi D_2 . Akibatnya, tingkat kurs keseimbangan bergeser ke titik E_2 yaitu $US \$ 1 = Rp5.000,-$. Ini berarti nilai

dolar Amerika mengalami penurunan (depresiasi) terhadap rupiah. Yang perlu diingat dalam sistem kurs bebas adalah bahwa berapa pun harga keseimbangan (baik pada E_0 , E_1 , atau E_2), maka jumlah devisa yang diperjualbelikan merupakan jumlah keseimbangan, yakni jumlah yang diminta = jumlah yang ditawarkan.

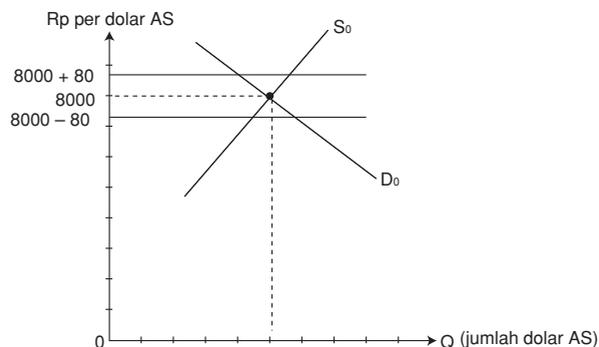
Kebaikan dari sistem kurs bebas adalah:

- 1) Pemerintah tidak perlu menyediakan cadangan devisa untuk mengendalikan kurs.
- 2) Tidak ada pasar gelap yang memanfaatkan perbedaan tingkat kurs.
- 3) Tidak ada defisit atau surplus neraca pembayaran karena mekanisme pasar akan segera menyeimbangkan defisit dan surplus menjadi neraca pembayaran yang seimbang.

Adapun keburukan dari sistem kurs bebas adalah kurs mudah sekali berubah-ubah, sehingga menimbulkan ketidakpastian transaksi ekspor, impor dan transaksi-transaksi lain yang berkaitan dengan mata uang asing.

c. Sistem Kurs Mengambang Terkendali (*Managed Floating Exchange Rate System*)

Pada sistem ini, tinggi rendahnya kurs ditentukan oleh mekanisme pasar. Yakni, ditentukan oleh kekuatan tarik menarik antara permintaan dan penawaran. Akan tetapi, dalam sistem ini pemerintah masih dapat mengendalikan tingkat kurs bila kurs bergerak naik atau turun melampaui batas yang telah ditetapkan. Contohnya, ditetapkan bahwa kurs boleh naik atau turun dengan batas 1% di atas atau 1% di bawah kurs yang telah ditentukan. Apabila ternyata kurs naik melebihi 1% maka pemerintah akan menjual cadangan devisa. Dan, bila ternyata kurs turun melampaui 1%, pemerintah akan membeli kelebihan devisa. Semua itu dilakukan pemerintah dengan tujuan agar kurs kembali ke tingkat yang telah ditentukan. Agar jelas, perhatikan grafik berikut!



Grafik 5.3 Sistem Kurs Mengambang terkendali

Pada awalnya, tingkat kurs ditentukan sebesar US \$ 1 = Rp8.000,-. Kurs diperbolehkan naik atau turun dengan batas 1% di atas atau 1% di bawah tingkat tersebut. Itu berarti, kurs boleh naik sampai US \$ 1 = Rp8.080,- {Rp8.000,- + (1% x Rp8.000,-)}, dan kurs boleh turun sampai US \$ 1 = Rp7.920,- {Rp8.000,- - (1% x Rp8.000)}. Apabila permintaan terhadap barang impor Amerika sangat tinggi yang berakibat permintaan terhadap dolar Amerika mengalami peningkatan, dan kurs berubah menjadi US \$ 1 = Rp8.100,- maka pemerintah akan menjual cadangan dolar Amerika yang dimiliki untuk memenuhi kelebihan permintaan tersebut, sehingga kurs kembali pada rentang antara Rp7.920,- sampai dengan Rp8.080,- per dolar Amerika.

Sebaliknya, bila kurs turun menjadi US \$ 1 = Rp7.900,- akan terjadi kelebihan penawaran terhadap dolar Amerika. Dan, pemerintah akan membeli kelebihan penawaran tersebut agar kurs tetap berada pada rentang Rp7.920,- sampai dengan Rp8.080,- per dolar Amerika.

Campur tangan pemerintah dalam mengendalikan kurs bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Contoh campur tangan pemerintah secara langsung adalah dengan membeli atau menjual valuta asing. Campur tangan secara langsung disebut *dirty floating*. Adapun contoh campur tangan pemerintah secara tidak langsung adalah dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Campur tangan secara tidak langsung disebut *clean floating*.

I N F O

Apa perbedaan pokok sistem kurs tetap dengan sistem kurs mengambang terkendali?

Jika dibaca secara mendalam dan seksama, bukankah sistem kurs tetap dan sistem kurs mengambang terkendali hampir sama? Bukankah sesungguhnya keduanya sama-sama *memerlukan campur tangan pemerintah* untuk mengendalikan kurs ke tingkat yang telah ditentukan?

Lalu, apa sebenarnya perbedaan pokok dari kedua sistem tersebut? Pada sistem kurs tetap, pemerintah harus mengendalikan ke tingkat yang sudah ditetapkan, yang menunjuk hanya pada satu nilai tertentu, misal US \$ 1 = Rp5.000,-. Nilai ini harus dipertahankan terus menerus oleh pemerintah. Sedangkan pada sistem kurs mengambang terkendali, pemerintah masih memberi kelonggaran pada kurs untuk bergerak naik turun dengan batas-batas tertentu (misalnya 1%) dari nilai yang sudah ditentukan. Apabila batas itu dilampaui, baru pemerintah ikut campur mengendalikannya.

5. Menghitung Nilai Tukar Valuta (Mata Uang) Berdasarkan Kurs yang Berlaku

Di kelas X, pada materi pasar valuta asing kita sudah pernah mempelajari cara menghitung nilai tukar valuta berdasarkan kurs yang berlaku. Berikut ini kita akan mengulanginya kembali dengan lebih rinci dalam bentuk contoh-contoh.

CONTOH SOAL ▼

1. Fita datang ke Money Changer A untuk membeli 1000 dolar Amerika. Kurs yang sedang berlaku di Money Changer A sebagai berikut:

Kurs Beli	Kurs Jual
US \$ 1 = Rp10.060,- Yen 1 = Rp86,50	US \$ 1 = Rp10.080,- Yen 1 = 1 = Rp87,50

Jika Fita membeli dolar Amerika, maka posisi Money Changer A adalah sebagai penjual. Sehingga pada Fita dikenakan kurs jual. Dengan demikian, untuk membeli 1000 dolar Amerika Fita harus membayar dengan uang Rp10.080.000,- ($1000 \times \text{Rp}10.080,-$).

2. Firman datang ke Money Changer A untuk menjual 1000 yen dan menukarnya menjadi rupiah. Kurs yang sedang berlaku di Money Changer A adalah sama seperti yang tercantum di atas. Bila firman menjual yen, maka posisi Money Changer A adalah sebagai pembeli. Sehingga, pada Firman dikenakan kurs beli. Dengan demikian, dari penjualan 1000 yen Firman akan memperoleh uang rupiah sebanyak Rp86.500,-.
3. Fita yang sudah membeli 1000 dolar Amerika, dua hari kemudian datang lagi ke Money Changer A untuk menjual dolarnya. Saat ini kurs sudah berubah menjadi:

Kurs Beli	Kurs Jual
US \$ 1 = Rp10.200,-	US \$ 1 = Rp10.250,-

Karena Fita menjual, maka pada Fita dikenakan kurs beli sebab posisi Money Changer A sebagai pembeli. Dengan menjual kembali uang 1000 dolar Amerika, Fita akan memperoleh uang sebanyak Rp10.200.000,-. Dengan demikian, dari jual beli valas Fita telah memperoleh keuntungan sebesar Rp10.200.000,- – Rp10.080.000,- = Rp120.000,-, karena dengan bermodalkan uang Rp10.080.000,- dua hari kemudian uang Fita telah berubah menjadi Rp10.200.000,-. Jual beli dengan memanfaatkan perubahan kurs seperti inilah yang dilakukan oleh para spekulasi dengan harapan memperoleh keuntungan. Bisa dibayangkan keuntungan yang didapat bila yang dibeli awalnya bukan 1000 dolar tapi 1.000.000 dolar Amerika. Sebagai kuncinya, bila ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli valas, seseorang (spekulasi) harus menunggu kurs beli yang dikenakan money changer naik lebih tinggi dibanding kurs jual yang dikenakan money changer sebelumnya.

KEGIATAN 5.3

Kunjungilah *money changer* atau bank devisa yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Coba praktikkan apa yang dilakukan Fita pada contoh 1 dan 3. Mulailah dengan modal yang kecil. Kumpulkan setiap keuntungan yang kalian peroleh!

I N F O

“ Mengapa Cina Lebih Suka bila Nilai Tukar Yuan Lemah?”

Di Indonesia pemerintah begitu bangga bila tren nilai tukar rupiah terus menguat terhadap dolar AS. Penguatan itu seolah dijadikan sebagai standar keberhasilan pemerintah. Padahal, kebijakan itu keliru. Kebijakan pemerintah membuat rupiah kuat justru tindakan kontraproduktif, memrakporandakan strategi pengusaha, dan memperlemah daya saing industri nasional.

Beda dengan Pemerintah Cina. Mereka bukan hanya memiliki strategi yang jelas, sikap birokrasi yang melayani, tetapi juga berusaha mati-matian mempertahankan kebijakan yuan lemah.

Dengan nilai tukar yuan lemah berarti semua produk Cina bisa dibeli dengan harga yang sangat murah, sehingga produk China

memiliki daya saing yang tinggi. Produk mereka tak hanya membanjiri pasar Asia, tetapi juga ke pasar Eropa, Amerika Latin, dan Amerika Utara. Hal inilah yang membuat produk China dimusuhi di berbagai pasar.

Dikutip dengan perubahan Sumber Kompas, 11 Februari 2006

G. Cara Pembayaran Internasional

Di depan telah dijelaskan mengenai devisa. Devisa adalah semua benda yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional, bisa berbentuk mata uang asing, emas, wesel, cek dan surat-surat berharga lain. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menggunakan devisa tersebut dalam pembayaran internasional. Betulkah bila importir Indonesia ingin membayar eksportirnya di Amerika, dia harus selalu mengantar sendiri sejumlah uang dolar ke Amerika? Tidak adakah cara-cara pembayaran lain yang lebih mudah, cepat dan aman?

Tentu saja ada. Itulah yang akan kita pelajari sekarang, dan umumnya sebagian besar cara pembayaran internasional menggunakan jasa bank sebagai perantara. Cara-cara pembayaran internasional tersebut meliputi:

1. Tunai (*Cash*)

Cara pembayaran tunai bisa dilakukan dengan menggunakan mata uang asing yang disebut valas (*valuta asing*) atau bisa juga dengan menggunakan mata uang dalam negeri. Hal itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Pembayaran cara ini dilakukan bila eksportir belum kenal baik dengan importir atau bila eksportir belum mempercayai importir.

2. Transfer Telegrafis

Transfer telegrafis atau *cable order* adalah cara pembayaran yang dilakukan bank atas perintah nasabah dengan mengirimkan telegram, telex atau telepon kepada bank di luar negeri, agar membayar sejumlah uang kepada orang atau badan yang berhak menerimanya.

3. *Clearing Internasional*

Clearing internasional adalah pembayaran yang terjadi antar bank di negara yang berlainan dengan cara memindahkan saldo kepada pihak yang

berhak sebagai hasil rekapitulasi (pengumpulan) transaksi tiap akhir hari kerja. Dalam sistem ini diperlukan satu lembaga yang bertugas mengatur tata cara transaksi yang disebut *clearing house*.

4. Wesel (*Bill of Exchange*)

Istilah lain dari wesel, yaitu *bill of exchange*, *commercial bill of exchange*, *draft* atau *trade bills*. Cara pembayaran dengan menggunakan wesel paling umum dipakai dalam perdagangan. Wesel adalah surat yang ditulis penjual (eksportir) yang berisi perintah kepada pembeli (importir) untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam perdagangan internasional, cara pembayaran dengan menggunakan wesel dapat mengikutsertakan peran bank agar lebih mudah, mengingat jarak eksportir dan importir sangat jauh.

Cara pembayaran dengan wesel yang mengikutsertakan peran bank langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Eksportir mengirimkan barang kepada importir melalui maskapai pelayaran.
- b. Eksportir mengirimkan dokumen pengiriman kepada importir dan memberitahukan adanya penarikan wesel.
- c. Eksportir datang ke bank A dengan membawa wesel yang sudah dilampiri dokumen pengiriman.
- d. Bank A membayar kepada eksportir. Bank A bersedia membayar karena bank memperoleh keuntungan berupa bunga diskonto. Selain itu, pada umumnya berlaku pula persyaratan bila importir tidak bisa membayar pada saat jatuh tempo maka eksportirlah yang bertanggung jawab melunasi wesel tersebut kepada bank.
- e. Selanjutnya bank A mengirimkan wesel tersebut kepada bank B di negara tempat importir tinggal. Dengan diterimanya wesel, bank B akan membayar kepada bank A. Pembayaran tidak dilakukan dengan cara mengirimkan uang, tapi hanya dalam bentuk pencatatan saldo, karena sebelumnya sudah ada perjanjian kerja sama antara bank A dengan bank B.
- f. Langkah terakhir, bank B menagih kepada importir. Apabila importir memiliki rekening di bank B maka bank B tinggal mengurangi jumlah yang tersimpan di rekeningnya. Sebagai catatan, wesel yang belum jatuh tempo dan sudah di-*accept* (diakui) oleh importir bisa diperjualbelikan untuk mendapat keuntungan, di antaranya berupa bunga diskonto.

Wesel yang dipergunakan dalam perdagangan internasional dapat digolongkan berdasarkan:

- 1) Ada tidaknya dokumen, yang terdiri atas:
 - (a) *Clean draft*, yaitu wesel yang tidak disertai dokumen pengiriman. *Clean draft* dipakai oleh eksportir dan importir yang saling percaya.
 - (b) *Documentary draft*, yaitu wesel yang disertai dokumen pengiriman.
- 2) Waktu pembayaran (*tenor/usance*). Terdiri atas:
 - (a) *Sight draft*, yaitu wesel yang harus segera dibayar setelah wesel dan dokumen diperlihatkan. Ada kemungkinan pembayaran telah terjadi sebelum penerimaan barang, karena umumnya pengiriman barang membutuhkan waktu lebih lama dibanding pengiriman wesel.
 - (b) *Arrival draft*, yaitu wesel yang dibayar bila barang sudah datang (diterima).
 - (c) *Date draft*, yaitu wesel yang dibayar pada tanggal tertentu seperti yang tercantum pada wesel.

5. Letter of Credit (LC)

Letter of credit adalah surat pernyataan tertulis yang dibuat bank atas permohonan nasabah (importir) untuk menyediakan sejumlah uang sebagai pembayaran kepada eksportir. Ada tiga pihak yang terlibat dalam transaksi LC, yaitu:

- a. *Opener*, yakni importir (pembeli) yang membuka LC di bank.
- b. *Issuer*, yakni bank yang menyetujui pembukaan LC.
- c. *Beneficiary*, yakni eksportir (penjual).

Selain tiga pihak di atas, umumnya transaksi LC masih menggunakan jasa *confirming bank*, yakni bank yang bersedia menjamin transaksi LC. Secara ringkas, transaksi LC menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Importir dan eksportir membuat perjanjian tentang cara pembayaran menggunakan LC.
- b. Importir membuka LC pada bank di negaranya dengan mengisi surat permohonan.
- c. Bank bersedia menandatangani LC bila permohonan importir disetujui.
- d. Dengan penandatanganan LC oleh bank, berarti telah tersedia dana (kredit) untuk menjamin pembayaran kepada eksportir.
- e. *Confirming bank* ikut membubuhkan tanda tangan pada LC untuk memperkuat jaminan pembayaran kepada eksportir.
- f. Barang kemudian dikirim oleh eksportir.
- g. Eksportir menarik (membuat tagihan) wesel kepada *issuer* dan mengirimkan wesel yang disertai dokumen pengiriman barang kepada *issuer*.

- h. Apabila wesel dan dokumen pengiriman barang sudah diterima dan ditandatangani *issuer*, barang yang ada di pelabuhan bisa dikeluarkan dan dikirimkan ke tempat importir.
- i. Selanjutnya, *issuer* membayar kepada eksportir, dan importir membayar kepada issuer sesuai tanggal jatuh tempo.

6. *Private Compensation*

Private compensation adalah cara pembayaran yang dilakukan importir dan eksportir dengan cara menukarkan utang piutang. Contohnya, Toni di Indonesia mempunyai utang 1000 ringgit kepada Farhan di Malaysia. Di lain pihak, Najib di Malaysia mempunyai utang kepada Diki di Indonesia. Atas kesepakatan mereka, untuk mempermudah transaksi, utang piutang tersebut diselesaikan dengan cara: Toni membayar utangnya kepada Diki; Najib membayar utangnya kepada Farhan.

7. *Open Account*

Open Account adalah cara pembayaran dengan terlebih dulu mengirimkan barang kepada importir tanpa disertai surat perintah membayar dan dokumen pengiriman. Pembayaran diterima eksportir beberapa waktu kemudian atau tergantung kesanggupan importir. Cara pembayaran ini sangat berisiko bagi eksportir. Oleh karena itu, cara ini sebaiknya dilakukan bila eksportir sudah mengenal (percaya) kepada importir dan lokasi importir tidak terlalu jauh.

KEGIATAN 5.4

Jika tempat tinggalmu dekat dengan pusat kota, kunjungilah bank yang melayani ekspor impor. Mintalah informasi mengenai cara-cara pembayaran internasional. Mintalah contoh-contoh dokumen yang digunakan dalam pembayaran internasional!

H. Alat Pembayaran Internasional

Benarkah hanya uang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional? Tidak bisakah benda-benda lain digunakan sebagai alat pembayaran internasional? Apabila disepakati oleh kedua pihak, bukan

hanya uang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional, emas dan barang lain juga dapat digunakan. Secara rinci, alat pembayaran internasional terdiri atas:

1. Uang, yang dimaksud uang di sini bisa berupa mata uang dari pihak yang berpiutang (pengekspor) atau mata uang internasional tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak, misalnya dolar AS. Cara penyampaiannya bisa dengan menggunakan telegrafis, transfer atau wesel.
2. Emas bila disepakati. Emas juga dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Jumlah emas yang harus diserahkan senilai dengan jumlah uang yang harus dibayarkan.
3. Barang-barang juga dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional. Penjualan barang yang dibayar kembali dengan barang sudah dilakukan sejak lama dan dalam perdagangan internasional disebut dengan istilah “perjanjian imbal balik” (*countertrade*). Bacalah sekilas info berikut!

I N F O

“Apa itu *Countertrades*”

Perdagangan Imbal-beli atau *countertrades* adalah perdagangan yang menggunakan barang sebagai alat pembayaran. Itu berarti bila negara A membeli barang dari negara B, negara A akan membanggunya dengan sejumlah barang.

Sistem perdagangan imbal-beli sudah dikenal sepanjang sejarah manusia. Manusia prasejarah, yang belum mengenal uang sebagai alat pembayaran, mempratikkan sistem perdagangan imbal-beli dalam bentuk paling sederhana, yaitu barter. Praktik perdagangan imbal-beli dalam perdagangan internasional pun sudah dikenal sebelum Perang Dunia II, tetapi pada akhir-akhir ini, terutama sejak terjadinya krisis moneter internasional tahun 1982, makin banyak negara yang menerapkan sistem perdagangan imbal beli termasuk Indonesia. Pada umumnya, pola imbal-beli diatur dalam suatu perjanjian atau kontrak, yang menyatakan kesediaan negara yang bersangkutan mengimpor barang-barang dari negara lain yang menjadi mitra dagangnya apabila, sebagai imbalannya, sang mitra bersedia pula membeli produk-produk negara tersebut dengan nilai yang sama.

Indonesia menerapkan sistem perdagangan imbal-beli (*counterpurchase*) sejak Januari 1982, yaitu dengan dikeluarkannya

Peraturan Pemerintah No. 1/1982. Kebijakan itu menetapkan bahwa setiap pemasok (supplier) asing yang memenangkan kontrak pembelian pemerintah di atas 500 juta rupiah diharuskan membeli, atau memasarkan komoditi Indonesia di luar negeri.

Indonesia sudah mengadakan perjanjian perdagangan imbal-beli dengan 25 negara, terutama Jerman Barat, Jepang, Kanada, dan Singapura. Komoditi yang dibeli dari Indonesia dalam rangka imbal-beli tersebut terutama adalah inti kelapa sawit, kayu lapis, aluminium ingot, udang, biji coklat, tekstil, kopi, karet, rotan, rempah-rempah, pasir silika, timah, nikel, dan lain-lain. Pada tanggal 31 Januari 1989 jumlah keseluruhan perdagangan tersebut mencapai nilai 1.964,71 juta dolar Amerika.

Kata Kunci

Adam Smith
cara pembayaran internasional
clearing internasional
counter trades
David Ricardo
devisa
diskriminasi
dumping
ekspor
free trade
impor
keb. perdagangan internasional
keb. perdagangan proteksionis
kebijakan perdagangan bebas
kuota ekspor
kuota impor
kurs
kurs transaksi
kurs UKA
larangan ekspor

larangan impor
letter of credit (LC)
open account
perdagangan internasional
premi
privat compensation
sistem kurs
sistem kurs bebas
sistem kurs mengambang
terkendali
sistem kurs tetap
subsidi
tarif ekspor
tarif impor
Teori Keunggulan Komparatif
Teori Keunggulan Mutlak
transfer telegrafis
tunai
wesel (bill of exchange)

RANGKUMAN

Perdagangan Internasional

- Arti:** Kegiatan menjual dan membeli produk yang terjadi antar negara yang dilakukan individu dengan individu, individu dengan pemerintah atau pemerintah dengan pemerintah.
 - Manfaat**
 - sebagai sumber devisa
 - menjaga stabilitas harga
 - mempertluas lapangan kerja
 - mendorong konsumsi
 - mempertluas alih teknologi
 - memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi sendiri
 - Faktor-faktor yang mendorong**
 - perbedaan sumber daya alam
 - selera (kesukaan)
 - penghematan biaya produksi
 - perbedaan teknologi
 - ingin meningkatkan keuntungan
 - Kebijakan perdagangan internasional**
 - Tujuan Kebijakan Perdagangan Internasional
 - mengendalikan ekspor dan impor
 - meningkatkan pertumbuhan ekonomi
 - menyehatkan neraca pembayaran
 - Macam kebijakan perdagangan internasional
 - Kebijakan perdagangan bebas** alasan-alasannya
 - mendorong persaingan antar pengusaha
 - mendorong penghematan biaya
 - menggerakkan perputaran modal, tenaga ahli dan investasi
 - memberi pilihan luas bagi konsumen
 - Kebijakan perdagangan proteksionis** alasan-alasannya
 - perdagangan bebas hanya menguntungkan negara maju
 - untuk melindungi industri dalam negeri yang baru tumbuh
 - untuk membuka lapangan kerja
 - untuk menyehatkan neraca pembayaran
 - untuk meningkatkan penerimaan negara
- Hambatan perdagangan proteksionis:**
Kuota impor, kuota ekspor, subsidi, tarif impor, tarif ekspor, premi, diskriminasi harga, larangan ekspor, larangan impor, dumping.
- Teori perdagangan Internasional**
 - Teori keunggulan mutlak (Adam Smith)
 - Teori keunggulan Komparatif (David Ricardo)

Cara Pembayaran Internasional

- Tunai
- Telegrafis Transfer
- Clearing Internasional
- Wesel (Bill of Exchange)
- Letter of Credit
- Private Compensation
- Open Account

Alat Pembayaran Internasional

- Uang
- Emas
- Barang

Devisa

- Arti:** Semua benda yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional yang bisa berbentuk mata uang asing, emas, wesel, cek dan surat-surat berharga lainnya.
- Macam**

Berdasarkan sumber: Devisa kredit
Devisa Umum
Berdasarkan wujud: Devisa Kartal
Devisa Giral
- Sumber**

Ekspor barang, ekspor jasa, PMA/PML, Pinjaman luar negeri, pendapatan atas modal dan investasi dan lain-lain.
- Fungsi**
 - sebagai alat pembayaran barang dan jasa impor
 - Sebagai alat pembayaran cicilan utang + bunga
 - Sebagai alat pembiayaan hubungan luar negeri
 - Sebagai sumber pendapatan negara
- Tujuan Penggunaan:**
 - untuk membayar barang konsumsi - impor
 - untuk membayar barang modal - impor
 - untuk membayar jasa-jasa keluar negeri
 - untuk membiayai penginiman tim kesenian dan lain-lain

Kurs

- Arti:** Nilai tukar mata uang asing yang dinyatakan dalam mata uang negeri sendiri
- Macam**
 - Kurs Uang Kertas Asing (UKA) yaitu kurs yang dipakai sebagai patokan dalam jual beli uang kertas asing
 - Kurs Transaksi, yaitu kurs yang dipakai sebagai patokan dalam melakukan transaksi yang melibatkan mata uang asing
- Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurs**
 - sistem kurs yang dianut
 - selera masyarakat
 - keadaan neraca pembayaran
 - kebijakan devaluasi dan revaluasi
 - keadaan kurs antar negara-negara maju
 - kekuatan permintaan dan penawaran
- Sistem kurs**
 - sistem kurs tetap
 - sistem kurs bebas
 - sistem kurs mengambang terkendali
- Menghitung nilai tukar valuta berdasar kurs yang berlaku**
 - bila konsumen membeli valuta asing akan dikenai kurs jual, karena posisi money changer (pedagang valas) adalah sebagai penjual.
 - Bila konsumen menjual valuta asing akan dikenai kurs beli, karena posisi money changer (pedagang valas) adalah sebagai pembeli

Evaluasi Akhir Bab

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

- Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya perdagangan internasional, kecuali
 - selera (kesukaan)
 - perbedaan teknologi
 - penghematan biaya produksi
 - persamaan pendapatan
 - perbedaan sumber daya alam
- Apel Washington dan Amerika memiliki kualitas dan rasa khusus dibanding apel-apel lain. Apel Amerika lebih murah diproduksi di Amerika karena cocok dengan iklim Amerika. Dalam hal ini Amerika memiliki
 - keunggulan apel
 - keunggulan mutlak
 - keunggulan komparatif
 - kerugian mutlak
 - kerugian komparatif
- Yang bukan manfaat perdagangan internasional adalah
 - menjaga stabilitas harga
 - mendorong alih teknologi
 - memperluas konsumsi
 - sebagai sumber devisa
 - menambah tenaga kerja
- Kebijakan perdagangan yang memberlakukan berbagai rintangan dan hambatan perdagangan disebut kebijakan
 - perfeksionis
 - liberal
 - komunis-sosialis
 - proteksi
 - demokratis
- Apabila dua negara mengadakan hubungan perdagangan karena perbedaan iklim maka akan memberikan
 - keunggulan sepadan
 - keunggulan berbeda
 - keunggulan mutlak
 - keunggulan komparatif
 - keunggulan komunikatif
- Yang merupakan alasan dipergunakannya kebijakan perdagangan bebas adalah
 - dapat melindungi industri dalam negeri
 - dapat mendorong penghematan biaya

- C. untuk membuka lapangan kerja dalam negeri
 - D. untuk mengurangi pengangguran
 - E. untuk mengurangi persaingan antar pengusaha
7. Bila produsen menjual dengan harga lebih murah di pasar luar negeri dibanding dengan harga di pasar dalam negeri maka disebut
- A. kuota
 - B. tarif ekspor
 - C. dumping
 - D. subsidi
 - E. premi
8. Dalam pembayaran internasional dapat dipergunakan LC, yakni
- A. surat pernyataan tertulis yang dibuat bank atas permohonan nasabah (importir) untuk menyediakan sejumlah uang sebagai pembayaran kepada eksportir.
 - B. surat pernyataan yang dibuat eksportir kepada bank agar menyediakan uang bagi importir
 - C. surat yang ditulis penjual yang ditujukan kepada pembeli agar menyerahkan barang
 - D. surat pernyataan pembayaran utang oleh eksportir.
 - E. surat pernyataan pembayaran utang oleh importir.
9. Cara pembayaran antar bank di negara yang berlainan dengan cara memindahkan saldo kepada pihak yang berhak berdasarkan hasil rekapitulasi transaksi tiap akhir hari kerja disebut
- A. transfer
 - B. wesel
 - C. LC
 - D. clearing/kliring
 - E. compensation
10. Batas jumlah barang yang boleh diekspor atau diimpor disebut
- A. subsidi
 - B. premi
 - C. kuota
 - D. kurs
 - E. kredit
11. Yang bukan faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan kurs adalah
- A. selera masyarakat
 - B. sistem kurs yang dianut
 - C. keadaan neraca pembayaran
 - D. kebijakan devaluasi dan revaluasi
 - E. jumlah penduduk
12. Kurs (nilai tukar) yang ditetapkan pemerintah disebut

- A. sistem kurs bebas
 - B. sistem kurs tetap
 - C. sistem kurs mengambang
 - D. sistem kurs mengambang terkendali
 - E. sistem kurs terkendali
13. Bila kurs (nilai tukar) ditentukan oleh kekuatan tarik menarik antara permintaan dan penawaran disebut
- A. sistem kurs tetap
 - B. sistem kurs bebas
 - C. sistem kurs terkendali
 - D. sistem kurs terpusat
 - E. sistem kurs terencana
14. Cara pembayaran dengan menggunakan telegram atau telex atau telepon kepada bank di luar negeri disebut
- A. clearing
 - B. wesel
 - C. transfer telegrafis
 - D. kontan
 - E. LC
15. Yang bukan merupakan alat pembayaran internasional adalah
- A. emas
 - B. uang dolar
 - C. jasa
 - D. uang yen
 - E. barang
16. Teori keunggulan mutlak dikemukakan oleh
- A. David Ricardo
 - B. Adam Smith
 - C. Robert Maltus
 - D. Schumpeter
 - E. Henry Ford
17. Semua benda yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional yang bisa berbentuk mata uang asing, emas, wesel, cek dan surat-surat berharga lain disebut
- A. devisa
 - B. kartal
 - C. uang giral
 - D. wesel
 - E. portofolio
18. Yang bukan fungsi devisa adalah
- A. sebagai sumber pendapatan negara
 - B. sebagai alat pembayaran barang & jasa impor
 - C. sebagai alat penelitian penyimpangan keuangan
 - D. sebagai alat pembiayaan hubungan luar negeri
 - E. sebagai alat pembayaran cicilan utang luar negeri

15. Jelaskan langkah-langkah transaksi dengan menggunakan LC!
16. Apa yang dimaksud Open Account dan Private Compensation!
17. Apa yang dimaksud dengan perdagangan imbal balik!
18. Dari mana saja devisa dapat diperoleh!
19. Apa yang terjadi bila suatu negara tidak memiliki devisa?
20. Menurutmu bagaimana caranya agar negara dapat memperoleh devisa sebanyak-banyaknya?

C. UKA (Usut Kasus)

Perhatikan daftar perdagangan imbal beli (Countertrade) berikut!

No	Kawasan	CT	%
1	Amerika Serikat, Kanada	60,4	9,2
2	EEC (Masyarakat Ekonomi Eropa)	148,3	22,6
3	Negara-negara Sosial Eropa	125,0	19,0
4	Negara-negara Eropa Lainnya	59,0	9,0
5	Australia, Selandia Baru	18,6	2,8
6	Timur Tengah	35,4	5,4
7	Asia Tenggara	13,7	2,1
8	Timur Jauh	141,5	21,5
9	Amerika Tengah dan Selatan	31,6	4,8
10	Afrika	23,1	3,5
11	Lain-lain	2,3	0,1
	Total Dunia	657,1	100

Rujukan: Manurung, R, & Hutagalung, B, "Countertrade: Mekanisme Perdagangan Masa Depan". Business News. No. 5012, 3 Oktober 1990.

Sistem perdagangan imbal-beli seringkali dicela sebagai tindakan proteksionistis oleh organisasi-organisasi perdagangan internasional seperti GATT dan UNCTAD, yang selalu memperjuangkan perdagangan bebas antar-negara. Meskipun demikian, kecenderungan memaksakan perdagangan imbal-beli pada negara lain makin meningkat. Diperkirakan sudah lebih dari 50% negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang, yang mempraktikkannya.

Sekarang cobalah jawab pertanyaan berikut!

1. Mengapa negara-negara tertarik melakukan perdagangan imbal balik? Pikirkan dan kemukakan pendapatmu!
2. Sampai kapan kira-kira perdagangan imbal-beli dipergunakan?

6. Pemberian upah dengan cara memberikan bagian tertentu dari hasil (keuntungan) yang diperoleh dinamakan sistem upah
 - A. borongan
 - B. prestasi
 - C. bagi hasil
 - D. premi
 - E. partisipasi

7. Cara yang tidak sesuai untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja adalah
 - A. mengadakan seminar dan workshop berkaitan dengan suatu pekerjaan
 - B. meningkatkan pemberian gizi
 - C. latihan kerja
 - D. meningkatkan pesangon
 - E. magang

8. Cara yang paling tepat untuk mengatasi pengangguran friksional adalah
 - A. mendirikan industri padat karya
 - B. meningkatkan daya beli masyarakat
 - C. memberi informasi lowongan kerja dengan cepat
 - D. meningkatkan perputaran modal
 - E. memberi latihan keterampilan

9. Pertumbuhan ekonomi lebih sempit dibandingkan dengan pembangunan ekonomi karena
 - A. pertumbuhan ekonomi hanya menekankan pada kenaikan BBM
 - B. pertumbuhan ekonomi memperhatikan pemerataan kesejahteraan
 - C. pertumbuhan ekonomi memperhatikan kenaikan jumlah penduduk
 - D. pertumbuhan ekonomi melihat perubahan struktur ekonomi
 - E. pembangunan ekonomi melihat kenaikan PDB

10. Yang bukan faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi adalah
 - A. konsumen
 - B. SDM (sumber daya manusia)
 - C. teknologi
 - D. modal
 - E. SDA (sumber daya alam)

11. Prapitalisme, kapitalisme madya, kapitalisme raya, dan kapitalisme akhir adalah tahap-tahap

- A. Frederich List
- B. Karl Bucher
- C. Werner Sombart
- D. W. W. Rostow
- E. Adam Smith

12. Mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 merupakan

- A. asas pembangunan nasional
- B. prinsip pembangunan nasional
- C. tujuan pembangunan nasional
- D. arti pembangunan ekonomi
- E. hakikat pembangunan ekonomi

13. PROPENAS (Program Pembangunan Nasional) berlaku untuk

- A. 1 tahun
- B. 2 tahun
- C. 3 tahun
- D. 4 tahun
- E. 5 tahun

14. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut.

- 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui suatu saat habis
- 2. Kemajuan gaya hidup
- 3. Terjadi polusi udara, air, tanah, dan suara
- 4. Kesehatan manusia terganggu
- 5. Hutan dan ekosistem rusak

Yang merupakan dampak negatif dari pembangunan ekonomi adalah pernyataan

- A. 1, 2, 3
- B. 2, 3, 4
- C. 3, 4, 5
- D. 1, 4, 5
- E. 2, 3, 5

15. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut.

- 1. Memberikan perlindungan bagi pekerja.
- 2. Memberikan kompensasi istimewa bagi pekerja asing.
- 3. Membuat peraturan sepihak bagi pekerja cacat.
- 4. Menetapkan sistem pengupahan dan penjaminan kesejahteraan pekerja.
- 5. Menciptakan lapangan kerja sesuai kebijakan ekonomi makro.

Yang merupakan strategi yang tepat dalam mengatasi masalah lapangan kerja di Indonesia adalah pernyataan

- A. 1, 2, 3
- B. 2, 3, 4
- C. 3, 4, 5
- D. 1, 4, 5
- E. 2, 3, 5

16. Karl Bucher membagi pertumbuhan ekonomi dalam masa, sebagai berikut.
- A. Tradisional, prasyarat lepas landas, lepas landas, ekonomi matang, dan konsumsi tinggi.
 - B. Prakapitalisme, kapitalis madya, kapitalis raya, kapitalis akhir.
 - C. Rumah tangga desa, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, rumah tangga dunia.
 - D. Berburu, beternak, bertani, kerajinan, industri, dan perdagangan.
 - E. rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, rumah tangga dunia
17. Dengan adanya APBN pemerintah dapat mendistribusikan pendapatan yang diterima secara adil dan merata. Ini merupakan fungsi
- A. efisiensi
 - B. stabilisasi
 - C. distribusi
 - D. adil dan merata
 - E. alokasi
18. Bila RAPBN diterima maka
- A. RAPBN disahkan menjadi GBHN
 - B. digunakan APBN tahun lalu
 - C. pemerintah membuat DUK dan DUP
 - D. RAPBN disahkan menjadi APBN
 - E. RAPBN diawasi oleh BPK
19. Pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN dalam bentuk
- A. hasil APBN
 - B. koreksi APBN
 - C. PAN (Perhitungan Anggaran Negara)
 - D. laporan APBN
 - E. Daftar Anggaran Negara
20. Yang bukan tergolong penerimaan perpajakan negara adalah
- A. cukai
 - B. retribusi
 - C. Pajak Bumi dan Bangunan
 - D. bea masuk
 - E. Pajak Pertambahan Nilai
21. Yang tergolong pengeluaran rutin pemerintah pusat adalah
- A. belanja pegawai, subsidi, belanja proyek
 - B. belanja barang, bayar bunga utang, biaya pembangunan

- C. belanja pegawai, subsidi, belanja umum
 D. bayar bunga utang, belanja proyek, subsidi
 E. subsidi, belanja barang, bayar bunga utang
22. Sejak April tahun 2000 di APBN, pinjaman luar negeri tidak dianggap sebagai penerimaan negara tapi dianggap sebagai komponen
 A. pendapatan
 B. pembiayaan
 C. kelebihan
 D. defisit
 E. surplus
23. Korupsi dari sisi pembelanjaan negara bisa dilakukan dengan cara
 A. mark up, penyelundupan, pungli
 B. mark up, belanja fiktif, pungli
 C. pungli, belanja fiktif, penyelundupan
 D. penggelapan pajak, penyelundupan, pungli
 E. menghindari pajak, penggelapan, mark up
24. Yang bukan PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah
 A. retribusi daerah
 B. pajak daerah
 C. iuran kecamatan
 D. pendapatan bunga
 E. jasa giro
25. Kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara dinamakan
 A. kebijakan moneter
 B. kebijakan ekonomi
 C. politik ekonomi
 D. kebijakan anggaran
 E. strategi keuangan
26. Kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran lebih besar daripada penerimaan disebut
 A. kebijakan anggaran defisit
 B. kebijakan anggaran seimbang
 C. kebijakan anggaran dinamis
 D. kebijakan moneter surplus
 E. kebijakan fiskal surplus
27. Pasar yang memperjualbelikan surat-surat berharga jangka panjang dinamakan
 A. pasar uang
 B. pasar modal
 C. pasar surat berharga
 D. pasar jangka panjang
 E. pasar valuta

28. Surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar modal disebut
- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| A. right, saham biasa, waran | D. promes, SBI, aksept |
| B. aksept, right, obligasi | E. reksadana, waran, ABPU |
| C. obligasi, promes, SBI | |
29. Dalam pasar modal, pihak yang memberikan pinjaman modal disebut
- | | |
|--------------------|----------------|
| A. perusahaan efek | D. investor |
| B. emiten | E. wali amanat |
| C. debitor | |
30. Jika surat berharga yang ingin dijual tidak segera ada yang membeli seperti yang diinginkan dinamakan risiko
- | | |
|---------------|-----------------|
| A. inflasi | D. capital loss |
| B. delisting | E. bisnis |
| C. likuiditas | |
31. Setelah pesanan dari pemodal-beli diteliti oleh perusahaan efek, pesanan tersebut lalu disampaikan kepada . . . di lantai bursa untuk dilaksanakan.
- | | |
|-----------------|-----------|
| A. dealer | D. emiten |
| B. pialang jual | E. sales |
| C. pialang beli | |
32. Umumnya seorang pemodal menjual kembali efek yang dibelinya dengan tujuan
- | | |
|-----------------|-----------------|
| A. capital gain | D. nama baik |
| B. capital loss | E. capital yard |
| C. likuiditas | |
33. Seorang pemodal ingin membeli saham PT Sampurna sebanyak 10 lot. Sepuluh lot sama dengan saham sejumlah
- | | |
|---------|---------|
| A. 1000 | D. 4000 |
| B. 1500 | E. 5000 |
| C. 2000 | |
34. Yang merupakan alasan diberlakukannya kebijakan perdagangan proteksionis adalah
- mendorong penghematan biaya
 - memberi pilihan yang luas kepada konsumen
 - menggerakkan perputaran modal
 - melindungi industri dalam negeri
 - mendorong persaingan atau pengusaha

35. Teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith tertuang dalam bukunya yang berjudul
- A. Capital of Nations D. Gain Nations
 B. Wealth of Nations E. Free Trade
 C. Absolute Advantage
36. Kebijakan memberi hadiah atau penghargaan kepada perusahaan yang bisa memproduksi barang dengan kualitas tinggi dan jumlah tertentu dinamakan
- A. tarif ekspor D. premi
 B. subsidi E. dumping
 C. diskriminasi
37. Pada hari Rabu tanggal 4 Mei tahun X kurs jual US\$ 1 = Rp9.500,- dan pada hari Kamis tanggal 5 Mei tahun X kurs jual US\$ 1 = Rp8.500,-. Hal ini berarti pada hari Kamis nilai tukar rupiah terhadap dolar semakin
- A. tidak terkendali D. jelas
 B. melemah E. terpuruk
 C. menguat
38. Bila pemerintah harus mengendalikan kur ke tingkat yang sudah ditetapkan yang menunjuk pada satu nilai tertentu, maka negara tersebut menganut sistem kurs
- A. mengambang terkendali
 B. bebas
 C. mengambang
 D. tidak tetap
 E. tetap
39. Cara pembayaran dengan mengirimkan telegram, telex, ataupun telepon yang dilakukan bank atas perintah nasabah dinamakan
- A. clearing telegrafis D. bill of exchange
 B. transfer telegrafis E. trade bill
 C. letter of credit
40. Tunisia membayar impor sepatu dari Malaysia dengan mengirimkan karpet ke Malaysia. Ini berarti Tunisia melakukan
- A. counter trade D. privat trade
 B. insider trade E. exclusive trade
 C. open trade

B. Jawablah pertanyaan berikut!

1. Jelaskan perbedaan tenaga kerja, angkatan kerja, dan pekerja!
2. Jelaskan cara-cara meningkatkan kualitas tenaga kerja!
3. Jelaskan fungsi-fungsi APBN!
4. Sebutkan dampak-dampak APBD terhadap perekonomian!
5. Jelaskan perbedaan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi!
6. Negara P pada tahun 2004 mempunyai PDB senilai US\$90.000 miliar dan pada tahun 2005 PDB mengalami kenaikan menjadi US\$100.000 miliar. Hitung pertumbuhan ekonomi negara P tahun 2005.
7. Jelaskan mekanisme transaksi perdagangan di pasar modal!
8. Jelaskan risiko-risiko yang dihadapi oleh pelaku pasar modal!
9. Sebutkan alasan-alasan diberlakukannya kebijakan perdagangan bebas!
10. Menurutmu, bisakah suatu negara mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa mengadakan hubungan perdagangan dengan negara lain? Jelaskan!

Bab VI

Akuntansi sebagai Sistem Informasi



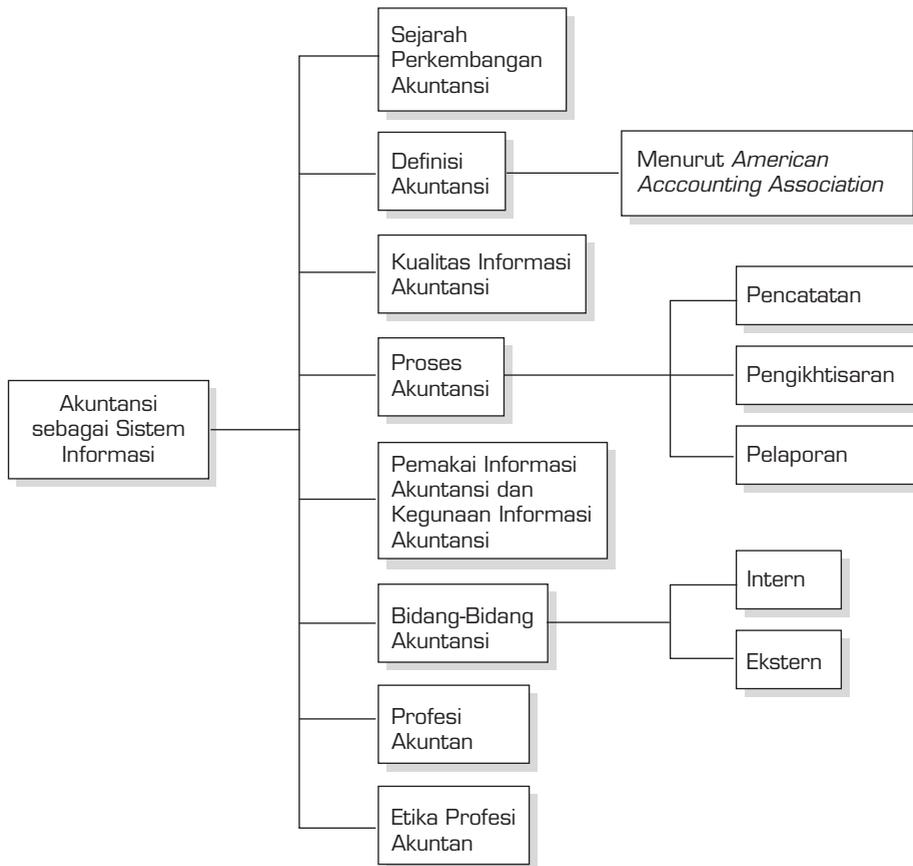
Sumber: *Tempo*, 1-7 Agustus 2005

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat:

1. mendefinisikan pengertian dasar akuntansi;
2. merumuskan kualitas informasi akuntansi;
3. menjelaskan proses akuntansi dan kualitas informasi akuntansi;
4. mengidentifikasi kegunaan informasi akuntansi bagi masing-masing pemakai;
5. mengidentifikasi macam - macam bidang spesialisasi akuntansi;
6. mengidentifikasi etika profesi akuntan.

PETA KONSEP



Dalam dunia usaha, akuntansi memiliki peran yang sangat penting. Akuntansi merupakan bahasa bisnis; merangkum semua aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Akuntansi melakukan pencatatan data-data aktivitas perusahaan menjadi informasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan.

A. Sejarah Perkembangan Akuntansi

Akuntansi dimulai sejak manusia mengenal uang sebagai alat pembayaran dan membuat catatan. Pada awal abad XV muncul naskah-naskah mengenai pelajaran akuntansi di Italia dengan menggunakan angka-angka Arab. Dan pada akhir abad XV terbit buku yang pertama di Italia, hasil karya seorang Venesia, bernama Lucas Paciolo yang berjudul "*Summa De Arithmetica, Geometrica et Proportionalita*". Buku tersebut membahas tentang akuntansi, dan menjadi tonggak sejarah di bidang akuntansi. Di dalam salah satu babnya, buku tersebut membahas tentang "*Tractatus de Computist el Scriptorio*", yaitu cara-cara pembukuan dengan berpasangan (*double book keeping*), yang sampai sekarang masih banyak digunakan.

Hasil karya Lucas Paciolo ini menyebar ke Eropa Barat dan dikembangkan oleh pengarang-pengarang baru. Sehingga timbullah beberapa sistem, yang namanya disesuaikan dengan nama negaranya masing-masing, contohnya sistem Belanda, sistem Amerika (*anglo saxon*), dan sebagainya.

Akuntansi berbeda dengan pembukuan. Pembukuan atau tata buku adalah suatu seni pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran. Adapun akuntansi lebih luas cakupannya daripada pembukuan. Mengapa demikian? Karena pembukuan sebagian dari kegiatan akuntansi. Adapun hal yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu:

1. pembukuan;
2. penganalisisan laporan-laporan keuangan yang telah disusun;
3. penelitian untuk mengetahui luas serta macam-macam transaksi keuangan;
4. perencanaan sistem akuntansi yang akan digunakan pada sebuah perusahaan berdasarkan hasil survei;
5. pemeriksaan akuntansi; dan lain sebagainya.

Dalam perkembangan akuntansi, beberapa negara di Eropa Barat memisahkan "pembukuan" dari pelajaran "akuntansi dalam arti yang luas". Di negeri Belanda, sampai sekarang masih memberikan pelajaran "pembukuan" saja pada berbagai perguruan, dan untuk pelajaran "akuntansi

secara luas” hanya diberikan di fakultas ekonomi jurusan akuntansi. Adapun di Amerika Serikat, dikarenakan pembukuan merupakan bagian dari akuntansi, maka yang dipergunakan pada perguruan-perguruan di sana adalah pelajaran akuntansi dalam arti yang luas.

Dan di Indonesia sendiri disepakati lewat lokakarya Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi tahun 1980 tentang Pendidikan Akuntansi di Indonesia, bahwa cara atau sistem yang dipakai di Indonesia adalah cara atau sistem Amerika, setelah sebelumnya Indonesia pernah memakai sistem Belanda karena pengaruh penjajahan oleh pihak Belanda.

B. Definisi Akuntansi

Menurut *American Accounting Association*: akuntansi adalah “ suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi, yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”.

Dari pengertian ini ada tiga hal yang bisa kita simpulkan, yaitu;

1. masukan (input) akuntansi adalah berupa data-data atau dokumen ekonomi dari kegiatan (transaksi) organisasi ataupun perusahaan;
2. masukan tersebut diolah melalui proses identifikasi, pengukuran, pelaporan untuk menghasilkan keluaran (output) informasi atau laporan keuangan;
3. keluaran tersebut digunakan sebagai penunjang atau sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis oleh pemakai informasi tersebut.

C. Kualitas Informasi Akuntansi

Informasi akuntansi bisa dikatakan berkualitas bila memenuhi syarat-syarat berikut.

1. Perbandingan antara manfaat dan biaya. Manfaat laporan informasi akuntansi paling tidak harus sama dengan biaya untuk membuat laporan tersebut. Biaya sebuah laporan akuntansi tidak boleh lebih besar daripada manfaat yang bisa diterima oleh pemakai informasi tersebut.
2. Dapat dimengerti. Informasi akuntansi dapat dimengerti oleh pemakai bila dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan tingkat pengetahuan pemakai.
3. Relevan. Agar informasi akuntansi relevan, maka dipilih metode pengukuran dan pelaporan akuntansi keuangan yang sesuai dan bisa membantu para pemakai dalam pengambilan keputusan.

4. Dapat diuji. Informasi akuntansi harus dapat diuji kebenarannya oleh para penguji independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama.
5. Netral. Informasi akuntansi harus ditujukan pada kebutuhan umum pemakai, bukan pada kebutuhan dan kepentingan pihak-pihak tertentu.
6. Menyajikan yang seharusnya. Informasi akuntansi bisa dipercaya, bila menyatakan yang sebenarnya atau menyajikan yang seharusnya.
7. Nilai prediksi. Informasi akuntansi tentang posisi keuangan masa lalu memiliki nilai prediksi. Artinya, dapat dipakai sebagai dasar memprediksi atau meramalkan masa depan.
8. *Feedback* (umpan balik). Umpan balik bisa berupa membenaran atau penolakan terhadap perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.
9. Tepat waktu. Informasi akuntansi harus disampaikan tepat waktu agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan/kebijakan perusahaan dan untuk mencegah tertundanya pengambilan keputusan/kebijakan.
10. Dapat dibandingkan atau konsisten. Informasi akuntansi yang disajikan harus dapat memudahkan pemakai untuk membandingkannya dengan informasi sejenis dari perusahaan lain. Dan perbedaan informasi akuntansi yang diperoleh harus disebabkan oleh faktor keadaan ekonomi, bukan disebabkan oleh perbedaan prinsip atau metode/prosedur.

D. Proses Akuntansi

Bila dikelompokkan, proses akuntansi terdiri atas dua kegiatan, sebagai berikut.

1. Kegiatan yang bersifat konstruktif atau sintetik; Meliputi kegiatan pencatatan, peringkasan, penggolongan dan aktivitas lain yang menghasilkan informasi akuntansi.
2. Kegiatan yang bersifat analitikal dari informasi akuntansi; Meliputi kegiatan penganalisisan dan penginterpretasian informasi akuntansi.

Secara garis besar proses akuntansi terdiri atas beberapa tahap, sebagai berikut.

1. Tahap pencatatan, meliputi penyediaan dokumen dan analisisnya, pencatatan transaksi ke jurnal, dan posting buku besar.
2. Tahap pengikhtisaran, meliputi pembuatan neraca percobaan/neraca saldo/neraca sisa serta kertas kerja/neraca lajur.
3. Tahap penyusunan laporan keuangan, meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas.

E. Beberapa Pemakai Informasi Akuntansi dan Kegunaan Informasi Akuntansi

Menurut pengertian akuntansi yang telah kita bahas sebelumnya, akuntansi adalah suatu proses yang mengolah data-data atau dokumen ekonomi dengan tujuan menghasilkan informasi. Informasi tersebut akan digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan atau yang berkepentingan, sebagai dasar untuk menilai dan membuat keputusan. Pemakai informasi akuntansi tersebut dapat kita bedakan menjadi dua pihak, yaitu pihak intern dan pihak ekstern.

Pihak intern adalah pihak yang berhubungan langsung dengan kegiatan atau operasi perusahaan sehari-hari serta terlibat langsung dalam membuat dan menentukan berbagai kebijakan atau keputusan operasional perusahaan, yaitu pemimpin perusahaan atau para manajer. Pemimpin perusahaan sangat berkepentingan terhadap informasi akuntansi karena dia merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas kelangsungan dan kemajuan perusahaan. Berdasarkan informasi akuntansi, pemimpin perusahaan dapat membuat berbagai kebijakan seperti penyusunan anggaran yang realistis, penambahan atau pengurangan karyawan, penetapan harga pokok produksi yang lebih rasional, dan penetapan harga jual yang tepat.

Pada perusahaan besar, posisi pemimpin perusahaan diduduki oleh para manajer. Berdasarkan informasi akuntansi yang dibutuhkan, dapat dibedakan tiga tingkatan manajer, yaitu: manajer tingkat atas, manajer tingkat menengah dan manajer tingkat bawah. Dalam suatu perusahaan, tingkatan manajer digambarkan seperti bentuk piramida. Semakin rendah tingkatannya, semakin banyak pula jumlah orang-orang yang terlibat di dalamnya. Berikut ini tiga tingkatan manajer dalam suatu perusahaan.

1. Manajer Tingkat Atas (*Top Manager*)

Informasi akuntansi yang dibutuhkan manajer tingkat atas umumnya berupa informasi secara global atau garis besar (misalnya, total penjualan tiap bulan dari departemen produksi) karena manajer tingkat atas bertugas mengendalikan perusahaan secara keseluruhan. Kelompok manajer tingkat atas antara lain: direktur utama, direktur, dan manajer.

2. Manajer Tingkat Menengah (*Middle Manager*)

Manajer tingkat ini membutuhkan informasi lebih rinci (misalnya, penjualan harian atau mingguan dari tiap bagian produksi) karena lingkup pengendaliannya lebih sempit. Kelompok manajer tingkat menengah antara lain: kepala divisi, kepala bagian, dan kepala departemen

3. Manajer Tingkat Bawah (*Low Manager*)

Manajer tingkat ini membutuhkan informasi yang sesuai pada subunit tertentu, misalnya transaksi pembelian dan penjualan oleh tiap bagian. Kelompok manajer tingkat bawah antara lain: supervisor, asisten supervisor, dan mandor.

Pihak ekstern adalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan tetapi tidak terlibat secara langsung dalam membuat berbagai kebijakan/keputusan operasional perusahaan. Pihak ekstern terdiri atas:

1. Pemilik Perusahaan atau Pemegang Saham atau Investor

Pemilik perusahaan atau pemegang saham merupakan pihak yang memiliki kepentingan dan kepedulian terhadap maju-mundurnya perusahaan, karena mereka yang menanggung risiko atas modal yang ditanam ke dalam perusahaan.

Pemilik atau pemegang saham pada umumnya akan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada manajer-manajer yang profesional. Untuk mengetahui kemampuan para manajer dalam mengelola perusahaan, pemilik atau pemegang saham dapat melihatnya dari berbagai laporan informasi yang disediakan akuntansi. Bila perusahaan memerlukan tambahan modal, pemilik atau pemegang saham dapat mengetahuinya dari informasi yang disediakan oleh akuntansi, sehingga dapat memutuskan apakah akan ikut menambah modal atau tidak. Atau sebaliknya, dengan melihat informasi akuntansi, pemegang saham bisa memutuskan untuk menjual sebagian atau seluruh sahamnya.

2. Karyawan dan Serikat Pekerja

Karyawan dan serikat pekerja juga memerlukan informasi akuntansi perusahaan. Jika keadaan keuangan perusahaan baik dan meningkat maka karyawan dapat menuntut perbaikan gaji dan upah.

3. Kreditor (Pemberi Pinjaman)

Perusahaan membutuhkan pinjaman (kredit) untuk membiayai operasinya. Pinjaman tersebut dapat diperoleh dari kreditor, yang akan memutuskan apakah memberi pinjaman atau tidak, dengan mengetahui keadaan perusahaan. Kreditor mengetahui keadaan perusahaan setelah melihat dan menganalisis laporan informasi yang disajikan oleh akuntansi.

4. Badan-Badan Pemerintah

Pemerintah memiliki kepentingan terhadap perusahaan, terutama dalam masalah perpajakan dan ketenagakerjaan. Dalam masalah perpajakan, pemerintah perlu mengetahui keuntungan suatu perusahaan agar bisa menghitung besarnya pajak penghasilan perusahaan yang bersangkutan. Dalam masalah ketenagakerjaan, pemerintah perlu memastikan apakah perusahaan telah menggaji atau memberi upah sesuai peraturan yang berlaku, seperti peraturan tentang UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten).

5. Pelanggan

Pelanggan pasti berkepentingan atas maju-mundurnya perusahaan. Konsumen dan pemasok tergolong sebagai pelanggan. Pemasok perlu mengetahui keadaan keuangan perusahaan untuk menjamin kelancaran pembayaran barang yang dipasoknya. Keadaan keuangan perusahaan dapat dilihat oleh pemasok melalui laporan yang disajikan oleh akuntansi.

6. Masyarakat

Masyarakat memiliki kepentingan terhadap perusahaan dalam hal penyediaan lapangan kerja dan manfaat sosial lainnya. Kemampuan perusahaan dalam menyediakan lapangan kerja dan manfaat sosial lainnya dapat diketahui melalui laporan keuangan (akuntansi), misalnya dengan melihat laporan laba/rugi.

F. Bidang-Bidang Akuntansi

Ilmu akuntansi memiliki ruang lingkup yang sangat luas sehingga timbullah bidang-bidang khusus dalam akuntansi, sebagai berikut.

1. Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam proses pencatatan transaksi hingga penyajian dalam bentuk laporan keuangan. Dalam pencatatan berbagai transaksi keuangan perusahaan, akuntansi keuangan harus berpatokan kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

2. Akuntansi Biaya

Akuntansi biaya adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya produksi. Akuntansi biaya berkaitan dengan penentuan harga pokok produksi dan pengendalian biaya produksi. Akuntansi biaya bermanfaat bagi manajemen untuk mengendalikan kegiatan perusahaan dan merencanakan kegiatan perusahaan di masa depan berdasarkan data-data biaya yang diperoleh.

3. Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan anggaran perusahaan dan kemudian membandingkannya dengan realisasinya agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi. Akuntansi anggaran merupakan bagian dari akuntansi manajemen.

4. Auditing/Akuntansi Pemeriksaan

Auditing adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan diri pada pemeriksaan catatan-catatan akuntansi secara bebas (independen). Pelaksananya disebut auditor. Auditor harus bekerja secara bebas tanpa dipengaruhi kepentingan pihak-pihak tertentu. Auditor akan memeriksa apakah pencatatan transaksi telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Dalam melakukan pemeriksaan, auditor berpatokan pada standar auditing yang berlaku.

5. Akuntansi Manajemen

Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang melakukan pengembangan dan penafsiran data-data akuntansi, baik data masa lalu maupun data tafsiran untuk membantu manajemen dalam mengoperasikan perusahaan. Akuntansi manajemen membantu memecahkan berbagai masalah khusus yang dihadapi manajemen, yang pemecahannya membutuhkan beberapa alternatif.

6. Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan adalah bidang akuntansi yang bertugas melakukan penyiapan data yang digunakan untuk perhitungan pajak. Sehingga pajak yang dibayar perusahaan sesuai dengan peraturan pemerintah. Agar dapat bekerja dengan baik, seorang akuntan pajak harus memahami berbagai peraturan, baik yang berupa undang-undang maupun ketentuan lain tentang perpajakan.

7. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam penyajian laporan keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. Akuntansi ini berkaitan dengan pembuatan anggaran negara beserta laporan realisasinya. Akuntansi ini bermanfaat untuk mengendalikan pengelolaan keuangan negara.

8. Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi adalah bidang akuntansi yang melakukan perencanaan prosedur pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan data keuangan. Sistem akuntansi harus menciptakan suatu sistem yang dapat mempermudah pengelolaan dan pengendalian perusahaan.

9. Akuntansi Pendidikan

Akuntansi pendidikan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan akuntansi dalam rangka menyebarkan ilmu akuntansi. Akuntansi bisa dikembangkan dengan cara memasukkan akuntansi ke kurikulum sekolah.

G. Profesi Akuntansi

Akuntan merupakan suatu profesi seperti halnya profesi dokter, guru, pengacara, dan polisi. Untuk memperoleh gelar akuntan, seseorang terlebih dahulu harus lulus program S1 dari fakultas ekonomi, kemudian lulus dalam ujian profesi di lembaga yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Departemen Pendidikan Nasional. Ada empat jenis profesi akuntan, sebagai berikut.

1. Akuntan Perusahaan (Intern)

Akuntan perusahaan (intern) adalah akuntan yang bekerja di suatu perusahaan dan bertanggung jawab terhadap masalah akuntansi di perusahaan tersebut. Ruang lingkup tugas dari akuntan perusahaan adalah:

- menyusun sistem akuntansi yang diperlukan perusahaan;
- menyusun laporan keuangan bagi pihak intern dan ekstern;
- menyusun anggaran perusahaan;
- melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan sistem akuntansi dan anggaran;
- menyelesaikan masalah-masalah perpajakan, seperti penghitungan pajak.

2. Akuntan Publik

Akuntan publik adalah akuntan yang memberikan jasa dalam bidang akuntansi bagi perusahaan atau organisasi bisnis dan nonbisnis. Akuntan publik bersifat independen (bebas) tidak seperti akuntan perusahaan yang terikat pada kepentingan perusahaan. Jasa akuntan publik yang utama adalah memeriksa laporan keuangan suatu organisasi apakah telah sesuai dengan SAK. Akuntan publik juga menawarkan jasa konsultasi di bidang manajemen, perpajakan, penyusunan laporan keuangan, dan sebagainya. Agar bisa menjadi akuntan publik, seseorang harus lulus ujian profesi dan memiliki nomor register akuntan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI.

3. Akuntan Pemerintah

Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah dan bertugas mengendalikan, dan memeriksa penggunaan keuangan atau kekayaan negara dan membuat laporan hasil pemeriksaan. Akuntan pemerintah umumnya bekerja di Departemen Keuangan (Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

4. Akuntan Pendidik

Akuntan pendidik adalah akuntan yang memiliki tugas utama mengajarkan dan mengembangkan akuntansi, misalnya dosen dan guru mata pelajaran akuntansi.

H. Etika Profesi Akuntan

Etika berasal dari bahasa Yunani *etos*, yang berarti kebiasaan atau watak. Etika bisa diartikan sebagai nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur hidup manusia. Dengan demikian etika profesi akuntan merupakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral serta hukum yang mengatur hubungan antara akuntan dengan para kliennya atau langganannya dan hubungan antara sesama rekan akuntan serta hubungan antara akuntan dengan masyarakat umumnya.

Etika profesi akuntan memiliki lima prinsip, sebagai berikut.

1. Kebebasan, Keutuhan, dan Keobyektifan
Seorang akuntan yang telah memiliki izin praktik dan nomor register harus mempertahankan keutuhan dan keobyektifan serta bebas atau independen dari pihak yang menerima jasanya.
2. Norma Teknis dan Norma Kecakapan
Seorang akuntan harus menjalankan tugas memeriksa suatu perusahaan dengan norma teknis profesi dan selalu berusaha meningkatkan kecakapannya.
3. Tanggung Jawab kepada Klien/Langganannya
Seorang akuntan dalam melakukan pemeriksaan harus memberikan pelayanan dengan kemampuan yang maksimal, bertanggung jawab penuh atas tugasnya, baik untuk pelanggan maupun untuk masyarakat umum.
4. Tanggung Jawab kepada Kolega
Seorang akuntan harus mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya serta mengembangkan kerja sama dan hubungan baik dengan koleganya.
5. Tanggung Jawab terhadap Martabat Profesi
Seorang akuntan harus berperilaku baik dan sesuai dengan profesi sehingga dapat mempertinggi kebesaran martabat profesi dan kemampuannya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Di Indonesia, kode etik (etika) profesi akuntan diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia, sebagai berikut.

Umum

Pasal 1: Tiap anggota dalam menjalankan pekerjaan sebagai akuntan berkewajiban untuk menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dapat merugikan martabat dan kehormatan akuntan.

Pelaksanaan Pekerjaan Akuntan

Pasal 2: Tiap anggota diwajibkan untuk melaksanakan pekerjaan sebagai akuntan sebaik-baiknya sehingga hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan keyakinan akan kebenaran pendapatnya.

Laporan Akuntan dan Pernyataan

Pasal 3: Tiap anggota yang menjalankan pekerjaan sebagai akuntan berkewajiban untuk memberikan atau melaporkan hasil pekerjaannya sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh yang berkepentingan.

Pasal 4: Laporan akuntan dalam general audit akan berupa pernyataan mengenai laporan tahunan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, dan keterangan lain.

- Pasal 5: Tanda tangan akuntan pada setiap hasil pekerjaannya sebagai akuntan harus disertai keterangan yang cukup mengenai maksud dibubuhkannya tanda tangan tersebut.
- Pasal 6: Tiap anggota yang tidak bekerja sebagai akuntan publik tidak dibenarkan memberikan pernyataan akuntan terkecuali kepada atasannya. Pernyataan tersebut harus ditandatangani sebagai akuntan intern.
- Pasal 7: Tiap anggota yang menerima tugas general audit tidak dibenarkan memberikan pernyataan akuntan bila ia tidak secara langsung melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Pasal 8: Tiap anggota dalam menjalankan general audit tidak diperbolehkan memberikan pernyataan akuntan terhadap laporan tahunan badan-badan, perseroan-perseroan, dan perorangan yang diperiksanya, bila ia mempunyai kepentingan finansial di dalamnya.

Honorarium

- Pasal 9: Honorarium akuntan tidak boleh bergantung pada hasil pekerjaannya.

Rahasia Jabatan

- Pasal 10: Keterangan pada pihak bukan memberikan tugas dapat diberikan apabila diwajibkan oleh undang-undang/hukum.

Kerja Sama

- Pasal 11: Dalam melaksanakan pekerjaan akuntan dilakukan antara beberapa anggota di bawah satu nama, maka sesuai dengan itu tanggung jawab mengenai peraturan pelaksanaan pekerjaan akuntan ditanggung bersama.
- Pasal 12: Dalam pelaksanaan pekerjaan akuntan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga ahli lain bukan akuntan, maka pekerjaan seluruhnya dianggap sebagai hasil pekerjaan akuntan.
- Pasal 13: Tiap anggota tidak boleh membiarkan namanya digunakan sebagai akuntan publik oleh orang lain bukan akuntan, kecuali dalam hubungan asosiasi secara formal dan kecuali bila bekerja di bawah pimpinan dan tanggung jawabnya.

Reklame

- Pasal 14: Tiap anggota yang menjalankan pekerjaannya sebagai akuntan publik dilarang untuk mengusahakan reklame atau membiarkan reklame diusahakan untuk kepentingannya.

- Pasal 15: Seorang anggota akuntan dilarang mempekerjakan atau menawarkan pekerjaan kepada pegawai rekan akuntan lainnya, tanpa terlebih dulu memberitahukan kepada rekan tersebut.
- Pasal 16: Tiap anggota tidak dibenarkan untuk membayar atau memberi ganti rugi, komisi atau sumbangan dalam bentuk apapun juga untuk memperoleh nasabah atau tugas pekerjaan akuntan, kecuali dalam hal pengoperan kantor akuntan atau pengoperan pekerjaan akuntan publik.
- Pasal 17:
- a) Akuntan publik tidak dibenarkan meminta pekerjaan atau menyuruh orang lain meminta pekerjaan, kecuali bila ada permintaan yang diajukan kepadanya.
 - b) Bila permintaan tersebut berasal dari pihak yang sudah atau pernah menugaskan akuntan lain untuk melakukan pekerjaan akuntan maka ia tidak boleh memenuhi permintaan tersebut tanpa terlebih dulu mendapat keterangan dari akuntan terdahulu.
 - c) Ayat 2 di atas tidaklah berlaku jika keadaan tidak memungkinkan.
 - d) Melamar pekerjaan sebagai pegawai tidak termasuk dalam arti pasal 1
- Pasal 18: Akuntan publik tidak dibenarkan menjalankan pekerjaan promotornya seperti dalam penjualan saham dan surat berharga lainnya.

Dewan Kehormatan

- Pasal 19: Untuk memelihara dan menjamin terlaksananya kode etik IAI dibentuk dewan kehormatan.
- Pasal 20:
- a) Personalia dewan kehormatan ditetapkan oleh kongres dan harus anggota IAI.
 - b) Susunan dewan kehormatan terdiri dari lima orang yang seorang ketuanya ditetapkan dan dipilih oleh mereka.
 - c) Selain itu kongres juga memilih lima orang anggota pengganti yang akan bertindak selaku pengganti jika ternyata kemudian ada seorang atau lebih di antara anggota dewan kehormatan di atas nyata tidak mungkin atau tidak layak berfungsi sebagai anggota dewan dimaksud.
 - d) Personalia dewan kehormatan IAI terdiri dari dua orang anggota akuntan publik, dua orang akuntan pemerintah dan satu orang akuntan dari unsur lain.

- Pasal 21: Dewan kehormatan IAI bertanggung jawab kepada kongres
- Pasal 22: Masa kerja dewan kehormatan IAI berlaku untuk masa di antara dua kongres.

Pengaduan

- Pasal 23: Dewan kehormatan hanya bertindak jika ada pengaduan tertulis mengenai pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh anggota.

Sanksi

- Pasal 24:
- a) Sanksi terhadap pelanggaran kode etik secara berurutan adalah sebagai berikut.
 1. Peringatan tertulis
 2. Teguran tertulis
 3. Schorsing untuk masa tertentu
 4. Pemecatan
 - b) Dalam hal sanksi berupa schorsing, maka tindakan ini disampaikan kepada seluruh IAI oleh dewan; jika tindakan berupa pemecatan maka hal ini hendaknya diumumkan kepada masyarakat.
 - c) Sebelum sanksi tersebut di atas dilaksanakan maka anggota yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat dewan dan yang bersangkutan dapat didampingi oleh sebanyak-banyaknya dua orang pembela.

Banding

- Pasal 25: Tiap anggota yang terkena sanksi tersebut berhak untuk naik banding pada panitia banding. Panitia banding terdiri dari:
- a) Dewan kehormatan
 - b) Pengurus pusat
 - c) Pengurus cabang yang bersangkutan

Rehabilitasi

- Pasal 26: Jika terdapat rehabilitasi maka harus pula diumumkan.

Tata Kerja Dewan Kehormatan

- Pasal 27: Ketentuan dan tata kerja lebih lanjut mengenai dewan kehormatan ditetapkan oleh dewan dengan syarat tidak boleh menyimpang dari ketentuan di atas.

RANGKUMAN

1. Akuntansi merupakan bahasa bisnis.
2. Pembukuan atau tata buku adalah suatu seni pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran. Sedangkan Akuntansi atau per-Akunan lebih luas cakupannya daripada pembukuan.
3. akuntansi adalah " suatu proses pengidentifikasian, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi, yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut".
4. Syarat-syarat kualitas informasi akuntansi, yaitu harus ada pertimbangan manfaat dan biaya, dapat dimengerti, relevan, dapat diuji, menyajikan yang seharusnya, netral, bernilai prediksi, dapat dibandingkan atau konsisten, tepat waktu, dan ada umpan balik.
5. Proses akuntansi meliputi kegiatan konstruktif dan analitikal. Proses akuntansi meliputi: tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, dan pelaporan.
6. Pemakai informasi akuntansi ada pihak intern, yang terdiri atas: manajer tingkat atas, manajer tingkat menengah, manajer tingkat bawah. Dan, ada juga pihak ekstern, yang terdiri atas: pemilik perusahaan, karyawan, kreditor, badan pemerintah, pelanggan, masyarakat.
7. Bidang-bidang akuntansi yaitu: akuntansi keuangan, auditing, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi anggaran, akuntansi perpajakan, sistem akuntansi, akuntansi pemerintahan, akuntansi pendidikan.
8. Profesi akuntan terdiri atas: akuntan perusahaan, akuntan publik, akuntan pemerintah, akuntan pendidik.
9. Etika meliputi sifat-sifat manusia yang ideal ataupun disiplin atas diri sendiri.
10. Lima prinsip etika profesi adalah: kebebasan, keutuhan, dan keobjektifan; norma kecakapan dan norma teknis; tanggung jawab kepada klien; tanggung jawab kepada kolega; serta tanggung jawab terhadap martabat profesi.

Kata Kunci

*akuntan
akuntan manajemen
akuntan pemerintahan
akuntansi
akuntansi anggaran
akuntansi biaya
akuntansi keuangan
akuntansi manajemen
akuntansi pemeriksaan
akuntansi pemerintahan
akuntansi perpajakan
andal
auditing*

*input/masukan
kecenderungan
manajer tingkat atas
manajer tingkat bawah
manajer tingkat menengah
output/keluaran
pihak ekstern
pihak intern
proses
sistem akuntansi
sistem informasi akuntansi
umpan balik*

Evaluasi Akhir Bab

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat !

1. Seorang Venesia yang berjasa dalam bidang Akuntansi dengan menerbitkan buku pertama tentang akuntansi pada akhir abad ke-15 adalah
 - A. Lucas de Arithmatica
 - B. Arithmatica
 - C. Summa de Geometrica
 - D. Lucas de Summa
 - E. Lucas Paciolo

2. Salah satu bab dari bukunya membahas tentang cara-cara pembukuan menurut catatan berpasangan adalah
 - A. Summa de Scriptorio
 - B. Tractatus de Arithmatica
 - C. Tractatus de Computist et Scriptorio
 - D. Summa de Tractatus
 - E. Tractatus de proportionalita

3. “ ...proses pengidentifikasian, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi, yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”. Pernyataan di atas merupakan definisi akuntansi menurut
 - A. American accounting association
 - B. American accounting
 - C. Accounting association
 - D. Kamus akuntansi
 - E. American association

4.
 - 1) Dapat dimengerti
 - 2) Relevan
 - 3) Dapat diproses
 - 4) Tidak netral
 - 5) Tepat waktu
 - 6) Dapat diuji

Pernyataan di atas yang termasuk syarat-syarat berkualitasnya informasi akuntansi adalah

 - A. 1, 2, 3 dan 4
 - B. 2, 3, 4 dan 5
 - C. 3, 4, 5 dan 6
 - D. 1, 2, 5 dan 6
 - E. 2, 3, 4 dan 6

5. Yang termasuk pihak ekstern pemakai akuntansi adalah
 - A. kepala bagian pembelanjaan
 - B. kepala bagian Pemasaran
 - C. kreditor
 - D. manajer
 - E. kepala bagian anggaran

6. Berikut ini yang merupakan pemakai informasi pihak intern adalah
 - A. pemegang saham
 - B. manajer
 - C. kreditor
 - D. karyawan
 - E. pemerintah

7. Akuntansi yang bertugas menekankan masalah penetapan dan pengendalian harga pokok produksi adalah bidang akuntansi. . . .
 - A. Keuangan
 - B. Manajemen
 - C. Anggaran
 - D. Auditing
 - E. Biaya

8. Akuntansi yang mencakup berbagai segi untuk suatu unit ekonomi secara keseluruhan dan berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan disebut
 - A. Akuntansi manajemen
 - B. Akuntansi pemerintahan
 - C. Akuntansi biaya
 - D. Akuntansi keuangan
 - E. Akuntansi pemeriksaan

9. Kreditor perusahaan memerlukan informasi akuntansi untuk
 - A. mengetahui naik turunnya pembayaran dividen
 - B. mengetahui kemampuan perusahaan mengembalikan pinjaman
 - C. mengetahui kemajuan yang dicapai oleh manajer
 - D. mengetahui kejujuran dari para pemilik
 - E. mengetahui jumlah pegawai perusahaan

10. Berikut ini yang termasuk kegunaan akuntansi dilihat dari segi intern adalah sebagai
 - A. dasar pengambilan keputusan untuk mengelola perusahaan
 - B. bahan informasi untuk memberikan barang pasokan
 - C. dasar untuk mendapat kenaikan gaji
 - D. dasar penetapan pajak
 - E. dasar pemberian pinjaman

11. Pemerintah memerlukan informasi akuntansi dari perusahaan untuk. . . .
 - A. penetapan pimpinan perusahaan
 - B. penyusunan data penjualan
 - C. penentuan biaya produksi

- D. penetapan pajak
 - E. penetapan jumlah pegawai perusahaan
13. Bidang akuntansi yang melakukan pemeriksaan catatan-catatan akuntansi secara independen dengan menggunakan prinsip-prinsip pada standar akuntansi keuangan adalah
- A. akuntansi sistem
 - B. akuntansi manajemen
 - C. akuntansi biaya
 - D. akuntansi perpajakan
 - E. auditing
14. Laporan keuangan yang diminta bank dari perusahaan memberi informasi terutama tentang
- A. sistem organisasi yang diterapkan pada perusahaan
 - B. kemampuan perusahaan dalam pengembalian kredit (pinjaman)
 - C. kemampuan manajemen dalam mengendalikan perusahaan
 - D. masa operasi perusahaan pada waktu yang akan datang
 - E. jumlah karyawan yang bekerja pada perusahaan
15. Akuntan yang bekerja memeriksa pembukuan dan jasa konsultasi manajemen serta bekerja secara independen disebut
- A. akuntan khusus
 - B. akuntan intern
 - C. akuntan pemerintah
 - D. akuntan umum
 - E. akuntan publik
16. Serikat pekerja memerlukan informasi akuntansi dari suatu perusahaan untuk
- A. menetapkan jumlah pajak perusahaan
 - B. mengetahui rentabilitas perusahaan agar bisa meminta perbaikan gaji dan upah
 - C. mendasari pemberian pinjaman bagi pengembangan perusahaan
 - D. membandingkannya dengan perusahaan sejenis untuk mengetahui data-data mengenai laba yang dibayar perusahaan kepada pemegang saham
 - E. menentukan biaya produksi
17. Pernyataan berikut ini termasuk etika profesi akuntan, *kecuali*
- A. bertanggung jawab pada koleganya
 - B. bertanggung jawab terhadap martabat profesi
 - C. bebas, obyektif, utuh
 - D. sesama anggota seprofesi saling berebut dalam pelayanan publik
 - E. memiliki norma teknis dan norma kecakapan
18. Informasi akuntansi sangat berguna bagi para pemakai laporan di luar perusahaan. Kegunaan informasi akuntansi tersebut antara lain adalah

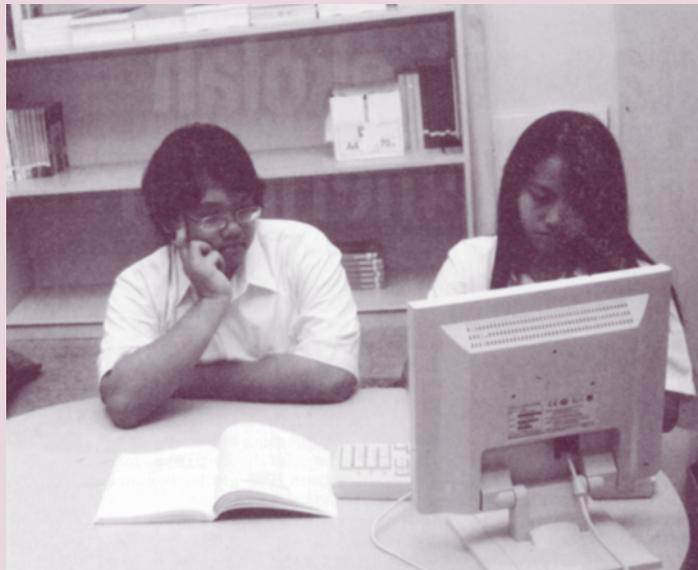
- A. sebagai bahan dasar pertimbangan dalam menambah jumlah karyawan
 - B. sebagai bahan untuk menyusun perencanaan agar tidak rugi
 - C. sebagai bahan dasar untuk mengetahui prospek perusahaan di masa datang
 - D. sebagai bahan dasar untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana awal perusahaan
 - E. sebagai bahan pengendalian perusahaan dalam membayar pajak dan dividen pemegang saham
19. Informasi akuntansi untuk menilai kemampuan membayar utang dan memberikan pinjaman adalah kegunaan informasi untuk
- A. pemberi pinjaman (kreditor)
 - B. investor dan calon investor
 - C. debitur
 - D. pelanggan
 - E. pemerintah
20. Seorang pengajar mata pelajaran akuntansi di sekolah berprofesi sebagai
- | | |
|-----------------------|---------------------|
| A. akuntan perusahaan | D. akuntan pendidik |
| B. akuntan pemerintah | E. akuntan publik |
| C. akuntan intern | |

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Sebutkanlah profesi-profesi akuntan, dan contoh penerapan etika profesinya!
2. Jelaskan pengertian akuntansi!
3. Jelaskan kriteria kualitas informasi akuntansi!
4. Mengapa penyelenggaraan akuntansi itu perlu dan wajib dilakukan?
5. Jelaskanlah bidang-bidang akuntansi!
6. Jelaskanlah pemakai informasi akuntansi secara intern dan ekstern!
7. Sebutkan bidang profesi akuntan!
8. Jelaskan pengertian akuntansi pemeriksaan/auditing!
9. Sejak kapan perkembangan akuntansi di dunia dimulai? Jelaskan!
10. Sebutkan tahap-tahap dalam proses akuntansi!

Bab VII

Dasar Hukum dan Pelaksanaan Akuntansi



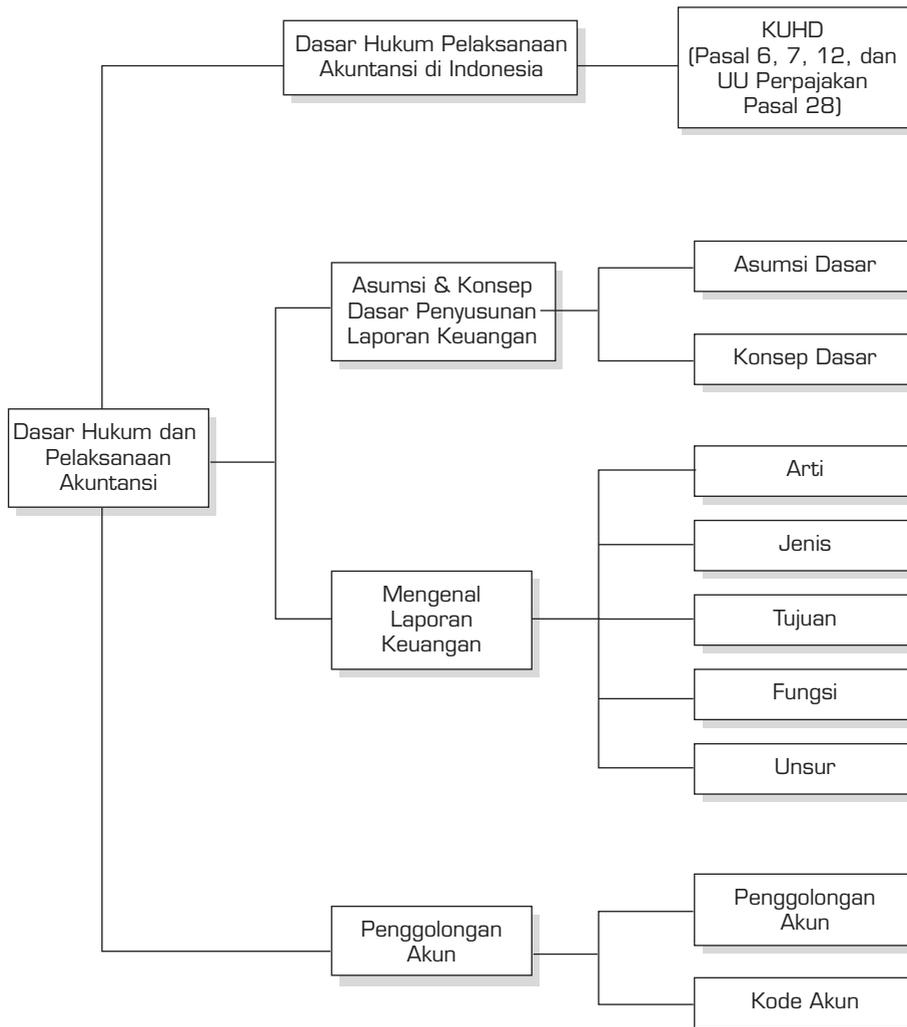
Sumber: *Tempo*, 31 Juli 2005

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti pembelajarana siswa dapat:

1. menjelaskan dasar hukum pelaksanaan akuntansi di Indonesia;
2. menjelaskan asumsi dan konsep dasar penyusunan laporan keuangan;
3. menjelaskan arti, jenis, tujuan, dan unsur-unsur laporan keuangan;
4. menjelaskan penggolongan akun.

PETA KONSEP



Pelaksanaan akuntansi atau pembukuan bagi perusahaan dilakukan berdasarkan hukum dari undang-undang dan peraturan. Berikut ini kita akan membahas mengenai dasar hukum pelaksanaan akuntansi atau pembukuan.

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Akuntansi di Indonesia

Dasar hukum pelaksanaan akuntansi (pembukuan) bagi perusahaan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 6 dan Undang-Undang Perpajakan No. 16 Tahun 2000 pasal 28.

1. Pasal 6 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)
 - Ayat 1. Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan diwajibkan membuat catatan-catatan dengan cara demikian sehingga sewaktu-waktu dari catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya.
 - Ayat 2. Dari tahun ke tahun, dalam waktu enam bulan yang pertama dari tiap-tiap tahunnya ia diwajibkan menandatangani sendiri sebuah neraca yang tersusun sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu.
 - Ayat 3. Ia diwajibkan menyimpan selama tiga puluh tahun untuk buku-buku dan dokumen sumber yang bersangkutan. Dan ia pun diharuskan menyimpan surat-surat kawat dan surat-surat lain selama sepuluh tahun.
2. Pasal 7 KUHD
Hakim bebas untuk kepentingan masing-masing akan memberikan kekuatan bukti sedemikian rupa kepada pemegang buku setiap pengusaha, sebagaimana menurut pendapatnya dalam tiap-tiap kejadian harus diberikannya.
3. Pasal 12 KUHD
Tiada seorang dapat dipaksa akan memperlihatkan buku-bukunya, melainkan untuk keperluan mereka yang langsung berkepentingan terhadap buku-buku itu sebagai waris, sebagai yang berkepentingan dalam suatu perusahaan, sebagai pesero, sebagai perangkat seorang pengurus atau wakil, dan akhirnya pun dalam hal kepailitan.

Peraturan pokok yang mengatur pembukuan tercantum dalam KUHD pasal 6 yang berbunyi: Mewajibkan pada setiap orang yang menjalankan perusahaan untuk mengadakan catatan-catatan mengenai keadaan kekayaan

perusahaan dan mengenai semua hal tentang perusahaannya sedemikian rupa sehingga setiap saat dapat diketahui hak dan kewajibannya.

Selain itu, kewajiban pelaksanaan pembukuan bagi perusahaan di Indonesia diatur dalam UU Perpajakan No. 16 Tahun 2000 pasal 28 yang di antaranya mengatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

1. Orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia harus mengadakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung penghasilan kena pajak atau harga perolehan dan penyerahan barang atas jasa guna penghitungan jumlah pajak terutang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan perpajakan.
2. Bagi wajib pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan dibebaskan dari kewajiban untuk mengadakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya harus menyelenggarakan pencatatan untuk dijadikan dasar pengenaan pajak terutang.
3. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memerhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
4. Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas catatan yang dikerjakan secara teratur tentang keadaan kas dan bank daftar utang piutang dan daftar persediaan barang dan pada setiap tahun pajak berakhir wajib pajak harus menutup pembukuannya dengan membuat neraca dan perhitungan rugi/laba berdasarkan prinsip pembukuan yang taat asas (konsisten) dengan tahun sebelumnya.
5. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
6. Pembukuan atau pencatatan dan dokumen yang menjadi dasarnya serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak harus disimpan selama 10 tahun.

Dari pembahasan pada bab 6 kita telah mengetahui, bahwa tahap terakhir dari proses akuntansi adalah tahap penyusunan laporan keuangan yang terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca dan laporan arus kas.

B. Asumsi dan Konsep Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun laporan keuangan digunakan asumsi dasar dan konsep dasar. Berikut ini penjelasannya.

1. Asumsi Dasar

Asumsi dasar yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan terdiri atas dasar:

a. Dasar Akrual (*Accrual Basic*)

Dengan menggunakan asumsi ini (dasar akrual) maka aktiva, kewajiban, ekuitas (modal), pendapatan, dan beban diakui pada saat kejadian, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan. Dan kemudian hal tersebut dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan di periode yang bersangkutan.

Berdasarkan asumsi ini, pendapatan dilaporkan pada saat terjadi, dan biaya dilaporkan pada saat biaya itu terjadi. Contoh, walaupun perusahaan belum menerima uang dari konsumen yang membeli secara kredit, perusahaan sudah mencatat sebagai pendapatan. Begitu juga jika perusahaan membeli perlengkapan usaha secara kredit, pengeluaran itu sudah dianggap biaya, meskipun perusahaan belum mengeluarkan uang.

Kebalikan dari dasar akrual, yaitu cash basic, yaitu pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dan, dicatat dalam akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

Dengan pendekatan ini, pendapatan dilaporkan pada saat uang telah diterima, dan biaya dilaporkan pada saat uang dikeluarkan. Misalnya, penjualan hanya dicatat ketika perusahaan menerima uang dari konsumen, dan biaya sewa dicatat hanya ketika perusahaan sudah membayar sewa kepada si penyewa.

b. Kelangsungan Usaha (*Going Concern Concept*)

Dengan asumsi kelangsungan usaha, laporan keuangan harus disusun atas dasar perusahaan akan melanjutkan usahanya di masa depan, karena itu perusahaan diasumsikan tidak bermaksud membubarkan atau mengurangi secara material skala usahanya. Apabila perusahaan ingin

membubarkan atau mengurangi skala usaha secara material, maka laporan keuangan harus disusun dengan asumsi dasar yang berbeda, dan asumsi dasar yang digunakan harus diungkapkan.

Pihak manajemen harus mempertimbangkan apakah asumsi kelangsungan usaha masih layak digunakan dalam menyiapkan laporan keuangan. Sebagai bahan pertimbangan, manajemen memerhatikan semua informasi masa depan yang relevan sedikitnya untuk jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca. Tingkat pertimbangan bergantung pada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perusahaan. Jika selama ini perusahaan menghasilkan laba dan mempunyai akses ke sumber pembiayaan maka asumsi kelangsungan usaha dapat digunakan tanpa melalui analisis rinci.

2. Konsep Dasar Akuntansi

Konsep dasar akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan terdiri atas:

a. Konsep Kesatuan Usaha (*Business Entity Concept*)

Konsep ini mengandung pengertian bahwa setiap perusahaan dianggap sebagai suatu kesatuan usaha yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemiliknya dan dari perusahaan-perusahaan lain. Sehingga, keuangan perusahaan juga harus terpisah dari keuangan pemilik dan dari keuangan perusahaan lain. Pada saat pemilik perusahaan ingin mengetahui kemajuan perusahaannya, laporan keuangan harus disusun dengan cara tidak mencampuradukkan transaksi kepentingan pribadinya dengan transaksi perusahaan.

b. Konsep Biaya (*Cost Principle Concept*)

Konsep ini mengandung pengertian bahwa biaya akan menjadi data dasar untuk menyusun laporan keuangan. Angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan menggambarkan biaya yang terjadi dan tercatat dalam sistem pembukuan perusahaan (atau mendasarkan pada biaya historis = biaya yang telah terjadi).

c. Konsep Harga Perolehan (*Cost of Good Concept*)

Harga perolehan adalah nilai atau biaya yang dikorbankan untuk memperoleh suatu barang hingga barang tersebut siap digunakan.

Misalnya:	
Harga beli mesin jahit	Rp800.000,00
Biaya transportasi	Rp75.000,00
Biaya pajak	<u>Rp20.000,00</u> +
Jadi, biaya perolehan	Rp895.000,00

d. Konsep Periode Akuntansi (*Accounting Period*)

Konsep ini mengandung pengertian bahwa sistem akuntansi memberikan informasi keuangan suatu perusahaan untuk dilaporkan kepada pemakai informasi secara berkala, misalnya per tiga bulan, enam bulan, atau satu tahun. Sehingga, pelaporan akuntansi dapat digunakan untuk menentukan strategi dan kebijakan perusahaan di masa yang akan datang.

e. Konsep Satuan Moneter (*Pengukuran Nilai Uang*)

Menurut konsep ini, transaksi-transaksi usaha harus diukur dengan satuan uang tertentu. Begitu pula dengan aktiva, kewajiban, dan ekuitas yang terdapat dalam perusahaan. Dengan demikian, nilai keseluruhan kekayaan, kewajiban, dan ekuitas perusahaan dapat ditentukan nilainya.

f. Konsep Prinsip Keandalan

Menurut konsep ini, catatan dan laporan akuntansi harus didasarkan atas data yang tersedia dan paling dapat diandalkan, sehingga catatan dan laporan tersebut akurat dan berguna. Dengan kata lain, data harus dapat dibuktikan kebenarannya dan dapat dikonfirmasi oleh setiap pengamat yang independen.

C. Laporan Keuangan

Berikut ini kita akan membahas seputar laporan keuangan yang meliputi arti, jenis, tujuan, dan unsur laporan keuangan.

1. Arti Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan yang dibuat oleh perusahaan pada akhir periode akuntansi yang memberikan berbagai informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Jenis Laporan Keuangan

Ada beberapa jenis laporan keuangan, yaitu:

- a. Laporan laba rugi, yaitu laporan keuangan yang menyajikan rincian pendapatan yang diperoleh dan beban yang terjadi selama satu periode akuntansi di suatu perusahaan.
- b. Laporan perubahan modal, yaitu laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal (ekuitas) suatu perusahaan yang terjadi selama satu periode akuntansi.
- c. Neraca, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang terdiri atas harta, kewajiban (utang), dan modal (ekuitas) selama satu periode akuntansi.
- d. Laporan arus kas, yaitu laporan keuangan yang melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar di suatu perusahaan selama satu periode akuntansi.

3. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan dibuat dengan beberapa tujuan, di antaranya adalah:

- a. Memberi berbagai informasi yang diperlukan sesuai jenis laporan keuangan yang dihasilkan, yaitu informasi mengenai pendapatan, biaya, perubahan modal, keadaan posisi keuangan (harta, kewajiban, modal), dan arus kas masuk serta arus kas keluar.
- b. Memudahkan pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Karena tanpa adanya laporan keuangan, pimpinan perusahaan, para manajer, kantor pajak, calon kreditur sebagai pemakai laporan keuangan akan kesulitan dan lama dalam mengambil keputusan.
- c. Memberikan informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi tentang aktivitas investasi, pembiayaan dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipakai perusahaan.
- d. Memudahkan pemimpin dan para manajer dalam mengelola dan mengontrol perusahaan dengan lebih baik.

4. Fungsi Laporan Keuangan

Laporan keuangan memiliki beberapa fungsi yang sesuai dengan jenis laporan keuangan yang dibuat, yaitu:

- a. Untuk mengetahui besarnya laba atau rugi yang diperoleh perusahaan dengan membandingkan jumlah pendapatan dan beban.

- b. Untuk mengetahui perubahan modal yang terjadi dalam perusahaan dengan menganalisa faktor-faktor atau transaksi-transaksi yang memengaruhinya.
- c. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dengan melihat jenis dan jumlah dari harta, kewajiban, dan modal.
- d. Untuk mengetahui arus kas masuk dan arus kas keluar di suatu perusahaan dan melihat pengaruhnya terhadap saldo kas akhir periode.

5. Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan terdiri atas beberapa jenis. Oleh karena itu, unsur-unsur laporan keuangan bergantung pada jenis laporan keuangan yang dibuat. Berikut penjelasannya.

- a. Pada laporan laba rugi terkandung unsur pendapatan dan beban. Pendapatan adalah penerimaan yang timbul dari aktivitas perusahaan, seperti penjualan, penerimaan jasa, bunga, dan lain-lain. Beban adalah sejumlah pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan, seperti beban listrik, beban gaji dan upah, dan lain-lain.
- b. Pada laporan perubahan modal terkandung unsur-unsur, sebagai berikut:
 - 1) Modal awal, yakni jumlah modal di awal periode akuntansi.
 - 2) Laba atau rugi, yakni selisih antara pendapatan dan beban. Bila pendapatan lebih besar dari beban akan diperoleh laba, bila pendapatan lebih kecil dari beban akan diperoleh rugi.
 - 3) Modal tambahan, yakni modal yang ditambahkan selama periode akuntansi berlangsung.
 - 4) Pengambilan pribadi (*prive*), yakni besarnya kas atau uang perusahaan yang diambil pemilik untuk kepentingan pribadinya.
 - 5) Modal akhir, yakni jumlah modal di akhir periode akuntansi setelah dipengaruhi oleh keempat unsur di atas.
- c. Pada neraca terkandung unsur-unsur, sebagai berikut:
 - 1) Aktiva atau harta, yakni kekayaan yang dimiliki perusahaan yang berupa aktiva berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai uang dan akan mendatangkan manfaat di masa yang akan datang.
 - 2) Kewajiban atau utang, yakni utang perusahaan di masa kini yang timbul akibat peristiwa di masa lalu yang telah memberikan manfaat kepada perusahaan dan penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya perusahaan.
 - 3) Modal atau ekuitas adalah kekayaan pemilik perusahaan yang ditanamkan ke dalam perusahaan yang besarnya merupakan selisih antara aktiva dan kewajiban.

- d. Pada laporan arus kas terkandung unsur-unsur, sebagai berikut:
- 1) Arus kas masuk, yakni transaksi-transaksi yang mengakibatkan masuknya kas ke dalam perusahaan.
 - 2) Arus kas keluar, yakni transaksi-transaksi yang mengakibatkan keluarnya kas dari perusahaan.

D. Penggolongan Akun

Akun sangat berkaitan dengan laporan keuangan. Karena laporan keuangan memuat berbagai akun yang ingin dilaporkan sesuai jenis laporan keuangan yang dibuat. Apakah akun itu? Akun adalah formulir atau tempat untuk mencatat transaksi keuangan yang sejenis. Mengapa harus ada akun? Karena transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan umumnya sangat banyak dan beragam. Untuk memudahkan pencatatan maka perlu pengelompokan transaksi yang sejenis sehingga perlu dibuat akun.

Dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan), akun dikelompokkan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Akun riil atau akun permanen, yaitu akun yang saldo-saldonya pada akhir periode akuntansi dipindahkan ke neraca. Contohnya: semua akun aktiva, kewajiban, dan ekuitas.
2. Akun laba rugi atau akun nominal, yaitu akun yang saldo-saldonya pada akhir periode akuntansi dipindahkan ke laporan rugi laba. Contoh semua akun pendapatan dan semua akun beban.

1. Penggolongan Akun

Menurut jenis dan susunan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan, maka akun dapat digolongkan menjadi :

a. Aktiva

Aktiva adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang berupa aktiva berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai uang dan akan mendatangkan manfaat pada masa yang akan datang. Aktiva dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Aktiva lancar (current asset) yaitu kekayaan yang berupa uang tunai dan kekayaan lain yang dapat dicairkan (diuangkan) dalam jangka waktu kurang dari satu tahun, di antaranya:

- a) kas dan bank
 - b) surat-surat berharga yang mudah dijual
 - c) deposito jangka pendek
 - d) wesel tagih
 - e) piutang usaha
 - f) piutang lain yang akan direalisasikan dalam jangka waktu satu tahun
 - g) persediaan
 - h) pembayaran pajak di muka
 - i) biaya dibayarkan di muka, yang akan menjadi beban dalam waktu satu tahun, contoh asuransi dibayar di muka.
- 2) Investasi Sementara, yaitu investasi dalam bentuk surat berharga (marketable) yang terdiri dari saham dan obligasi dan tujuan kepemilikan surat-surat berharga ini adalah untuk memanfaatkan dana kas yang berlebih. Dan suatu saat bila dibutuhkan surat-surat berharga tersebut dapat dijual kembali untuk memperoleh uang tunai.
- 3) Aktiva Tetap (*Fixed Assets*), terdiri dari :
- a) Aktiva tetap berwujud (*tangible fixed assets*) adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan cara dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan perusahaan dan mempunyai masa pakai/ manfaat lebih dari satu tahun. Contohnya yaitu: gedung, tanah, peralatan, mesin, dan kendaraan.
 - b) Aktiva tetap tidak berwujud (*Intangible Fixed Assets*) adalah aktiva yang tidak berwujud (tidak dapat dilihat) yang umumnya berupa hak-hak istimewa atau hak hukum yang berlaku dalam jangka panjang (lebih dari satu tahun). Aktiva tetap tidak berwujud terdiri atas:
 - (1) Hak paten, yaitu hak yang diberikan oleh pemerintah kepada perorangan atau badan usaha sebagai penemu untuk menggunakan penemuannya di bidang teknologi.
 - (2) Hak cipta, yaitu hak yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan atau badan usaha sebagai pencipta atau penerima hak cipta untuk menjual atau memperbanyak hasil karya seni/ tulisan.
 - (3) Hak merek, yaitu hak yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha untuk menggunakan nama, cap atau lambang bagi usahanya.
 - (4) *Goodwill*, yaitu nilai lebih yang dimiliki suatu perusahaan yang timbul karena adanya keistimewaan-keistimewaan tertentu, seperti usaha strategis dan nama terkenal.

- (5) Franchise, yaitu hak istimewa yang diperoleh perusahaan atau perseorangan dari pihak lain untuk mengkomersilkan produk, teknik atau formula tertentu.
- c) Aktiva lain-lain, adalah aktiva yang dimiliki perusahaan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam jenis-jenis aktiva di atas. Contohnya, mesin baru yang belum digunakan, piutang kepada pemegang saham, dan lain-lain.

b. Kewajiban (*Liabilities*)

Kewajiban (*liabilities*) merupakan utang perusahaan di masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang telah memberikan manfaat kepada perusahaan dan penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya perusahaan. Berdasarkan jangka waktu, kewajiban atau utang terbagi menjadi :

- 1) Kewajiban jangka pendek (utang lancar/*current liabilities*) adalah kewajiban atau utang yang harus dilunasi dalam waktu tidak lebih dari satu tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan. Misalnya, utang usaha (*account payable*), utang wesel, utang beban yang masih harus dibayar, sewa diterima di muka, dan utang dividen (*notes payable*).
- 2) Kewajiban jangka panjang (*long term debt*), adalah utang perusahaan yang akan dilunasi dalam waktu lebih dari satu tahun, misalnya utang obligasi (*bonds payable*), utang-utang hipotek (hipotek u/m), dan utang bank.
- 3) Kewajiban lain-lain meliputi semua kewajiban yang tidak dapat dikelompokkan sebagai kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang, seperti uang jaminan yang diterima dari pelanggan.

c. Ekuitas (*Modal*)

Ekuitas (*modal*), artinya kekayaan pemilik suatu perusahaan yang ditanamkan ke dalam perusahaan, yang besarnya merupakan selisih antara aktiva dengan kewajiban ($E = A - K$). Ekuitas terdiri dari ekuitas sendiri (biasa disebut modal), ekuitas saham, laba tidak dibagi, dan ekuitas sumbangan.

d. Pendapatan (*Revenue*)

Pendapatan (*revenue*) adalah penerimaan yang timbul dari aktivitas perusahaan seperti penjualan, penerimaan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Pendapatan berbeda dengan penghasilan karena penghasilan dapat berarti pendapatan (*revenue*) ataupun keuntungan (*gain*).

Pendapatan dapat digolongkan menjadi :

- 1) Pendapatan usaha yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan, contohnya pendapatan jasa salon dan penjualan barang dagangan.
- 2) Pendapatan di luar usaha yaitu pendapatan yang diperoleh dari kegiatan di luar usaha pokok, contohnya pendapatan bunga, pendapatan dari penjualan aktiva tetap, dan pendapatan dari komisi penjualan.

e. Beban (*Expense*)

Beban (*Expense*) artinya sejumlah pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Beban dapat digolongkan menjadi :

- 1) Beban usaha adalah pengorbanan yang dikeluarkan untuk membiayai usaha pokok perusahaan, contohnya beban gaji, beban listrik, beban sewa, beban telepon, beban air, dan beban perlengkapan.
- 2) Beban di luar usaha adalah pengorbanan yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan di luar usaha pokok perusahaan. Contoh: beban bunga dan beban sumbangan.

2. Kode Akun/Kode Perkiraan

Akun atau perkiraan yang digunakan suatu perusahaan umumnya berjumlah relatif banyak. Untuk memudahkan mencari akun yang diinginkan serta memudahkan pencatatan transaksi ke dalam akun yang tepat, perlu dibuat kode akun yang disusun dalam bagan akun (*chart of account*). Manfaat lain dari pembuatan kode akun adalah memudahkan penyusunan laporan keuangan.

Kode akun adalah suatu kode yang menggunakan angka, huruf, atau kombinasi keduanya untuk memberikan tanda pada akun-akun.

Kode akun ada bermacam-macam, di antaranya sebagai berikut.

a. Kode Numeral

Kode numeral adalah pembuatan kode akun dengan cara memberi nomor-nomor pada akun-akun secara berurutan. Contoh:

Kode Akun	Nama Akun	Keterangan
1	Kas	
2	Piutang Usaha	
3	Wesel Tagih	
4	Efek	

5	Persediaan barang dagangan	aktiva lancar
6	Perlengkapan toko	
7	Perlengkapan kantor	
8	Asuransi dibayar di muka	
9	Beban dibayar di muka	
10	Sewa dibayar di muka	
11	Peralatan	
12	Akumulasi penyusutan peralatan	
13	Kendaraan	
14	Akumulasi penyusutan kendaraan-kendaraan	aktiva tetap
15	Gedung	
16	Akumulasi penyusutan gedung	
17	Tanah	
18dan seterusnya.

b. Kode Angka Blok

Kode angka blok adalah pembuatan kode akun dengan mengelompokkan akun menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompok diberi satu blok angka yang berurutan sebagai kodenya. Contoh:

No.	Kode
01 - 20	Aktiva Lancar
21 - 30	Investasi Jangka panjang
31 - 50	Aktiva tetap berwujud
51 - 60	Aktiva tetap tidak berwujud
61 - 80	Aktiva lain-lain
81 - 100	Utang lancar
101 - 110	Utang jangka panjang
111 - 120	Ekuitas
121 - 160	Pendapatan penjualan
161 - 180	Harga pokok penjualan
181 - 290	Beban produksi
291 - 340	Beban administrasi dan umum
341 - 390	Beban pemasaran
391 - 440	Pendapatan di luar usaha
441 - 499	Beban di luar usaha

c. Kode Angka Desimal

Kode Angka Desimal, adalah pembuatan kode akun dengan menggunakan sepuluh angka, dari 0 sampai 9. Dan, tiap-tiap angka menunjukkan kelompok, golongan, dan jenis akun. Contoh:

No.	Keterangan
1	Aktiva
1.0	Aktiva lancar
1.0.1	Kas
1.0.2	Piutang usaha
1.0.	dan seterusnya
1.1	Investasi jangka panjang
1.1.1	investasi saham
1.1.2	investasi obligasi
1.2	Aktiva tetap
1.2.1	Peralatan toko
1.2.2	Akumulasi penyusutan peralatan toko dan seterusnya
1.3.	Persediaan bahan baku
	persediaan bahan baku dibagi menjadi (maksimum 10 golongan)
1.3.1	Bahan baku kayu
1.3.2	bahan baku eceng gondok
1.3.3	bahan baku pelepah pisang
1.3.4	bahan baku bambu dan seterusnya
	persediaan bahan baku kayu dibagi menjadi (maksimum 10 golongan)
1.3.1.1	Bahan baku kayu jati
1.3.1.2	Bahan baku kayu mahoni
1.3.1.3	Bahan baku albasia dan seterusnya.

d. Kode Mnemonik

Kode mnemonik adalah pembuatan kode akun dengan menggunakan huruf-huruf.

Berikut ini adalah contoh pembuatan kode akun dengan cara kode mnemonik.

Kelompok Akun	Nama Akun	Kode
Aktiva (A)	Aktiva lancar	AL
	kas	AL.K
	piutang usaha	AL.PU
	surat berharga	AL.SB
Kewajiban (K)	Kewajiban lancar	KL
	utang usaha	KL.UU
	utang wesel	KL.UW
Ekuitas (E)	modal sendiri	E.S
Pendapatan (P)	Penjualan	P.Pj
	Pendapatan jasa	P.J
	Pendapatan komisi	P.K
Beban (B)	beban usaha	B.U

e. Kode Kombinasi Huruf dan Angka

Kode kombinasi huruf dan angka adalah pembuatan kode akun dengan menggunakan kombinasi huruf dan angka. Pada umumnya huruf digunakan sebagai kode kelompok dan golongan akun, sedangkan angka menunjukkan nama akun.

Misalnya: Kelompok aktiva ditunjukkan dengan kode A.

 Golongan aktiva lancar ditunjukkan dengan kode AL.

 Golongan aktiva tetap ditunjukkan dengan kode AT.

 Angka 10 menunjukkan nama akun, misalnya kas.

Nama Akun	Kode	Keterangan
Kas	AL-10	Aktiva lancar
Piutang usaha	AL-11	Aktiva lancar
Perlengkapan	AL-12	Aktiva lancar
Peralatan toko	AT-13	Aktiva tetap
Utang usaha	UL-20	Utang lancar
Utang wesel	UL-21	Utang lancar
Utang hipotek	UJ-22	Utang jangka panjang
Utang obligasi	UJ-23	Utang jangka panjang
Ekuitas saham	MS-30	Modal sendiri
Beban gaji	BU-50	Beban usaha
Beban sewa	BU-51	Beban usaha
Jasa salon	PJ-40	Pendapatan jasa
Jasa komisi	PJ-41	Pendapatan jasa

RANGKUMAN

1. Dasar hukum pelaksanaan akuntansi bagi perusahaan di Indonesia tercantum dalam pasal 6 KUHD dan Undang-Undang Perpajakan pasal 28..
2. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan terdiri dari dasar *accrual* (*accrual basic*) dan kelangsungan usaha.
3. *Accrual basic*, artinya pengakuan pada saat kejadian atas aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan utang
4. Asumsi kelangsungan usaha, yaitu laporan keuangan yang disusun atas dasar asumsi perusahaan akan melanjutkan usahanya di masa depan dan tidak akan membubarkan atau melikuidasi perusahaan.
5. Konsep dasar dalam menyusun laporan keuangan terdiri atas: konsep kesatuan usaha, konsep biaya, konsep harga perolehan, konsep periode akuntansi, konsep satuan moneter, dan konsep prinsip keandalan.
6. Konsep kesatuan usaha berarti sebuah perusahaan dipandang sebagai kesatuan usaha yang terpisah dari pemilik dan dipandang sebagai unit akuntansi sendiri
7. Konsep biaya berarti bahwa biaya akan menjadi data dasar untuk menyusun laporan keuangan dan data biaya bersifat historis (telah terjadi).
8. Konsep harga perolehan terdiri atas beban pembelian ditambah beban perolehan.
9. Konsep perolehan akuntansi berarti informasi keuangan suatu perusahaan dilaporkan secara berkala/periodik.
10. Konsep satuan moneter berarti transaksi-transaksi usaha harus diukur dengan satuan uang tertentu.
11. Konsep prinsip keandalan berarti catatan dan laporan akuntansi harus berdasarkan data yang tersedia dan dapat diandalkan.
12. laporan keuangan yang disusun dalam akuntansi terdiri atas: laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas.
13. Penggolongan akun menurut jenis dan susunan informasi dalam laporan keuangan terdiri dari aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban.
14. Kode akun adalah suatu kode yang menggunakan angka, huruf, atau kombinasi keduanya untuk memberikan tanda pada akun-akun.
15. Macam-macam kode akun yaitu kode numeral, kode angka blok, kode angka desimal, kode mnemonik, kode kombinasi huruf dan angka.

Kata Kunci

*aktiva lancar
aktiva lancar
aktiva tetap berwujud
aktiva tetap tidak berwujud
beban
dasar akrual
franchise
goodwill
keuntungan
kewajiban jangka panjang
kewajiban
kode akuntansi
konsep biaya*

*konsep harga perolehan
konsep kelangsungan usaha
konsep kesatuan usaha
nilai harga jual
pendapatan
periode akuntansi
sistem desimal
surat berharga
utang dividen
utang lancar
utang obligasi
utang usaha*

Evaluasi Akhir Bab

A. Pilihlah satu jawaban yang benar!

1. Dasar hukum pelaksanaan akuntansi bagi perusahaan di Indonesia terdapat dalam
 - A. KUHD pasal 1
 - B. KUHD pasal 2
 - C. KUHD pasal 3
 - D. KUHD pasal 6
 - E. KUHD pasal 16
2. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) perusahaan harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, yakni pendapatan dan biaya dicatat pada
 - A. saat terjadi
 - B. akhir periode
 - C. saat dibayar
 - D. saat diterima
 - E. awal periode
3. Jika pengaruh transaksi dan peristiwa lain dalam penyusunan laporan keuangan dicatat pada saat kas atau yang setara kas diterima atau dibayar, maka asumsi dasar yang berlaku adalah

- A. cash basic
B. accrual basic
C. cash flow basic
- D. deferral basic
E. basic assumption
4. Bila perusahaan membeli perlengkapan secara kredit, pembelian sudah dicatat sebagai biaya walau perusahaan belum mengeluarkan uangnya. Ini penerapan dari asumsi
- A. *cash basic*
B. *accrual basic*
C. *defferal basic*
- D. *symbol basic*
E. *active basic*
5. Yang tidak termasuk sebagai jenis laporan keuangan adalah
- A. laporan laba/rugi
B. laporan perubahan modal
C. laporan perubahan harta
D. neraca
E. laporan arus kas
6. Laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan disebut
- A. neraca
B. laporan laba/rugi
C. laporan perubahan modal
- D. laporan arus kas
E. Laporan pegawai
7. Modal awal, laba atau rugi, modal tambahan, prive dan modal akhir adalah unsur-unsur dari
- A. neraca
B. laporan laba/rugi
C. laporan perubahan mosal
- D. laporan arus kas
E. laporan aktiva
8. Berikut ini yang merupakan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan secara umum berlaku di Indonesia adalah
- A. KKSK
B. KPSA
C. KSA
- D. SKA
E. SAK
9. Di bawah ini yang bukan merupakan informasi akuntansi adalah
- A. informasi laporan penjualan tiap cabang perusahaan
B. informasi laporan penjualan para pedagang
C. informasi jumlah siswa yang membolos
D. output pemrosesan faktur penjualan
E. informasi berbagai jenis barang yang dijual

10. Laporan keuangan yang disusun atas dasar melanjutkan usahanya di masa depan dan tidak ingin melikuidasi perusahaannya, yaitu
- A. cash basic
 - B. kesatuan usaha
 - C. kelangsungan usaha
 - D. konsisten
 - E. konservatif
11. Apabila perusahaan menerima uang tunai karena jasanya telah menyelesaikan pesanan dari pelanggan, maka kenaikan kas ini dapat dikatakan sebagai
- A. beban
 - B. kewajiban
 - C. pendapatan
 - D. ekuitas
 - E. aktiva
12. Harta, utang dan modal merupakan unsur-unsur dari
- A. laporan arus kas
 - B. laporan perubahan modal
 - C. laporan laba/rugi
 - D. neraca
 - E. laporan arus modal
13. Yang bukan tujuan pembuatan laporan keuangan adalah
- A. memudahkan pengambilan keputusan di perusahaan
 - B. memudahkan pengelolaan dan pengawasan perusahaan
 - C. memberi informasi yang sesuai dengan jenis laporan keuangan
 - D. memberi informasi yang berkaitan dan relevan dengan laporan keuangan
 - E. memudahkan pembubaran perusahaan
14. Menurut pasal 6 ayat 3 KUHD setiap perusahaan diwajibkan menyimpan buku-buku dan dokumen sumber selama
- A. 25 tahun
 - B. 20 tahun
 - C. 10 tahun
 - D. 15 tahun
 - E. 30 tahun
15. Kekayaan yang berupa uang tunai dan kekayaan lain yang dapat dicairkan (diuangkan) dalam waktu kurang dari satu tahun disebut
- A. aktiva lancar
 - B. aktiva tetap
 - C. investasi
 - D. kewajiban
 - E. modal

16. Kewajiban yang akan dilunasi dalam waktu lebih dari satu tahun disebut
- A. kewajiban lancar
 - B. kewajiban jangka pendek
 - C. kewajiban khusus
 - D. kewajiban jangka panjang
 - E. kewajiban lain-lain
17. Di bawah ini yang bukan termasuk unsur harga perolehan adalah. . . .
- A. harga pembelian
 - B. beban pengangkutan
 - C. bea masuk dan pajak
 - D. harga pokok penjualan
 - E. ongkos sopir
18. Bagi perusahaan pembuat rokok, pendapatan dari menyewakan sebuah ruangan tergolong sebagai
- A. pendapatan pokok
 - B. pendapatan usaha
 - C. pendapatan di luar usaha
 - D. beban usaha
 - E. pendapatan sehari-hari
19. Menurut KUHD, setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan diwajibkan membuat catatan/pembukuan hal ini untuk
- A. melihat aktiva dan kewajiban
 - B. mengetahui segala hak dan kewajiban perusahaan
 - C. mengetahui likuiditas perusahaan
 - D. mengetahui kelengkapan persyaratan pembukuan suatu perusahaan
 - E. mengetahui surat izin perusahaan
20. Pembuatan kode akun dengan menggunakan huruf-huruf disebut
- A. kode angka
 - B. kode desimal
 - C. kode mnemonik
 - D. kode angka blok
 - E. kode khusus

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!

1. Dasar hukum pelaksanaan akuntansi perusahaan di Indonesia tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang pasal 6 ayat 3, jelaskan isinya!

2. Sebutkan dua pendapatan perusahaan!
3. Apa yang dimaksud dengan kode akun?
4. Sebutkan akun-akun yang akan disajikan dalam laporan keuangan menurut jenis dan susunan informasinya? Uraikan secara singkat!
5. Apa yang dimaksud dengan asumsi kelangsungan usaha? Faktor apa yang harus dipertimbangkan oleh manajemen untuk kelangsungan usaha?
6. Berilah contoh prinsip keandalan dalam suatu perusahaan?
7. Sebutkan komponen-komponen yang menentukan besarnya harga perolehan!
8. Sebutkan komponen-komponen yang termasuk dalam akun aktiva? Uraikan!
9. Apa perbedaan pendapatan usaha dan pendapatan luar usaha? Berikan uraian singkat beserta contohnya.
10. Konsep dasar-dasar akuntansi terdiri dari beberapa prinsip (konsep), jelaskan secara singkat!

Bab VIII

Struktur Dasar Akuntansi



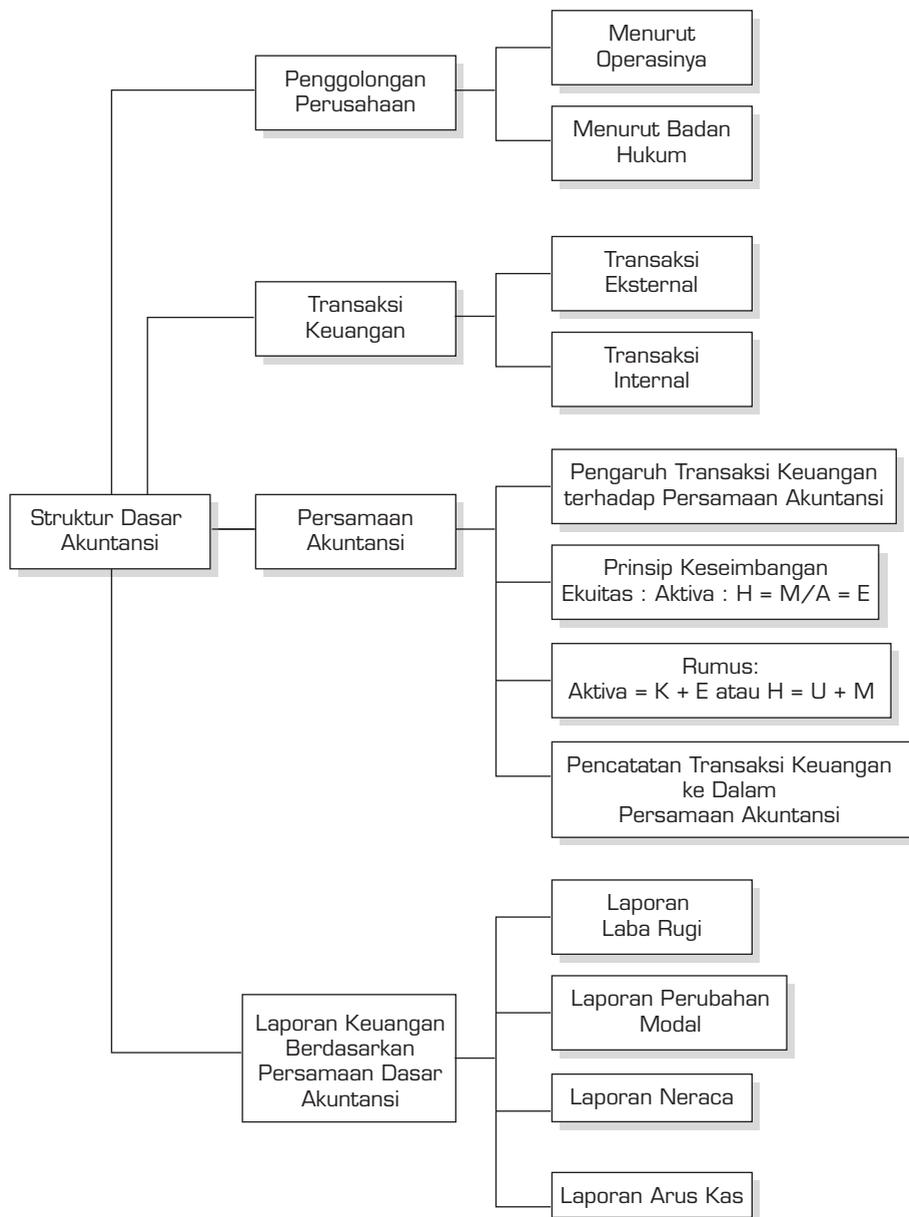
Sumber: Tempo, 31 Juli 2005

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti pembelajarana siswa dapat:

1. menjelaskan penggolongan perusahaan;
2. mendefinisikan transaksi keuangan;
3. menjelaskan persamaan akuntansi;
4. membuat dan memahami laporan keuangan.

PETA KONSEP



Akuntansi dalam sebuah perusahaan berfungsi sebagai alat pencatatan data aktivitas perusahaan, apa pun bentuk bentuk penggolongan perusahaan tersebut. Untuk memahami struktur dasar akuntansi, berikut ini kita akan membahas penggolongan perusahaan, transaksi keuangan persamaan akuntansi, dan laporan keuangan berdasarkan persamaan akuntansi.

A. Penggolongan Perusahaan

Dalam mempelajari akuntansi kita perlu mengetahui penggolongan perusahaan. Perusahaan dapat digolongkan menurut operasi dan bentuk badan hukumnya, sebagai berikut:

1. Menurut Operasi

Penggolongan perusahaan menurut operasinya terbagi menjadi perusahaan jasa, perdagangan, dan manufaktur.

- a. Perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang bergerak dalam memberi jasa kepada pihak lain, dengan kata lain produk yang dijualnya adalah jasa. Contohnya rumah bersalin, bank, dan lain-lain.
- b. Perusahaan perdagangan atau perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang membeli barang atau produk dan menjual barang/produk tersebut tanpa mengubah sifat barang atau produk dengan tujuan memperoleh keuntungan.
- c. Perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang membeli bahan baku kemudian memprosesnya sehingga tercipta produk baru, lalu menjualnya kepada pihak lain

2. Menurut Bentuk Badan Hukumnya

Dilihat dari segi bentuk badan hukumnya, perusahaan terbagi menjadi:

- a. Perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh satu orang yang biasanya bertindak sebagai manajer. Perusahaan perseorangan bukan badan hukum karena pemilik perusahaan itu sendiri bertanggung jawab secara pribadi terhadap kewajiban-kewajiban perusahaan.
- b. Persekutuan Firma, yaitu persekutuan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan di bawah satu nama secara bersama-sama (firma). Setiap anggotanya mempunyai kedudukan yang sama dan secara langsung bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban perusahaan.
- c. Persekutuan komanditer (CV= *Comanditire Vennooteschav*), yaitu perusahaan yang di dalamnya terdapat seorang atau lebih yang

- bertanggungjawab penuh kepada yang lain. Dan yang lainnya mempunyai tanggung jawab terbatas sebesar jumlah modal yang disetor.
- d. Perseroan terbatas, yaitu persekutuan yang dimiliki beberapa orang yang kepemilikannya dinyatakan dengan saham. Pemegang saham hanya bertanggungjawab sebesar saham yang dimilikinya.
 - e. Koperasi, yaitu badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pemberdayaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya.
-

B. Transaksi Keuangan

Akuntansi sangat berkaitan dengan transaksi keuangan. Transaksi keuangan adalah kegiatan ekonomi suatu unit organisasi, atau kejadian yang menyangkut unit organisasi yang diukur dengan jumlah uang atau rupiah dan dicatat dalam sistem akuntansi. Transaksi keuangan dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Transaksi eksternal adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar, contohnya pembelian bahan baku, penjualan barang, dan pembayaran utang.
 2. Transaksi internal adalah transaksi yang terjadi di dalam unit perusahaan. Contohnya penyusutan aktiva tetap, pemakaian bahan baku dan sebagainya.
-

C. Persamaan Akuntansi

Konsep persamaan akuntansi merupakan hal yang paling mendasar dari struktur akuntansi. Mengapa? Karena, semua pencatatan transaksi hingga berbentuk laporan keuangan berangkat dari konsep ini. Dengan konsep inilah kita dapat mengetahui pengaruh dari suatu transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan. Pada gilirannya, persamaan transaksi memungkinkan pihak pemakai informasi akuntansi menilai suatu perusahaan.

Menurut persamaan akuntansi, harta perusahaan pada dasarnya merupakan hak dari pihak lain yang dalam hal ini termasuk pemilik perusahaan. Jika perusahaan tidak memiliki kewajiban (utang), maka seluruh harta perusahaan akan menjadi hak pemilik, yang dapat dinyatakan sebagai berikut.

1. Keseimbangan antara Harta dan Modal

Harta merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan dan merupakan sumber pembelanjaan untuk melaksanakan kegiatan usaha. Harta harus sama atau seimbang dengan sumber pembelanjaan. Sumber pembelanjaan yang diperoleh dari pemilik disebut modal. Keseimbangan atau kesamaan harta dan modal biasanya dinyatakan dalam suatu persamaan akuntansi sebagai berikut:

$$\text{Harta} = \text{Modal}$$

2. Harta Sama dengan Utang Ditambah Modal

Sumber pembelanjaan dalam kegiatan usaha dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu:

- a. Dari pemilik yang disebut modal:
- b. Dari kreditor yang disebut utang, karena menimbulkan suatu kewajiban untuk mengembalikan. Sehingga, persamaan akuntansinya adalah:

$$\text{Harta} = \text{Utang} + \text{Modal}$$

Dalam operasi usaha dimungkinkan adanya pendapatan dan beban. Pendapatan merupakan kenaikan harta yang diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa, sedangkan beban merupakan penurunan harta karena merupakan pengorbanan untuk memperoleh pendapatan.

3. Pengaruh Transaksi Keuangan terhadap Persamaan Akuntansi

Setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan akan memengaruhi persamaan akuntansi. Pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi dapat mengakibatkan penambahan atau pengurangan dalam beberapa komponen. Perubahan-perubahan yang terjadi adalah:

- a. Perubahan harta diikuti dengan perubahan harta lain dalam jumlah yang sama. Contoh transaksinya yaitu:
 - 1) Pembelian barang habis pakai, peralatan, gedung, tanah, dan lain-lain secara tunai
 - 2) Penerimaan piutang dagang
 - 3) Penjualan aktiva tunai

- b. Perubahan harta diikuti perubahan utang atau sebaliknya dalam jumlah yang sama. Contoh transaksinya yaitu:
 - 1) Pembelian harta secara kredit
 - 2) Pembayaran utang
 - 3) Menerima pinjaman uang dari kreditor
- c. Perubahan harta diikuti dengan perubahan modal dalam jumlah yang sama. Contoh transaksinya yaitu:
 - 1) Investasi oleh pemilik
 - 2) Penerimaan pendapatan
 - 3) Pembayaran beban
 - 4) Penarikan modal oleh pemilik
- d. Perubahan harta diikuti dengan perubahan piutang dan modal dalam jumlah yang sama.

4. Pencatatan Transaksi pada Persamaan Akuntansi

Berikut ini kita kan mempelajari cara pencatatan transaksi keuangan pada persamaan akuntansi. Agar mudah, kita langsung mengaplikasikannya dalam contoh berikut:

Tuan Andi membuka usaha reparasi motor dengan nama bengkel motor MAKMUR, dan mempunyai catatan transaksi sebagai berikut ini:

Transaksi A: Modal

Pada tanggal 1 Agustus 2005, Tuan Indra menyetorkan uang pribadinya sebesar Rp-10.000.000,- sebagai modal untuk mendirikan usaha reparasi motor (bengkel motor) MAKMUR.

Akibat transaksi ini, harta perusahaan bertambah dalam bentuk kas sebesar Rp10.000.000,-. Pada sisi lain, modal bertambah dengan jumlah yang sama. Persamaan akuntansinya adalah:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Harta} & = & \text{Modal (dalam ribuan rupiah)} \\
 \hline
 \text{Kas} & & \text{Modal Tn Indra} \\
 (a) \ 1/8 & 10.000 & = \ 10.000
 \end{array}$$

Transaksi B: Peralatan

Dibeli peralatan pada tanggal 3 Agustus 2005. Untuk itu dikeluarkan uang sebesar Rp3.000.000,-.

Transaksi ini menambah harta berupa peralatan sebesar Rp3.000.000,-. Di sisi lain, pembayaran tunai menyebabkan harta berupa kas berkurang dalam jumlah yang sama. Persamaan akuntansinya adalah:

	Harta		=	Modal (dalam ribuan rupiah)	
	Kas	+ Peralatan		Modal Tn Indra	
Saldo lama	10.000			10.000	
(b) 3/8	(3.000)	3.000	=		
Saldo baru	7.000	+ 3.000		10.000	

Transaksi C: Perlengkapan

Pada tanggal 4 Agustus 2005 Tn Indra membeli perlengkapan sebesar Rp500.000,- dengan pembayaran dibayar kemudian (utang).

Transaksi ini menyebabkan harta berupa perlengkapan bertambah Rp500.000,00, dan utang bertambah sebesar Rp500.000,00. Persamaan akuntansinya adalah:

	Harta			=	Utang dan Modal (dalam ribuan Rp)		
	Kas	+ Peralatan	+ Perlengkapan		= Utang Usaha	+ Modal Tn Indra	
Saldo lama	7.000	+ 3.000		=	+ 10.000		
(b) 4/8			500	=	500		
Saldo baru	7.000	+ 3.000	+ 500		500	+ 10.000	

Transaksi D: Beban listrik

Dibayar beban listrik sebesar Rp600.000,- dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2005.

Transaksi ini mengurangi kas dan modal sebesar Rp600.000,-. Persamaan akuntansinya adalah:

	Harta			=	Utang dan Modal (dalam ribuan Rp)		
	Kas	+ Peralatan	+ Perlengkapan		= Utang Usaha	+ Modal Tn Indra	
Saldo lama	7.000	+ 3.000	+ 500	=	500	+ 10.000	
(b) 10/8	(600)			=	(600) Beban listrik		
Saldo baru	6.400	+ 3.000	+ 500		500	+ 9.400	

Transaksi E: Pendapatan usaha

Tanggal 15 Agustus 2005, diterima pendapatan usaha jasa perbaikan motor sebesar Rp2.500.000,- dibayar tunai sebesar Rp1.000.000,-, sisanya dibayar kemudian.

Transaksi ini memengaruhi kas, piutang usaha, dan modal pemilik. Kas bertambah Rp1.000.000,-, piutang usaha bertambah Rp1.500.000,-, dan modal bertambah Rp2.500.000,-. Persamaan akuntansinya adalah:

	Harta				=	Modal		
	<hr/>					(dalam ribuan rupiah)		
	Kas	+ Piutang usaha	+ Peralatan	+ Perlengkapan	=	Utang + Modal usaha Tn Andi		
Saldo lama	6.400	+	3.000	+	500	500 + 9.400		
(b) 15/8	1.000		1.500			= 2.500		
Saldo baru	<hr/>					<hr/>		
	7.400	+	1.500	+	3.000	+	500	500 + 11.900
								(pendapatan)

Transaksi F: Pembayaran utang

Pada tanggal 20 Agustus 2005, dibayar lunas utang atas pembelian perlengkapan tanggal 4 Agustus 2005.

Transaksi ini memengaruhi harta dan utang. Harta yang dipengaruhi adalah kas, berkurang Rp500.000,00. Pos utang usaha berkurang sebesar Rp500.000,00. Persamaan akuntansinya adalah:

	Harta				=	Utang dan Modal		
	<hr/>					(dalam ribuan rupiah)		
	Kas	+ Piutang usaha	+ Peralatan	+ Perlengkapan	=	Utang + Modal usaha Tn Indra		
Saldo lama	7.400	+	1.500	+	3.000	+	500	500 + 11.900
(b) 20/8	(500)							= (500)
Saldo baru	<hr/>					<hr/>		
	6.900	+	1.500	+	3.000	+	500	+ 11.900

Transaksi G: Pembayaran upah karyawan

Upah karyawan dua orang dibayar per dua mingguan pada tanggal 25 Agustus 2005 sebesar Rp400.000,- per orang.

Transaksi ini berpengaruh pada kas dan modal, jadi berkurang Rp800.000,-. Persamaan akuntansinya adalah:

	Harta				=	Utang dan Modal		
	<hr/>					(dalam ribuan rupiah)		
	Kas	+ Piutang usaha	+ Peralatan	+ Perlengkapan	=	Utang + Modal usaha Tn Indra		
Saldo lama	6.900	+	1.500	+	3.000	+	500	+ 11.900
(b) 2/10	(800)							= (800)
Saldo baru	<hr/>					<hr/>		
	6.100	+	1.500	+	3.000	+	500	+ 11.100

Transaksi H: Prive Tn. Indra

Pada tanggal 26 Agustus 2005, Tn Andi menggunakan uang perusahaan sebesar Rp200.000,- untuk keperluannya.

Transaksi berpengaruh pada kas dan modal, masing-masing menjadi berkurang Rp200.000,-. Persamaan akuntansinya adalah:

	Harta				=	Modal (ribuan rupiah)	
	Kas	+ Piutang usaha	+ Peralatan	+ Perlengkapan	=	Utang usaha	+ Modal Tn Indra
Saldo lama	6.100	+ 1.500	+ 3.000	+ 500			+ 11.100
(b) 26/8	(200)				=		(200)
						Prive Tn Indra	
Saldo baru	5.900	+ 1.500	+ 3.000	+ 500			10.900

Transaksi I: Penggunaan perlengkapan

Tanggal 27 Agustus 2005 setelah dihitung perlengkapan yang digunakan selama satu bulan sebesar Rp200.000,-.

Transaksi ini memengaruhi pos perlengkapan, jadi berkurang sebesar Rp200.000,-. Pos modal juga berkurang Rp200.000,-. Persamaan akuntansinya adalah:

	Harta				=	Modal (ribuan rupiah)	
	Kas	+ Piutang usaha	+ Peralatan	+ Perlengkapan	=	Utang usaha	+ Modal Tn Indra
Saldo lama	5.900	+ 1.500	+ 3.000	+ 500			+ 10.900
(b) 27/8				(200)	=		(200)
						Beban Perlengk.	
Saldo baru	5.900	+ 1.500	+ 3.000	+ 300	=		+ 10.700

D. Laporan Keuangan Berdasarkan Persamaan Akuntansi

Laporan keuangan merupakan laporan hasil akhir dari proses pencatatan dan pengikhtisaran dari seluruh transaksi keuangan selama satu periode akuntansi. Pada umumnya, laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal (ekuitas), neraca, dan laporan arus kas. Berikut ini kita akan belajar membuat dan memahami laporan keuangan berdasarkan persamaan akuntansi yang sudah kita pelajari sebelumnya.

1. Laporan Laba-Rugi

Laporan laba-rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan rincian pendapatan yang diperoleh dan biaya yang terjadi pada sebuah perusahaan selama jangka waktu tertentu. Apabila pendapatan lebih besar daripada biaya, hal ini menunjukkan adanya laba. Jika sebaliknya maka laporan tersebut akan menunjukkan rugi.

Supaya lebih memahami bagaimana bentuk dan cara menyusun laporan laba-rugi, pergunakan kembali contoh persamaan akuntansi pada Usaha Reparasi Motor MAKMUR. Dari contoh tersebut dapat kita ketahui laporan rugi-labanya seperti berikut.

a. Bentuk *Single Step* (Langsung)

Pada bentuk ini semua pendapatan ada di bagian atas dan semua beban dikelompokkan di bagian bawah.

USAHA REPARASI MAKMUR		
Laporan Laba-Rugi		
Untuk periode yang berakhir 31 Agustus 2005		
Pendapatan		
Pendapatan servis motor		Rp2.500.000,-
Beban		
Beban upah	Rp800.000,-	
Beban listrik	Rp600.000,-	
Beban perlengkapan	Rp200.000,-	
Total beban		<u>Rp1.600.000,-</u>
Laba bersih		<u><u>Rp900.000,-</u></u>

b. Bentuk *Multiple Step* (Bertahap)

Pada bentuk ini, pendapatan dan beban dibedakan menjadi pendapatan dan beban operasional dan nonoperasional. Pendapatan dan beban operasional disajikan pertama, dan yang nonoperasional disajikan di bawahnya.

USAHA REPARASI MAKMUR
Laporan Laba-Rugi
 Untuk periode yang berakhir 31 Agustus 2005

Pendapatan operasional/usaha:		
Pendapatan servis motor		Rp2.500.000,-
Beban operasional/usaha:		
Beban upah	Rp800.000,-	
Beban listrik	Rp600.000,-	
Beban perlengkapan	Rp200.000,-	
Total beban		Rp1.600.000,-
Pendapatan dan beban nonoperasional:		_____
Pendapatan lain-lain		-
Beban lain-lain		-
Laba bersih		<u><u>Rp900.000,-</u></u>

2. Laporan Perubahan Ekuitas (Modal)

Laporan perubahan modal adalah sebuah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas (modal) suatu perusahaan yang terjadi pada suatu periode tertentu.

USAHA REPARASI MAKMUR
Laporan Perubahan Ekuitas (Modal)
 Untuk periode yang berakhir 31 Agustus 2005

Modal awal		Rp10.000.000,-
Laba Bersih	Rp900.000,-	
Prive Tn Indra	Rp200.000,-(-)	
Tambahan modal		<u>Rp700.000,-</u>
Modal akhir per 31 Agustus 2005-12-31		<u>Rp10.700.00,-</u>

3. Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan (harta, utang, ekuitas) sebuah perusahaan pada tanggal tertentu.

Neraca dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Bentuk skontro, yaitu bentuk penyusunan penempatan kelompok aktiva di sebelah kiri, sedangkan utang dan ekuitas di sisi kanan. Bentuk skontro disebut juga bentuk T.
- b. Bentuk stafel, yaitu bentuk penyusunan penempatan kelompok aktiva di sebelah atas, sedangkan utang dan ekuitas di bawahnya. Bentuk stafel disebut juga bentuk laporan.

a. Bagan Neraca Bentuk Skontro

USAHA REPARASI MAKMUR			
Neraca			
Untuk periode yang berakhir 31 Agustus 2005			
Aktiva			
Aktiva lancar			
Kas	Rp5.900.000,-	Utang Usaha	-
Piutang Usaha	Rp1.500.000,-	Modal Tn Indra	Rp10.700.000,-
Perlengkapan	<u>Rp300.000,-</u>		
Total aktiva lancar	Rp7.700.000,-		
Aktiva Tetap			
Peralatan	<u>Rp3.000.000,-</u>	Total pasiva	<u>Rp10.700.000,-</u>
Total aktiva	<u>Rp10.700.000,-</u>		

b. Bagan Neraca Bentuk Stafel

USAHA REPARASI MAKMUR	
Neraca	
Untuk periode yang berakhir 31 Agustus 2005	
Harta	
Harta Lancar	
Kas	Rp3.900.000,-
Piutang Usaha	Rp1.500.000,-
Perlengkapan	Rp300.000,-
Harta Tetap	
Peralatan	<u>Rp3.000.000,-</u>
Total Harta	<u>Rp10.700.000,-</u>
Utang dan Modal	
Utang Usaha	Rp -
Modal Tn Indra	<u>Rp10.700.000,-</u>
Total Utang dan Modal	<u>Rp10.700.000,-</u>

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan perusahaan yang melaporkan arus kas masuk dan keluar dari suatu perusahaan selama satu periode akuntansi. Laporan arus kas merupakan salah satu laporan keuangan yang berguna bagi manajer untuk menilai operasi masa lalu untuk merencanakan aktivitas investasi serta pembiayaan di masa depan.

Adakalanya perusahaan besar yang memiliki laba bersih yang sangat besar ternyata tidak memiliki kas yang cukup untuk membayar gaji pegawai dan membeli perlengkapan. Itu berarti laba bersih yang diperoleh suatu perusahaan belum menjamin bahwa perusahaan tersebut memiliki uang kas yang cukup untuk membiayai perusahaan. Oleh karena itu, perlu disusun laporan arus kas dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk memperkirakan arus kas pada masa yang akan datang berdasarkan laporan arus kas yang dibuat sekarang.
- b. Untuk menentukan apakah perusahaan mampu membayar kewajiban atau tidak dengan melihat keadaan kas yang ada.
- c. Untuk dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan dalam memperbaiki kinerja perusahaan.
- d. Untuk menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Pada umumnya perusahaan yang memperoleh laba akan memiliki kas dalam jumlah yang cukup. Sebaliknya, perusahaan yang mengalami rugi akan mengalami kekurangan kas sehingga kesulitan membayar utang dan membiayai kegiatan lainnya.

Aktivitas-aktivitas arus kas dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
- b. Aktivitas investasi adalah aktivitas untuk memperoleh dan melepas aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.
- c. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi, ekuitas atau modal dan pinjaman perusahaan.

Laporan arus kas dapat disusun dengan dua metode, yaitu:

- a. Metode langsung
Penyusunan laporan arus kas dengan metode langsung dilakukan dengan cara mengidentifikasi penambahan dan pengurangan kas yang terjadi dalam aktivitas perusahaan. Penggunaan metode langsung lebih

mudah dipahami dan mampu memberi informasi dan keterangan lebih banyak untuk dipakai dalam pengambilan kebijakan perusahaan.

b. Metode tidak langsung

Penyusunan laporan arus kas dengan metode tidak langsung dilakukan dengan cara menunjukkan perhitungan yang dimulai antara laba bersih arus kas dari kegiatan operasi, kemudian dengan arus kas dari kegiatan investasi dan arus kas dari kegiatan pendanaan.

Dalam menyusun laporan arus kas, saldo akhir pada laporan arus kas harus sama dengan jumlah kas di neraca. Berikut ini akan disajikan laporan arus kas dari "Usaha Reparasi Ananda" dengan menggunakan metode langsung. Setelah itu disajikan pula laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung dari suatu CV.

Contoh laporan arus kas dengan metode langsung.

USAHA REPARASI MAKMUR Laporan Arus Kas Untuk periode yang berakhir 31 Agustus 2005		
Arus Kas dari aktivitas operasi		
Penerimaan dari pendapatan usaha secara tunai(Arus kas masuk)		Rp1.000.000,-
Arus kas keluar:		
Pembayaran beban listrik	Rp600.000,-	
Pembayaran utang	Rp 500.000,-	
Pembayaran upah	Rp800.000,-	
		<u>Rp1.900.000,-</u> -
Arus kas keluar aktivitas operasi		(Rp900.000,-)
Arus kas dari aktivitas investasi		
Pembelian peralatan		(Rp3.000.000,-)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penarikan prive Tn Indra		<u>(Rp200.000,-)</u> +
Arus kas keluar bersih		(Rp4.100.000,-)
Saldo kas 1 Agustus (awal)		<u>Rp10.000.000,-</u> +
Saldo kas per 31 Agustus (akhir)		Rp5.900.000,-

Contoh laporan arus kas dengan metode tidak langsung

Laporan Arus Kas CV untuk periode		
Arus kas dari aktivitas operasi		
Laba bersih		XX
Ditambah - Penurunan aktiva lancar (piutang, persediaan, beban dibayar di muka)	XX	
- Kerugian dari menjual aktiva	XX	
- Kenaikan kewajiban lancar (utang usaha, wesel dibayar, kewajiban akrual)	XX	
- Penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aktiva tidak berwujud	<u>XX +</u>	XX
Dikurangi - Kenaikan aktiva lancar (piutang, persediaan, beban dibayar di muka)	XX	
- Keuntungan dari menjual aktiva	XX	
- Penurunan kewajiban lancar (utang usaha, wesel dibayar, kewajiban akrual)	<u>XX +</u>	<u>(XX) +</u>
Arus kas bersih dari aktivitas operasi		XX
Arus kas dari kegiatan investasi		
Ditambah : kas dari penjualan aktiva tetap	XX	
Dikurangi : kas untuk membeli investasi dan aktiva tetap	<u>(XX)</u>	
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi		XX
Arus kas dari kegiatan pendanaan		
Ditambah : kas dari penjualan saham dan obligasi	XX	
Dikurangi : kas untuk melunasi obligasi	<u>(XX)</u>	
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		<u>XX</u>
		XX

5. Hubungan Antar-Laporan Keuangan

Antara empat jenis laporan keuangan, yakni laporan laba/rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas ternyata memiliki hubungan yang erat. Hubungan tersebut digambarkan, sebagai berikut.

Usaha Reparasi Makmur Laporan Laba/Rugi Per 31 Agustus 2005		
Pendapatan		
Pendapatan servis motor		Rp2.500.000,-
Beban		
Beban upah	Rp800.000,-	
Beban listrik	Rp600.000,-	
Beban perlengkapan	<u>Rp200.000,- +</u>	
Total beban		<u>Rp1.600.000,- -</u>
Laba bersih		Rp900.000,-

Usaha Reparasi Makmur Laporan Perubahan Modal Per 31 Agustus 2005		
Modal awal		Rp10.000.000,-
Laba bersih	Rp900.000,-	
Prive Tuan Indra	<u>Rp200.000,- -</u>	
Tambahan modal		<u>Rp700.000,- +</u>
Modal akhir		Rp10.700.000,-

Usaha Reparasi Makmur Neraca Per 31 Agustus 2005			
Aktiva			
Aktiva lancar			
Kas	Rp5.900.000,-		
Piutang usaha	Rp1.500.000,-		
Perlengkapan	<u>Rp300.000,-</u>		
Total aktiva lancar	Rp7.700.000,-		
Aktiva tetap			
Peralatan	<u>Rp3.000.000,-</u>		
Total aktiva	Rp10.700.000,-		
		Utang usaha	--
		Modal Tuan Indra	Rp10.700.000,-
		Total pasiva	Rp10.700.000,-

Usaha Reparasi Makmur Laporan Arus Kas Per 31 Agustus 2005		
Arus kas dari aktivitas operasi		
Penerimaan		Rp1.000.000,-
Arus kas keluar:		
Pembayaran beban listrik	Rp600.000,-	
Pembayaran utang	Rp500.000,-	
Pembayaran upah	<u>Rp800.000,- +</u>	
		<u>Rp1.900.000,- -</u>
Arus kas keluar dari aktivitas operasi		(Rp900.000,-)
Arus kas dari aktivitas investasi		
Pembelian peralatan		(Rp3.000.000,-)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penarikan prive Tuan Indra		<u>(Rp200.000,-) +</u>
Arus kas keluar bersih		(Rp4.100.000,-)
Saldo kas awal (1 Agustus 2005)		<u>Rp10.000.000,- +</u>
Saldo kas akhir (31 Agustus 2005)		Rp5.900.000,-

RANGKUMAN

1. Penggolongan perusahaan menurut operasinya terdiri dari: perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur.
2. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam memberi jasa kepada pihak lain. Produk yang dijualnya adalah jasa, contohnya rumah bersalin, bank, dan lainnya.
3. Perusahaan perdagangan atau perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang atau produk dan menjual barang/produk tersebut tanpa mengubah sifat barang atau produk.
4. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang membeli bahan baku kemudian memprosesnya sehingga tercipta produk baru, lalu menjualnya kepada pihak lain.
5. Penggolongan perusahaan menurut badan hukumnya terdiri dari: perusahaan perseorangan, persekutuan firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, dan koperasi.
6. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang yang biasanya bertindak sebagai manajer. Perusahaan perseorangan bukan badan hukum karena pemilik perusahaan itu sendiri bertanggung jawab secara pribadi terhadap kewajiban-kewajiban perusahaan.
7. Persekutuan firma adalah persekutuan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan di bawah satu nama secara bersama-sama. Setiap anggotanya mempunyai kedudukan yang sama dan secara langsung bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban perusahaan.
8. Persekutuan komanditer (CV= Comanditire Vennooteschav) adalah perusahaan yang di dalamnya terdapat seorang atau lebih yang bertanggungjawab penuh; dan yang lainnya mempunyai tanggung jawab terbatas sebesar jumlah modal yang disetor.
9. Perseroan terbatas adalah persekutuan yang dimiliki beberapa orang yang kepemilikannya dinyatakan dengan saham. Pemegang saham hanya bertanggungjawab sebesar saham yang dimilikinya.
10. Koperasi, yaitu badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pemberdayaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya.
11. Transaksi keuangan dikelompokkan menjadi transaksi internal dan transaksi eksternal.
12. Transaksi eksternal adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar.
13. Transaksi internal adalah transaksi yang terjadi di dalam unit perusahaan. Contohnya penyusutan aktiva tetap, pemakaian bahan baku dan sebagainya.
14. Persamaan akuntansi yaitu suatu keadaan perhitungan ruas kiri atau aktiva yang sama dengan ruas kanan atau pasiva.
15. Rumus persamaan akuntansi adalah aktiva = kewajiban + ekuitas.
16. Laporan keuangan adalah laporan hasil akhir dari suatu proses pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran transaksi keuangan selama satu periode akuntansi.
17. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas.
18. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi untuk kebutuhan pemakai.
19. Laporan laba-rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan rincian pendapatan yang diperoleh dan biaya yang terjadi pada sebuah perusahaan selama jangka waktu tertentu.
20. Laporan perubahan modal adalah sebuah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas suatu perusahaan yang terjadi pada suatu periode tertentu.
21. Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan (harta, utang, ekuitas) sebuah perusahaan pada tanggal tertentu.
22. Bentuk neraca adalah skontro dan stafel.
23. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan perusahaan yang melaporkan arus kas masuk dan keluar dari suatu perusahaan selama satu periode.
24. Aktivitas perusahaan dikelompokkan menjadi aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan.
25. Metode penyusunan laporan arus kas ada dua, yaitu metode langsung dan tidak langsung.

Kata Kunci

aktiva/harta
akun modal
akuntansi keuangan
 arus kas dari aktivitas investasi
 arus kas dari aktivitas operasi
 arus kas dari aktivitas pendanaan
 beban
 bentuk laporan
 buku besar
 kode akun/kode
 kode angka
 laporan arus kas
 laporan keuangan
 laporan laba rugi

laporan neraca
 laporan perubahan wujud
 laporan posisi keuangan
 modal saham
 neraca
 nomor akun
 periode akuntansi
 persamaan akuntansi
 persediaan
 piutang usaha
 siklus akuntansi
 utang jangka panjang
 utang usaha

Evaluasi Akhir Bab

A. Pilihlah jawaban yang paling benar!

- Berikut ini yang bukan termasuk macam-macam perusahaan menurut operasinya adalah
 - perusahaan manufaktur
 - perusahaan jasa
 - perusahaan dagang
 - perusahaan niaga
 - perusahaan perseorangan
- Perusahaan asuransi merupakan usaha
 - ekstraktif
 - pabrik
 - dagang
 - jasa
 - manufaktur
- Perusahaan membeli mesin dengan pembayaran sebagian tunai dan sisanya dibayar bulan depan. Pengaruhnya terhadap perubahan harta dan utang adalah

- A. berkurangnya utang diimbangi berkurangnya modal
 - B. bertambahnya harta diimbangi dengan berkurangnya harta yang lain
 - C. berkurangnya harta kas diimbangi bertambahnya harta yang lain dan utang bertambah
 - D. harta kas bertambah diimbangi berkurangnya harta yang lain dan utang berkurang.
 - E. bertambahnya harta (mesin) diimbangi berkurangnya harta lain (kas) dan bertambah utang.
4. Berikut ini adalah hal yang tidak perlu diperhatikan pada waktu menyusun neraca yaitu
- A. setelah harta lancar dicatat harta tetap
 - B. harus ditulis tanggal neraca
 - C. harta tetap dicatat menurut urutan kekekalannya
 - D. harta lancar disusun menurut kelancarannya
 - E. harus berbentuk skontro
5. Perusahaan membayar upah karyawan, perubahan yang terjadi pada harta dan modal adalah
- A. harta kas bertambah modal pemilik berkurang
 - B. harta kas berkurang modal pemilik bertambah
 - C. aktiva berkurang diimbangi modal bertambah
 - D. aktiva berkurang diimbangi modal berkurang
 - E. aktiva bertambah diimbangi modal berkurang
6. Perusahaan membeli peralatan kantor dengan harga Rp3.000.000,-, dibayar tunai Rp1.250.000,- sisanya dibayar bulan depan. Perubahan dalam persamaan akuntansinya adalah ...
- A. peralatan kantor (-) Rp3.000.000,-; utang (-) Rp1.250.000,-; kas (-) Rp1.750.000,-
 - B. peralatan kantor (+) Rp3.000.000,-; kas (-) Rp3.000.000,-
 - C. peralatan kantor (+) Rp3.000.000,-; kas (-) Rp1.250.000,-; utang (-) Rp1.750.000,-
 - D. peralatan kantor (-) Rp3.000.000,-; kas (-) Rp1.250.000,-; utang (-) Rp1.750.000,-
 - E. peralatan kantor (+) Rp3.000.000,-; kas (-) Rp1.250.000,-; utang (+) Rp1.750.000,-
7. Persekutuan yang didirikan di bawah satu nama secara bersama-sama disebut

- A. firma
 B. persekutuan komanditer
 C. PT (persekutuan terbatas)
- D. perusahaan perseorangan
 E. koperasi
8. Rumus persamaan dasar akuntansi adalah
- A. aktiva = utang
 B. aktiva = kewajiban + ekuitas
 C. ekuitas = aktiva + kewajiban
 D. kewajiban = aktiva + ekuitas
 E. aktiva = ekuitas – kewajiban
9. Jenis laporan keuangan yang isinya menjelaskan aliran kas pada neraca adalah
- A. neraca
 B. laporan arus kas
 C. laporan daftar sisa piutang
 D. laporan perubahan modal
 E. laporan laba-rugi
10. Di bawah adalah data pembukuan perusahaan “X” per 30 September 2003.
- | | |
|-----------|--------|
| Kas | 4.000 |
| Modal | 12.600 |
| Piutang | 5.000 |
| Peralatan | 10.000 |
- Dari data di atas dengan menggunakan persamaan dasar akuntansi, utang perusahaan “X” adalah
- A. Rp5.000,-
 B. Rp6.400,-
 C. Rp8.800,-
- D. Rp10.000,-
 E. Rp12.600,-
11. Berikut ini adalah data dari saldo-saldo persamaan akuntansi:
- | | |
|--------------------|--------|
| Utang gaji | 25.000 |
| Utang bunga | 32.500 |
| Pinjaman dari Bank | 62.500 |
| Modal Priyan | 60.000 |
- Harta perusahaan adalah berjumlah
- A. Rp180.000,-
 B. Rp155.000,-
 C. Rp147.500,-
- D. Rp197.500,-
 E. Rp190.000,-

12. Berikut ini yang bukan merupakan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah
- | | |
|---------------------|-----------------------|
| A. <i>reliable</i> | D. relevan |
| B. kredibilitas | E. dapat dibandingkan |
| C. dapat dimengerti | |
13. Diketahui aktiva lancar Rp1.000.000,-; aktiva tak berwujud Rp1.000.000,-; aktiva tetap Rp5.000.000,-; utang lancar dan jangka panjang Rp4.000.000,-; maka besar modal adalah
- | | |
|------------------|------------------|
| A. Rp3.000.000,- | D. Rp6.000.000,- |
| B. Rp4.000.000,- | E. Rp7.000.000,- |
| C. Rp5.000.000,- | |
14. 1) Sewa diterima dimuka
2) Pendapatan sewa
3) Beban sewa yang masih harus dibayar
4) Beban bunga
5) Gaji yang masih harus dibayar
- Pernyataan di atas yang merupakan akun riil adalah
- | | |
|----------------|----------------|
| A. 1, 4, dan 5 | D. 1, 4, dan 6 |
| B. 1, 2, dan 3 | E. 4, 5, dan 6 |
| C. 1, 3, dan 5 | |
15. Berikut ini adalah sumber pencatatan akuntansi
- 1) Penghapusan piutang tak tertagih
 - 2) Penjualan aktiva yang telah rusak
 - 3) Penyusutan aktiva tetap
 - 4) Pembelian peralatan tunai
 - 5) Pembayaran utang
 - 6) Pemakaian perlengkapan
- Yang termasuk transaksi keuangan intern adalah nomor
- | | |
|----------------|----------------|
| A. 2, 4, dan 6 | D. 1, 2, dan 3 |
| B. 1, 3, dan 6 | E. 1, 4, dan 6 |
| C. 3, 4, dan 6 | |
16. Di bawah ini termasuk aktiva lancar, *kecuali*
- | | |
|----------------------------|-----------------|
| A. piutang usaha | D. perlengkapan |
| B. asuransi dibayar dimuka | E. kas |
| C. peralatan | |

17. Perusahaan melakukan pembayaran beban asuransi sebesar Rp1.000.000,-. maka analisa transaksinya adalah harta berupa kas berkurang sebesar Rp1.000.000,- yang diimbangi dengan ...
 - A. piutang usaha bertambah Rp1.000.000,-
 - B. modal berkurang Rp1.000.000,-
 - C. kewajiban bertambah Rp1.000.000,-
 - D. modal bertambah Rp1.000.000,-
 - E. kewajiban berkurang Rp1.000.000,-

18. Macam-macam akun di bawah ini termasuk beban usaha, *kecuali*
 - A. beban perlengkapan
 - B. utang sewa
 - C. beban sewa
 - D. beban gaji
 - E. beban asuransi

19. Penerimaan pelunasan piutang dari debitor (pihak yang berutang kepada perusahaan) akan mengakibatkan perubahan pada akun
 - A. harta dan utang
 - B. harta dan modal
 - C. utang dan modal
 - D. modal dan harta
 - E. harta dan harta

20. Perusahaan membayar gaji karyawannya, ini termasuk transaksi yang mempengaruhi
 - A. harta kas dan utang
 - B. harta kas dan modal
 - C. harta kas dan piutang
 - D. harta kas dan kewajiban
 - E. utang dan modal

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!

1. Sebutkan penggolongan perusahaan menurut operasinya!
2. Apa yang dimaksud dengan koperasi dan perseroan terbatas?
3. Jelaskan arti neraca!
4. Jelaskan arti laporan laba-rugi!
5. Jelaskan arti laporan perubahan modal!
6. Jelaskanlah hubungan persamaan akuntansi dengan transaksi keuangan!
7. Sebutkan dua transaksi yang mengubah harta di satu pihak dan mengurangi modal di pihak lain!

8. Sebutkan dua transaksi yang mengubah harta kas dan mengubah harta lainnya!
9. Pada waktu menyusun neraca, terdapat suatu pos yang seharusnya dicatat sebelah debit, tetapi tercatat di sebelah kredit sebagai utang. Bagaimana pengaruh kesalahan ini terhadap jumlah modal?
10. Mengapa informasi yang terdapat pada neraca sangat diperlukan oleh pemilik perusahaan? Jelaskan!

C. Susunlah neraca dalam bentuk skontro berdasarkan data-data di bawah ini!

Perlengkapan jahit	Rp1.000.000,-
Piutang	Rp10.000.000,-
Pendapatan jahit diterima di muka	Rp3.750.000,-
Peralatan jahit	Rp10.000.000,-
Gedung	Rp25.000.000,-
Utang usaha	Rp5.500.000,-
Wesel bayar (utang wesel)	Rp1.500.000,-
Kas	Rp5.000.000,-
Asuransi dibayar di muka	Rp800.000,-
Gaji yang masih harus dibayar	Rp330.000,-
Gaji dibayar di muka	Rp150.000,-
Bunga terutang (yang masih harus dibayar)	Rp150.000,-
Inventaris kantor	Rp5.000.000,-
Modal Tuan Bima	Rp.....

Untuk memudahkan pengerjaan, kalian bisa melihat penggolongan akun di Bab 7.

D. Di bawah ini adalah sebagian dari transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan angkutan Tuan Iman dalam bulan Juni 2005.

1. Disetor ke dalam perusahaan uang tunai Rp15.000.000,- sebagai modal.
2. Dibeli tunai persediaan perlengkapan untuk operasi usaha (oli, bensin, suku cadang, dan lain-lain) seharga Rp2.175.000,-.
3. Diterima pendapatan sebesar Rp500.000,- tunai dari langganan.
4. Dibayar per kas biaya iklan sebesar Rp375.000,- (per kas = tunai = kontan)

5. Dibayar per kas sewa bulan Mei Rp450.000,-.
6. Diterima dari langganan-langganan uang tunai sebesar Rp5.750.000,-.
7. Dibeli per kas sebuah mobil sedan untuk pribadi Tuan Iman seharga Rp5.500.000,-.
8. Dibeli kredit sebuah truk dengan harga Rp7.500.000,-.
9. Dibeli kredit tambahan peralatan kantor seharga Rp800.000,-.
10. Dibayar tunai utang atas pembelian truk Rp5.000.000,-.
11. Dibayar gaji sebesar Rp1.250.000,-.

Tunjukkanlah akibat dari tiap-tiap transaksi di atas terhadap persamaan dasar akuntansi secara berurutan!

Bab IX

Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa



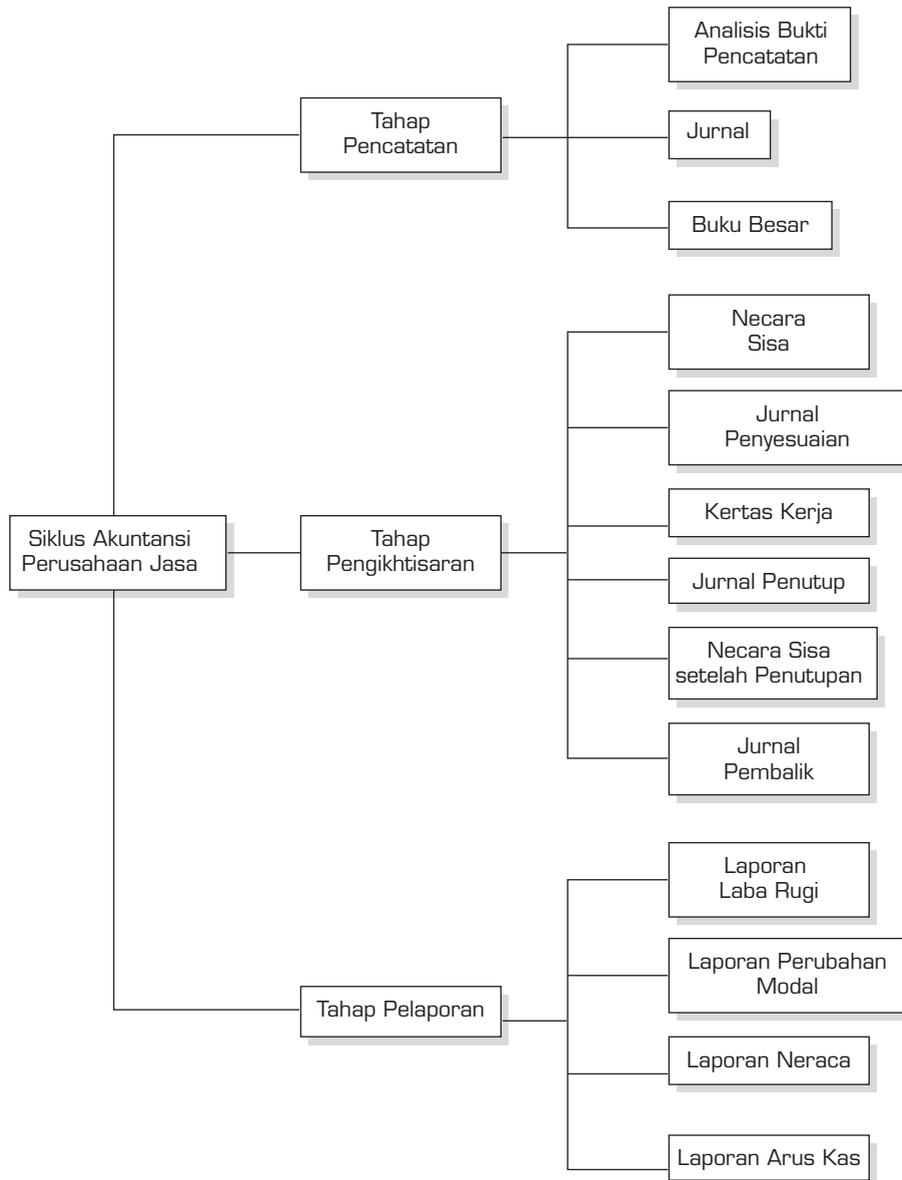
Sumber: Tempo, 12 Juni 2005

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti pembelajarana siswa dapat:

1. menjelaskan tahap pencatatan dari siklus akuntansi perusahaan jasa;
2. menjelaskan tahap pengikhtisaran dari siklus akuntansi perusahaan jasa;
3. menjelaskan tahap pelaporan dari siklus akuntansi perusahaan jasa.

PETA KONSEP



Seperi yang telah dijelaskan sebelumnya, tentang penggolongan perusahaan menurut operasinya, ada yang disebut perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya bergerak dalam bidang penyediaan pelayanan kepada masyarakat, seperti memberi kemudahan, kenikmatan, kenyamanan, dan sebagainya, dengan memperoleh imbalan.

Setelah mengetahui apa itu perusahaan jasa, selanjutnya kita akan membahas siklus akuntansi pada perusahaan jasa, yang mempunyai tiga tahap, yaitu tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran dan tahap pelaporan.

A. Tahap Pencatatan

Tahap pencatatan dilakukan mulai dari analisis debit/kredit bukti pencatatan transaksi keuangan, kemudian jurnal, setelah itu dilakukan posting ke dalam buku besar.

1. Analisis Bukti Pencatatan

Analisis bukti pencatatan merupakan awal dari tahap pencatatan. Sebelum kita menganalisis bukti pencatatan, terlebih dahulu kita harus mengetahui macam-macam bukti transaksi keuangan. Berikut ini uraian mengenai bukti pencatatan.

a. Bukti Pencatatan

Setiap transaksi keuangan harus disertai bukti pencatatannya, sebagai pertanggungjawaban kerja pada atasan bahwa transaksi telah dilakukan. Adapun sebelum kita menganalisa bukti pencatatan, kita harus mengetahui macam-macam bukti transaksi keuangan. Bukti pencatatan dapat dihasilkan dari transaksi dengan pihak luar perusahaan, atau juga diperoleh dari transaksi antarpihak di dalam perusahaan.

Bukti yang diperoleh dari transaksi dengan pihak luar yaitu sebagai berikut:

1) Faktor

Faktor adalah bukti transaksi berupa perhitungan penjualan kredit yang dibuat pihak penjual dan diberikan kepada pihak pembeli. Bagi pihak penjual, faktor tersebut disebut faktor penjualan atau faktor keluar. Sedangkan bagi pihak pembeli faktor tersebut disebut faktor pembelian atau faktor masuk. Biasanya faktor penjualan diberikan pada pihak pembeli, karena itu umumnya dibuat rangkap sesuai kebutuhan.

Berikut ini adalah contoh faktur:

CV. Adiguna Karya Jl. Otista No. 15 Garut	FAKTUR	No. Faktur: D13 Kepada: Yth. CV Makmur Jaya Jl. Nusa Indah 2 Ciamis	
Jumlah satuan	Nama Barang	Harga Satuan	Jumlah
2	Sepatu	Rp 175.000	Rp350000 <u>Rp350000</u>

2) Kuitansi

Kuitansi adalah bukti pembayaran yang dibuat oleh pihak penerima uang. Kuitansi terdiri atas dua bagian. Bagian kanan untuk pihak yang membayar uang dan sebelah kiri untuk arsip penerima uang. Kuitansi bisa dibuat rangkap, dalam hal ini bagian asli untuk pihak pembayar, sedang tembusannya untuk arsip penerima uang.

Contoh kuitansi:

Kuitansi	
No.019 Telah terima dari Tn. Bambang Uang sebanyak lima juta rupiah Untuk membayar sewa gedung untuk 1 tahun	Garut, 19 Juli 2006 Penerima (Drs Anto)
Tertimbang Rp 5.000.000,00	

3) Nota kontan

Nota kontan adalah bukti pembelian tunai yang diberikan pihak penjual kepada pembeli. Pembuatan nota disesuaikan dengan kebutuhan, artinya ada yang rangkap dua atau lebih. Biasanya yang asli diberikan kepada pihak pembeli.

Berikut ini adalah contoh nota kontan:

Toko Multiguna
Jl. Cimenuk No.51
Garut

Tgl, 02-07-06

NOTA KONTAN

Jumlah	Nama Barang	Harga Satuan	Jumlah
7 rim	Kertas HVS 80 gram	Rp 25.000	Rp 175.000
20 lbr	Kertas Sarason	Rp 1.000	Rp 20.000
			Rp 195.000

4) Bukti Memo

Bukti memo adalah bukti pencatatan yang dibuat untuk mencatat transaksi intern atau transaksi antarbagian dalam perusahaan. Contoh transaksi intern adalah penyusutan aktiva, pembelian perlengkapan, dan penghapusan piutang.

Berikut ini contoh bukti memo:

Memo

Untuk : Bagian Akuntansi

Dari : Tn. Rahman

Hal : Penyusutan aktiva

Tgl. : 31 Desember 2004

Catatlah beban penyusutan gedung untuk akhir Desember 2004 sebesar 3% dari Rp60.000.000,00 (harga gedung).

5) Nota Debet

Nota debet adalah nota yang menyatakan bahwa perkiraan lawan telah didebet. Perusahaan akan membuat nota debet bila perusahaan mengirimkan kembali sebagian barang yang telah dibelinya secara berutang. Pengiriman kembali tersebut mengharuskan perusahaan mengurangi utangnya dengan cara mendebet utang, sehingga disebut nota debet.

Bagi pihak yang menerima tembusan nota debet (pihak yang dikembalikan barangnya) akan mengurangi piutangnya dengan cara mengkredit piutang. Berikut ini contoh nota debet.

Toko Surya

Jl. A Yani 20

Garut

Garut, 4 April 2004

Kepada Yth. Toko Adil

Jl. Kenanga 5

Bandung

Nota Debet

Kami telah mendebet rekening Saudara, sebagai berikut:

Dikirim kembali TV Politronic karena rusak seharga Rp4.000.000,00

Toko Surya

Rahmat

6) Nota Kredit

Nota kredit adalah nota yang menyatakan bahwa perkiraan lawan dikredit. Perusahaan membuat nota kredit bila perusahaan menerima kembali barang yang telah dijualnya tidak dengan tunai. Penerimaan kembali tersebut mengharuskan perusahaan mengurangi piutangnya dengan cara mengkredit piutang, sehingga disebut nota kredit. Contoh nota kredit sebagai berikut:

PT Anugrah

Jl. A Yani 6

Bandung

Bandung, 5 Juni 2001

Kepada Yth. PT Maju

Jl. Tirta No. 10

Bogor

Nota Kredit

Kami telah mengkredit rekening Saudara, sebagai berikut:

Diterima kembali enam kuintal kopi yang tidak sesuai dengan pesanan
Anda seharga Rp1.000.000,00

Direktur PT Anugrah

Suweno, B. A.

7) Cek (Cheque)

Cek adalah surat perintah dari seorang nasabah kepada bank tempat dia menyimpan uang untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang ditunjuk.

Bagi yang mengeluarkan cek akan mencatat Akun Kas di sebelah kredit (kas berkurang). Sedangkan pihak yang menerima cek akan mencatat dalam Akun Kas di sebelah debit (kas bertambah).

Berikut ini contoh cek (cheque):



Sumber: Scanned dokumentasi penerbit
Gambar 9.1 Contoh cek

b. Analisis Bukti Pencatatan

Terdapat dua cara pencatatan transaksi yaitu:

- 1) Pencatatan bertahap, maksudnya dimulai dari jurnal lalu ke buku besar.
- 2) Pencatatan transaksi langsung ke buku besar (mengandung kelemahan jika terdapat kesalahan maka akan sulit menemukannya).

Pada umumnya terdapat lima jenis perkiraan yang perlu dianalisis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Aktiva
Posisi aktiva dalam neraca di sebelah debit. Bila terjadi penambahan jumlah aktiva dicatat pada sebelah debit, dan bila terjadi pengurangan dicatat di sebelah kredit. Sedangkan secara normalnya, setiap akhir periode perkiraan aktiva bersaldo debit.
- 2) Kewajiban
Posisi kewajiban dalam neraca di sebelah kredit. Bila terjadi penambahan jumlah utang dicatat pada sebelah kredit, dan bila terjadi pengurangan dicatat di sebelah debit. Sedangkan secara normalnya, setiap akhir periode perkiraan utang bersaldo kredit.

3) Modal

Posisi modal dalam neraca di sebelah kredit. Bila terjadi penambahan jumlah modal dicatat pada sebelah kredit, dan bila terjadi pengurangan dicatat di sebelah debet. Sedangkan secara normalnya, setiap akhir periode perkiraan modal bersaldo kredit.

4) Pendapatan

Pendapatan bersifat menambah modal. Oleh karena penambahan modal dicatat di sebelah kredit, maka penambahan pendapatan dicatat di sebelah kredit juga. Sebaliknya pengurangan pendapatan dicatat di sebelah debet. Secara normal, perkiraan pendapatan bersaldo kredit (sebelum ditutup di akhir periode).

5) Beban

Beban bersifat mengurangi modal. Oleh karena pengurangan modal dicatat di sebelah debet maka bila beban bertambah akan dicatat di sebelah debet. Sebaliknya bila beban berkurang akan dicatat di sebelah kredit. Secara normal, pada akhir periode perkiraan beban bersaldo debet (sebelum ditutup).

Agar lebih jelas bisa kita lihat lewat tabel di bawah ini:

Tabel 9.1

Kelompok Akun	(+)	(-)	Saldo Normal
Aktiva/harta	D	K	D
Utang	K	D	K
Ekuitas/modal	K	D	K
Pendapatan	K	D	K
Beban	D	K	D
Prive	D	K	D

Keterangan D = Debet
K = Kredit

2. Jurnal

Setiap transaksi yang sudah diwujudkan dalam bukti transaksi harus dicatat dahulu dalam jurnal. Jadi, jurnal merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama, sehingga jurnal sering disebut buku catatan pertama (book of original entry).

a. Pengertian Jurnal

Jurnal bisa diartikan sebagai media atau buku yang mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dengan menuliskan akun yang didebet dan akun yang dikredit. Dalam penjurnalan, paling sedikit ada satu akun (perkiraan) yang didebet dan satu akun yang dikredit.

b. Fungsi jurnal

Berikut ini beberapa fungsi jurnal.

- 1) Fungsi historis
Jurnal merupakan sebuah buku untuk mencatat semua transaksi dan kejadian secara kronologis atau berurutan tanggal terjadinya.
- 2) Fungsi
Jurnal menentukan ke akun mana dan dengan jumlah berapa transaksi dicatat.
- 3) Fungsi analisis
Jurnal menganalisis transaksi untuk menentukan akun yang harus didebet maupun yang harus dikredit.
- 4) Fungsi instruktif
Jurnal merupakan perintah mem-posting dalam buku besar, baik yang didebet maupun yang dikredit, sesuai analisis dalam jurnal.
- 5) Fungsi informatif
Jurnal memberikan keterangan tentang kegiatan perusahaan secara jelas. Jurnal menyajikan tanggal, nama akun, keterangan singkat mengenai transaksi, dan jumlah uang yang terlibat dalam suatu transaksi.

c. Bentuk Jurnal

Ada dua bentuk jurnal yaitu:

- 1) Jurnal Umum
Jurnal umum merupakan jurnal yang mencatat semua transaksi, kecuali transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal khusus. Apabila jenis transaksi perusahaan masih sedikit, maka jurnal umum dengan dua kolom debit dan kredit sudah cukup sebagai pencatatan pertama akuntansi.
- 2) Jurnal Khusus
Jurnal khusus adalah jurnal yang melakukan pencatatan setiap transaksi yang sejenis yang terjadi berulang kali. Biasanya jurnal khusus digunakan pada perusahaan besar, yang berulang kali melakukan transaksi-transaksi dengan frekuensi yang tinggi, seperti pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas.

d. Langkah-Langkah dalam Menyusun Jurnal

- Langkah 1. Catatlah tanggal terjadinya transaksi pada kolom tanggal, sesuai dengan tanggal yang tercantum pada bukti transaksi.
- Langkah 2. Isilah kolom nomor bukti dengan nomor bukti transaksi yang tercantum dalam bukti transaksi.
- Langkah 3. Tuliskan akun-akun yang mengalami perubahan akibat transaksi pada kolom akun/keterangan. Akun yang didebet ditulis rapat ke garis kolom nomor bukti, sedangkan akun yang dikredit ditulis lebih menjorok ke kanan, sehingga kedua akun tidak sejajar. Beri penjelasan singkat pada kolom referensi.
- Langkah 4. Isilah kolom debit/kredit sesuai dengan jumlah uang yang terlibat dalam transaksi.

Sebagai contoh kita coba lihat jurnal untuk seluruh transaksi usaha Reparasi ANANDA seperti pada peraga berikut:

USAHA BENGKEL MAKMUR					
JURNAL UMUM					
Untuk periode yang berakhir 31 Agustus 2005					
Tanggal	Nomor bukti	Akun	Ref	Debet	Kredit
2005	1	Kas		10,000	
Agustus		Modal Tn. Andi			10,000
	3	Peralatan Bengkel		3,000	
		Kas			3,000
	4	Perlengkapan Bengkel		500	
		Utang usaha			500
	10	Beban listrik, air dan telf		600	
		Kas			600
	15	Kas		1,000	
		Piutang Usaha		1,500	
		Pendapatan Usaha			2,500
	20	Utang Usaha		500	
		Kas			500
	25	Beban upah		800	
		Kas			800
	26	Prive Tn Andi		200	
		Kas			200
	27	Beban Pemakaian Perl.		200	
		Perlengkapan Toko			200

Untuk lebih memahaminya, coba kalian susun jurnal umum dari transaksi-transaksi di bawah ini:

Sebuah usaha dengan nama "Kantor Akuntan Sudjana, SH", mempunyai transaksi keuangan selama bulan April 2005, sebagai berikut:

- April 1 : Disetor oleh Sudjana sebagai modal Rp 20.000.000,00 berupa uang tunai.
- April 5 : Dibeli perlengkapan kantor Rp1.000.000,00 dan peralatan kantor Rp2.000.000,00 secara tunai.
- April 6 : Dibayar biaya listrik Rp600.000,00
- April 10 : Diselesaikan jasa pemeriksaan akuntansi dari seorang langganan dan diterima tunai Rp 4.500.000,00.
- April 20 : Diambil untuk keperluan pribadi oleh Sudjana sebesar Rp750.000,00.
- April 25: Dibeli tambahan peralatan kantor Rp2.000.000,00 dan baru dibayar uang muka Rp500.000,00.
- April 26: Dibayar utang Rp1.000.000,00.
- April 27: Dibayar biaya gaji asisten akuntan bulan ini Rp1.000.000,00.
- April 28: Dibayar biaya telpon Rp150.000,00.
- April 29: Dibayar biaya air Rp 50.000,00.
- April 30: Dibayar biaya rupa-rupa Rp Rp 50.000,00.
- April 30: Perlengkapan yang masih ada Rp250.000,00. Jadi, terdapat biaya pemakaian perlengkapan sebesar Rp750.000,00.

3. Buku Besar (*General Ledger*)

Buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan akun (perkiraan) yang dipakai untuk meringkas transaksi-transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Adapun yang dimaksud akun atau perkiraan adalah sebuah media (tempat) untuk mengelompokkan transaksi-transaksi yang sejenis. Akun bisa dibuat dalam bentuk: kartu, lembaran, atau buku. Karena merupakan kumpulan dari banyak akun itulah maka istilah yang dipakai adalah Buku Besar.

a. Bentuk Buku Besar

Pada umumnya ada empat bentuk buku besar. Perusahaan dapat memilih salah satu bentuk, sesuai dengan kebutuhan perusahaannya.

1) Bentuk T (T Account)

Bentuk ini merupakan bentuk paling sederhana dan mirip dengan huruf T. Pada bentuk ini sebelah kiri merupakan sisi debet dan sebelah kanan merupakan sisi kredit.

Nama Akun (misal, Kas)	No. Akun:
------------------------	-----------------

2) Bentuk dua kolom

Bentuk dua kolom memiliki dua kolom utama, yakni kolom debit di sebelah kiri dan kolom kredit di sebelah kanan. Selain itu, terdapat beberapa kolom lain, yakni kolom tanggal, keterangan, dan referensi (Ref.). Contoh:

Nama Akun

No. Akun

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Tanggal	Keterangan	Ref	Kredit

3) Bentuk tiga kolom

Bentuk ini memiliki tiga kolom utama, yakni kolom debit, kolom kredit, dan kolom saldo. Dan, terdapat pula beberapa kolom lain, yakni kolom tanggal, keterangan, dan referensi (Ref.). Contoh:

Nama Akun

No. Akun

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo

4) Bentuk empat kolom

Bentuk ini memiliki empat kolom utama, yakni kolom debit, kolom kredit, kolom saldo debit, dan kolom saldo kredit. Jadi bentuk ini mirip dengan bentuk tiga kolom, hanya kolom saldo dibedakan antara saldo debit dengan saldo kredit. Contoh:

Nama Akun

No. Akun

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit

b. Posting

Proses yang harus dilakukan setelah transaksi dicatat dalam jurnal adalah pemindahbukuan ke dalam buku besar. Pemindahbukuan jurnal ke dalam buku besar disebut posting. Langkah-langkah posting terdiri atas:

- 1) Memindahkan tanggal di jurnal ke dalam tanggal di akun buku besar.
- 2) Memindahkan jumlah debit di jurnal ke kolom debit di akun buku besar.

- 3) Memindahkan jumlah kredit di jurnal ke kolom kredit di akun buku besar.
- 4) Memindahkan nomor halaman di jurnal ke kolom Ref di akun buku besar.
- 5) Memindahkan nomor akun di buku besar ke kolom Ref di jurnal.

Contoh posting Jurnal ke Buku Besar Akun Dua Kolom

Jurnal Umum

Halaman:1

Tanggal		Akun	Ref	Debet	Kredit
2005	1	Kas	101	10,000	
Agustus		Modal Tn ANDI	301		10,000

Kas No:101

Tanggal	Keterangan	Ref	Jumlah	Tanggal	Keterangan	Ref	Jumlah
2005	1 Investasi	JU.1	10,000				
Agus							

Modal Tn ANDI No. 301

Tanggal	Keterangan	Ref	Jumlah	Tanggal	Keterangan	Ref	Jumlah
				2005	1 Investasi	JU.1	10,000
				Agus			

B. Tahap Pengikhtisaran

Tahap pengikhtisaran meliputi pembuatan neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Neraca saldo disusun berdasarkan saldo pada masing-masing akun di buku besar. Tidak semua saldo menunjukkan data yang sebenarnya. Beberapa saldo membutuhkan penyesuaian sehingga

perlu dibuat jurnal penyesuaian. Kertas kerja digunakan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Jurnal penutup dibuat untuk menutup saldo nominal sehingga data keuangan siap digunakan untuk periode berikutnya. Sedangkan jurnal pembalik digunakan untuk membalik jurnal-jurnal tertentu yang berkaitan.

1. Neraca Sisa/Saldo

Setelah melakukan proses pencatatan dalam jurnal dan akun buku besar, langkah selanjutnya adalah menyusun sisa/saldo masing-masing akun/rekening. Dalam menyusun saldo tersebut kita perlu memerhatikan dua aturan dalam mekanisme pencatatan berpasangan, yaitu:

- a. Jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit. Ini berarti paling sedikit ada dua rekening yang terpengaruh oleh setiap transaksi.
- b. Persamaan dasar akuntansi harus selalu dalam keadaan seimbang.

Meskipun jumlah debit dan kredit sudah sama, belum menjamin bahwa pencatatan telah dilakukan secara benar karena ada kemungkinan salah dalam mempergunakan akun.. Apabila jumlah debit dan jumlah kredit dalam daftar saldo tidak sama, maka terjadi kesalahan-kesalahan dalam proses pencatatan.

Kesalahan tersebut mungkin diakibatkan oleh hal-hal berikut.

- 1) Kesalahan dalam mencatat atau lupa mencatat yaitu dapat berupa:
 - a) mencatat transaksi lebih dari satu kali,
 - b) mencatat transaksi pada akun yang salah tetapi dalam jumlah yang benar, dan
 - c) kesalahan dalam jumlah debit atau kredit.
- 2) Kesalahan waktu menyusun saldo yang berupa:
 - a) saldo debit salah dicatat sebagai saldo kredit di neraca saldo atau sebaliknya,
 - b) salah menjumlahkan pada salah satu lajur pada neraca saldo, dan
 - c) jumlah saldo akun dicatat kurang atau lebih dalam neraca saldo.
- 3) Kesalahan waktu menentukan saldo akun yang diakibatkan kesalahan dalam menjumlah.
- 4) Kesalahan waktu mencatat transaksi dalam buku besar, misalnya:
 - a) salah mencatat suatu jumlah;
 - b) keliru mencatat pada suatu sisi, seharusnya debit dicatat pada sisi kredit, dan
 - c) jumlah debit atau kredit lupa tidak dicatat.

Pencatatan ke dalam neraca saldo dilakukan dengan suatu pola tertentu pada suatu daftar yang mampu merangkum semua akun baik sisi debit maupun sisi kredit. Bentuk neraca saldo yang umum digunakan dijelaskan dalam bagan berikut ini.

Nama Perusahaan (1)
Neraca Saldo
Periode (2)

No. Akun	Nama Akun	Debet	Kredit
(3)	(4)	(5)	(6)

Keterangan:

- (1) Isi nama perusahaan
- (2) Isi tanggal pembuatan neraca saldo
- (3) Isi nomor akun secara berurutan
- (4) Isi nama akun buku besar
- (5) Isi jumlah rupiah dari saldo akun buku besar sebelah debit
- (6) Isi jumlah rupiah dari saldo akun buku besar sebelah kredit.

Untuk mengetahui bagaimana proses pengisian neraca sisa, mari kita perhatikan bagan yang memperlihatkan cara memindahkan saldo dari akun buku besar ke neraca sisa pada Usaha Bengkel MAKMUR.

Kas

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	SALDO	
					Debet	Kredit
2005	1 Mencatat Modal	JU1	10,000		10,000	
Agustus	3 Membeli Peralatan			3,000	7,000	
	10 Membayar Beban Listrik			600	6,400	
	15 Menerima Pendapatan		1,000		7,400	
	20 Membayar Utang			500	6,900	
	25 Membayar Upah			800	6,100	
	26 Prive Tn Andi			200	5,900	

Peralatan Bengkel

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	SALDO	
					Debet	Kredit
2005	3 Membeli peralatan	JU1	3,000		3,000	
Agus						

Perlengkapan Toko

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	SALDO	
					Debet	Kredit
2005	3 Membeli perlengkapan	JU1	500		500	
Agus	27 Pemakaian perlengkapan	JU1		200	300	

Utang Usaha

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	SALDO	
					Debet	Kredit
2005	4 Membeli perlengkapan bengkel	JU1		500		500
Agus	20 Membayar utang	JU1	500		-	

Beban Listrik

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	SALDO	
					Debet	Kredit
2005	4 Pembayaran Beban Listrik	JU1	600		600	
Agus						

Piutang Usaha

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	SALDO	
					Debet	Kredit
2005	15 Menerima pendapatan	JU1	1,500		1,500	
Agus						

Modal Tn Andi

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	SALDO	
					Debet	Kredit
2005	1 Mencatat modal	JU1		10,000		10,000
Agus						

Pendapatan Jasa

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	SALDO	
					Debet	Kredit
2005	15 Menerima pendapatan	JU1		2,500		2,500
Agus						

Beban Upah

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	SALDO	
					Debet	Kredit
2005 25	Membayar upah	JU1	800		800	
Agus						

Prive Tn Andi

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	SALDO	
					Debet	Kredit
2005 26	Prive Tn Andi	JU1	200		200	
Agus						

Beban Pemakaian Peralatan

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	SALDO	
					Debet	Kredit
2005 27	Pemakaian perlengkapan	JU1	200		200	
Agus						

Usaha Bengkel ANANDA

Neraca Saldo

Untuk periode 31 Agustus 2005

No. Akun	Nama Akun	Debet	Kredit
	Kas	3900	
	Peralatan Bengkel	3000	
	Perlengkapan	300	
	Utang Usaha		
	Beban Listrik	600	
	Piutang Usaha	1.500	
	Modal Tn ANDI		10000
	Pendapatan Jasa		2.500
	Beban Upah	800	
	Prive Tn ANDI	200	
	Beban Pemakaian Perh	200	

2. Jurnal Penyesuaian

Neraca saldo yang telah kita bahas sebelumnya merupakan dasar bagi penyusunan laporan keuangan. Tetapi pada kenyataannya, neraca saldo ini belum menunjukkan hasil operasional perusahaan yang sesungguhnya. Sebagai contoh, di neraca saldo tercantum perlengkapan Rp2.000.000,00. Tetapi pada kenyataannya perlengkapan tinggal Rp400.000,00, karena telah dipakai selama satu periode akuntansi.

Agar sama dengan kenyataan sesungguhnya maka akun perlengkapan di neraca saldo memerlukan penyesuaian, sehingga perlu dibuat jurnal penyesuaian. Selain itu, kadang-kadang terdapat suatu transaksi yang terjadi pada suatu periode akuntansi tapi transaksi tersebut belum dicatat, sehingga neraca saldo yang ada belum menunjukkan adanya transaksi tersebut. Untuk itu diperlukan jurnal penyesuaian. Jadi, jurnal penyesuaian bisa diartikan sebagai jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan neraca saldo agar mampu menggambarkan hal sesungguhnya.

Setelah neraca saldo disesuaikan maka kita akan mendapatkan Neraca Saldo Setelah Disesuaikan (NSSD). Neraca Saldo Setelah Disesuaikan inilah yang dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

Bila ditinjau dari segi transaksi maka ada dua kelompok transaksi yang memerlukan penyesuaian, sebagai berikut.

- a. Transaksi yang telah dicatat, tetapi pada akhir periode perlu dikoreksi:
 - 1) Pemakaian perlengkapan
 - 2) Penyusutan aktiva tetap
 - 3) Beban yang dibayar di muka
 - 4) Pendapatan yang diterima di muka.
- b. Transaksi yang sudah terjadi, tetapi belum dicatat:
 - 1) Beban yang masih harus dibayar.
 - 2) Pendapatan yang masih harus diterima.

Untuk mempermudah pemahaman, perhatikan contoh-contoh berikut.

a. Pemakaian Perlengkapan

Di neraca saldo per 31 Desember 2005, nilai akun perlengkapan tertulis Rp1.500.000,00. Setelah diadakan perhitungan, ternyata nilai perlengkapan tinggal Rp600.000,00; maka jurnal penyesuaiannya adalah, sebagai berikut.

Desember 31	Beban pemakaian perlengkapan	Rp900.000,00	
	Perlengkapan		Rp900.000,00
	(penyesuaian)		

Jurnal di atas memiliki arti: Beban pemakaian perlengkapan bertambah sebesar Rp900.000,00 dan perlengkapan berkurang sebesar Rp900.000,00. Selanjutnya bila jurnal

tersebut diposting ke buku besar hasilnya tampak sebagai berikut.

Beban Pemakaian Perlengkapan

No. 114

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2005 Des 31	Penyesuaian		Rp900.000,00		Rp900.000,00	

Perlengkapan Kantor

No. 121

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2005 Des 31	Saldo				Rp1.500.000,00	
	Penyesuaian			Rp400.000,00	Rp600.000,00	

b. Penyusutan Aktiva Tetap

Di neraca saldo, akun gedung bersaldo debit Rp40.000.000,00. Pada akhir periode 31 Desember 2005 gedung disusutkan 5%. Besarnya beban penyusutan satu tahun = $5\% \times 400.000.000,00 = Rp2.000.000,00$. Jurnal penyesuaian yang harus dibuat adalah sebagai berikut.

Desember 31	Beban penyusutan gedung	Rp2.000.000,00
	Akumulasi penyusutan gedung (penyyesuaian)	Rp2.000.000,00

Jurnal di atas memiliki arti: Beban penyusutan gedung bertambah Rp2.000.000,00 dan akumulasi penyusutan gedung bertambah Rp2.000.000,00. Di neraca, akumulasi penyusutan gedung dicantumkan untuk mengurangi nilai gedung. Itu berarti setiap akhir periode akuntansi nilai gedung selalu mengalami penurunan karena adanya penyusutan.

Selanjutnya bila jurnal penyesuaian tersebut diposting ke buku besar, hasilnya tampak sebagai berikut.

Beban Penyusutan Gedung

No. 520

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2005 Des 31	Penyesuaian		Rp2.000.000,00	--	Rp2.000.000,00	

Akumulasi Penyusutan Gedung

No. 125

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2005 Des 31	Penyesuaian		--	Rp2.000.000,00	--	Rp2.000.000,00

c. Beban yang Dibayar di Muka

Beban yang dibayar di muka adalah beban yang telah dibayar tetapi pembebanannya untuk masa yang akan datang. Sehingga bila suatu periode akuntansi berakhir, beban yang dibayar di muka memerlukan penyesuaian, sebab sebagian beban harus diakui sebagai beban suatu periode. Adapun sebagian beban yang lain merupakan beban periode berikutnya.

Pencatatan beban yang dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua cara:

- 1) Diperlakukan sebagai harta (dicatat sebagai akun 'beban dibayar di muka' atau disebut juga 'piutang beban').
- 2) Diperlakukan sebagai beban (dicatat sebagai akun 'beban')

Agar mudah, perhatikan contoh berikut:

PT Adil pada 1 Januari 2005 membayar beban sewa gedung untuk tiga tahun sebesar Rp6.000.000,00. Beban yang dibayar di muka tersebut bisa dicatat dengan dua cara yang harus dipilih salah satu, sebagai berikut:

- 1) Diperlakukan sebagai harta. Sehingga saat pembayaran, jurnal umum yang dibuat adalah;

2005

Januari 1	Sewa dibayar di muka	Rp6.000.000,00
	Kas	Rp6.000.000,00

- 2) Diperlakukan sebagai beban. Sehingga saat pembayaran, jurnal umum yang dibuat adalah:

2005

Januari 1	Beban sewa	Rp6.000.000,00
	Kas	Rp6.000.000,00

Karena beban sebesar Rp6.000.000,00 tersebut untuk tiga tahun, maka pada akhir periode 2005 perlu dibuat penyesuaian. Beban yang diakui untuk tahun 2005 adalah Rp6.000.000,00: 3 = Rp2.000.000,00. Jurnal penyesuaian yang dibuat adalah sebagai berikut:

- 1) Bila diperlakukan sebagai harta, jurnal penyesuaiannya:

Desember 31	Beban sewa	Rp2.000.000,00
	Sewa dibayar di muka (penyesuaian)	Rp2.000.000,00

Jurnal penyesuaian di atas memiliki arti: Beban sewa bertambah sebesar Rp 2.000.000,00 dan sewa dibayar di muka berkurang sebesar Rp2.000.000,00. Selanjutnya bila jurnal penyesuaian tersebut diposting ke buku besar, hasilnya tampak sebagai berikut:

Beban sewa**No.116**

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2005 Desember 31	Penyesuaian		Rp2.000.000,00		Rp2.000.000,00	

Sewa dibayar di muka**No. 515**

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2005 Januari 1	Membayar sewa di muka		Rp6.000.000,00		Rp6.000.000,00	
Desember 31	Penyesuaian			Rp2.000.000,00	Rp4.000.000,00	

- 2) Bila diperlakukan sebagai beban, jurnal penyesuaiannya:

Desember 31	Sewa dibayar di muka	Rp4.000.000,00
	Beban sewa (penyesuaian)	Rp4.000.000,00

Jurnal penyesuaian di atas memiliki arti: Sewa dibayar di muka bertambah Rp4.000.000,00.

(Untuk memunculkan adanya harta bernama sewa dibayar di muka yang nilainya pada 31 Desember 2005 tinggal Rp4.000.000, 00 karena yang Rp2.000.000,00 telah diakui sebagai beban untuk tahun 2005). Di sisi lain beban sewa berkurang sebesar Rp4.000.000,00.

Selanjutnya bila jurnal penyesuaian tersebut diposting ke buku besar, hasilnya tampak sebagai berikut:

Sewa dibayar di muka**No.116**

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2005 Desember 31	Penyesuaian		Rp4.000.000,00		Rp4.000.000,00	

Beban sewa**No.515**

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2005 Januari 1	Membayar sewa		Rp6.000.000,00		Rp6.000.000,00	
Desember 31	Penyesuaian			Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	

Dengan pembuatan jurnal penyesuaian maka beban sewa yang diakui dan dibebankan untuk tahun 2005 adalah sebesar Rp2.000.000,00 sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

d. Pendapatan yang Diterima di Muka

Pendapatan yang diterima di muka adalah pendapatan yang telah diterima tetapi pendapatan tersebut merupakan pendapatan untuk dua periode akuntansi atau lebih. Sehingga bila suatu periode akuntansi berakhir, pendapatan yang diterima di muka memerlukan penyesuaian. Sebab sebagian pendapatan harus diakui sebagai pendapatan suatu periode dan sisanya merupakan pendapatan untuk periode-periode berikutnya.

Pencatatan pendapatan yang diterima di muka dapat dilakukan dengan cara, sebagai berikut.

- 1) Diperlakukan sebagai kewajiban (dicatat sebagai akun 'pendapatan diterima di muka' atau disebut juga 'utang pendapatan').
- 2) Diperlakukan sebagai pendapatan (dicatat sebagai akun 'pendapatan').

Agar jelas, perhatikan contoh berikut.

Pada tanggal 1 Juli 2005 diterima pendapatan dari sewa toko untuk dua tahun sebesar Rp2.400.000,00. Pendapatan yang diterima di muka ini bisa dicatat dengan dua cara, sebagai berikut.

- 1) Diperlakukan sebagai kewajiban. Sehingga waktu penerimaan, jurnal umum yang dibuat adalah:

2005

Juli 1	Kas	Rp2.400.000,00
	Diterima di muka	Rp2.400.000,00

- 2) Diperlakukan sebagai pendapatan. Sehingga waktu penerimaan, jurnal umum yang dibuat adalah:

2005

Juli 1	Kas	Rp2.400.000,00
	Pendapatan sewa	Rp2.400.000,00

Karena pendapatan sebesar Rp2.400.000,00 itu untuk 2 tahun maka pada akhir periode 2005 perlu dibuat penyesuaian. Pendapatan yang diakui untuk periode 2005 adalah $\frac{\text{Rp}2.400.000,00}{24 \text{ bulan}} \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp}600.000,00$. Jurnal penyesuaian yang dibuat adalah, sebagai berikut:

- 1) Bila diperlakukan sebagai kewajiban, jurnal penyesuaiannya:

Desember 31 Sewa diterima di muka Rp600.000,00
 Pendapatan sewa Rp600.000,00

Jurnal penyesuaian tersebut memiliki arti: Sewa diterima di muka berkurang sebesar Rp600.000,00 dan pendapatan sewa bertambah Rp600.000,00. Bila jurnal penyesuaian tersebut diposting ke buku besar hasilnya tampak, sebagai berikut:

Sewa diterima di muka

No.116

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2005 Juli	1 Penerimaan sewa			Rp2.400.000,00		Rp2.400.000,00
Desember	31 Penyesuaian		Rp600.000,00			Rp1.800.000,00

Pendapatan sewa

No.412

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2005 Desember	31 Penyesuaian			Rp600.000,00		Rp600.000,00

2) Bila diperlakukan sebagai pendapatan, jurnal penyesuaiannya:

Desember 31 Pendapatan sewa Rp1.800.000,00
 Sewa diterima di muka Rp1.800.000

Jurnal penyesuaian tersebut memiliki arti: Pendapatan sewa berkurang sebesar Rp1.800.000,00 dan sewa diterima di muka bertambah sebesar Rp1.800.000,00. Bila jurnal penyesuaian tersebut diposting ke buku besar hasilnya tampak, sebagai berikut.

Pendapatan sewa

No.412

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2005 Juli	1 Penerimaan sewa			Rp2.400.000,00		Rp2.400.000,00
Desember	31 Penyesuaian		Rp1.800.000,00			Rp600.000,00

Sewa diterima di muka

No.116

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2005 Desember	31 Penyesuaian			Rp1.800.000,00		Rp1.800.000,00

e. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang masih harus dibayar adalah beban yang sudah menjadi kewajiban suatu periode tapi belum dibayar. Oleh karena itu, perlu dibuat jurnal penyesuaian untuk mengakui adanya beban tersebut.

Contoh:

Perusahaan membayar upah karyawan setiap hari Sabtu. Karena tanggal 31 Desember 2005 (sebagai hari tutup buku) jatuh pada hari Kamis, maka perusahaan harus membuat jurnal penyesuaian untuk mengakui adanya beban upah selama hari Senin sampai dengan Kamis. Walaupun upah tersebut belum dibayar tapi upah hari Senin sampai dengan Kamis tersebut sudah merupakan beban periode akuntansi yang berakhir 31 Desember 2005. Dengan demikian, jurnal penyesuaian yang dibuat bila besarnya upah Senin sampai Kamis sebesar Rp2.600.000,00 adalah:

Desember 31	Beban upah	Rp2.600.000,00
	Upah yang akan dibayar (Penyesuaian)	Rp2.600.000,00

Istilah lain dari upah yang akan dibayar adalah utang upah. Selanjutnya, bila jurnal penyesuaian tersebut diposting ke buku besar hasilnya tampak sebagai berikut.

Beban upah					No.502	
Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2005					Rp45.000.000,00	
Desember 31	Penyesuaian		Rp2.600.000,00	--	Rp47.000.000,00	--

Upah yang akan dibayar					No.202	
Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2005						
Desember 31	Penyesuaian		--	Rp2.600.000,00	--	Rp2.600.000,00

f. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak suatu periode tapi belum diterima. Oleh karena itu, perlu dibuat jurnal penyesuaian untuk mengakui adanya hak tersebut.

Contoh:

Setiap enam bulan sekali perusahaan memperoleh pendapatan bunga obligasi. Untuk periode April sampai dengan September (6 bulan), pendapatan bunga diterima tiap tanggal 1 Oktober. Dan untuk periode Oktober sampai dengan Maret, pendapatan bunga diterima

tiap tanggal 1 April. Karena periode akuntansi berakhir pada 31 Desember 2005 maka ada pendapatan bunga untuk bulan Oktober, November, dan Desember yang sudah menjadi hak perusahaan tapi belum diterima uangnya. Oleh karena itu, perlu dibuat jurnal penyesuaian untuk hal tersebut. Bila pendapatan bunga untuk bulan Oktober, November, dan Desember sebesar Rp600.000,00, maka:

Desember 31	Bunga yang akan diterima	Rp600.000,00
	Pendapatan bunga	Rp600.000,00
	(Penyesuaian)	

Istilah lain dari *bunga yang akan diterima* adalah piutang bunga. Selanjutnya, bila jurnal penyesuaian tersebut diposting ke buku besar hasilnya tampak sebagai berikut.

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2005 Desember 31	Penyesuaian		Rp600.000,00		Rp600.000,00	

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2005 Desember 31	Penyesuaian			Rp600.000,00		Rp600.000,00

3. Kertas Kerja (Neraca Lajur)

Setelah membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan saldo akun-akun tertentu, langkah berikutnya adalah menyusun laporan keuangan. Untuk menyusun laporan keuangan langsung dari neraca saldo yang telah disesuaikan bukan pekerjaan mudah, apalagi bila perusahaan memiliki banyak akun dan banyak jurnal penyesuaian. Untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan diperlukan satu alat bantu yang disebut kertas kerja atau worksheet atau neraca lajur. Kertas kerja ini hanya merupakan alat bantu bukan merupakan catatan akuntansi yang resmi seperti jurnal dan buku besar serta bukan salah satu bentuk dari laporan keuangan. Dalam praktiknya, kertas kerja ditulis dengan pensil.

a. Pengertian dan Fungsi Kertas Kerja

Kertas kerja dapat diartikan sebagai alat bantu berupa daftar berkolom-kolom (berlajur-lajur) untuk menghimpun data-data akuntansi yang diperlukan dalam rangka mempermudah penyusunan laporan keuangan.

Kertas kerja memiliki fungsi, sebagai berikut:

- 1) mempermudah penyusunan laporan keuangan;
- 2) mengurangi terjadinya kesalahan; dan bila terjadi kesalahan, dapat dihapus dan dibetulkan dengan mudah;
- 3) membantu pengecekan saldo laba atau rugi apakah sudah sesuai antara laporan laba rugi dengan neraca.

b. Bentuk Kertas Kerja

Terdapat beberapa bentuk kertas kerja yaitu sebagai berikut:

- 1) Bentuk 6 kolom

No	Nama Akun	Neraca Saldo		Laba Rugi		Neraca	
		D	K	D	K	D	K

- 2) Bentuk 8 kolom

No	Nama Akun	Neraca Saldo		Ayat		Laba Rugi		Neraca	
				Penyesuaian					
		D	K	D	K	D	K	D	K

- 3) Bentuk 10 kolom

No	Nama Akun	Neraca		Ayat		N. Saldo		Laba		Neraca	
		Saldo		Peny.		Dises.		Rugi			
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K

- 4) Bentuk 12 kolom

No	Nama Akun	Neraca		Ayat		N. Saldo		Laba		Perub.		Neraca	
		Saldo		Peny.		Dises.		Rugi		Ekuitas			
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K

Dari semua bentuk kertas kerja tersebut yang paling sering dipakai adalah bentuk 10 kolom.

c. Tahap Pengerjaan Kertas Kerja

- 1) Menyiapkan format kertas kerja dengan mencantumkan nama perusahaan, kertas kerja, dan periode kertas kerja (misal, 31 Desember 2004).
- 2) Memasukkan saldo akun buku besar pada kolom neraca saldo.
- 3) Memasukkan jurnal penyesuaian pada kolom penyesuaian.
- 4) Angka-angka yang terdapat pada neraca saldo setelah ditambah atau dikurangi penyesuaian dimasukkan dalam kolom neraca saldo disesuaikan.
- 5) Saldo yang terdapat pada neraca saldo yang disesuaikan dipindahkan ke kolom laporan laba rugi atau neraca. Saldo akun-akun riil (harta, kewajiban, dan ekuitas/modal) dimasukkan ke neraca. Saldo akun-akun nominal (pendapatan dan beban) dimasukkan ke laporan laba rugi.
- 6) Menjumlahkan kolom laba/rugi dan menentukan saldonya (laba/rugi). Bila saldo laba dipindahkan ke neraca sebelah kredit dan bila rugi dipindahkan ke neraca sebelah debit.
- 7) Menjumlahkan kolom neraca antara debit dan kredit (jumlah harus sama).

Setelah mengetahui tahap pengerjaan kertas kerja, agar lebih jelas, kita coba susun kertas kerja untuk Usaha salon Tiara bila diketahui data-data, sebagai berikut.

Salon Tiara
Neraca Saldo Per 31 Desember 2004
(dalam rupiah)

No. Akun	Nama Akun	Debet	Kredit
101	Kas	3.226.500	
102	Piutang usaha	3.500.000	
103	Perlengkapan salon	1.300.000	
104	Perlengkapan kantor	805.000	
121	Peralatan salon	1.100.000	
122	Peralatan kantor	900.000	
123	Gedung salon	9.500.000	
201	Utang usaha		2.500.000
301	Modal Anita		13.500.000
302	Pengambilan prive	850.000	
401	Pendapatan salon		7.405.000
501	Beban upah dan gaji	586.000	
502	Beban pemeliharaan	412.500	
503	Beban penerangan	535.000	
504	Beban umum lain-lain	690.000	
		23.405.000	23.405.000

Data penyesuaian per 31 Desember 2004.

1. Perlengkapan salon yang telah terpakai Rp500.000,-
2. Nilai persediaan perlengkapan kantor Rp350.000,-
3. Penyusutan peralatan salon ditetapkan Rp125.000,-
4. Penyusutan inventaris kantor ditetapkan Rp75.000,-
5. Penyusutan gedung salon ditetapkan Rp190.000,-
6. Gaji dan upah yang masih harus dibayar Rp325.000,-
7. Pajak penghasilan yang masih harus dibayar Rp625.000,-

Akun-akun yang harus dibuka adalah sebagai berikut:

- 202 Gaji dan upah yang masih harus dibayar
- 203 Utang pajak
- 505 Beban perlengkapan salon
- 506 Beban perlengkapan kantor
- 507 Beban penyusutan peralatan salon
- 508 Beban penyusutan peralatan kantor
- 509 Beban penyusutan gedung salon
- 121.1 Akumulasi penyusutan peralatan salon
- 122.1 Akumulasi penyusutan peralatan kantor
- 123.1 Akumulasi penyusutan gedung salon
- 631 Pajak penghasilan

Salon Tiara
Jurnal Penyesuaian
Per 31 Desember 2004

Tanggal	Nama Akun/Keterangan	Ref	Debit	Kredit
Des 31	Beban perlengkapan salon	505	500.000	
2004	Perlengkapan salon	103		500.000
	Beban perlengkapan kantor	506	350.000	
	Perlengkapan kantor	104		350.000
	Beban penyusutan peralatan salon	507	125.000	
	Akum. peny. peral salon	121.1		125.000
	Beban penyusutan peralatan kantor	508	75.000	
	Akum. peny. peral kantor	122.1		75.000
	Beban penyusutan gedung salon	509	190.000	
	Akum. peny. gedung salon	123.1		190.000
	Beban upah dan gaji	501	325.000	
	Gaji dan upah yang akan dibayar	202		325.000
	Pajak penghasilan	631	625.000	
	Utang pajak	203		625.000
	Jumlah		2.190.000	2.190.000

Dengan menggunakan bentuk 10 kolom maka kertas kerja yang dibuat Salon Tiara adalah sebagai berikut.

Salon Tiara
Kertas Kerja Per 31 Desember 2004

No.	Nama Akun	Neraca		Ayat		N. Saldo		Laporan		Neraca	
		Sisa		Penyesuaian		Disesuaikan		Laba Rugi			
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K
101	Kas	3.226.500				3.226.500					3.226.500
102	Piutang usaha	3.500.000				3.500.000					3.500.000
103	Perlengkapan salon	1.300.000		¹ 500.000		800.000					800.000
104	Perlengkapan kantor	805.000		² 350.000		455.000					455.000
121	Peralatan salon	1.100.000				1.100.000					1.100.000
122	Peralatan kantor	900.000				900.000					900.000
123	Gedung salon	9.500.000				9.500.000					9.500.000
201	Utang usaha		2.500.000					2.500.000			2.500.000
301	Modal Anita		13.500.000					13.500.000			13.500.000
302	Pengambilan prive										
401	Pendapatan salon	850.000				850.000		7.405.000	7.405.000		850.000
501	Beban upah dan gaji	586.000		⁶ 325.000		911.000			911.000		911.000
502	Beban pemeliharaan	412.500				412.500			412.500		412.500
503	Beban penerangan	535.000				535.000			535.000		535.000
504	Beban umum lain-lain	690.000				690.000			690.000		690.000
		23.405.000	23.405.000								
202	Gaji dan upah yang akan dibayar				⁶ 325.000						325.000
203	Utang pajak				⁷ 625.000						625.000
505	Beban perlengkapan salon			¹ 500.000		500.000			500.000		500.000
506	Beban perlengkapan kantor			² 350.000		350.000			350.000		350.000
507	Beban peny peral salon			³ 125.000		125.000			125.000		125.000
508	Beban peny peral kantor			⁴ 75.000		75.000			75.000		75.000
509	Beban peny gedung salon			⁵ 190.000		190.000			190.000		190.000
121.1	Akum peny peral salon			³ 125.000					125.000		125.000
122.1	Akum peny peral kantor			⁴ 75.000					75.000		75.000
123.1	Akum peny gedung			⁵ 190.000					190.000		190.000
631	Pajak penghasilan			⁷ 625.000		625.000			625.000		625.000
				2.190.000	2.190.000	24.745.000	24.745.000	24.745.000	4.413.500	7.405.000	20.331.500
	Saldo Laba								2.991.500		2.991.500
									7.405.000		20.331.500

4. Jurnal Penutup

Berikutnya kita akan membahas pengertian dan fungsi jurnal penutup serta cara menyusun jurnal penutup.

a. Pengertian Jurnal Penutup

Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup akun-akun sementara sehingga nilainya menjadi nol. Yang tergolong akun sementara adalah akun pendapatan, beban dan akun prive. Data akun pendapatan dan beban terdapat pada kertas kerja kolom laba rugi, selanjutnya dalam proses jurnal penutup yang merupakan perkiraan lawan atau akun tandingannya adalah akun ikhtisar laba rugi. Adapun data akun prive terdapat pada kertas kerja kolom neraca dan akun tandingannya adalah akun modal/ekuitas.

Mengapa akun-akun sementara harus ditutup pada akhir periode akuntansi? Karena memang akun-akun tersebut bersifat sementara yang berfungsi menampung perubahan-perubahan akun modal selama satu periode akuntansi. Karena bersifat sementara maka di akhir periode akuntansi, akun-akun sementara harus ditutup. Pada saat penutupan, semua perubahan akun modal yang telah ditampung akun sementara akan dilimpahkan ke akun modal sehingga jumlah modal bisa mengalami perubahan.

Setelah dibuat jurnal penutup dan diposting ke akun masing-masing dalam buku besar yang bersangkutan, maka akun-akun tersebut akan memperlihatkan saldo nihil atau nol.

b. Fungsi Jurnal Penutup

Fungsi jurnal penutup adalah untuk menutup akun-akun sementara agar bersaldo nol, sehingga dalam menyusun neraca saldo setelah penutupan hanyalah akun-akun riil saja yang tampak.

Akun-akun yang memerlukan jurnal penutup adalah:

- 1) Akun pendapatan
- 2) Akun beban
- 3) Akun prive
- 4) Ikhtisar laba rugi

c. Menyusun Jurnal Penutup

Jurnal penutup disusun dengan cara berikut:

- 1) Memindahkan Akun Pendapatan

Semua akun pendapatan didebet sebesar saldo akhir masing-masing dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi sebesar jumlah semua akun pendapatan. Jurnal penutup yang dibuat sebagai berikut:

Pendapatan	RpXX	
Ikhtisar laba rugi		RpXX

2) Memindahkan Akun Beban

Semua akun beban dikredit sebesar saldo akhir masing-masing dan mendebet akun ikhtisar laba rugi dengan jumlah dari semua akun beban.

Ikhtisar laba rugi	RpXX	
Beban		RpXX

3) Memindahkan Akun Prive

Mengkredit akun prive dengan jumlah saldonya, dan mendebet akun modal dengan jumlah tersebut. Jurnal penutup ini sebagai berikut.

Modal	RpXX	
Prive		RpXX

4) Memindahkan Saldo Laba atau Rugi

Saldo laba diperoleh bila jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah beban. Saldo laba atau laba bersih dipindahkan dengan mendebet akun ikhtisar laba rugi sebesar jumlah saldo laba (laba bersih) dan mengkredit akun ekuitas dengan jumlah tersebut. Jurnal penutupnya adalah sebagai berikut.

Ikhtisar laba rugi	RpXX	
Modal		RpXX

Saldo rugi diperoleh bila jumlah pendapatan lebih kecil dibanding jumlah beban. Saldo rugi (rugi bersih) dipindahkan dengan mengkredit akun ikhtisar laba rugi sebesar jumlah saldo rugi (rugi bersih) dan mendebet akun modal (ekuitas) dengan jumlah tersebut. Jurnal penutup yang dibuat adalah, sebagai berikut:

Modal	RpXX	
Ikhtisar laba rugi		RpXX

Untuk mempelajari akun-akun yang memerlukan jurnal penutup dan cara penyusunannya, perhatikan kolom laba rugi pada kertas kerja Salon Tiara. Setelah dipelajari saksama, akan diperoleh jurnal penutup sebagai berikut:

Salon Tiara
Jurnal Penutup
Per 31 Desember 2004

Tanggal		Nama Akun/Keterangan	Ref	Debit	Kredit
Des	31	Pendapatan salon	401	7,405,000	
		Ikhtisar laba rugi			7,405,000
		(penutupan akun pendapatan)			
	31	Ikhtisar laba rugi	331	4,413,500	
		Beban upah dan gaji	501		911,000
		Beban pemeliharaan	502		412,500
		Beban penerangan	503		535,000
		Beban umum lain-lain	504		690,000
		Beban perlengkapan salon	505		500,000
		Beban perlengkapan kantor	506		350,000
		Beban peny.peral salon	507		125,000
		Beban peny.inven. kantor	508		75,000
		Beban peny.gedung salon	509		190,000
		Pajak penghasilan	631		625,000
		(penutupan akun beban)			
	31	Ikhtisar laba rugi	331	2,991,500	
		Modal Anita			2,991,500
		(penutupan akun ikhtisar laba/rugi)			
	31	Modal Anita	301	850,000	
		Prive Anita	302		850,000
		Jumlah		7,244,000	7,244,000

Bila jurnal-jurnal penutup tersebut diposting ke akun masing-masing ke dalam buku besar maka semua akun sementara akan bersaldo nol. Demikian pula, akun ikhtisar laba rugi akan bersaldo nol. Adapun akun modal akan bertambah atau berkurang sesuai jumlah debit dan kredit yang memengaruhi modal.

Berikut ini buku besar setelah ayat penyesuaian dan ayat penutupan Salon Tiara.

Kas

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2004						
Des 31	Neraca saldo				3,226,500	

Piutang Usaha

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2004						
Des 31	Neraca saldo				3,500,000	

Perlengkapan Salon

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2004						
Des 31	Neraca saldo				1,300,000	
Des 31	Penyesuaian			500,000	800,000	

Perlengkapan kantor

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2004						
Des 31	Neraca saldo				805,000	
Des 31	Penyesuaian			350,000	455,000	

Peralatan salon

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2004						
Des 31	Neraca saldo				1,100,000	

Inventaris kantor

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2004						
Des 31	Neraca saldo				900,000	

Gedung salon

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2004						
Des 31	Neraca saldo				9,500,000	

Utang usaha

Tanggal		Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
2004							
Des	31	Neraca saldo					2,500,000

Modal Anita

Tanggal		Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
2004	31	Neraca saldo					13,500,000
Des	31	Ayat penutup (saldo laba)			2,991,500		16,491,500
	31	Ayat Penutup (prive)		850,000			15,641,500

Prive Anita

Tanggal		Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
2004	31	Neraca saldo				850,00	
Des	31	Ayat penutup (ke modal)			850,00	0	

Pendapatan salon

Tanggal		Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
2004	31	Neraca saldo					7,405,000
Des	31	Ayat penutup		7,405,000		0	

Beban gaji&up ah

Tanggal		Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
2004	31	Neraca saldo				586,000	
Des	31	Ayat penutup			586,000	0	

Beban pemeliharaan

Tanggal		Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
2004	31	Neraca saldo				412,500	
Des	31	Ayat penutup			412,500	0	

Beban penerangan

Tanggal		Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
2004	31	Neraca saldo				535,000	
Des	31	Ayat penutup			535,000	0	

Beban lain-lain

Tanggal		Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
2004	31	Neraca saldo				690,000	
Des	31	Ayat penutup			690,000	0	

Gaji & upah yang akan dibayar

Tanggal		Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
2004							
Des	31	Ayat penyesuaian			325,000		325,000

Utang pajak

Tanggal		Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
2004							
Des	31	Ayat penyesuaian			625,000		625,000

Beban pemakaian perlengkapan salon

Tanggal		Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
2004	31	Ayat penyesuaian		500,000		500,000	
Des	31	Ayat penutup			500,000	0	

Beban perlengkapan kantor

Tanggal		Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
2004	31	Ayat penyesuaian		350,000		350,000	
Des	31	Ayat penutup			350,000	0	

Beban peny. peralatan salon

Tanggal		Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
2004	31	Ayat penyesuaian		125,000		125,000	
Des	31	Ayat penutup			125,000	0	

Beban peny. peralatan kantor

Tanggal		Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
2004	31	Ayat penyesuaian		75,000		75,000	
Des	31	Ayat penutup			75,000	0	

Beban peny. gedung salon

Tanggal		Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
2004	31	Ayat penyesuaian		190,000		190,000	
Des	31	Ayat penutup			190,000	0	

Akum. penyusutan peralatan salon

Tanggal		Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
2004	31	Ayat penyesuaian			125,000		125,000
Des							

Akum. penyusutan inventaris kantor

Tanggal		Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
2004	31	Ayat penyesuaian			75,000		75,000
Des							

Akum. penyusutan gedung salon

Tanggal		Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
2004							
Des	31	Ayat penyesuaian			190,000		190,000

Pajak penghasilan

Tanggal		Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
2004	31	Ayat penyesuaian		625,000		625,000	
Des	31	Ayat penutup			625,000	0	

Ikhtisar laba rugi

Tanggal		Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
2004	31	Menutup akun pendapatan			7,405,000		7,405,000
Des	31	Menutup akun beban		4,413,500			
	31	Ayat penutup		2,991,500			0

5. Neraca Saldo Setelah Penutupan

Neraca Saldo Setelah Penutupan merupakan neraca saldo yang disusun dari akun buku besar setelah jurnal penyesuaian dan jurnal penutup dibuat. Tujuan pembuatan neraca saldo setelah penutupan adalah untuk memastikan apakah buku besar telah seimbang sebagai dasar untuk memulai pencatatan data akuntansi periode berikutnya. Perlu diingat bahwa neraca saldo setelah penutupan ini hanya terdiri dari akun riil seperti aktiva, kewajiban dan ekuitas (modal). Untuk akun-akun sementara (pendapatan, beban, dan prive) telah ditutup dan bersaldo nol, sehingga tidak perlu dicantumkan dalam neraca saldo setelah penutupan.

Neraca saldo setelah penutupan ini dapat disusun dengan mengambil saldo-saldo akun dalam buku besar setelah ayat penyesuaian dan ayat penutup dibukukan, atau dapat juga diambil dari kertas kerja kolom neraca.

Setelah kita membuat jurnal penutupan, langkah berikutnya adalah memindahbukukannya ke dalam buku besar bersangkutan. Setelah dicatat di buku besar, maka akun tersebut akan menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Akun terbuka atau akun neraca.
- b. Akun tak bersaldo atau akun sementara.

Neraca saldo setelah penutupan dibuat dengan mencantumkan saldo-saldo akun terbuka (akun neraca). Jadi neraca sisa setelah penutupan sama dengan angka-angka yang terdapat pada akun terbuka dan merupakan saldo awal tiap akun pada periode berikutnya.

Salon Tiara Neraca Saldo Setelah Penutupan Per 31 Desember 2004

No. Akun	Nama Akun	Debet	Kredit
101	Kas	3,226,500	
102	Piutang usaha	3,500,000	
103	Perlengkapan salon	800,000	
104	Perlengkapan kantor	455,000	
121	Peralatan salon	1,100,000	
121	Akum.Peny.Peral. salon		125,000
122	Inventaris kantor	900,000	
122	Akum.Peny.Peral.kantor		75,000
123	Gedung salon	9,500,000	
123	Akum.Peny.gedung salon		190,000
201	Utang usaha		2,500,000
202	Gaji & upah yg akan dibayar		325,000
203	Utang pajak		625,000
301	Modal Anita		15,641,500
		19,481,500	19,481,500

6. Jurnal Pembalik

Setelah kita mempelajari neraca sisa/saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan, berikut ini kita akan membahas mengenai jurnal pembalik.

a. Pengertian dan Tujuan Pembuatan Jurnal Pembalik

Apa itu jurnal pembalik? Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu yang telah dibuat pada periode sebelumnya. Tujuan pembuatan jurnal pembalik di antaranya adalah:

- 1) Menjaga konsistensi pencatatan dengan cara menghilangkan akun-akun tertentu yang timbul akibat pembuatan jurnal penyesuaian;
- 2) Menjaga ketepatan penghitungan 'pendapatan' dan 'beban' pada tahun yang sedang berjalan agar benar-benar sesuai dengan kenyataan sesungguhnya;
- 3) Menjaga agar tidak terjadi pencatatan berulang.

Pembuatan jurnal pembalik bukan merupakan keharusan, artinya boleh dilakukan boleh tidak. Bila perusahaan tidak membuat jurnal pembalik maka perusahaan itu harus berhati-hati dalam menjurnal transaksi-transaksi yang berkaitan dengan akun-akun jurnal penyesuaian tertentu agar kesalahan-kesalahan yang telah disebut tidak terjadi.

Jurnal penyesuaian yang perlu dibuatkan jurnal pembalik adalah:

- 1) Beban yang masih harus dibayar (*accrued expenses*);
- 2) Pendapatan yang masih harus diterima (*accrued revenue*);
- 3) Beban dibayar di muka (*prepaid expenses*); khusus bila beban tersebut pada saat pembayaran dicatat sebagai beban bukan sebagai harta;
- 4) Pendapatan diterima di muka (*deferred revenue*); khusus bila pendapatan tersebut pada saat penerimaan dicatat sebagai pendapatan bukan sebagai kewajiban.

Berikut kita akan membahas satu per satu keempat hal tersebut.

- 1) Beban yang masih harus dibayar

Contoh:

Perusahaan membayar gaji dan upah karyawan setiap hari Sabtu. Besar gaji dan upah seluruh karyawan per Minggu (6 hari kerja) adalah Rp6.000.000,-. Karena tanggal 31 Desember 2005 (sebagai hari tutup buku) jatuh pada hari Kamis maka perusahaan harus membuat jurnal penyesuaian untuk mengakui adanya beban gaji dan upah untuk hari Senin sampai dengan Kamis sebesar Rp4.000.000,- (gaji dan upah per hari Rp1.000.000,-). Jurnal penyesuaian yang dibuat adalah:

Desember 31	Beban gaji dan upah	Rp4.000.000,-
	Gaji dan upah yang akan dibayar (penyesuaian)	Rp4.000.000,-

Jurnal pembalik yang dibuat untuk membalik jurnal penyesuaian tersebut adalah:

Januari 2006	Gaji dan upah yang akan dibayar	Rp4.000.000,-
	Beban gaji dan upah (pembalik)	Rp4.000.000,-

Pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2006 perusahaan membayar gaji dan upah sebesar Rp5.000.000,- (karena tanggal 1 Januari, karyawan libur). Jurnal yang dibuat saat pembayaran gaji dan upah adalah:

Januari 2006	Biaya gaji dan upah	Rp5.000.000,-
	Kas	Rp5.000.000,-

Walaupun pada hari Sabtu perusahaan membayar gaji dan upah Rp5.000.000,-, sebenarnya beban gaji dan upah untuk periode yang berjalan (tahun 2006) hanyalah sebesar Rp1.000.000,-.

Bila jurnal-jurnal tersebut diposting ke buku besar hasilnya tampak, sebagai berikut:

Beban gaji dan upah

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
Des 31	Penyesuaian		Rp4.000.000,00	--	Rp4.000.000,00	--
	Penutupan		--	Rp4.000.000,00	Rp0	--
Jan 2	Pembalik		--	Rp4.000.000,00	--	Rp4.000.000,00
	Pembayaran		Rp5.000.000,00	--	Rp1.000.000,00	--

(Keterangan: Di akhir periode, akun beban mengalami penutupan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada materi jurnal penutup)

Dengan bantuan jurnal pembalik maka beban gaji dan upah untuk tahun 2006 tetap sebesar Rp1.000.000,- seperti tampak pada saldo akun beban gaji dan upah. Hal seperti ini sesuai dengan tujuan kedua pembuatan jurnal pembalik yakni untuk menjaga ketepatan perhitungan pendapatan dan beban pada tahun yang sedang berjalan. Sekarang mari kita perhatikan posting jurnal-jurnal di atas ke akun gaji dan upah yang akan dibayar (utang gaji dan upah), seperti yang tampak berikut:

Gaji dan upah yang akan dibayar

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
Des	31	Penyesuaian	--	Rp4.000.000,00	--	Rp4.000.000,00
	31	Pembalik	Rp4.000.000,00	--	Rp0	--

Dengan adanya jurnal pembalik akun 'gaji dan upah yang akan dibayar' (utang gaji dan upah) akan bersaldo nol, karena utang gaji dan upah sudah pasti dibayar pada hari Sabtu 2 Januari 2006 dan saat pembayaran perusahaan juga tidak menggunakan akun tersebut dalam membuat jurnal pembayarannya. Hal ini berbeda dengan bila perusahaan tidak membuat jurnal pembalik di awal tahun 2006. Bila tidak membuat jurnal pembalik maka jurnal yang dibuat saat pembayaran gaji tanggal 2 Januari 2006 adalah, sebagai berikut.

Januari 2	Biaya gaji dan upah	Rp1.000.000,-
	Gaji dan upah yang akan dibayar	Rp4.000.000,-
	Kas	Rp5.000.000,-

Bila jurnal ini diposting ke buku besar akan tampak, sebagai berikut.

Beban gaji dan upah

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
Des	31	Penyesuaian	Rp4.000.000,00	--	Rp4.000.000,00	--
	31	Penutupan	--	Rp4.000.000,00	Rp0	--
Jan	2	Pembayaran	Rp1.000.000,00	--	Rp1.000.000,00	--

Gaji dan upah yang akan dibayar

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
Des	31	Penyesuaian	Rp4.000.000,00	--	Rp4.000.000,00	--
Jan	2	Pembayaran	--	Rp4.000.000,00	Rp0	--

Dari yang sudah diuraikan tampak bahwa dengan membuat jurnal pembalik atau tidak membuat jurnal pembalik, saldo akun 'Beban gaji dan upah' dan 'Gaji dan upah yang akan dibayar' jumlahnya sama, yakni masing-masing Rp1.000.000,- untuk saldo beban gaji dan upah dan Rp0,- untuk saldo gaji dan upah yang akan dibayar.

- 2) Pendapatan yang masih harus diterima

Contoh:

Perusahaan menyewakan satu ruangan dengan sewa bulanan. Sewa diterima tiap tanggal 10 sebesar Rp900.000,-. Ini berarti pada bulan Desember perusahaan mempunyai tagihan selama 20 hari, yaitu mulai tanggal 11 sampai dengan 31 Desember

sebesar Rp600.000,-. Pada akhir periode (akhir tahun) dibuat ayat penyesuaian, sebagai berikut.

Desember 31	Sewa yang akan diterima	Rp600.000,-
	Pendapatan sewa	Rp600.000,-

Jurnal pembalik yang harus dibuat untuk membalik jurnal penyesuaian tersebut adalah:

Januari 2	Pendapatan sewa	Rp600.000,-
	Sewa yang akan diterima	Rp600.000,-

Pada tanggal 10 Januari 2006 perusahaan menerima sewa sebesar Rp900.000,-. Jurnal umum yang dibuat adalah:

Januari 10	Kas	Rp900.000,-
	Pendapatan sewa	Rp900.000,-

Bila jurnal-jurnal tersebut diposting ke buku besar hasilnya tampak, sebagai berikut:

Sewa yang akan diterima

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
Des 31	Penyesuaian		Rp 600.000,00	--	Rp600.000,00	--
Jan 2	Pembalik		--	Rp600.000,00	Rp0	--

Pendapatan sewa

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
Des 31	Penyesuaian		--	Rp600.000,00	--	Rp600.000,00
	Penutupan		Rp 600.000,00	--	Rp0	--
Jan 2	Pembalik		Rp600.000,00	--	Rp600.000,00	--
	Penerimaan		--	Rp900.000,00	Rp300.000,00	--

Jadi, dengan adanya jurnal pembalik, akun 'pendapatan sewa' pada saat menerima pendapatan sewa akan bersaldo Rp300.000,- dan ini sesuai dengan kenyataan sesungguhnya bahwa pendapatan sewa yang menjadi hak tahun 2006 hanya sebesar Rp300.000,- (sebab yang Rp600.000,- sudah diakui sebagai hak tahun 2005).

- 3) Beban dibayar di muka; khusus bila beban tersebut pada saat pembayaran dicatat sebagai 'beban' bukan sebagai 'harta'.

Contoh:

Perusahaan membayar premi asuransi untuk satu tahun pada tanggal 1 Agustus 2005 sebesar Rp1.200.000,-. Pada saat pembayaran perusahaan membuat jurnal umum, sebagai berikut:

akun 'asuransi dibayar di muka', serta memunculkan kembali akun awal yaitu akun 'beban asuransi'.

- 4) Pendapatan diterima di muka; khusus bila pendapatan tersebut pada saat penerimaan dicatat sebagai pendapatan bukan sebagai kewajiban.

Contoh:

Pada tanggal 1 Juli 2005 diterima pendapatan sewa toko untuk 2 tahun sebesar Rp2.400.000,-. Pada 1 Juli 2005 penerimaan pendapatan di jurnal perusahaan, sebagai berikut:

Juli 1	Kas	Rp2.400.000,-
	Pendapatan sewa	Rp2.400.000,-

Pada akhir Desember 2005 perusahaan membuat jurnal penyesuaian, karena pendapatan sewa sebesar Rp2.400.000,- yang telah dicatat pada 1 Juli 2005 hanya sebagian yang merupakan pendapatan tahun 2005, yakni sebesar Rp600.000,-. Jurnal penyesuaian yang dibuat adalah:

Desember 31	Pendapatan sewa	Rp1.800.000,-
	Sewa diterima di muka	Rp1.800.000,-

Dengan adanya jurnal penyesuaian ini, pendapatan sewa pada 31 Desember 2005 bersaldo Rp600.000,- sesuai dengan hak tahun 2005.

Selanjutnya dibuat jurnal pembalik, sebagai berikut:

Januari 2	Sewa diterima di muka	Rp1.800.000,-
	Pendapatan sewa	Rp1.800.000,-

Bila jurnal-jurnal tersebut diposting ke buku besar, hasilnya tampak sebagai berikut.

Pendapatan sewa

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
Jul 1	Penerimaan		--	Rp2.400.000,00	--	Rp2.400.000,00
Des 31	Penyesuaian		Rp1.800.000,00	--	--	Rp600.000,00
	Perutupan		Rp600.000,00	--	--	Rp0
Jan 2	Pembalik		--	Rp1.800.000,00	--	Rp1.800.000,00

Sewa diterima di muka

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
Des 31	Penyesuaian		--	Rp1.800.000,00	--	Rp1.800.000,00
Jan 2	Pembalik		Rp1.800.000,00	--	--	Rp0

Dengan adanya jurnal pembalik maka akun 'sewa diterima di muka' akan bersaldo nol dan akun 'pendapatan sewa' muncul lagi sebesar Rp1.800.000,00 setelah sebelumnya bersaldo nol karena adanya jurnal penutup. Hal seperti ini sesuai dengan tujuan pembuatan jurnal pembalik yang pertama, seperti yang telah diuraikan di atas.

C. Tahap Pelaporan Keuangan

Tahap pelaporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi (siklus akuntansi). Laporan keuangan diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kinerja keuangan. Proses penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan cara mengambil data dari kertas kerja atau neraca lajur.

1. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan seperti yang tercantum dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) antara lain sebagai berikut.

a. Menyediakan Informasi Posisi Keuangan Perusahaan

Informasi posisi keuangan perusahaan ini terutama disediakan dalam neraca. Informasi posisi keuangan di masa lalu sangat berguna untuk meramal kemampuan perusahaan dalam menghasilkan aktiva lancar (misalnya, kas atau yang setara kas) meramalkan besar kecilnya pinjaman di masa depan dan bagaimana menghasilkan laba bersih serta arus kas di masa depan dengan mendistribusikan kepada mereka yang memiliki hak dalam perusahaan.

Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang dikendalikan struktur keuangan, misalnya:

- 1) kemampuan perusahaan memenuhi utang jangka pendek (likuiditas),
- 2) kemampuan perusahaan memenuhi utang jangka panjang (solvabilitas),
- 3) kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan

Informasi likuiditas merupakan ketersediaan kas jangka pendek di masa depan setelah memperhitungkan komitmen yang ada. Informasi solvabilitas merupakan ketersediaan kas jangka panjang untuk memenuhi komitmen pada saat jatuh tempo.

b. Menyediakan Informasi Kinerja Perusahaan

Informasi kinerja perusahaan bermanfaat untuk memprediksikan kepastian perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Selain itu, bermanfaat

juga untuk merumuskan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya. Informasi kinerja perusahaan terutama disediakan dalam laporan laba rugi.

c. Menyediakan Informasi Perubahan Keuangan Perusahaan

Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan di antaranya dapat dilihat pada laporan aliran kas. Laporan ini menyajikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar (cash flow) pada suatu periode. Informasi perubahan posisi keuangan berguna untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan, dan operasi selama suatu periode.

2. Jenis Laporan Keuangan

Ada beberapa jenis laporan keuangan, di antaranya sebagai berikut:

- a. Laporan laba/rugi (*income statement*)
- b. Laporan perubahan modal (*capital statement*)
- c. Neraca (*statement of balance/balance sheet*)
- d. Laporan arus kas

Dalam membuat keempat laporan keuangan tersebut di bagian paling atas dari laporan harus selalu mencantumkan judul laporan yang terdiri atas nama perusahaan, jenis laporan keuangan, dan periode akuntansi. Berikut ini kita akan membahas satu per satu dengan menggunakan kertas kerja Salon Tiara sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Kertas kerja Salon Tiara bisa dilihat di awal bab ini.

a. Laporan Laba/Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan rincian pendapatan dan beban dari suatu perusahaan selama satu periode akuntansi. Penyajian laporan laba rugi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *single step* dan *multiple step*.

1) *Single Step*/Langsung

Penyajian laporan laba rugi dengan cara *single step* dilakukan dengan cara semua pendapatan dijumlahkan menjadi satu jumlah dan semua beban dijumlahkan dalam satu jumlah, kemudian dicari selisihnya untuk mendapatkan saldo *laba* atau saldo *rugi*.

2) *Multiple Step*/Bertahap

Untuk bentuk *multiple step* pendapatan dipisahkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

- a) pendapatan operasional/usaha/pokok;
- b) pendapatan nonoperasional/luar usaha/sampingan.

Demikian juga untuk beban dipisahkan menjadi dua:

- a) beban operasional/usaha/pokok;
- b) beban nonoperasional/luar usaha/sampingan.

Penyajian laporan bentuk *multiple step* dilakukan dengan urutan, sebagai berikut:

- a) pendapatan operasional/usaha/pokok;
- b) beban operasional/usaha/pokok;
- c) pendapatan nonoperasional/luar usaha/sampingan;
- d) beban nonoperasional/luar usaha/sampingan.

Selisih antara pendapatan operasional dengan beban operasional merupakan jumlah *laba usaha* atau *rugi usaha*. Adapun laba usaha atau rugi usaha ditambah atau dikurangi dengan pendapatan/beban nonoperasional neto akan menghasilkan jumlah laba bersih atau rugi bersih.

Berikut ini disajikan laporan laba/rugi salon Tiara dengan bentuk *single step*.

Salon TIARA Laporan Laba-Rugi Per 31 Desember 2004		
Pendapatan		
Pendapatan salon		Rp7.405.000,-
Beban		
Beban upah dan gaji	Rp911.000,-	
Beban pemeliharaan	Rp412.500,-	
Beban penerangan	Rp535.000,-	
Beban umum lain-lain	Rp690.000,-	
Beban Perl. salon	Rp500.000,-	
Beban perl kantor	Rp350.000,-	
Beban peny. peral. salon	Rp125.000,-	
Beban peny. peral. Kantor	Rp75.000,-	
Beban peny gedung salon	Rp190.000,-	
Beban pajak	Rp625.000,-	
Total beban		Rp4.413.500,-
Laba bersih		Rp2.991.500,-

b. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menyajikan tentang perubahan modal selama satu periode akuntansi. Perubahan modal disebabkan perusahaan mengalami laba atau rugi (berasal dari laporan laba rugi), serta adanya pengambilan pribadi (*prive*) pemilik maupun setoran modal. Laporan perubahan modal dibuat oleh perusahaan yang bentuk badannya perseorangan, rma, dan komanditer. Tetapi bila bentuk badannya berupa perseroan terbatas, tidak membuat laporan perubahan modal tetapi membuat laporan yang disebut 'Laporan laba yang ditahan'. Mengapa demikian? Karena PT modalnya berbentuk saham dan tidak boleh berubah selama akta pendirian tidak ada perubahan.

Laporan perubahan modal terdiri atas unsur-unsur, sebagai berikut:

- 1) modal awal periode akuntansi
- 2) laba bersih atau rugi bersih (berasal dari laporan L/R)
- 3) setoran modal (bila ada)
- 4) pengambilan pribadi (*prive*) pemilik
- 5) modal akhir periode akuntansi

Adapun laporan laba yang ditahan terdiri atas unsur-unsur, sebagai berikut:

- 1) laba yang ditahan awal periode akuntansi
- 2) laba bersih atau rugi bersih (berasal dari laporan L/R)
- 3) dividen yang dibagikan pada periode berjalan
- 4) laba yang ditahan akhir periode akuntansi

Berikut ini disajikan laporan perubahan modal salon Tiara.

Salon TIARA Laporan Perubahan Modal Per 31 Desember 2004		
Modal Anita		Rp13.500.000,-
Laba Bersih	Rp2.991.500,-	
Prive Anita	Rp850.000,-	
Tambahkan modal	—————	Rp2.141.500,-
Modal akhir per 31 Agustus 2004		Rp15.641.500,-

Dan, berikut ini disajikan pula contoh "Laporan laba yang ditahan" dari PT Adira Perdana.

PT Adira Perdana
Laporan Laba yang Ditahan
Per 31 Desember 2004

Laba yang ditahan per 1 Januari 2004		Rp15.200.000,-
Laba bersih tahun 2004	Rp 40.500.000,-	
Dividen tahun 2004	<u>Rp20.500.000,-</u>	
Tambahan laba yang ditahan		Rp20.000.000,- +
Laba yang ditahan per 31 Desember 2004		Rp35.200.000,-

c. Neraca

Neraca adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan yang terdiri atas aktiva, utang, dan ekuitas (modal) suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi.

Untuk menyajikannya, laporan keuangan ada dua bentuk, sebagai berikut:

- 1) Bentuk laporan (*report form*) atau bentuk *stafel*; Tersusun secara vertikal dengan urutan:
 - a) harta (disajikan terlebih dahulu sampai selesai)
 - b) utang/kewajiban
 - c) modal
- 2) Bentuk akun (*account form*); Tersusun secara horizontal/ke samping dengan pembagian:
 - a) sebelah debit: harta
 - b) sebelah kredit: utang/kewajiban dan modal

Hal yang perlu diingat dalam menyusun harta, utang, dan modal harus diurutkan menurut likuiditasnya (tingkat kelancaran). Berikut ini disajikan neraca dari Salon Tiara dengan bentuk akun (ke samping)

Salon TIARA
Laporan Neraca
Per 31 Desember 2004

Aktiva		Pasiva	
Aktiva lancar			
Kas	Rp3.226.500,00	Utang Usaha	Rp2.500.000,-
Piutang usaha	Rp3.500.000,00	Utang Pajak	Rp625.000,-
Perl. salon	Rp800.000,00	Gaji&upah yg msh hrs dibyr	Rp325.000,-
Perl. kantor	<u>Rp455.000,00</u>	Total utang	Rp3.450.000,-
Total aktiva lancar	<u>Rp7.981.500,00</u>		

Aktiva tetap			
Peralatan salon	Rp1.100.000,-		
Akum peny. perl salon	Rp125.000,-		
		Rp975.000,-	
Peralatan kantor	Rp900.000,-		
Akum peny. peral. kantor	Rp75.000,-		
		Rp825.000,-	
Gedung salon	Rp9.500.000,-		Modal Anita
Akum peny. gedung	Rp190.000,-		
		Rp9.310.000,-	
Total aktiva tetap		Rp11.110.000,-	
Total aktiva	Rp19.091.500,-		Total pasiva
			Rp19.091.500,-

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus keluar di suatu perusahaan selama satu periode akuntansi. Aktivitas-aktivitas arus kas dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, sebagai berikut.

- 1) Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Contoh: penerimaan kas dari penjualan barang dagangan kepada pelanggan.
- 2) Aktivitas investasi adalah aktivitas untuk memperoleh dan melepas aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Contoh: penerimaan kas dari penjualan gedung atau pengeluaran kas untuk membeli mesin.
- 3) Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi ekuitas atau modal dan pinjaman perusahaan. Contoh: penerimaan kas dari peminjaman dan penerimaan kas dari tambahan modal.

Laporan arus kas dapat disusun dengan dua metode, yaitu:

- 1) Metode langsung; Penyusunan laporan arus kas dengan metode langsung dilakukan dengan cara mengidentifikasi penambahan dan pengurangan kas yang terjadi dalam aktivitas perusahaan. Penggunaan metode langsung lebih mudah dipahami dan mampu memberi informasi dan keterangan lebih banyak untuk dipakai dalam pengambilan kebijakan perusahaan.
- 2) Metode tidak langsung; Penyusunan laporan arus kas dengan metode tidak langsung dilakukan dengan cara menunjukkan perhitungan yang dimulai antara laba bersih *arus kas dari kegiatan operasi* kemudian dengan *arus kas dari kegiatan investasi* dan *arus kas dari kegiatan pendanaan*.

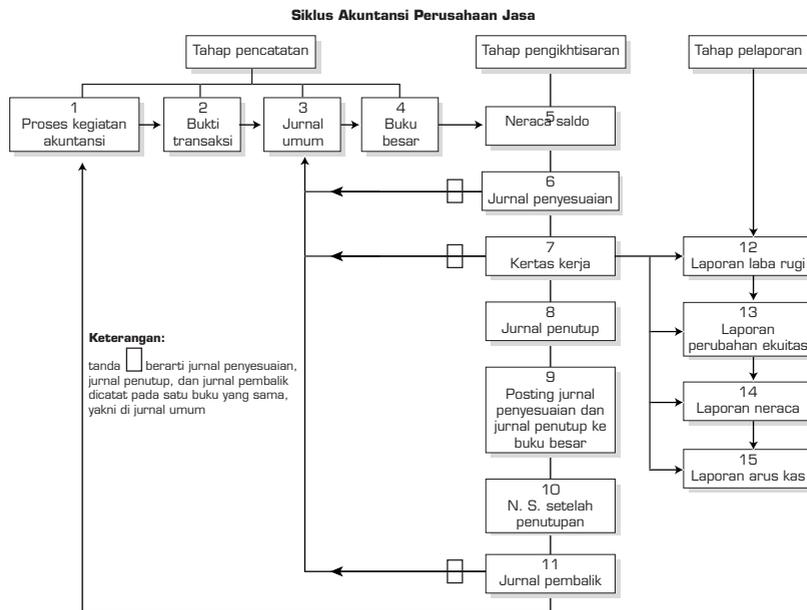
Dalam menyusun laporan arus kas, saldo akhir pada laporan arus kas harus sama dengan jumlah kas di neraca. Berikut ini disajikan laporan arus kas dari Salon Tiara dengan menggunakan metode langsung (untuk contoh laporan arus kas dengan metode tidak langsung dapat dilihat di bab 8). Untuk menyusun laporan arus kas dari Salon Tiara diketahui data tambahan yang terjadi selama tahun 2004, sebagai berikut.

- 1) Saldo kas awal 2004 Rp2.394.000,-
- 2) Pendapatan salon yang diterima per kas Rp4.206.000,-
- 3) Beban-beban yang dibayar secara tunai (kas) adalah:
 - a) beban upah dan gaji Rp586.000,-
 - b) beban pemeliharaan Rp412.500,-
 - c) beban penerangan Rp535.000,-
 - d) beban umum dan lain-lain Rp690.000,-
- 4) Pembelian peralatan kantor secara tunai Rp700.000,-
- 5) Pengambilan prive Rp850.000,-
- 6) Pembelian peralatan salon secara tunai Rp600.000,-
- 7) Setoran modal tambahan Rp1.000.000,-

Berdasarkan data tersebut, laporan arus kas salon Tiara adalah sebagai berikut:

Salon Tiara		
Laporan Arus Kas		
Per 31 Desember 2004		
a. Arus kas dari aktivitas operasi		
Penerimaan (pendapatan salon)		Rp4.206.000,-
Arus kas keluar:		
Beban upah dan gaji	Rp586.000,-	
Beban pemeliharaan	Rp412.500,-	
Beban penerangan	Rp535.000,-	
Beban umum lain-lain	Rp690.000,-	+
Total beban		<u>Rp2.223.500,-</u>
Arus kas masuk dari aktivitas operasi		Rp1.982.500,-
b. Arus kas dari aktivitas investasi		
Pembelian peralatan salon	Rp600.000,-	
Pembelian peralatan kantor	Rp700.000,-	+
Arus kas keluar dari aktivitas investasi		(Rp1.300.000,-)
c. Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Setoran modal tambahan	Rp1.000.000,-	
Penarikan prive	Rp850.000,-	
Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan		<u>Rp150.000,-</u> +
Arus kas masuk bersih		Rp832.500,-
d. Saldo kas awal (1 Januari 2004)		<u>Rp2.394.000,-</u> +
e. Saldo kas akhir (31 Desember 2004)		Rp3.226.500,-

Dari semua penjelasan tentang tahap-tahap pada siklus akuntansi perusahaan jasa yang sudah diuraikan di atas, dapat dibuatkan skemanya, sebagai berikut:



Gambar 9.2 Skema siklus akuntansi perusahaan jasa

RANGKUMAN

1. Tahap siklus akuntansi yaitu tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran dan tahap pelaporan.
2. Tahap pencatatan terdiri dari penerimaan bukti transaksi, analisa bukti transaksi, pencatatan dalam jurnal (buku harian) lalu posting ke dalam buku besar.
3. Macam bukti transaksi antara lain faktur, kuitansi, nota kontan, nota kredit, nota debit, bukti memo.
4. Jurnal adalah daftar yang merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama, yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dengan menyebutkan akun yang di debit maupun yang di kredit.
5. Fungsi jurnal terdiri dari fungsi historis, fungsi mencatat, fungsi analisis, fungsi instruktif, dan fungsi informatif.
6. Bentuk jurnal terdiri dari jurnal umum dan jurnal khusus.
7. Buku besar (general ledger) adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal.
8. Akun (rekening) atau perkiraan adalah sebuah daftar atau tempat untuk mengelompokkan transaksi-transaksi yang sejenis.
9. Bentuk buku besar terdiri dari bentuk T, bentuk 2 kolom, bentuk 3 kolom, dan 4 bentuk kolom.
10. Posting artinya memindahbukukan dari jurnal ke buku besar.
11. Neraca Saldo adalah sebuah daftar yang memuat saldo-saldo akhir dari setiap akun buku besar, baik sebelah debit maupun sebelah kredit.
12. Data-data neraca saldo diperoleh dari akun-akun buku besar dan merupakan tahap awal pengikhtisaran siklus akuntansi perusahaan jasa.

13. Jurnal Penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan neraca saldo agar mampu menggambarkan kenyataan yang sesungguhnya.
14. Kertas Kerja adalah suatu daftar yang terbagi berkolom-kolom untuk menghimpun data-data akuntansi yang diperlukan dalam rangka mempermudah penyusunan laporan keuangan.
15. Bentuk kertas kerja: 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom.
16. Jurnal penutup adalah jurnal yang digunakan untuk menolkan akun-akun sementara misalnya prive, beban, dan pendapatan.
17. Posting jurnal penyesuaian dan jurnal penutup ke buku besar bertujuan untuk memperjelas akun-akun yang permanen (neraca) dan akun-akun sementara.
18. Neraca sisa setelah penutupan adalah neraca akhir pada periode pembukuan dan menjadi neraca awal pada periode berikutnya.
19. NS setelah penutupan datanya diambil dari saldo-saldo akun dalam buku besar, setelah ayat penyesuaian dan ayat penutup dibukukan.
20. Tujuan pembuatan NS setelah penutupan adalah memastikan bahwa buku besar telah seimbang sebelum memulai pencatatan periode berikutnya.
21. Jurnal pembalik artinya jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu yang dibuat pada periode sebelumnya.
22. Pada dasarnya ada 4 macam ayat penyesuaian yang perlu dilakukan jurnal pembalik yaitu:
 - Beban yang masih harus dibayar
 - Beban dibayar di muka
 - Pendapatan yang masih harus diterima
 - Pendapatan diterima di muka
23. Laporan keuangan adalah laporan yang memberikan informasi mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan. Ada empat jenis laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas.
24. Tujuan laporan keuangan menurut SAK adalah:
 - menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan perusahaan
 - menyediakan informasi kinerja perusahaan
 - menyediakan informasi perubahan posisi keuangan perusahaan

Kata Kunci

akumulasi penyusutan
aliran kas keluar
ayat jurnal penyesuaian
ayat penyesuaian
biaya yang masih harus dibayar
buku catatan akuntansi terakhir
buku pencatatan utama
laporan perubahan modal
neraca sisa yang disesuaikan
pendapatan yang masih harus diterima
persediaan awal
utang gaji

Evaluasi Akhir Bab

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Bukti pencatatan yang dibuat antarbagian dalam suatu perusahaan dinamakan . . .
A. faktur
B. kuitansi
C. nota
D. memo/bukti memo
E. nota kredit
2. Berikut ini termasuk bukti transaksi keuangan, *kecuali* . . .
A. faktur
B. kuitansi
C. jurnal
D. memo
E. nota kredit
3. Berikut ini yang merupakan fungsi jurnal, *kecuali* . . .
A. fungsi mencatat
B. fungsi historis
C. fungsi institusi
D. fungsi informatif
E. fungsi analisis
4. Neraca saldo bersumber dari . . .
A. kertas kerja
B. neraca sisa
C. saldo-saldo akun di buku besar
D. jurnal
E. neraca awal
5. Nota yang menyatakan bahwa perkiraan lawan telah didebet disebut
A. nota kredit
B. nota debit
C. nota kontan
D. nota lawan
E. kuitansi
6. Jurnal yang tujuannya untuk menyesuaikan rekening riil maupun nominal agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada suatu periode tertentu disebut . . .
A. jurnal khusus
B. jurnal penyesuaian
C. jurnal umum
D. jurnal penutup
E. jurnal pembalik

7. Bukti pembayaran yang dibut oleh pihak penerima yang disebut
- | | |
|----------------|-------------|
| A. nota kredit | D. kuitansi |
| B. bukti memo | E. cek |
| C. faktur | |
8. Pada tanggal 1 September 2005 diterima sewa Rp1.200.000,- dan dicatat pada sewa diterima di muka. Sewa tersebut adalah untuk masa setahun. Penyesuaian per 31 Desember 2005, adalah
- | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| A. Sewa diterima di muka | Rp1.200.000,- | |
| Pendapatan sewa | | Rp1.200.000,- |
| B. Kas | | Rp1.200.000,- |
| Pendapatan sewa | | Rp1.200.000,- |
| C. Pendapatan sewa | | Rp1.200.000,- |
| Kas | | Rp1.200.000,- |
| D. Pendapatan sewa | | Rp 900.000,- |
| Sewa diterima di muka | | Rp 900.000,- |
| E. Sewa diterima di muka | Rp 400.000,- | |
| Pendapatan sewa | | Rp 400.000,- |
9. Pada tanggal 31 Desember 2005 masih harus diterima sewa gedung bulan November dan Desember 2005 sejumlah Rp1.200.000,- (untuk dua bulan). Penyesuaian per 31 Desember 2005
- | | | |
|--------------------|--|---------------|
| A. Pendapatan sewa | | Rp1.200.000,- |
| Kas | | Rp1.200.000,- |
| B. Kas | | Rp1.200.000,- |
| Pendapatan | | Rp1.200.000,- |
| C. Piu tang sewa | | Rp1.200.000,- |
| Kas | | Rp1.200.000,- |
| D. Piutang sewa | | Rp1.200.000,- |
| Pendapatan sewa | | Rp1.200.000,- |
| E. Pendapatan sewa | | Rp1.200.000,- |
| Piutang sewa | | Rp1.200.000,- |
| Beban bunga | | Rp600.000,- |
10. Pada tanggal 1 Mei 2005 dibayar per kas premi asuransi Rp1.200.000,-satu tahun dan dicatat sebagai beban asuransi. Penyesuaiannya per 31 Desember 2005 adalah
- | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| A. Asuransi dibayar di muka | | Rp800.000,- |
| Kas | | Rp800.000,- |
| B. Beban asuransi | Rp800.000,- | |
| Kas | | Rp800.000,- |

C.	Beban asuransi	Rp800.000,-	
	Asuransi dibayar di muka	Rp800.000,-	
D.	Asuransi dibayar di muka	Rp400.000,-	
	Beban asuransi	Rp400.000,-	
E.	Beban asuransi	Rp400.000,-	
	Kas		Rp400.000,-

11. Pada tanggal 31 Desember 2005 masih harus dibayar gaji Rp500.000,-. Ayat penyeuaiannya yaitu
- | | | | |
|----|---------------|-------------|-------------|
| A. | Beban gaji | Rp500.000,- | |
| | Kas | | Rp500.000,- |
| B. | Utang gaji | Rp500.000,- | |
| | Kas | | Rp500.000,- |
| C. | Utang gaji | Rp500.000,- | |
| | Beban gaji | Rp500.000,- | |
| D. | Beban gaji | Rp500.000,- | |
| | Utang gaji | | Rp500.000,- |
| E. | Beban gaji | Rp500.000,- | |
| | Persekot gaji | | Rp500.000,- |
12. Daftar untuk mengelompokkan transaksi-transaksi yang sejenis disebut
- | | |
|---------------|-----------------|
| A. jurnal | D. neraca saldo |
| B. buku besar | E. posting |
| C. akun | |
13. Akun-akun yang ada pada neraca saldo tetapi tidak ada pada neraca saldo penutupan adalah
- | |
|------------------------------|
| A. Kas |
| B. Beban sewa |
| C. Piutang |
| D. Cadangan kerugian piutang |
| E. Pendapatan jasa |
14. Memindahbukukan jurnal ke dalam buku besar disebut
- | | |
|-------------------|---------------|
| A. jurnalning | D. pencatatan |
| B. entry | E. posting |
| C. pemindahbukuan | |
15. Di bawah ini yang bukan merupakan fungsi laporan rugi laba adalah

- A. untuk mengetahui besarnya rugi bersih perusahaan
 B. untuk mengetahui besarnya labasih perusahaan
 C. untuk mengetahui besar modal pada ahir periode
 D. untuk menganalisa rentabilitas perusahaan
 E. untuk mengetahui dan membandingkan perkembangan perusahaan
16. Modal akhir akan diperoleh jika modal awal
 A. ditambah laba bersih ditambah prive
 B. dikurang rugi bersih ditambah prive
 C. dikurangi laba bersih dikurangi prive
 D. ditambah prive dikurangi rugi bersih
 E. ditambah laba bersih ditambah prive
17. PT ANDIKA mempunyai transaksi sebagai berikut:
 Saldo laba ditahan awal periode Rp2.500.000,-
 Laba kotor Rp1.200.000,-
 Beban operasional Rp750.000,-
 Devident yang dibayar Rp500.000,-
 Besar laba yang ditahan pada akhir periode
 A. Rp3.800.000,- D. Rp3.600.000,-
 B. Rp4.200.000,- E. Rp2.450.000,-
 C. Rp3.200.000,-
18. Bentuk stafel dan skontro adalah bentuk penyusunan
 A. laporan laba rugi D. laporan perubahan modal
 B. laporan kas E. laporan arus kas
 C. neraca
19. Akun-akun yang digunakan:
 1. Akumulasi penyusutan peralatan 3. Goodwill
 2. Beban gaji 4. Surat-surat berharga
 5. Beban komisi
 Akun dari neraca saldo disesuaikan yang dipindahkan ke neraca adalah akun nomor
 A. 1, 2 dan 3 D. 3, 4 dan 5
 B. 1, 3 dan 5 E. 1, 3 dan 4
 C. 2, 3 dan 4
20. Data yang dikutip dari saldo akun PT PERMATA yang bergerak di usaha reparasi motor per 31 Desember 2004 sebagai berikut (dalam ribuan rupiah):

Pendapatan jasa	Rp15.500,-
Pendapatan bunga	Rp3.000,-
Beban administrasi	Rp3.000,-
Beban bunga	Rp1.200,-
Beban gaji	Rp7.000,-
Beban sewa	Rp4.000,-

Dari data di atas maka rugi atas usaha adalah . . .

- | | |
|--------------|--------------|
| A. Rp2.750,- | D. Rp2.700,- |
| B. Rp2.625,- | E. Rp2.600,- |
| C. Rp3.300,- | |

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat!

- Jelaskan langkah-langkah penyusunan kertas kerja!
- Apa kegunaan neraca saldo itu?
- Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika menyusun laporan laba-rugi, laporan perubahan modal dan neraca?
- Mengapa saldo laba ditempatkan pada neraca sebelah kredit! Jelaskan jawaban Anda!
- Apa yang dimaksud dengan laporan arus kas?
- Jelaskan ketentuan membuat ayat jurnal penutup!
- Apa tujuan dari dibuatnya ayat jurnal pembalik pada awal periode akuntansi?
- Apa yang dimaksud dengan pendapatan yang masih harus diterima? Berikan satu contohnya!
- ANITA membuka usaha binatu dengan nama "BINATU ANITA" sebagai modal pertama pada tanggal 1 April diinvestasikan uang tunai sebesar Rp10.000.000,-
 - April 1 : Dibeli tunai peralatan binatu seharga Rp500.000,-
 - April 4 : Dibeli perlengkapan binatu seharga Rp45.000,-
 - April 5 : Diterima pendapatan dari binatu sebesar Rp110.000,-
 - April 9 : Dibeli tunai peralatan binatu Rp20.000,-
 - April 10 : Diterima pendapatan dari binatu sebesar Rp80.000,-
 - April 19 : Dibayar gaji pembantu sebesar Rp100.000,-
 - April 20 : Diterima borongan binatu seharga Rp120.000,- dibayar secara kredit
 - April 23 : Dibayar biaya pemeliharaan binatu sebesar Rp75.000,-
 - April 25 : Dibeli secara kredit peralatan binatu seharga Rp215.000,-
 - April 28 : Diterima pendapatan binatu Rp150.000,-
 - April 29 : Dibeli perlengkapan binatu Rp25.000,-
 - April 30 : Dibayar gaji pembantu sebesar Rp50.000,-

Diminta:

- a. Mencatat transaksi-transaksi di atas ke dalam jurnal umum.
 - b. Posting jurnal umum ke buku besar.
 - c. Berdasarkan saldo-saldo buku besar, susunlah neraca saldo per 31 Desember 2005.
10. Pada akhir periode akuntansi 31 Desember 2005, usaha bengkel Anugerah Bandung menyusun Neraca Saldo seperti di bawah ini:

**USAHA BENGKEL ANUGERAH
NERACA SALDO
PER 31 DESEMBER 2005**

NO	NAMA AKUN	NERACA SALDO	
		DEBET	KREDIT
101	Kas	5.000.000,-	
102	Piutang	8.750.000,-	
103	Perl. bengkel	1.750.000,-	
104	Perl. kantor	400.000,-	
105	Asuransi dib. di muka	970.000,-	
106	Sewa dib. di muka	850.000,-	
107	Iklan dib. di muka	610.000,-	
121	Peralatan bengkel	15.250.000,-	
121.1	Akum. peny. peral. bengkel		6.250.000,-
122	Peralatan kantor	1.250.000,-	
122.1	Akum. peny. peral. kantor		650.000,-
201	Utang		4.850.000,-
301	Modal PARDI		18.300.000,-
302	Prive PARDI	3.750.000,-	
401	Pendapatan bengkel		19.750.000,-
501	Biaya gaji	4.000.000,-	
502	Biaya bengkel serba-serbi	2.000.000,-	
503	Biaya penerangan bengkel	810.000,-	
504	Biaya pemeliharaan bengkel	400.000,-	
511	Biaya gaji pegawai kantor	1.450.000,-	
512	Biaya umum serba-serbi	1.350.000,-	
631	Pajak penghasilan	1.210.000,-	
		49.800.000,-	49.800.000,-

Berikut data penyesuaian per 31 Desember 2005

- a. Persediaan perlengkapan bengkel per 31 Desember 2005 sebesar Rp450.000,-
- b. Premi asuransi yang telah dibayar adalah untuk masa 1 Mei 2005 sampai 1 Mei 2006

- c. Nilai perlengkapan kantor yang masih ada per 31 Desember 2005 sebesar Rp75.000,-
- d. Sewa bengkel yang telah dibayar adalah untuk masa 1 Maret 2005 sampai 1 Maret 2006
- e. Penyusutan peralatan bengkel untuk tahun 2005 ditetapkan sebesar 10% dari harga beli
- f. Untuk peralatan kantor ditetapkan penyusutan untuk tahun 2005 sebesar 15% dari harga beli.
- g. Reparasi mobil milik pelanggan sebesar Rp500.000,- belum dicatat dan belum diterima uangnya
- h. Gaji montir dibayar tiap hari Sabtu setelah 6 hari kerja, gajinya per hari Rp12.500,-. Tanggal 31 Desember 2005 tepat pada hari Selasa

Diminta:

- a. buat jurnal penyesuaian sesuai data di atas.
- b. Susunlah kertas kerja 10 kolom, terdiri dari Neraca Saldo, Penyesuaian, Neraca Saldo Disesuaikan, Rugi-Laba, dan Neraca.
- c. Buatlah laporan keuangan yang terdiri dari:
 - laporan Rugi/Laba
 - laporan Perubahan Modal
 - Laporan Neraca (bentuk skontro)
 - Laporan Arus Kas

Evaluasi Akhir Tahun

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!

1. Diana keluar dari pekerjaannya dan memilih menganggur sementara sambil mencari pekerjaan yang lebih baik. Diana tergolong pengangguran . . .
 - A. struktural
 - B. friksional
 - C. konjungtural
 - D. musiman
 - E. siklikal
2. Penduduk yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun dan sanggup bekerja bila ada permintaan kerja disebut . . .
 - A. Angkatan kerja
 - B. pekerja
 - C. tenaga kerja
 - D. pekerja penuh
 - E. pekerja produktif
3. Akuntan swasta yang secara independen memberikan jasa pada masyarakat yang membutuhkan, dengan imbalan atas jasa yang telah diberikan disebut akuntan . . .
 - A. pemerintah
 - B. intern
 - C. publik
 - D. pendidik
 - E. perusahaan
4. Keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kenaikan PDB (Produk Domestik Bruto) tanpa memandang apakah persentase kenaikan PDB tersebut lebih besar atau lebih kecil dari persentase kenaikan jumlah penduduk biasa disebut dengan istilah . . .
 - A. kenaikan ekonomi
 - B. pembangunan ekonomi
 - C. pengembangan ekonomi
 - D. kemajuan ekonomi
 - E. pertumbuhan ekonomi
5. Buku yang dikarang Lucas Paciolo yang membahas tentang catatan berpasangan terdapat dalam bab yang berjudul . . .
 - A. Double Entry System
 - B. Proportioni et proportionalita
 - C. Tractatus de computis et Scriptorio
 - D. Summa De Arithmatica, Geometrica et Proportionalita
 - E. Anglo Saxon

6. Pemakai informasi akuntansi terdiri atas pihak intern dan ekstern, yang tidak termasuk pihak ekstern adalah
- pemilik modal
 - manajer perusahaan
 - pemilik perusahaan
 - karyawan perusahaan
 - rekanan perusahaan
7. Yang bukan dampak positif dari pembangunan ekonomi adalah
- mempermudah hidup manusia
 - meningkatkan taraf hidup
 - meningkatkan kecemburuan sosial
 - meningkatkan persediaan barang
 - meningkatkan kesempatan kerja
8. Tabel berikut merupakan akun-akun Riil dan Nominal

A	B	C
1. Modal	1. Prive	1. Beban sewa
2. Beban ymhb dibayar	2. Pendapatan jasa	2. Modal
3. Gedung	3. Beban gaji	3. Wesel bayar
4. Utang usaha	4. Perlengkapan	4. Peralatan

Dari tabel di atas yang termasuk golongan harta adalah . . .

- A1, B1, dan C2
 - A1, B3, dan C1
 - A2, B3, dan C2
 - A3, B2, dan C3
 - A3, B4, dan C4
9. Di bawah ini adalah nama-nama akun :
- Kas
 - Piutang
 - Utang Usaha
 - Modal
 - Beban sewa
 - Pendapatan Jasa
- Akun yang jika bertambah dicatat di debet adalah
- 1, 2, dan 3
 - 4, 5 dan 6
 - 3, 4 dan 5
 - 1, 2, dan 5
 - 2, 3, dan 4
10. Akun-akun riil nominal sebagai berikut:
- Wesel bayar
 - Beban sewa
 - Pendapatan diterima di muka
 - Sewa dibayar muka
 - Gaji yang masih harus dibayar
 - Pendapatan jasa

Yang merupakan kelompok akun utang adalah

- A. 1,2 dan 4
- B. 1,3 dan 5
- C. 2,3 dan 5
- D. 3,5 dan 6
- E. 4,5 dan 6

11. Jika pengaruh transaksi atau peristiwa lain diakui pada saat kejadian berarti perusahaan menggunakan asumsi dasar yaitu
- A. konsep kelangsungan usaha
 - B. matching concept
 - C. harga perolehan
 - D. konsep kesatuan usaha
 - E. asas dasar akrual
12. Berikut ini yang tidak tergolong sebagai pengeluaran rutin pemerintah adalah
- A. pembiayaan proyek
 - B. pembayaran bunga utang
 - C. subsidi BBM
 - D. belanja pegawai
 - E. belanja barang
13. Berikut ini yang tidak tergolong sebagai penerimaan dalam negeri di APBN adalah
- A. bea masuk
 - B. cukai
 - C. pajak ekspor
 - D. bagian laba BUMN
 - E. retribusi
14. Cara pengodean dengan menggunakan kombinasi huruf dan angka dasarnya sama dengan kode
- A. mnemonik
 - B. desimal
 - C. kelompok
 - D. blok
 - E. nomor berurutan
15. Kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran lebih kecil dibanding penerimaan disebut kebijakan
- A. anggaran de sit
 - B. anggaran seimbang
 - C. anggaran dinamis
 - D. anggaran surplus
 - E. skal de sit
16. Pihak yang meminjam modal dalam pasar modal disebut
- A. emiten
 - B. investor
 - C. debitor
 - D. kreditor
 - E. wali amanat

17. Pada suatu perusahaan terjadi penambahan harta Rp5.000.000,- dan modal bertambah Rp1.500.000,-, maka utang
- bertambah Rp1.500.000,-
 - bertambah Rp5.000.000,-
 - bertambah Rp3.500.000,-
 - bertambah Rp6.500.000,-
 - berkurang Rp3.500.000,-
18. Bila diketahui jumlah pendapatan Rp7.500.000,-, laba bersih Rp1.250.000,-, maka besarnya beban adalah
- Rp7.500.000,-
 - Rp1.250.000,-
 - Rp8.750.000,-
 - Rp6.250.000,-
 - Rp8.250.000,-
19. Diketahui data suatu perusahaan sebagai berikut:
- | | |
|-------------|----------------|
| Modal awal | Rp10.000.000,- |
| Laba bersih | Rp3.000.000,- |
| Modal akhir | Rp14.000.000,- |
- Besarnya prive adalah
- Rp500.000,-
 - Rp1.000.000,-
 - Rp1.500.000,-
 - Rp2.000.000,-
 - Rp2.500.000,-
20. Tahap pencatatan dalam kegiatan akuntansi adalah
- neraca saldo, neraca lajur, laporan keuangan
 - buku besar, neraca saldo, jurnal penutup
 - bukti transaksi, jurnal, buku besar
 - jurnal, buku besar, neraca saldo
 - neraca saldo, ayat penyesuaian, laporan keuangan
21. Pada akhir periode diperoleh data dari Bapak Kirman sebagai berikut:
- | | |
|---------------------|----------------|
| Modal awal | Rp20.000.000,- |
| Pendapatan angkutan | Rp15.000.000,- |
| Beban usaha | Rp7.000.000,- |
| Pengambilan pribadi | Rp3.000.000,- |
- Jadi laba bersih perusahaan pada akhir periode tersebut
- Rp9.000.000,-
 - Rp8.000.000,-
 - Rp7.000.000,-
 - Rp6.000.000,-
 - Rp5.000.000,-

D. Beban pemakaian perleng. kantor	Rp150.000,-
Pendapatan perleng. kantor	Rp150.000,-
E. Beban perlengkapan kantor	Rp850.000,-
Perlengkapan kantor	Rp850.000,-

26. Perusahaan membeli sebidang tanah yang akan dibangun gedung dengan harga Rp50.000.000,00 dibayar tunai Rp35.000.000,- sisanya akan dibayar bulan depan. Pencatatan pada jurnal yaitu . . .

A. Gedung	Rp50.000.000,-
Kas	Rp35.000.000,-
Utang usaha	Rp15.000.000,-
B. Tanah dan gedung	Rp50.000.000,-
Kas	Rp35.000.000,-
Utang usaha	Rp15.000.000,-
C. Tanah	Rp35.000.000,-
Kas	Rp35.000.000,-
D. Gedung	Rp15.000.000,-
Utang usaha	Rp15.000.000,-
E. Tanah	Rp50.000.000,-
Kas	Rp35.000.000,-
Utang usaha	Rp15.000.000,-

27. Diketahui akun-akun nominal sebagai berikut:

Pendapatan jasa bengkel setahun	Rp35.000.000,-
Pengambilan prive setahun	Rp1.500.000,-
Beban usaha setahun	Rp20.000.000,-

Untuk menutup akun penutupan jasa bengkel pada akhir periode di jurnal . . .

A. Pendapatan jasa bengkel	Rp35.000.000,-
Ikhtisar laba rugi	Rp35.000.000,-
B. Ikhtisar laba rugi	Rp35.000.000,-
Pendapatan jasa bengkel	Rp35.000.000,-
C. Prive	Rp1.500.000,-
Ekuitas	Rp1.500.000,-
D. Pendapatan jasa bengkel	Rp18.500.000,-
Ikhtisar laba rugi	Rp18.500.000,-
E. Ikhtisar laba rugi	Rp20.000.000,-
Ekuitas	Rp20.000.000,-

28. Sebuah perusahaan jasa memiliki modal akhir Rp30.000.000,-, mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,-, melakukan pengambilan prive sebesar Rp1.000.000,-. maka modal awalnya adalah
- Rp19.000.000,-
 - Rp20.000.000,-
 - Rp22.000.000,-
 - Rp40.000.000,-
 - Rp41.000.000,-
29. Pada akhir periode diperoleh data dari Bapak Alex sebagai berikut:
- | | |
|---------------------|----------------|
| Modal awal | Rp35.000.000,- |
| Pendapatan angkutan | Rp22.000.000,- |
| Beban usaha | Rp10.000.000,- |
| Prive | Rp5.000.000,- |
- Jadi laba bersih perusahaan pada akhir periode adalah
- Rp10.000.000,-
 - Rp11.000.000,-
 - Rp12.000.000,-
 - Rp13.000.000,-
 - Rp14.000.000,-
30. Yang bukan merupakan alasan dipergunakan kebijakan perdagangan bebas adalah .
- mendorong penghematan biaya
 - mendorong perputaran modal ke berbagai negara
 - mendorong persaingan antarpengusaha
 - melindungi industri dalam negeri
 - meningkatkan perolehan laba
31. Pada buku besar terdapat akun mesin (D) Rp5.000.000.000,-, kas (K) Rp3.000.000,-, utang usaha (K) Rp1.000.000,-. berarti transaksi yang terjadi adalah
- pembelian mesin yang baru dibayar sebagian dan sisanya bulan depan
 - pembelian mesin secara tunai
 - pembelian mesin secara kredit
 - penyusutan perkiraan mesin
 - pembayaran utang atas pembelian mesin
32. Berikut data pada neraca perusahaan Salon Gita:
- | | |
|--------------|---------------|
| Harta lancar | Rp1.000.000,- |
| Harta tetap | Rp9.000.000,- |
| Utang lancar | Rp1.250.000,- |
| Modal usaha | Rp5.000.000,- |

40. Harga beli sebuah mobil Rp45.000.000,-. Pada 31 Desember 2005 nilainya disusutkan 5% dari harga belinya, maka jurnal penyesuaiannya
- | | |
|----------------------|---------------|
| A. Akum. Peny. Mobil | Rp2.250.000,- |
| Mobil | Rp2.250.000,- |
| B. Beban peny. Mobil | Rp2.250.000,- |
| Kas | Rp2.250.000,- |
| C. Beban peny. Mobil | Rp2.250.000,- |
| Akum. Peny. Mobil | Rp2.250.000,- |
| D. Beban peny. Mobil | Rp2.250.000,- |
| Peny. Mobil | Rp2.250.000,- |
| E. Peny. Mobil | Rp2.250.000,- |
| Mobil | Rp2.250.000,- |

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

- Jelaskan sejarah singkat perkembangan akuntansi!
- Sebutkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi!
- Jelaskan apa yang dimaksud asas accrual basic!
- Jelaskan manfaat pemberian kode akun!
- Sebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam neraca dan laporan rugi/laba!
- Sebutkan macam-macam bukti pencatatan dari suatu perusahaan!
- Berikut ini adalah data-data yang ada pada Bengkel PUSAKA;
 - Pada tanggal 1 April 2005 Tuan Amin membuka bengkel dengan menginvestasikan uangnya sebesar Rp20.000.000,-
 - Dibayar sewa bangunan sebesar Rp2.000.000,-
 - Dibeli peralatan bengkel tunai sebesar Rp1.500.000,-
 - Perusahaan menerima uang hasil biaya servis dari pelanggan sebesar Rp500.000,-
 - Perusahaan membeli perlengkapan secara kredit sebesar Rp750.000,-
 - Perusahaan menyelesaikan servis motor pelanggan yang diperhitungkan sebesar Rp150.000,-
 - Dibayar sebagian utang sebesar Rp250.000,-

Dari transaksi di atas, catatlah dalam persamaan akuntansi yang benar!
- Buat laporan keuangan menurut data transaksi persamaan akuntansi pada soal no 7 di atas!
- Tanggal 1 Maret 2003 Tuan Barja mendirikan perusahaan angkutan BARJA. Ia menginvestasikan uang tunai Rp15.000.000,-, kendaraan Rp20.000.000,-, gedung Rp25.000.000,-, utang Rp15.000.000,-, modal Rp50.000.000,-. transaksi yang terjadi selama bulan Februari sebagai berikut:

- 2 Maret : Dibeli perlengkapan bengkel secara tunai Rp500.000,-
- 5 Maret : Diterima jasa angkutan sebesar Rp2.000.000,- secara tunai dan yang akan dibayar kemudian sebesar Rp1.000.000,-
- 12 Maret : Dibeli peralatan kantor secara kredit Rp750.000,-
- 15 Maret : Diterima piutang dari karyawan sebesar Rp500.000,-
- 17 Maret : Dibayar sebagian utang sebesar Rp2.000.000,-
- 22 Maret : Dibayar gaji karyawan sebesar Rp1.500.000,-
- 25 Maret : Dibeli sebuah kendaraan sebesar Rp17.500.000,-. dibayar tunai sebesar Rp3.500.000,, sisanya dibayar kemudian.
- 30 Maret : Tuan barja mengambil uang tunai untuk kepentingan pribadi sebesar Rp1.750.000,

Diminta:

1. Jurnal Umum
 2. Posting buku besar
 3. Neraca sisa per 31 Maret 2003
10. Pada akhir periode akuntansi 31 Desember 2005, usaha laundry Liberty menyusun Neraca Saldo seperti di bawah ini:

NAMA AKUN	NERACA SALDO	
	DEBET	KREDIT
Kas	1.218.000	-
Persediaan Perleng.cucian	1.975.000	-
Asuransi dibayar dimuka	599.000	-
Peralatan cucian	22.700.000	-
Akum.peny.peralatan cucian	-	5.600.000
Utang	-	365.000
Modal Dita	-	13.112.000
Prive Dita	6.220.000	-
Pendapatan cucian	-	24.915.000
Upah	7.835.000	-
Sewa	1.800.000	-
Beban lain-lain	1.115.000	4,850,000.00
Beban serba-serbi	510.000	18,300,000.00

Berikut data penyesuaian per 31 Desember 2005

- a. Persediaan perlengkapan cucian per 31 Desember Rp975.000,-
- b. Premi asuransi yang telah lewat waktunya dalam tahun ini Rp280.000,-
- c. Penyusutan peralatan cucian tahun ini Rp2.750.000,-
- d. Upah yang masih harus dibayar per 31 Desember Rp125.000,-

- e. Sewa yang dibayar di muka 31 Desember Rp320.000,-
- f. Beban lain-lain masih belum dibayar 31 Desember Rp225.000,-

Diminta:

- a. Buat jurnal penyesuaian sesuai data di atas
- b. Susunlah Kertas Kerja 10 kolom, terdiri dari Neraca Saldo, Penyesuaian, Neraca saldo disesuaikan, Rugi-laba, dan Neraca.
- c. Buatlah laporan keuangan yang terdiri dari:
 - Laporan Rugi/Laba
 - Laporan Perubahan Modal
 - Laporan Neraca (bentuk skontro)
 - Laporan Arus Kas

GLOSARIUM

A

- Angkatan kerja, 4 : kelompok tenaga kerja (usia 15 s.d. 64 th) yang ingin bekerja. Akuntansi
- Accounting period, 229 : periode akuntansi
- Accrual basic, 227 : dasar akrual
- APBD, 75 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- APBN, 59 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Auditing, 211 : akuntansi Pemeriksaan

B

- Balance sheet statement, 230 : laporan neraca
- Balance sheet, 230 : neraca
- Budgetary Accounting, 211 : akuntansi anggaran
- Business Entity Concept, 228 : konsep kesatuan usaha

C

- Capital Gain, 130 : keuntungan yang berupa selisih dari harga jual dikurangi harga beli.
- Capital Account, 232 : akun modal
- Capital saham, 314 : modal saham
- Capital statement, 313 : laporan perubahan modal
- Cash flow, 313 : aliran kas keluar
- Cost Accounting, 211 : akuntansi biaya
- Cost of Good Concept, 228 : konsep harga perolehan
- Cost Principle Concept, 228 : konsep biaya
- Count code, 235 : kode akuntansi
- Current Asset : aktiva lancar
- Current liabilities, 232 : utang lancar
- CV/ Commnditire Vennooteschav, 248 : perseroan terbatas

D

- Danareksa, 131 : pihak yang kegiatannya melakukan investasi, investasi kembali, atau perdagangan efek.
Deferred revenue, 290 : pendapatan diterima di muka
Depreciation expense, 8 : biaya penyusutan

E

- Expense, 235 : beban
External users, 209 : pihak ekstern

F

- Financial accounting, 210 : akuntansi keuangan
Financial statement, 229 : laporan keuangan
Fixed Asset, 232 : aktiva lancar
Franchise, 234 : hak istimewa perusahaan dari pihak lain untuk mengomersilkan produk, teknik atau formula tertentu

G

- Gain, 130 : keuntungan
General ledger, 279 : buku besar
Going Concern Concept, 227 : konsep kelangsungan usaha
Goodwill, 233 : nilai lebih perusahaan karena keistimewaan tertentu

Government

- Accountant, 213 : akuntan pemerintahan
Government Accounting, 212 : akuntansi pemerintahan

I

- Idle money, 121 : uang menganggur
Income statement, 313 : laporan laba rugi
Income tax, 89, 93 : pajak penghasilan
Indeks Dow Jones, 135 : indeks yang berupa kumpulan harga rata-rata dari beberapa perusahaan yang dianggap mewakili di Amerika.
Intangible fixed assets, 257 : aktiva tetap tidak berwujud
Internal users, 208 : pihak intern
Investor, 126 : pihak yang memiliki modal untuk dipinjamkan atau diinvestasikan.

K

- Kesempatan kerja, 3 : suatu keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh pencari kerja.
- Kurs, 170 : nilai tukar uang asing yang dinyatakan dalam mata uang negeri sendiri.
- Kurs beli, 170 : kurs yang dikenakan saat pedagang valas membeli valas.
- Kurs jual, 170 : kurs yang dikenakan saat pedagang valas menjual valas.
- Kurs transaksi, 172 : kurs yang dipakai sebagai patokan dalam melakukan transaksi yang melibatkan mata uang asing.
- Kurs UKA, 171 : (Kurs Uang Kertas Asing) kurs yang dipakai sebagai patokan dalam jual beli uang kertas asing, seperti uang kertas dolar Amerika Serikat.

L

- Latihan kerja, 11 : kegiatan melatih tenaga kerja agar memiliki keahlian dan keterampilan di bidang tertentu.
- Ledger : buku besar
- Liabilities : kewajiban
- Lingkaran setan kemiskinan (Vicious circle) : lingkaran yang tidak ada putusya dan saling berkaitan antara satu dengan lainnya.
- Liquidity analysis, 271 : analisis likuiditas
- Long term debt : utang jangka panjang
- Long term investment : investasi jangka panjang
- Long term liabilities : utang jangka panjang
- Lot : satuan pembelian saham; 1 lot = 500 satuan.
- Low manager : manajer tingkat bawah

M

- Magang, 11 : latihan kerja yang dilakukan langsung di tempat kerja.
- Management Accountant, 211 : akuntan manajemen
- Management Accounting, 211 : akuntansi manajemen
- Mark Up, 74 : mjelaporkan pembelanjaan lebih besar dari nilai sebenarnya.
- Marketable, 122 : surat berharga
- Middle manager, 208 : manajer tingkat menengah

N

Numerical code, 236 : kode angka

O

Office supplies : perlengkapan kantor

Output : keluaran

P

PAD, 82 : Pendapatan Asli Daerah.

Pajak, 88 : iuran yang wajib dibayar oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat balas jasa (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif negara.

Pajak langsung, 93 : pajak yang dikenakan secara berkala pada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak (kohir) yang dibuat oleh kantor pajak.

Pajak tidak langsung, 93 : pajak yang dikenakan pada wajib pajak hanya jika wajib pajak melakukan perbuatan atau peristiwa tertentu.

PAN : Perhitungan Anggaran Negara.

Pasar modal, 126 : pasar yang memperjualbelikan uang dalam bentuk surat-surat berharga yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.

Pasar uang, 121 : pasar yang memperjualbelikan uang dalam bentuk surat-surat berharga yang berjangka waktu kurang dari satu tahun.

Pasar valuta asing, 121 : pasar yang memperjualbelikan valuta asing.

Pekerja, 5 : kelompok angkatan kerja yang sudah mendapat pekerjaan.

Pembangunan ekonomi, 25 : proses yang bertujuan menaikkan pendapatan perkapita untuk jangka waktu panjang dan disertai adanya pemulihan struktur ekonomi dan perkembangan IPTEK.

Pemodal (investor), 126 : pihak yang memiliki modal untuk dipinjamkan atau diinvestasikan.

Pengangguran, 5, 8 : kelompok angkatan kerja yang belum mendapat pekerjaan.

Pengangguran friksional, 6, 9 : pengangguran yang disebabkan oleh pergeseran (friksi) pekerja yang ingin berpindah ke perusahaan lain dengan pekerjaan yang lebih bagus.

Pengangguran konjungtural, 6, 9	:	pengangguran yang disebabkan oleh pergerakan naik turunnya kegiatan perekonomian suatu negara.
Pengangguran musiman, 7, 10	:	pengangguran yang disebabkan oleh perubahan musim atau perubahan permintaan tenaga kerja secara berkala.
Pengangguran struktural, 6, 9	:	pengangguran yang disebabkan oleh terjadinya perubahan struktur perekonomian.
Perdagangan internasional, 155	:	kegiatan menjual dan membeli produk yang terjadi antar negara yang dilakukan individu dengan individu, individu dengan pemerintah atau pemerintah dengan pemerintah.
Pertumbuhan ekonomi, 25	:	suatu keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kenaikan PDB (Produk Domestik Bruto) tanpa memandang apakah presentase kenaikan PDB tersebut lebih besar atau lebih kecil dibanding presentase kenaikan jumlah penduduk.
Perusahaan efek, 130	:	perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dan BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) untuk menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan efek (surat berharga).
Post closing triad balance, 305	:	neraca sisa setelah penutupan
Posting, 280	:	membukukan ayat jurnal ke dalam buku besar
Prepaid expenses	:	biaya dibayar di muka
PROPENAS, 44	:	Program Pembangunan Nasional.
Pungli, 74	:	Pungutan liar.
R		
RAPBD, 77	:	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
RAPBN, 62	:	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Recording phase, 271	:	tahap pencatatan
Recoverable Amount	:	nilai harga jual
Reference	:	referensi
Reliable	:	andal
Rent earned, 234	:	pendapatan sewa

Rent expense, 235	:	beban sewa
Report form, 280	:	bentuk laporan
Retribusi, 88	:	pungutan yang dilakukan dengan pemberian jasa atau fasilitas langsung dari negara kepada pihak yang dipungut.
Revenue, 231	:	pendapatan
Reversing journal entry, 306	:	jurnal pembalik

S

Setengah menganggur, 5, 6	:	pekerja yang bekerja tapi tidak memenuhi kriteria pekerja penuh.
Salaries expense	:	beban gaji
Shorts term debt	:	kewajiban jangka pendek
Source document	:	dokumen sumber
Statement of cash flows, 230	:	laporan arus kas
Statement of owner's equity, 230	:	laporan perubahan wujud
Statement phase, 275	:	tahap pelaporan

T

Tenaga kerja, 4	:	penduduk yang dianggap sanggup bekerja tapi tidak ada permintaan kerja, yang berusia 15 s.d. 64 tahun.
Tangible fixed assets, 233	:	aktiva tetap berwujud
Tax Accounting, 211	:	akuntansi perpajakan
Top manager, 180	:	manajer tingkat atas

U

UMK, 14	:	Upah Minimum Kota/Kabupaten.
UMP, 14	:	Upah Minimum Provinsi.
UMR, 14	:	Upah Minimum Regional.

W

Wall street, 134	:	nama populer untuk pusat pasar uang, pasar modal dan lembaga keuangan di Amerika Serikat.
------------------	---	---

DAFTAR PUSTAKA

- Assauri Sofyan. 1997. *Matematika Ekonomi*. Jakarta. Penerbit Rajawali Pers.
- Baridwan, Zaki. 1984. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: BPF
- Baumol, Willian J and Alan S. Binder. 2003. *Economic, Principles and Policy*. Edisi g. Thomson Learning United State of America.
- BPS (Biro Pusat Statistik). 2002. *Laporan Perekonomian Indonesia 2001*. Jakarta: BPS.
- Budiono, Dr. 2002. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPF
- Christopher Pass & Biyan Lower. 1993. *Dictionary of Economics 2nd Edition*.
- Denburg F, Thomas. 1994. *Makro Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Departemen Luar Negeri. 1999. *Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat*. Jakarta: Deplu.
- Depdikbud. 1980. *Ilmu Menjual dan Reklame*. Jakarta: Bagian Proyek Pengadaan Buku Sekolah Ekonomi.
- Garis-Garis Besar Haluan Negara*. 1999.
- Gasperz, Vincent. 2001. *Ekonomi Managerial, Pembuatan Keputusan Bisnis*. Edisi kedua. Jakarta: Gramedia.
- Gilarso, T. 1994. *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Mikro. Jilid 2*. Yogyakarta: Kanisius.
- Harian Kompas: Jakarta
- Harian Pikiran Rakyat: Bandung
- Harian Republika: Jakarta
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2002. *Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- ISMAYA, SUJANA, SE. 2005, *Kamus Akuntansi*, Bandung: Pustaka Garfika.
- Lipsey et al 1995. *Pengantar Mikro Ekonomi Jilid 2*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Lipsey et al 1995. *Pengantar Mikro Ekonomi Jilid 1*. Jakarta: Biro Rupa Aksara.
- Lockett G, Dudley. 1994. *Uang dan Perbankan*. Jakarta: Erlangga.
- Majalah Mingguan Tempo: Jakarta
- Majalah. Jakarta: Pilar.
- Mankiw, N Gregory. 2002. *Pengantar Ekonomi Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N Gregory. 2002. *Pengantar Ekonomi Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Mc Eachern, William A. 2001. *Ekonomi Mikro, Pendekatan Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mc. Eachern, Willian A. 2000. *Ekonomi Makro, Pendekatan Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.

- Muhammad, M.Ag, Drs. 2004.*Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE.
- Nopirin, Ph.D. 1990. *Ekonomi Internasional Buku 2*. Yogyakarta: Liberty.
- Nopirin, Ph.D. 1990. *Ekonomi Moneter Buku 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Proyek Pengembangan Pendidikan Akuntansi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kumpulan Soal/Latihan Akuntansi Keuangan. Tingkat Dasar Satu*. Jakarta: Depdikbud.
- Rosyidi, Suherman. 1999. *Pengantar Teori Ekonomi*. Edisi Buku. Jakarta: PT Raja Grafindo Pusada.
- Saladin, Djaslim & Yovis M. Oesman. 2002. *Intisari Pemasaran dan Unsur-unsur Pemasaran*. Bandung: Linda Karya.
- Samuelson, Paul A dan William D. Nordhous. 1992. *Ekonomi Edisi ke-12 Jilid I*. Jakarta: Erlangga.
- Samuelson, Paul A. 2001. *Makro Ekonomi Edisi ke-14*. Jakarta: Erlangga.
- Soemarso, S. R. 1992. *Akuntansi Suatu Pengantar. Edisi keempat*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Soetrisno, Edisi 2000. *45 Peraih Nobel Ekonomi*. Jakarta: Inovasi.
- Sukirno, Sadono. 1994.*Mikro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2004.*Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sudono. 1998. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Lembaga Penerbit FEUI.
- Sutisna. 2001. *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran*. Bandung: PT Remaja Rosda karya.

INDEKS

A

Accounting Period 229
Accrual Basic 227
Adam Smith 39, 158
Aktiva 231, 232
 lancar 232
 tetap 233
 tetap berwujud 233
 tetap tidak berwujud 233
Aktivitas
 investasi 257, 317
 operasi 257, 317
 pendanaan 257, 317
Akun 232
 laba rugi 232
 riil 232
Akuntan
 pemerintah 213
 pendidik 213
 perusahaan 212
 publik 213
Akuntansi 205
 anggaran 211
 biaya 211
 keuangan 210
 manajemen 211
 pemerintahan 212
 pendidikan 212
 perpajakan 211
Analisis bukti pencatatan 271
Angka pengangguran 4
Angkatan kerja 4
Anglo saxon 205
APBD 75
APBN 59
Asumsi Dasar 227
Auditing 211

B

BAPEPAM 148
Beban 235
 di luar usaha 235
 usaha 235
 yang dibayar di muka 288
 yang masih harus dibayar
292
Belanja
 Aparatur Daerah 78
 Daerah 66
 Pelayanan Publik 79
 Pemerintah Pusat 66
Bentuk
 Buku Besar 279
 dua kolom 280
 empat kolom 280
 Jurnal 277
 skontro 256
 stafel 256
 T 279
 tiga kolom 280
Biaya sosial 8
Bill of Exchange 184
Bukan
 angkatan kerja 5
 tenaga kerja 4
Bukti memo 273
Buku besar 279
Business Entity Concept 228

C
Cable order 183
Capital gain 130
Capital statement 313
Cara Pembayaran Internasional 183
Cash 183

Cash flow 313
Cek 275
Clearing internasional 183
Co Partnership 13
Commercial bill of exchange 184
Cost of Good Concept 228
Cost Principle Concept 228

D

Daftar
 Anggaran Satuan Kerja 77
 Isian Kegiatan 63
 Isian Proyek 63
 Usulan Kegiatan 62
 Usulan Proyek 62
Dampak pengangguran 7
Dana
 Alokasi Khusus 78
 Alokasi Umum 78
 Bagi Hasil 78
 darurat 78
 perimbangan 78
Danareksa 131
Dasar hukum pelaksanaan
akuntansi 225
David Ricardo 40, 159, 189
Demand for labour 3
Devisa 155, 168, 183
Diskriminasi harga 165
Draft 184
Dumping 166

E
Economic
 development 25
 growth 25
Ekonomi biaya tinggi 82
Eksklusatif 67
Ekuitas 234
Emiten 126
Etika 213
 profesi akuntan 213

F

Faktur 271
Fixed Assets 233
Floor trader 138
Format APBD 79
Franchise 234
Frederich List 35
Free trade 161
Fungsi
 alokasi 61, 76
 analisis 277
 distribusi 62, 76
 historis 277
 informatif 277
 instruktif 277
 jurnal 277
 jurnal penutup 298
 otorisasi 76
 pengawasan 76
 perencanaan 76
 stabilisasi 62

G

George Soros 125
Going Concern Concept 227
Goodwill 233

H

Hak
 cipta 233
 merek 233
 paten 233
Harrod Domar 40
Hibah 78
High cost economy 82
High mass consumption 39

I

Idle money 121
Income statement 313
Indeks Dow Jones 135
Investasi Sementara 233
Investor 126

- J**
 Joseph Schumpeter 40
 Jurnal 277
 penyesuaian 286
 khusus 277
 pembalik 306
 penutup 298
 umum 277
- K**
 Karl Bucher 37
 Kebijakan
 anggaran 85
 anggaran pembiayaan
 fungsional 85
 anggaran seimbang 85
 fiskal 84
 pengelolaan anggaran 85
 perdagangan bebas 162
 perdagangan internasional
 161
 perdagangan proteksionis
 161, 163
 stabilisasi anggaran
 otomatis 85
 Kelangsungan Usaha 227
 Kertas kerja 293
 Kesempatan kerja 3
 Ketenagakerjaan 4
 Kewajiban 234
 jangka panjang 234
 jangka pendek 234
- Kode**
 akun 235
 angka blok 236
 angka desimal 237
 kombinasi huruf dan angka
 238
 mnemonik 237
 numeral 235
- Konsep**
 biaya 228
 Harga Perolehan 228
 Kesatuan Usaha 228
 Periode Akuntansi 229
 Prinsip Keandalan 229
 Satuan Moneter 229
- Koperasi** 248
Kuitansi 272
Kuota
 ekspor 165
 impor 164
- Kurs** 170
 Transaksi 172
 UKA 171
- L**
 Lapangan kerja 3, 46
 Laporan
 arus kas 230, 257, 317
 keuangan 229
 laba rugi 230, 313, 254
 perubahan modal 230, 315
- Larangan**
 ekspor 166
 impor 166
- Latihan kerja** 11
Letter of credit 185
Lot 138
Lucas Paciolo 205
- M**
 Magang 11
 Manajer
 tingkat atas 208
 tingkat bawah 209
 tingkat menengah 208
- Mark up** 74
Maturity of Economic 39
Metode
 langsung 257, 317
 tidak langsung 258, 317
- Multiple Step** 254
- N**
 Neraca 230, 255, 316
 Saldo Setelah Penutupan 305
 sisa 282
 debet 273

- Nota
 kontan 272
 kredit 274
- O**
 Open Account 186
- P**
 PAD 82
 Pajak 88
 Bumi dan Bangunan 90
 langsung 93
 Penghasilan (PPh) 89, 93
 penjualan 94
 tidak langsung 93
- Pasar
 modal 126
 uang 121
- Pekerja 5
 penuh 5
- Pembangunan
 ekonomi 25
 nasional 51
- Pembiayaan 68
 Pembukuan 205
 Pemerataan pembangunan 46
 Pemodal 126
 Pencari kerja 3
 Pendapatan 231, 234
 di luar usaha 235
 usaha 235
 yang diterima di muka 290
 yang masih harus diterima 292
- Penduduk 4
- Penerimaan
 bukan pajak 64
 dalam negeri 64
 perpajakan 64
- Pengangguran 5, 8
 friksional 6, 9
 konjungtural 6, 9
 musiman 7, 10
 struktural 6, 9
 terbuka 5
 terselubung 6
- Pengeluaran rutin 90
 Pengukuran nilai uang 229
 Penyelundupan 73
 Perdagangan internasional 155
 Perhitungan Anggaran Negara 63
 Persekutuan
 firma 247
 komanditer 247
- Perseroan terbatas 248
 Pertumbuhan ekonomi 25
 Perusahaan
 dagang 247
 efek 130
 jasa 247, 271
 manufaktur 247
 perseorangan 247
- PHK 3
- Pihak
 ekstern 209
 intern 208
- Posting 280
 Precondition for take off 38
 Premi 165
 Private compensation 186
 Production sharing 13
 Produk Domestik Bruto 25
 PROPEDA 45
 PROPENAS 44
 Pungli 74
- R**
 RAPBD 77
 RAPBN 62
 RASK 77
 RENSTRA 45
 REPELITA 45
 Retribusi 88
 Robert Solow 40
- S**
 Setengah menganggur 5, 6
 Single Step 254

Sistem akuntansi 212
Sistem kurs 175
 bebas 175
 mengambang terkendali

175

 tetap 175

Sistem upah

 bagi hasil 14

 borongan 13

 indeks biaya hidup 13

 menurut prestasi 13

 menurut waktu 13

 mitra usaha 13

 partisipasi 13

 premi 13

 produksi 13

 skala berubah 13

Sliding scale 13

Statement of balance/balance sheet
313

Subsidi 165

Sumbangan 88

Surat-Surat Berharga Pasar Uang
122

T

Tahap

 pencatatan 271

 pengikhtisaran 281

Take off 39

Tarif

 ekspor 165

 impor 165

Tenaga kerja 4

The traditional society 38

T. R. Malthus 40

Trade bills 184

Transaksi

 eksternal 248

 internal 248

 keuangan 248

Transfer 67

 Telegrafis 183

Tunai (Cash) 183

U

UMK 14

UMP 14

UMR 14

W

Wall Street 134

Walt Whiteman Rostow 38

Werner Sombart 37

Wesel 184

V

Vicious circle 46

EKONOMI 2



Ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang banyak, bervariasi, dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan atau produksi. Pelajaran ekonomi berfungsi mengembangkan kemampuan siswa untuk berekonomi, dengan cara mengenal berbagai kenyataan dan peristiwa ekonomi, memahami konsep dan teori serta berlatih dalam memecahkan masalah ekonomi yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Mata pelajaran ekonomi mencakup perilaku ekonomi dan kesejahteraan yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang terjadi di lingkungan kehidupan terdekat hingga lingkungan terjauh, meliputi aspek-aspek perekonomian, ketergantungan, spesialisasi dan pembagian kerja, perkoperasian, kewirausahaan, serta akuntansi dan manajemen.

Beberapa kelebihan buku ini, antara lain:

- memuat peristiwa dan masalah ekonomi yang aktual dalam kehidupan sehari-hari;
- menekankan pentingnya mendorong siswa berani berpikir kritis, orisinal, dan ilmiah;
- memunculkan beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan konsep ekonomi;
- membahas nilai-nilai dan etika ekonomi serta jiwa usaha;
- menyajikan konsep berdasarkan contextual learning;
- menyajikan soal-soal sesuai dengan tuntutan kompetensi yang diharapkan;
- menggunakan bahasa yang mudah dipahami;
- memberikan analisa matematis untuk membahas konsep yang susah dipahami.

ISBN 978-979-068-700-4 (nomor jilid lengkap)

ISBN 978-979-068-707-3

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp18.078,-

